

Nunus Supardi

KONGRES KEBUDAYAAN

SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA

JAKARTA, 2003



KONGRES **K**EBUDAYAAN

**SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA
MERDEKA**

Nunus Supardi

**Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
2003**

**KONGRES KEBUDAYAAN
SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA**

Penyusun:

Nunus Supardi

ISBN: 979-95284-6-1

Diterbitkan oleh

PROYEK PENGEMBANGAN MEDIA KEBUDAYAAN

Tahun 2003

*Teristimewa untuk Eks Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tempatku mengabdikan selama 38 tahun*

*Untuk yang sangat saya hormati
almarhum dan almarhumah kedua orang tuaku
Bapak S. Karsodimedjo dan Ibu Koni
Untuk yang kucintai
Siti Kurtati Hamidah, isteriku
Untuk yang kusayangi
Anak-anak, menantu, dan cucu-cucuku*

KATA PENGANTAR

Kalau kita berbicara tentang Kongres Kebudayaan, selama ini perhatian hanya tertuju pada Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka saja. Belum pernah terdengar pembicaraan bahwa sebelum Indonesia merdeka juga pernah diselenggarakan kongres yang juga membahas masalah kebudayaan. Tidak seperti halnya dengan bidang bahasa, yang telah menetapkan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 (sebelum Indonesia merdeka) sebagai Kongres Bahasa Indonesia yang pertama.

Data yang ada di Museum Sonobudoyo Yogyakarta menunjukkan bahwa pada tahun 1918 telah diselenggarakan Kongres Kebudayaan, meski masih terbatas pada kebudayaan Jawa. Nama kongres itu adalah **Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling (Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa)**. Temuan ini amat menarik untuk disimak, karena ternyata selama masa tahun 1918 hingga Indonesia merdeka, telah diselenggarakan 7 kali kongres. Enam dari tujuh kongres itu diselenggarakan oleh 'JAVA-INSTITUUT' sebuah lembaga penelitian kebudayaan yang lahir berdasarkan keputusan Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun 1918 itu.

Untuk menggali lebih jauh informasi yang amat penting itu, saya sempatkan untuk melacak ke bagian perpustakaan museum. Di sana saya dapatkan laporan penyelenggaraan kongres yang dimuat dalam majalah yang ber-nama 'DJAWA' dalam bahasa Belanda. Majalah ini terbit antara tahun 1921 hingga 1941. Di samping itu ada juga data yang dimuat dalam majalah 'SRI POESTAKA' terbitan Balai Pustaka.

Buku berjudul '**KONGRES KEBUDAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA**' ini berisi pula data tentang penyelenggaraan Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka. Dengan menyatukan uraian berbagai hal yang berkaitan dengan Kongres Kebudayaan diselenggarakan dalam dua masa tersebut, diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang serangkaian pemikiran kaum terpelajar, budayawan, seniman, cendekiawan dan pemangku adat, dalam upaya mengembangkan kebudayaan bangsanya. Terlepas dari masalah bobot kongres ketika itu bila dibandingkan dengan setelah Indonesia merdeka, sebagai peristiwa budaya prestasi itu tetap patut untuk dicatat. Setidaknya, kita menjadi tahu bahwa mereka telah memiliki

kesadaran yang tinggi terhadap nasib budayanya, di samping kesadaran untuk menjadi satu bangsa.

Pada Bab I, sebagai pendahuluan diuraikan latar belakang diselenggarakannya Kongres Kebudayaan pada masa sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka. Selain itu juga disinggung mengenai kaitan dengan tumbuhnya kesadaran kehidupan berbangsa dan kesadaran tentang nasib kebudayaan di kalangan kaum terpelajar.

Bab II berisi uraian sekilas tentang latar belakang kondisi masyarakat pada kedua masa tersebut, terutama kondisi posisi kebudayaan dalam kaitan dengan pemerintahan. Kondisi pemerintahan sebelum Indonesia merdeka berada di bawah kekuasaan penjajah. Posisi pemerintahan kerajaan menjadi lemah, dan banyak kehilangan kewenangannya. Sebagai akibatnya aktivitas para raja di bidang pemerintahan menjadi berkurang, sehingga perhatian terhadap kebudayaan menjadi lebih banyak. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kebudayaan menempati posisi yang penting di samping bidang-bidang yang lain. Secara khusus kebudayaan dimasukkan dalam salah satu Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada Bab III diuraikan tentang penyelenggaraan Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka, terutama mengenai konsep pemikiran dan topik masalah yang diperbincangkan. Meskipun kongres pada masa ini masih terbatas pada perbincangan masalah kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali, tetapi di dalamnya telah muncul pemikiran tentang kebudayaan bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Bab IV, berisi uraian tentang penyelenggaraan Kongres Kebudayaan sesudah Indonesia merdeka. Permasalahan kebudayaan yang diperbincangkan pada masa sesudah Indonesia merdeka semakin luas dan kompleks. Masalah keberadaan kebudayaan daerah, kebudayaan nasional dan kebudayaan asing, serta masalah pendidikan kebudayaan menjadi topik perbincangan utama dalam kongres.

Pada Bab V diuraikan tentang hubungan antara Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Dalam bab ini diuraikan tentang kesamaan konsep pemikiran dan topik-topik masalah yang diperbincangkan. Sedangkan pada Bab VI disajikan berbagai topik-topik yang pernah diperbincangkan, dan beberapa topik penting yang belum diperbincangkan.

Di samping itu juga disajikan beberapa rekomendasi kongres yang berkenaan dengan kelembagaan dan kepanitiaan baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, yang sudah dan yang belum ada tindak lanjutnya.

Bab VII menyajikan berbagai penyelenggaraan kongres yang ada kaitannya dengan kebudayaan, yaitu Kongres Bahasa Daerah, Kongres Bahasa Indonesia dan Kongres Kesenian, sementara sajian tentang

kongres aspek budaya yang lain belum sempat disampaikan pada buku ini. Sebagai penutup (Bab VIII) di-sampaikan beberapa catatan penting sebagai kesimpulan dari uraian sekilas mengenai Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka.

Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati, yang telah mendorong untuk meneruskan penyusunan naskah yang semula hanya dalam bentuk naskah pendek saja. Di samping itu beliau juga bersedia dengan ikhlas membaca dan mengoreksi naskah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Drs. AD. Pirous, Dr. Taufiq Ismail dan rekan-rekan yang lain yang menganggap perlu untuk membukukan 'berita' tentang kongres itu. Juga kepada Sdr. Taufik Rahzen, yang telah membantu banyak dalam melengkapai bahan bacaan.

Khusus kepada Ibu Adiwoso saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, yang dengan tulus menerjemahkan teks dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Tidak lupa kepada rekan-rekan di Yogyakarta, di Museum Sono-budoyo dan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta dan UPT lainnya, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan layanannya.

Sekelumit himpunan tentang Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka ini disusun dengan sangat tergesa-gesa. Oleh karena itu masih banyak kekurangan dan kelemahan-nya, terutama kelengkapan data hasil-hasil yang dicapai oleh Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka. Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya.

Jakarta, akhir Mei 2003

Penyusun,

Nunus Supardi

Mantan Sekretaris 1

Kongres Kebudayaan 1991

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN, **1**

BAB II KEBUDAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA, **10**

BAB III KONGRES KEBUDAYAAN SEBELUM INDONESIA MERDEKA, **26**

1. Kongres Kebudayaan tahun 1918 (I), **23**
2. Kongres Kebudayaan tahun 1919 (II), **34**
3. Kongres Kebudayaan tahun 1921 (III), **39**
4. Kongres Kebudayaan tahun 1924 (IV), **46**
5. Kongres Kebudayaan tahun 1926 (V), **50**
6. Kongres Kebudayaan tahun 1929 (VI), **55**
7. Kongres Kebudayaan tahun 1937 (VII), **63**

BAB IV KONGRES KEBUDAYAAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA, **70**

1. Kongres Kebudayaan tahun 1948 (I), **72**
2. Kongres Kebudayaan tahun 1951 (II), **86**
3. Kongres Kebudayaan tahun 1954 (III), **100**
4. Kongres Kebudayaan tahun 1991 (IV), **108**


BAB V HUBUNGAN ANTARA KONGRES KEBUDAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA, **127**

BAB VI SEKILAS TENTANG TOPIK-TOPIK MATERI KONGRES KEBUDAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA, **139**

BAB VII PENYELENGGARAAN KONGRES BAHASA DAN KESENIAN, **154**

BAB VIII PENUTUP, **179**

LAMPIRAN:



Kongres Kebudayaan (KK) merupakan suatu peristiwa budaya yang amat penting maknanya bagi kehidupan berbudaya sebuah bangsa. Lebih-lebih bagi bagi sebuah bangsa yang lahir dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda budaya, agama, dan bahasa. Forum kongres menjadi ajang yang sangat tepat untuk bersama-sama membahas permasalahan kebudayaan beserta unsur-unsurnya, maupun berbagai hal lain yang terkait dengan proses menjadi satu bangsa.

Kata kongres itu sendiri mengandung makna: *'(rangkai)an pertemuan para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah.'*¹ Masalah yang diskusikan dapat berasal dari macam-macam bidang, termasuk masalah bidang kebudayaan. Mereka memperdebatkan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan: pengertian, konsep, strategi, kelembagaan, kebijakan dan program serta hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah-masalah kebudayaan.

Dalam kongres sebelum Indonesia merdeka, oleh para pendiri bangsa forum itu digunakan juga untuk **mematangkan komitmen** menjadi satu bangsa. Pada perkembangan selanjutnya, KK tidak hanya menjadi forum untuk mematangkan komitmen itu saja, tetapi juga menjadi forum untuk menyusun strategi **mempertahankan komitmen** itu, agar tetap abadi sepanjang masa, sehingga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tetap ada. Topik yang dibahas mencakup peran kebudayaan dalam memperkuat jati diri, menumbuhkan kebanggaan nasional dan dalam ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Perbincangan tentang kebudayaan menjadi kebutuhan mutlak, karena kebudayaan pada hakikatnya selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Di samping itu kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, diposisikan menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Hatta, antara pemerintahan Negara dengan kebudayaan memiliki hubungan timbal-balik yang sangat erat kaitannya. Dalam prasarannya di KK tahun 1948 Moh. Hatta menegaskan bahwa *'pemerintahan*

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hal. 455

*suatu Negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pada sifat pemerintahan Negara.*²

Sementara Mr. Koentjoro Poerbopranoto lebih tegas lagi dalam memosisikan hubungan antara kebudayaan dan kehidupan Negara. Sebagai pemerasaran pada KK tahun 1948, ia berbeda pendapat dengan Ki Mangoensarkoro tentang hubungan antara keduanya. Ki Mangoensarkoro menyatakan *'.....kebudayaan sebagai 'modal perjalanan pembangunan' Negara. Dan Negara sebagai hasil pembangunan itu merupakan wadah dan sumber kebudayaan kita yang akan datang.'* Sementara itu dengan mengutip pendapat Prof. P.J. Bouman dalam bukunya *'Sociologie'* (1947), Mr. Koentjoro menyatakan sebaliknya. Bouman menyatakan bahwa: *'Negara adalah suatu uitingvorm, atau suatu 'emanatie' jadi hanya salah satu pendjelmaan daripada kebudajaan dari suatu bangsa (natie) pada suatu tingkat sedjarah jang tertentu, jaitu bilamana sesuatu bangsa dalam pergaulan hidupnja mewujudkan suatu susunan (organisasi) jang teratur.....'*³

Jadi, kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya lahir lebih dahulu, dan bukan Negara. Posisi kebudayaan merupakan sumber bagi terbentuknya negara. Apa peran kebudayaan dalam menyatukan bangsa yang hidup dalam tatanan bernegara? Menurut pandangan Koentjoro:

*'.....kebudajaan adalah tali pengikat atau semen jang menjatupadukan masjarakat mendjadi suatu Negara, suatu 'bindmiddel' atau lebih tepat 'binding', jang mewujudkan golongan-golongan dalam masjarakat mendjadi suatu organisasi-hukum, suatu 'Rechrts figuur' jang dinamakan staat atau Negara itu. 'Binding' atau 'bindmiddel,' tali pengikat itu berwujud dalam berbagai bentuk, baik bentuk jang bersifat lahir, jang mengenai kehidupan lahir dalam masjarakat dalam pelbagai susunan (susunan pemerintahannya, ekonominya, tekniknja dsb.) maupun mengenai kehidupan batin (seperti keagamaan, kesusilaan, tata hukum dsb.)'*⁴



Berbicara tentang penyelenggaraan KK, selama ini perhatian orang hanya tertuju pada KK yang diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka saja. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka kaum terpelajar juga sudah berfikir tentang kebudayaan dan berinisiatif

² Muhadjir (*penyunting*), *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1987, hal. 5

³ *Majalah Indonesia*, No. I-II Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1950, hal. 34

⁴ *Majalah Indonesia*, No. I-II Tahun I, hal. 35

untuk memperbincangkannya dalam suatu kongres. Oleh kalangan seniman, budayawan maupun ahli kebudayaan, peristiwa itu juga tidak pernah diangkat ke permukaan, sehingga tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan dalam menjawab permasalahan tentang kapan KK pertama diselenggarakan.

Dalam buku yang berjudul '*Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa 1879-1952*,' disinggung sedikit tentang Kongres Kebudayaan Jawa tahun 1918. Sebagai seorang tokoh pergerakan nasional Dr. Radjiman juga terlibat dalam dan bahkan termasuk sebagai pemrakarsa untuk diselenggarakan Kongres Kebudayaan Jawa tahun 1918 dan Kongres Bahasa Jawa tahun 1924. Di samping itu aktif berperan dalam kongres sebagai pemrasaran bersama kaum terpelajar lainnya seperti: Pangeran Mangkoenegoro VII, PA. Hadiwidjojo (Ketua Bale Agung Kraton Surakarta), RMA. Woerjaningrat (Ketua Pengurus Besar BO masa bakti 1916-1921, 1922-1925, 1933-1935), Dr. Hoesein Djajadiningrat dan lain-lain.⁵

Data yang lebih lengkap tentang KK yang pernah diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka ada di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. KK pertama diselenggarakan 27 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 5 – 7 Juli tahun 1918, di kota Surakarta. Sebagai pemrakarsa adalah PAAP. Prangwadono yang selanjutnya dibahas bersama kaum terpelajar lainnya. Akhirnya mereka sepakat untuk segera mengadakan suatu pertemuan membicarakan masalah pengembangan kebudayaan, khususnya budaya Jawa. Pertemuan itu diberi nama '**Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling**', atau kalau diterjemahkan menjadi '**Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa.**'

Ditilik dari sisi bentuk forum yang dipilih, yakni sebuah kongres, mencerminkan adanya konsep bertindak yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, dengan melibatkan semua unsur kekuatan yang ada. Pertemuan itu dihadiri oleh wakil berbagai perkumpulan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah, dalam hal ini kebudayaan. Tujuannya jelas, yaitu mencari kesepakatan tentang konsep, kebijakan dan strategi pemeliharaan, pengembangan dan memajukan kebudayaan dan bangsa.

Pada awalnya sasaran yang diperbincangkan dalam kongres masih terbatas pada kebudayaan dan '*bangsa*' Jawa dalam hal ini Jawa Tengah dan Timur saja. Setelah KK 1918, lalu disusul oleh kongres-kongres berikutnya, yaitu tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan tahun 1937. Dari kongres

⁵ Soebaryo Mangoenwidodo, *Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa (1879-1952)* Gramedia 1994, hal. 62

pertama ke kongres berikutnya, materi yang diperbincangkan makin meluas, mencakup kebudayaan dan 'bangsa' Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Bidang yang dibahas telah menyinggung pada permasalahan yang mendasar, yakni tentang kebudayaan masa depan: tentang konsep, arah kebijakan dan strategi pelestarian kebudayaan. Mereka telah memperbincangkan tentang permasalahan bagaimana melakukan upaya pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan.

Perdebatan mengenai pembinaan kebudayaan diarahkan pada upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pendukung kebudayaan, dengan cara mengoptimalkan peran pendidikan dalam arti luas sebagai proses pembudayaan. Hal ini tergambar jelas ketika mereka memperbincangkan tentang perlunya mengubah pandangan sebagai bangsa kuli menjadi bangsa yang merdeka dan berkepribadian. Mereka membahas tentang masalah pendidikan sejarah, arsitektur, bahasa, sastra, filsafat, musik, tari, sandiwara (tonil) dan kerajinan, antara lain tentang kerajinan besi, perak, emas, kayu, tenun, bambu, kulit hingga pada pembuatan perahu tradisional.

Sementara itu, perdebatan masalah pengembangan diarahkan pada masalah substansial kebudayaan itu sendiri, yaitu tentang perlunya dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan bangsa. Hal ini tergambar dari perdebatan mereka tentang masalah pengaruh kebudayaan dari Barat maupun Timur (India), terhadap kebudayaan Jawa. Mereka tidak hanya terbatas memperdebatkan kebudayaan Jawa tetapi juga kebudayaan Sunda, Madura dan Bali, kemudian meluas dengan menyelipkan perdebatan tentang kebudayaan nusantara, kebudayaan nasional dan kebudayaan Indonesia. Mereka juga telah memperbincangkan tentang hubungan langsung dengan kebudayaan asing, seperti yang diusulkan oleh Ki Hadjar Dewantara (tahun 1938): "*Tidak mungkinkah bangsa kita dengan tendens-tendens nasionalnya membentuk suatu badan yang dapat kita sebut 'Hubungan Internasional' untuk menghubungkan bangsa kita dengan bangsa lain?*"⁶

Perdebatan tentang upaya perlindungan kebudayaan diarahkan pada upaya untuk menjaga agar kebudayaan tidak mengalami kerusakan dan kemusnahan. Perlindungan diarahkan pada kebudayaan yang bersifat benda (*tangible*) maupun yang bersifat non-benda (*intangible*). Hal ini tergambar pada perbincangan mereka tentang nilai-nilai (tatakrama), seni musik, keutuhan berbagai bangunan kuno, situs purbakala, arsitektur, alat-alat kesenian, hasil kerajinan, bahasa daerah, hingga pada sistem keluarga dan

⁶ Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan II*, Majelis Luhur Taman Siswa, 1994, hal.39

adat. Mereka telah memikirkan untuk mendirikan lembaga penelitian kebudayaan dan lembaga museum untuk menyimpan dan memamerkan berbagai benda peninggalan sejarah bangsa, dan lembaga pendidikan seni (kerajinan).

Sedangkan mengenai pemikiran tentang pemanfaatan kebudayaan diarahkan pada upaya penggunaan kebudayaan bagi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, ekonomi (koperasi, perdagangan, kesejahteraan rakyat) dan bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri. Mereka telah membahas tentang pemanfaatan peninggalan sejarah dan budaya bagi penyelenggaraan pendidikan kesadaran bangsa. Mereka juga sudah memperbincangkan pemanfaatan kebudayaan untuk pariwisata (*tourism*) yaitu sebagai aset budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata (KK 1924 di Yogyakarta, 1926 di Surabaya, 1937 di Bali).

Jarak waktu penyelenggaraan kongres yang relatif dekat membuktikan bahwa kaum terpelajar sangat tanggap (*responsive*) terhadap permasalahan kebudayaan. Jarak yang cukup yang cukup panjang terjadi antara KK tahun 1929 dan 1937, yakni 8 tahun. Kevakuman itu terjadi bukan karena menurunnya perhatian terhadap kebudayaan, melainkan karena di lingkungan Pemerintah Hindia Belanda sedang dilanda oleh terjadinya krisis keuangan yang dikenal dengan sebutan '*zaman malaise*'.⁷ Dengan demikian KK yang diselenggarakan tahun 1918 memiliki makna yang amat penting bagi perjalanan sejarah kebudayaan bangsa, karena telah menjadi KK pertama sebelum Indonesia merdeka dan telah menjadi motor penggerak untuk diselenggarakannya KK berikutnya, bahkan berlanjut hingga pada masa-masa bangsa ini merdeka.



Sebagai peristiwa budaya, meskipun kongres awal ini masih sangat sederhana bila dilihat dari segala sisi, baik dari sisi konsep, materi, tujuan, peserta dan penyelenggaraannya, tetapi pastilah dari kegiatan ini ada bagian-bagian menarik untuk disimak dan dipetik manfaatnya. Kongres ini dapat dikatakan sebagai langkah awal yang luar biasa, karena diselenggarakan pada saat dan suasana kehidupan masyarakat yang sedang dijajah, dan pada saat mulai tumbuhnya kesadaran berbangsa.

KK I sebelum Indonesia merdeka (1918) diselenggarakan tepat di tengah-tengah dua peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa pertama adalah kebangkitan rasa kebangsaan Indonesia atau se-

⁷ *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, hal. 8

ring disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia, ditandai dengan berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo (BO) tanggal 20 Mei 1908.

Peristiwa kedua adalah ketika para pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa ini merupakan titik kulminasi dari tumbuhnya kesadaran berbangsa, yang diwujudkan dalam suatu **komitmen** (kesepakatan) untuk menjadi satu bangsa, menempati wilayah (tanah air) yang satu, dan menggunakan bahasa Melayu-Riau (Indonesia) sebagai bahasa nasional. Peristiwa pencanangan ikrar itu lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Dengan posisi KK tahun 1918 yang berada ditengah-tengah dua peristiwa bersejarah itu, menggambarkan betapa besar kepekaan kaum terpelajar untuk berinisiatif menyiapkan segala langkah untuk menuju ke arah menjadi satu bangsa. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran untuk '*menjadi satu bangsa*' digalang pula kesadaran berbudaya yang dimanifestasikan dalam bentuk penyelenggaraan Kongres Kebudayaan. Meskipun mereka berbeda-beda budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama tetapi hal itu tidak menghalangi tumbuhnya kesadaran itu. Menyadari adanya permasalahan dalam perbedaan budaya itu, mereka kaum terpelajar bumiputra berinisiatif untuk menyepakati langkah strategis dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. Mereka memiliki perhatian yang serius terhadap kebudayaan kemarin, kini dan yang akan datang. Di samping itu kongres juga menjadi forum untuk memupuk kesadaran nasional sehingga makin lama makin menguat.

Sebagaimana diketahui meskipun jauh sebelum BO lahir telah berdiri lembaga tempat berkumpulnya kaum terpelajar, tetapi masih didominasi oleh kaum penjajah. Pada tahun 1778 berdiri '*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*,' milik kaum terpelajar Belanda. Setelah itu disusul dengan berdirinya organisasi yang menangani bidang kebudayaan yang lain seperti: '*Literary Society*' tahun 1811, '*Instituut voor de Javaansche Taal*' tahun (1832),⁸ '*Volklectuur*' atau Balai Pustaka tahun 1908, '*Commissie in Nederlandsch – Indië voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera*' tahun 1901, dan kemudian berubah menjadi '*Oudheidkundige Dienst voor Nerderlandsch-Indië*' tahun 1913.⁹ Meskipun demikian, tidak pernah muncul inisiatif untuk menyelenggarakan KK. Inisiatif itu muncul setelah kaum terpelajar bumiputra menyadari betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran berbudaya, di samping kesadaran berbangsa. Dalam hal ini peran PAAP. Prangwadono sebagai orang pertama yang

⁸ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yayasan Untuk Indonesia, 2000, hal. 389.

⁹ *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, hal. 1

menggagas tentang perlunya diselenggarakannya KK amat menentukan bagi kelanjutan hidup kebudayaan bangsa.

Hal lain yang menarik untuk disimak adalah isi prasaran, ceramah, pidato dan surat yang ditulis oleh orang-orang kelahiran Belanda yang secara tegas menyatakan pendapatnya tentang bangsa dan kebudayaan Jawa dan Indonesia. Pandangan mereka tentang kebudayaan seperti *'gayung bersambut'* dengan pandangan kaum terpelajar bumi putra (diuraikan pada Bab II) A. Muhlenfeld misalnya, dalam prasarannya pada KK 1918 menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

'Untuk membangkitkan kesadaran terhadap kebudayaan sendiri itu ke seluruh wilayah, maka pengajaran dan pengkajian sejarah bangsa merupakan sarana yang terbaik, terkuat dan terpenting. Untuk sebuah 'natie' atau bangsa, juga untuk perorangan atau individu, tuntutan pertama adalah mengenal dirinya sendiri sehingga mereka memiliki perangai, watak (karakter), dan mendapatkan kembali rasa percaya diri kembali setelah kehilangan selama berabad-abad.'

Sementara itu, dalam pidato pembukaan Kongres Kebudayaan tahun 1921, Walikota Bandung Mr. SA Reitsma telah mengutip pendapat tentang *'pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia.'* Sedangkan Walikota Surabaya, Dijkerman menyampaikan pandangan tentang perlunya sebuah Negara yang kuat agar seni dapat berkembang. Antara lain ia menyatakan pandangannya, berbunyi: *'Seni berkembang kuat pada saat bangsa itu sedang dalam kondisi kuat. Dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan suku bangsa Indonesia...'*

Pandangan lain disampaikan oleh Mr. Samuel Koperberg sebagai Sekretaris Java-Instituut. Dalam salah satu suratnya yang ditujukan kepada Sutan Sjahrir menyatakan pandangannya tentang hubungan budaya Timur dan Barat. Koperberg menyatakan bahwa: *'Mengenai nilai hasil pekerjaan itu orang dapat berselisih pendapat, namun saya tetap yakin bahwa di antara kebudayaan Indonesia lama dan alam pikiran orang Barat perlu ada kompromi.'*¹⁰

Pandangan seperti ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahkan lebih ekstrim lagi, karena tidak hanya perlu kompromi tetapi malahan harus berani mengoper. Ki Hajar antara lain menyatakan: *'Bahkan kita harus berani mengoper kebudayaan asing, asalkan dapat memperkaya,*

¹⁰ Jaap Erkelens, *Java-Instituut Dalam Foto*, KITLV, Yogyakarta, 2001, hal. 13

*yakni yang dapat menambah atau memperkembangkan kebudayaan kita yang asli.*¹¹



Permasalahan di bidang kebudayaan menjadi semakin kompleks setelah secara *'de facto'* dan *'de jure'* telah lahir kebudayaan nasional Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 lahir sebuah **bangsa** dan **negara Indonesia** yang bebas dan merdeka, terlepas status sebagai bangsa terjajah. Seiring dengan itu lahir pula **kebudayaan nasional Indonesia**. Perbincangan tentang kebudayaan setelah Indonesia merdeka meluas menyangkut kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Perbincangan dalam forum Kongres Kebudayaan pertama dilaksanakan 3 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1948, kemudian disusul tahun 1951, 1954, dan 1991.

Berdasarkan pada uraian di atas timbul pertanyaan, apakah ada hubungan antara KK sebelum dengan sesudah Indonesia merdeka? Bila jawabannya dicari dari sudut masalah yang dibahas dalam kongres, wajar apabila ada yang masih menyangsikan, karena materi yang dibahas masih sederhana dan terbatas, hanya permasalahan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Tetapi bila ditilik dari segi ide dan pemikiran yang terkandung di balik kongres itu akan dapat ditangkap adanya hubungan itu. Apa yang ada dalam benak kaum terpelajar, budayawan, seniman dan pemangku adat tentang konsep dan strategi pengembangan kebudayaan pada saat itu, memiliki kesamaan dengan pemikiran mereka sesudah Indonesia merdeka. Mereka sama-sama berfikir tentang kebudayaan masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Beberapa masalah yang dibahas dan dipikirkan oleh kaum terpelajar pada saat itu relevan menjadi pokok pikiran para budayawan, seniman dan cendekiawan pada masa awal kemerdekaan. Pemikiran-pemikiran yang muncul sejak awal kongres mengalir laksana titik-titik air dari hulu menuju hilir, membasahi 'tanah-tanah' yang dilalui. Oleh karena itu apabila jejak-jejak basah itu ditelusuri dari awal (sebelum Indonesia merdeka) hingga kini (sesudah Indonesia merdeka) ditemukan adanya *'benang-benang halus'* yang menghubungkan sepanjang jejak-jejak itu.

Dalam membicarakan hubungan antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka tidak mungkin kalau kita hanya melihatnya dari sudut budaya semata tanpa mengaitkan dengan eksistensi bangsa. Dan sebaliknya kita tidak dapat membicarakan masalah eksistensi bangsa tanpa membicarakan peran kebudayaan. Dalam sejarah kehidupan suatu bangsa, kebudayaan

¹¹ Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan II*: 1994, hal. 76

mempunyai peran yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Soerjanto Poespowardojo, peran pada zaman (1) *pra-revolusi*; (2) *revolusi*, dan; (3) *zaman pembangunan*, dapat dilihat perbedaannya.¹²

Dalam zaman pra-revolusi, kebudayaan Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam membentuk kesadaran nasional. Bentuk kesadaran itu telah dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan kebudayaan maupun yang terkait erat dengan kebudayaan. Demikian pula halnya dengan zaman revolusi, **kebudayaan Indonesia** telah mampu memperkuat ikatan komitmen menjadi satu bangsa sehingga mampu merebut kemerdekaannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka tidak terlepas kaitan dengan tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia.

Sebaliknya, dengan tumbuhnya kesadaran nasional itu telah menumbuhkan pula kesadaran anak negeri sebagai pemilik kebudayaan untuk mengangkat kebudayaannya dari posisi budaya terjajah ke posisi budaya yang bebas dari penjajahan. Kongres Kebudayaan tahun 1918 telah memberikan sumbangan moral yang besar bagi kebangkitan kesadaran tentang nasib kebudayaannya arah jauh ke depan, sehingga seluruh warga dunia menghargai kebudayaan Indonesia sebagai bagian kebudayaan dunia.

¹² Muhadjir (*penyunting*), *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*: 1987, hal. 61.

BAB II KEBUDAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA

Sebelum menginjak pada uraian tentang KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, perlu diketahui secara sekilas tentang kondisi dan permasalahan kebudayaan sehingga kaum terpelajar, budayawan, seniman, dan tokoh adat tergerak untuk berkumpul memperbincangkan kebudayaannya. Dengan mengetahui kondisi itu kita akan dapat memahami dasar pertimbangan dan arah yang akan dituju oleh kongres-kongres yang mereka selenggarakan.

Bagaimana kondisi kebudayaan pada masa sebelum Indonesia merdeka tidak terlepas dari status kita sebagai bangsa yang dijajah. Ketika itu kita sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan sendiri tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan kebudayaan kita sendiri. Sementara itu perhatian pihak pemerintah Hindia Belanda terhadap kebudayaan kita tidak dapat dilepaskan dari kepentingan menegakkan dominasi kekuasaan sebagai bangsa penjajah. Mereka tidak hanya berusaha mempengaruhi masyarakat bumiputra dengan menanamkan kebudayaan yang mereka bawa, tetapi juga juga melakukan penekanan dan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan berkreasi.

Berbeda sekali dengan kondisi kebudayaan setelah bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah dan memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai bangsa yang merdeka setiap anggota masyarakat dan suku bangsa mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan kebudayaannya, sesuai dengan dorongan jiwanya. Mereka mendapat kebebasan untuk berkarya dan mengembangkan daya kreativitasnya masing-masing. Dengan demikian suasana batin para peserta kongres ketika hadir pada kongres sebelum Indonesia merdeka sangat berbeda dengan setelah Indonesia merdeka.

Hal lain yang membedakan antara dua masa itu terletak pada keluasan cakupan pengertian kebudayaan dan materi yang dibahas pada saat menyelenggarakan kongres. Pada KK sebelum Indonesia merdeka masalah kebudayaan yang diperbincangkan masih terbatas, dan bersifat lokal (suku bangsa): Jawa, Madura, Sunda dan Bali. Permasalahan yang dibahas menyangkut kebudayaan yang berkembang di kalangan keraton atau puri dan di kalangan masyarakat bawah suku bangsa (sering disebut sebagai masyarakat pinggiran). Sementara itu, perbincangan pada KK masa sesudah

Indonesia merdeka lebih kompleks, mencakup baik masalah budaya bangsa, budaya lokal seluruh suku bangsa, budaya nasional dan bahkan hubungannya dengan budaya asing (internasional atau global).

Dari serangkaian Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka bagian yang menarik untuk disimak adalah keterlibatan para raja dan bangsawan Jawa, Madura, Sunda dan Bali dalam setiap penyelenggaraan kongres. Hal ini membuktikan betapa besarnya perhatian raja dan bangsawan terhadap kebudayaan. Besarnya perhatian itu sesungguhnya sangat berkaitan dengan adanya perubahan peranan pemerintahan kerajaan. Kerajaan tidak lagi sepenuhnya lagi sebagai pusat kekuasaan, karena kekuasaan lebih banyak berada di tangan penjajah. Peranan kerajaan bergeser ke arah pusat pengembangan kebudayaan. Para Raja, bangsawan dan pejabat yang hadir dalam penyelenggaraan kongres antara lain: Sultan Hamengkobowono VIII, Sri Soesoehoenan Pakoebowono, KGPAA. Mangkoenegoro VII, Sri Pakoe Alam, Tjokorde Gde Raka Soekawati dari Gianyar, Tjokorde Raka dari Ubud, dan I Gusti Bagoes Djelantik, dari Karangasem.

Masalah kebudayaan suku bangsa, khususnya Jawa telah banyak ditulis orang. Demikian pula halnya dengan tulisan tentang kebudayaan yang berkembang di lingkungan keraton. Dalam kaitan dengan keterlibatan kaum bangsawan (termasuk raja-raja) di lingkungan kraton Surakarta dan Yogyakarta dalam kegiatan KK sebelum Indonesia merdeka, ada baiknya kita menyimak pandangan yang ditulis oleh Darsiti Soeratman dalam bukunya yang berjudul *'Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939.'* Di samping itu juga sebuah artikel yang ditulis oleh DA. Peransi yang dimuat dalam majalah Prisma No. 6 tahun 1985, tentang Retradisionalisasi dalam Kebudayaan, dan pandangan Prof. Dr. Umar Kayam yang disampaikan pada Kongres Kesenian Indonesia I tahun 1995. Untuk melengkapi gambaran tentang permasalahan kebudayaan sebelum Indonesia merdeka menarik pula untuk dikutip ulasan yang panjang lebar dalam buku 1 *'Nusa Jawa: Silang Budaya'* karya Denys Lombard tentang *'Batas-batas Pembaratan,'* yang menganalisis unsur-unsur dasar kebudayaannya, dan menyangkut keseluruhan sejarah pulau Jawa.



Menurut Darsiti Soeratman, sejak tahun 1830, baik di keraton Surakarta maupun Yogyakarta telah kehilangan daerah, yang disebutnya sebagai daerah *'mancanegara.'* Daerah yang dimaksud adalah daerah yang menjadi bagian (taklukan) dari masing-masing kerajaan. Dengan keberadaan daerah taklukan itu membuktikan bahwa raja memiliki kekuatan dan kekuasaan yang disegani oleh daerah bagian. Pada masa pemerintahan raja Surakarta

Pakoe Boewono VII, raja menandatangani perjanjian dengan Belanda yang dikenal dengan Perjanjian Gianti tahun 1830. Dengan penandatanganan perjanjian itu membuktikan sebagai raja lemah dalam menghadapi Pemerintah Hindia Belanda. Untuk mendapatkan singgasana keraton Surakarta, diperlukan dukungan Belanda dan usaha itu berhasil, sehingga ia dapat memperoleh tahta.

Sebagai konsekuensinya, pada masa pemerintahannya kekuasaan politik berpindah ke tangan penjajah. Kekuasaan raja dalam bidang pengadilan dan kepolisian mulai tahun 1847 mengalami penyusutan. Demikian pula halnya dengan pemerintahan di bawah pengganti-penggantinya, intervensi pemerintah kolonial terhadap bidang itu semakin mendalam.

Akhirnya, pada pemerintahan Pakoe Boewono X, kekuasaan dalam bidang pengadilan sepenuhnya jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (1903). Pada tahun 1917, menyusul berakhirnya kekuasaan Sunan terhadap tanah, yang semula berupa tanah *pengrembe*, *tanah lungguh*, dan *tanah-tanah yang disewa* oleh para pengusaha perkebunan asing. Mudah-mudahan raja baru itu melepaskan kekuasaannya, karena terikat oleh isi Verklaring, yang ditandatangani beberapa hari sebelum ia dinobatkan menjadi raja.¹³ Merosotnya kekuasaan dalam bidang politik ini membawa pengaruh terhadap kedudukan sosial raja. Pada masa pemerintahan Pakoe Boewono VII (1830), untuk pertama kali upacara *gerebeg* di keraton tidak dihadiri oleh para *adipati mancanegara*, sehingga banyak tempat di sekitar keraton menjadi tidak berfungsi. Keadaan semacam ini terus berjalan selama pemerintahan pengganti-penggantinya.

Dengan demikian, merosotnya kekuasaan raja dalam konsep politik bermula dari dibuatnya peraturan baru oleh Pemerintah Hindia Belanda yang isinya mengurangi sebagian kekuasaan dalam konsep kultural. Hal ini mengakibatkan Sunan banyak mencurahkan perhatiannya pada penyelenggaraan upacara dan pesta di kraton secara besar-besaran. Kemegahan itu juga tampak, jika Sunan bersama permaisuri *tedhak loji* pada hari ulang tahun Ratu Belanda. Sifat barok yang makin menonjol pada penyelenggaraan upacara dan pesta itu merupakan lambang untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesaran raja. Di samping itu, tindakan Sunan Pakoe Boewono dengan sangat sering bepergian ke luar daerah kerajaannya, menampakkan diri di muka umum, mendatangi tokoh-tokoh daerah, juga merupakan suatu usaha untuk menunjukkan wibawa dan kebesarannya.

¹³ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, 2000, hal. 396

Penyusutan kekuasaan politik raja mempunyai dampak pada bidang kultural di keraton. Jika sebelumnya unsur-unsur kebudayaan daerah dapat dijadikan masukan bagi perkembangan kebudayaan keraton, sesudah daerah-daerah itu terlepas, sumber masukan tersebut menjadi berkurang. Pada masa sebelumnya keraton sebagai pusat kebudayaan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perkembangan kultural daerah yang dikuasai. Keadaan semacam ini terpaksa ditinggalkan, sesudah kekuasaan raja terhadap daerah mancanegara harus dilepaskan.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Paku Buwono X, kontak kebudayaan keraton Surakarta dengan kebudayaan Barat makin dekat. Terhadap pendidikan Barat, Sunan bersikap menerima dan putra-putra yang dikirim ke sekolah-sekolah Barat dititipkan (dipondokkan) pada keluarga Belanda. Kesadaran Sunan untuk mengirimkan putra-putranya ke sekolah gaya Barat itu dimaksudkan agar putra-putra itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman baru, sehingga mereka tetap berada di lapisan atas. Namun, pengiriman putra-putra raja dan priyayi ke sekolah Barat menjadikan mereka itu asing terhadap karya-karya sastra lama karangan para pujangga keraton dan beberapa raja yang memerintah lebih dahulu.

Keraton sebagai sebuah komunitas mengadakan interaksi dengan komunitas di luar kraton. Interaksi ini menjadi lebih intens sesudah Sunan bersikap terbuka bagi kebudayaan Barat. Dengan demikian, keraton menjadi cenderung terbuka untuk masuknya tradisi di lingkungan luar tembok keraton di samping itu keraton juga banyak meminjam unsur-unsur kebudayaan Barat. Dengan demikian masyarakat keraton memiliki beberapa ciri: *'menjadi setengah terbuka, bersifat tradisional, konservatif; peradaban bersifat involutif raja dianggap sakral-magis, demikian pula benda-benda miliknya; mengutamakan status, senioritas darah/kebangsawanan; dan terdapatnya hirarki yang menyusup di seluruh bagian kehidupan.'*¹⁴

Birokrasi kehidupan masyarakat kraton pada masa pemerintahan Paku Buwono X condong untuk dikatakan sebagai pelarian dari kenyataan seperti dikemukakan oleh J. Huizinga. Namun Sunan tidak sepenuhnya hidup dalam mimpi. Sadar akan kedudukannya sebagai pelindung kebudayaan Jawa, Sunan bersama para bangsawan berusaha untuk melestarikan eksistensi kebudayaan itu, bahkan memperluasnya.¹⁵

Perubahan perkembangan kebudayaan sesungguhnya sudah dimulai sejak orang-orang Barat mendarat di Indonesia. Pertemuan antara kedua budaya

¹⁴ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, hal. 399

¹⁵ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, hal. 400

itu telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan budaya bumiputra. Dalam suatu Konferensi Pelajar Indonesia di Hennef tahun 1955, kaum intelektual muda (Chaerul Saleh, Wiratmo Sukito, Frans Seda, Doddy Tisnaamidjja, Chaerun Caroboka, Muljoto Djojomartono) dan sekitar 60 orang lagi menyatakan bahwa ketika Barat memasuki negeri kita dalam bentuk VOC dan kemudian Cultuurstelsel serta mengadakan eksploitasi kekayaan bumi Indonesia, penetrasi Barat itu mengguncangkan dan merombak kebudayaan tradisional kita. Masyarakat dan kebudayaan Indonesia sebelumnya didasarkan atas kebudayaan kerajaan sakral. Pertalian antara sektor-sektor kebudayaan sebagai agama, politik, kesusasteraan dan kesenian amat erat, sedangkan sektor-sektor tersebut dalam keseluruhannya selalu mempunyai peranan pula dalam memperteguh kedudukan sakral dari raja tadi.

Selama zaman kolonial, sifat dan hakikat masyarakat kita lenyap oleh karena selama itu bertahtalah sistem pemerintahan asing di atas ketatanegaraan Indonesia. Gubernur Jenderal, Para Gubernur dan Residen-residen Belanda berdiri di atas raja-raja, para bupati dan kepala-kepala adat. Pusat masyarakat bukan lagi raja akan tetapi pemerintah ketatanegaraan yang datang dari Batavia, dari Amsterdam (Heern XVII) dan kemudian dari Den Haag (*Departemen van Kolonien*)¹⁶

Dengan cara demikian lenyaplah kebudayaan kerajaan sakral yang dulu menjadi dasar pusat masyarakat Indonesia lama, dan hal itu mengakibatkan rubuhnya tata-tertib kemasyarakatan dan kebudayaan. Proses ini dipercepat oleh penetrasi pada kehidupan rohaniah, dan hal itu terjadi melalui pengajaran dan pendidikan Barat. Keadaan desintegrasi ini menimbulkan ketidak-tentuan serta kegelisahan. Ini merupakan aspek pertama dari krisis kita.

Sementara itu Denys Lombard menyatakan bahwa perubahan budaya yang terjadi di pulau Jawa tidak hanya karena pengaruh yang datang dari Eropa, tetapi juga dari India, Islam, dan China. Indonesia dan Jawa khususnya selama dua ribu tahun sejarahnya, telah menjadi sebuah persilangan budaya, dari peradaban-peradaban dunia yang penting bertemu, diterima, diolah, dikembangkan, dan diperbaharui.¹⁷

Berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat itu sangat besar pengaruhnya terhadap proses perkembangan kebudayaan saat itu. Seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Umar Kayam bahwa: *'Kebudayaan adalah suatu proses dialektika antara sistem-sistem dalam masyarakat dimana manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu terlibat dalam*

¹⁶ DA. Peransi, *Retradisionalisasi dalam Kebudayaan*, Prisma, No. 6/1985, hal. 11

¹⁷ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya jilid I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 74-85.

*proses membangun sosok kebudayaan.*¹⁸ Sistem penataan masyarakat sebelum Indonesia merdeka diatur dalam sistem kerajaan atau kesultanan. Pada waktu kesenian kita masih merupakan bagian dari sosok-budaya *'feodal aristokratik'* maka kesenian merupakan juga bagian dari dialektika budaya waktu itu. Sistem kekuasaan yang absolut dari masyarakat-masyarakat kerajaan dengan sosok-budaya *'feodal aristokratik'* melahirkan suatu sintesa budaya *'adiluhung,' 'yang indah dan yang luhur,'* yang sangat keras berorientasi kepada sistem nilai *'halus-kasar,'* yang sudah barang tentu ditentukan oleh sistem kekuasaan absolut kerajaan.¹⁹ Bertolak dari pandangan Umar Kayam ini, maka kita dapat dikatakan bahwa peran kaum bangsawan sangat dominan dalam proses membangun sosok kebudayaan saat itu.

Demikian gambaran singkat tentang kondisi kebudayaan yang berkembang saat sebelum Indonesia merdeka. Peran kaum bangsawan amat besar dalam proses perkembangan kebudayaan di samping masyarakat sedang berada pada perubahan yang sangat mendasar. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, kaum terpelajar, budayawan, seniman, dan pemangku adat, hingga pada tingkat pejabat, raja dan kaum bangsawan menaruh perhatian besar terhadap perkembangan kebudayaannya. Mereka berkali-kali berkumpul untuk bersama-sama memperbincangkan masa depan kebudayaannya.



Bagaimana posisi kebudayaan setelah Indonesia merdeka? Dengan berbekal ikrar yang diucapkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, masalah kebudayaan bangsa sepenuhnya terletak di tangan bangsa Indonesia sendiri. Menurut Kuntjoro, ditinjau dari sudut kebudayaan, hari kemerdekaan itu sebagai *'saat sejarah di mana bangsa kita melepaskan diri dari belenggu yang mengikat jiwanya berabad-abad lamanya itu. Kesempatan yang bersinar-sinar terbuka kembali bagi kebudayaan untuk bersemi, berkembang dan berbuah.'*²⁰ Sementara itu menurut Umar Kayam *'sejak kita menyatakan kemerdekaan kita, disamping kita memerdekakan wilayah geografis kita dari status penjajahan, kita juga bertekad untuk membangun Negara dan masyarakat baru dengan kebudayaan baru.'*²¹ Untuk merancang bangunan itu semua para pendiri bangsa kita telah merancang UUD 1945 beserta Mukadimah serta dasar

¹⁸ Umar Kayam, Prof. Dr., *Perjalanan Kesenian dalam Masyarakat* (makalah) disajikan pada Kongres Kesenian Indonesia I, tahun 1995, hal. 1.

¹⁹ Umar Kayam, Prof. Dr., *Perjalanan Kesenian dalam Masyarakat*, hal. 2-3

²⁰ *Majalah Indonesia*, No. I-II, Tahun I, hal. 40

²¹ Umar Kayam, Prof. Dr., *Perjalanan Kesenian dalam Masyarakat*, hal. 1

falsafah negara Pancasila, yang di dalamnya berisi kehendak yang kuat untuk meninggalkan azas sistem kekuasaan yang absolut dari sosok budaya feodal menuju ke arah kebudayaan yang modern dan demokratis.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebudayaan diatur dalam Pasal tersendiri, yakni dalam Pasal 32, berada di bawah naungan Bab XIII yang berjudul Pendidikan. Berdasarkan Risalah hasil rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), masalah kebudayaan cukup hangat dibicarakan, baik tentang rumusannya maupun posisinya dalam Pasal UUD 1945. Sebelum ditetapkan dalam Pasal 32, bidang kebudayaan berada pada Bab dan Pasal yang lain. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan dan lahirnya UUD 1945, secara *'de facto'* dan *'de jure'* kebudayaan nasional diakui keberadaannya.

Semula, yaitu pada rapat tanggal 13 Juli 1945 kebudayaan ditampung dalam Pasal 34. Bunyi pasal ini adalah: *'Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu.'*²² Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 posisi kebudayaan bergeser dari Pasal 34 digeser ke Pasal 33 di bawah Bab tentang Kesejahteraan Sosial.

Setelah digeser, bunyi kalimatnya dipersingkat menjadi: *'Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.'* Bagaimana dengan posisi kebudayaan daerah? Menanggapi pertanyaan ini Soepomo selaku Anggota Panitia Penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar (RUUD) menyatakan bahwa dengan penyebutan kebudayaan nasional bukan berarti kebudayaan daerah akan dihilangkan. Antara lain dikatakan:

*'Pasal 33 ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanya kebudayaan daerah. Bukan maksud kami untuk menghapuskan misalnya kebudayaan Jawa, oleh karena dianggap bukan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan daerah harus dihormati, dijunjung tinggi. Pasal 33 ini maksudnya ialah: oleh karena kita menghendaki persatuan, maka kita mengajar (?) lahirnya kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana jalannya itu terserah kepada Negara dan masyarakat di kemudian hari.'*²³

Sementara itu dalam hubungan dengan penempatan kebudayaan pada Pasal 33 Bung Hatta mengusulkan agar dipindahkan ke dalam Bab XIII tentang Pendidikan. Bung Hatta mengatakan: *'Saya kira pasal itu lebih kena,*

²² Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Sekretariat Negara RI, 1995, hal.232.

²³ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), hal . 279.

*kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan.*²⁴ Usul ini mencerminkan pandangan Bung Hatta tentang kedekatan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Keduanya saling membutuhkan dan saling mengisi. Dilihat dari segi kebudayaan, materi yang diberikan kepada peserta didik pada hakikatnya adalah kebudayaan. Sebaliknya, bila dilihat dari segi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembudayaan. Melalui pendidikan nilai-nilai kebudayaan ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan cara demikian hidup kebudayaan bangsa akan berlangsung terus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menanggapi usul Bung Hatta, Soepomo mengatakan: *'kami tidak ada keberatan untuk memindahkan Pasal 33 ke Pasal di bawah di dalam bab pendidikan, menjadi **Pasal 31.**'* Tetapi dalam kenyataan sekarang tidak demikian. Kebudayaan tidak jadi ditampung dalam Pasal **31** tetapi dalam Pasal **32**. Pasal 31 memuat tentang pendidikan, dan kedua Pasal itu bernaung di bawah Bab XIII, Pendidikan. Alasan mengapa akhirnya menjadi demikian tidak ada keterangan yang disampaikan. Kalau posisi kebudayaan berada pada Pasal 31 dan pendidikan berada pada Pasal 32 seperti yang diusulkan, mungkin perjalanan sejarah kebudayaan akan menjadi lain.

Rumusan Pasal 32 tetap singkat, yaitu: *'Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.'* Karena bunyi kalimat yang singkat itu maka tidak tertutup kemungkinan tentang timbulnya perbedaan dalam penafsiran. Tetapi selama ini masyarakat luas dapat dikatakan dapat memahami maknanya dengan tepat. Hal itu dapat dicapai berkat adanya 3 kalimat Penjelasan yang telah menjadi pedoman dalam memposisikan kebudayaan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bunyi kalimat Pasal 32 tergolong singkat, dan dari balik kalimat ini terkandung suatu amanat dari para pendiri bangsa kepada Pemerintah dan kita semua untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Mengapa yang diberi amanat itu Pemerintah?

Sebagaimana telah diuraikan dibagian depan, bangsa Indonesia lahir melalui proses sejarah yang panjang. Sejak dari mulai timbulnya kesadaran berbangsa tahun 1908 kemudian kesadaran nasional itu makin meningkat dan pada tahun 1928 para Pemuda berikrar (**komitmen**) menyatakan diri menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

²⁴ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI)*, hal .326.

Sesudah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, secara *'de facto'* dan *'de jure'* kehadiran bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan secara penuh. Setelah Indonesia merdeka yang berarti bangsa Indonesia menjadi ada, masalah mendasar yang harus dihadapi adalah tentang bagaimana menjaganya agar komitmen itu dapat hidup abadi. Menyadari betapa sulit dan beratnya proses mempersatukan berbagai macam suku bangsa untuk tetap sepakat menjadi satu bangsa, maka tugas mengasuh komitmen itu diamanatkan kepada Pemerintah. Pemerintahlah yang mengemban tugas untuk menjaga keutuhan komitmen menjadi satu bangsa itu. Menurut Prof. Dr. Slametmuljana, Pemerintah atau Negara mempunyai *'kewajiban meyalurkan semangat kesukuan ini ke arah kenegaraan, yang memberi jaminan akan kelangsungan kehidupan kesukuan di samping memupuk pertumbuhan watak kenasionalan.'*²⁵ Di dalam asuhan kenegaraan itu sesungguhnya pelaksanaan aspirasi kesukuan lebih terjamin.

Untuk dapat melaksanakan amanat itu, oleh pendiri bangsa telah disiapkan **3 kalimat Penjelasan** yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan amanat itu. Di dalam tiga kalimat penjelasan itu terdapat empat unsur budaya, yaitu budaya nasional, budaya suku bangsa, budaya lama dan asli serta budaya asing. Masing-masing kalimat penjelasan itu adalah sebagai berikut.

Kalimat Penjelasan **pertama** berbunyi: *'Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.'* Kalimat ini merupakan jawaban atas pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional itu? Wajar pertanyaan ini mengemuka karena pada awal kemerdekaan yang disebut dengan *'kebudayaan bangsa'* atau *'kebudayaan nasional'* atau *'kebudayaan Indonesia'* itu pada hakikatnya belum ada. Masyarakat hanya mengenal kebudayaan daerah atau suku bangsa masing-masing. Ketika dalam UUD yang dicantumkan di sana hanya kebudayaan nasional saja, maka posisi kebudayaan daerah di lebih dari 480 suku bangsa²⁶ perlu ada kejelasan, agar tidak menimbulkan pertanyaan. Ditegaskan bahwa kebudayaan nasional itu pada hakikat adalah semua kebudayaan suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Strategi ini sangat tepat mengingat kebudayaan suku-suku bangsa itu telah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka.

Setelah semua suku bangsa bergabung menjadi satu bangsa dan mengakui kehadiran kebudayaan nasional, melalui kalimat penjelasan tadi masalah tata hubungan antarbudaya suku bangsa menjadi jelas. Dalam kehidupan budaya antarsuku tidak berlaku konsep perbedaan antarsuku dan antar-

²⁵ Prof. Dr. Slametmuljana, *Politik Bahasa Nasional*, Jambatan, Jakarta, tahun 1959, hal. 3

²⁶ M. Junus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995

budaya dalam arti ada suku bangsa atau budaya '*minoritas*' dan '*mayoritas*,' atau '*besar*' dan '*kecil*,' '*tinggi*' atau '*rendah*,' dan '*kuat*' atau '*lemah*.' Masing-masing budaya suku bangsa memiliki kelebihan dan keunikan yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lain memiliki kedudukan setara, sehingga menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Dengan penjelasan ini, kita sepakat untuk menuju kearah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang '*Bhinneka Tunggal Ika*.' Kita memang berbeda-beda dalam hal suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa dan budaya tetapi pada hakikatnya kita satu, Indonesia.

Kalimat Penjelasan **kedua** berbunyi: '*Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.*' Kalimat ini merupakan jawaban atas pertanyaan, bagaimana posisi kebudayaan lama dan asli?

Pertanyaan ini muncul sejak terjadi polemik di kalangan budayawan ketika itu, sekitar posisi kebudayaan lama atau asli dalam kaitan dengan kebudayaan Indonesia baru, kebudayaan Timur, atau Barat. Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dalam tulisannya yang berjudul '*Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru*' menyatakan bahwa: '*....kebudayaan Indonesia tiadalah mungkin sambungan kebudayaan Jawa, Sunda atau kebudayaan yang lain.*' Sementara Sanoesi Pane dalam tulisan berjudul '*Djagat Besar dan Ketjil*' berpendapat bahwa: '*Itoelah sebabnja saja berdiri di Timoer jang silam jang keramat bagi saja sendiri mewoedjoedkan keboedajaan jang baroe, ramoean zaman Timoer jang silam diperkaja dengan ramoean dari Barat.*'²⁷ Untuk '*mendamaikan*' dua pendapat tersebut disiapkanlah penjelasan seperti di atas. Keberadaan (*eksistensi*) kebudayaan lama dan asli di seluruh wilayah Indonesia di tengah-tengah perkembangan dan kemajuan sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap '*terhitung sebagai kebudayaan bangsa.*'

Kalimat penjelasan **ketiga**: '*Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia.*' Isinya merupakan jawaban atas 3 pertanyaan: (1) ke arah mana tujuan dari usaha memajukan kebudayaan itu?; (2) bagaimana menyikapi pengaruh

²⁷ E. Ulrich Kratz, *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 64.

kebudayaan asing?; dan (3) apa yang dijadikan ukuran untuk menolak atau menerima pengaruh budaya asing?

Bagi pendiri bangsa, jawaban atas pertanyaan (1) adalah: *'...harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan.....'* Jawaban ini dipandang penting dengan maksud agar amanat yang diberikan kepada Pemerintah mencapai sasaran yang tepat. Di samping itu juga merupakan pengakuan bahwa kebudayaan memiliki peranan besar dalam membangun jati diri dan keutuhan bangsa. Tujuan untuk kemajuan *'persatuan bangsa'* diposisikan sebagai bagian yang penting oleh para pendiri bangsa di samping tujuan kemajuan adab dan kemajuan budaya, karena bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa (yang terbanyak di antara Negara-negara yang ada). Untuk menjaga agar komitmen menjadi satu bangsa itu tetap utuh dan bulat bersatu, Pemerintah diberikan amanat untuk menjaganya.

Untuk pertanyaan (2) yaitu bagaimana menyikapi masuknya unsur-unsur budaya asing, disiapkan jawaban: *'.....dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri...'* Dengan dicantulkannya kalimat ini masyarakat Indonesia mendapatkan pedoman dalam menyikapi pengaruh asing, baik pengaruh dari Barat atau Timur. Sedangkan untuk jawaban pertanyaan (3) yaitu tentang ukuran untuk menolak atau menerima unsur pengaruh asing itu dilengkapi dengan kalimat *'.....serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia.'* Kalimat ini menjadi acuan kita, apabila unsur budaya asing itu tidak sejalan dengan rambu-rambu itu berarti harus ditolak.

Bagian dari penjelasan yang dianggap tidak jelas terletak pada kalimat kedua, sehingga menimbulkan banyak polemik. Kata-kata yang berbunyi: *'...yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa,'* menyimpan sejumlah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan *'puncak-puncak'* itu? Unsur budaya daerah yang bagaimanakah yang masuk dalam kategori *'puncak-puncak'* itu?. Bagaimana kalau budaya daerah itu tidak memiliki *'puncak-puncak'*?

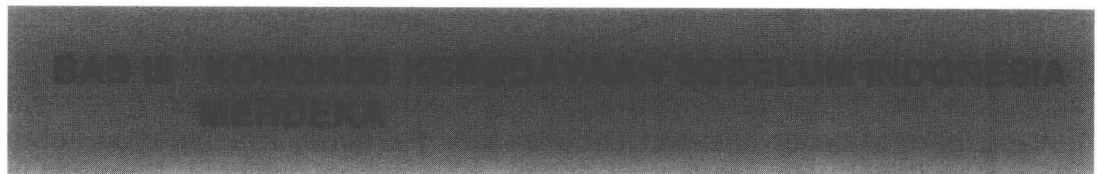
Kecuali itu, bagi sementara orang kalimat penjelasan kedua dinilai bertentangan dengan kalimat penjelasan pertama. Bukankah dalam kalimat pertama sudah sangat jelas dinyatakan bahwa *'...kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya,'* terhitung sebagai *kebudayaan bangsa?* Mengapa dalam kalimat kedua diulang dan cakupannya dibatasi hanya: *'...yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia....'* yang terhitung sebagai *kebudayaan bangsa?*

Dari sedikit gambaran tentang proses lahirnya Pasal 32 di atas, dapat disimpulkan ada 5 hal yang merupakan pencerminan pandangan mendasar tentang permasalahan inti dari kebudayaan. **Pertama**, kita memiliki kebudayaan nasional, dan untuk memajukan kebudayaan nasional, Pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan sesuai dengan arah yang cukup jelas. **Kedua**, kebudayaan mempunyai hubungan yang dekat dengan pendidikan. **Ketiga**, diperlukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kebudayaan bangsa (nasional) dalam kaitan dengan posisi kebudayaan daerah. **Keempat**, diperlukan penjelasan tentang posisi kebudayaan lama dan asli, dikaitkan dengan terjadi berbagai perubahan dan perkembangan. **Kelima**, diperlukan penjelasan tentang bagaimana menyikapi hubungan budaya antarbangsa (budaya asing) yang makin terbuka.

Dengan dicantumkannya Pasal tentang kebudayaan secara khusus dalam UUD Republik Indonesia, berarti kebudayaan merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan negara Indonesia merdeka. Tambahan penjelasan Pasal 32 UUD 1945 masalah makna, konsep, kebijakan dan strategi dasar di bidang kebudayaan menjadi sangat jelas. Masalah keberadaan kebudayaan suku bangsa, nasional, dan hubungannya dengan kebudayaan asing telah diletakkan pada posisi yang tepat. Dengan penjelasan ini menurut Nazaruddin Sjamsuddin *'mampu melepaskan diri dari rasa curiga terhadap kebudayaan suku-suku. Kebudayaan suku-suku bangsa tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional; kebudayaan daerah atau suku bukanlah ancaman, melainkan pembentuk kebudayaan nasional.'*²⁸

Sebagai bukti adanya perhatian dan kecintaan terhadap kebudayaan bangsa yang dirintis oleh para pendiri bangsa, setelah Indonesia merdeka para seniman, budayawan, cendekiawan dan pemangku adat, melakukan berbagai kajian, penelitian, diskusi, seminar, simposium, musyawarah dan konferensi untuk memperbincangkan masa depan kebudayaannya. Mereka berkumpul untuk merumuskan konsep, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tepat dalam rangka memenuhi amanat Pasal 32 UUD 1945. Kongres Kebudayaan yang dilakukan setelah Indonesia merdeka juga merupakan salah satu cara untuk mencari jawab atas pertanyaan: *kemanakah arah kebudayaan kita akan berkembang?*

²⁸ Muhadjir (penyunting), *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*, hal. 363-364



Sumber data mengenai penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka dapat ditemukan antara lain di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Dalam majalah 'DJAWA' yang terbit pertama tahun 1921 banyak direkam kegiatan kongres kebudayaan dan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang biasa dipakai oleh kaum terpelajar saat itu, bahasa Belanda. Majalah ini terbit 4 kali dalam setahun, dan edisi terakhir terbit tahun 1941.

Berdasarkan keterangan yang tercatat dalam majalah itu dan dari sumber lainnya dapat diketahui bahwa pada masa sebelum Indonesia merdeka telah diselenggarakan 7 kali Kongres Kebudayaan dan beberapa kali Kongres Bahasa. KK pertama diselenggarakan tahun 1918 dan yang terakhir diselenggarakan tahun 1937. Enam dari 7 kali kongres itu disiapkan dan diselenggarakan oleh sebuah lembaga penelitian kebudayaan yang disebut Java-Instituut.

Hal ini mencerminkan bahwa perhatian para kaum terpelajar terhadap kebudayaan pada saat itu sudah cukup tinggi. Dampak dari kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian kebudayaan tetapi juga memiliki kontribusi pada bidang politik dan menumbuhkan kesadaran berbangsa. Topik bahasan tentang bagaimana arah dan perkembangan serta strategi pengembangan kebudayaan hingga pada dampak ekonomi telah dijadikan topik diskusi yang menarik.

Pandangan tentang telah adanya kegiatan pembicaraan kebudayaan pada masa sebelum Indonesia merdeka, telah diakui pula oleh Sapardi Djoko Damono. Menurut Sapardi, tema kongres pada masa itu masih terkesan sempit dan sederhana, namun mempunyai dampak pengaruh yang sangat berarti bagi perkembangan kebudayaan masa depan. Seperti yang tertulis dalam makalah tentang KK I, II, dan III, Sapardi mengatakan: *'Pembicaraan, yang lebih sering merupakan perbantahan, mengenai kebudayaan telah berlangsung di negeri kita ini sejak beberapa puluh tahun sebelum kemerdekaan.'*²⁹ Pengertian 'beberapa puluhan tahun' itu tentunya tidak hanya perbantahan yang dilakukan oleh kalangan pemuda terpelajar yang

²⁹ Muhadjir (penyunting). *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*,: 1987, hal. 1.

berlangsung pada masa setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, tetapi juga yang dilakukan kaum terpelajar tahun 1918, bahkan sejak tahun 1908.

1. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1918 (I)

Meskipun kongres ini berlangsung pada masa penjajahan Belanda, peserta kongres banyak datang dari kaum terpelajar pribumi. Bahkan kongres ini diprakarsai penduduk bumiputra, yakni oleh PAAP. Prangwadono. Bersama dengan tokoh-tokoh dari perkumpulan Boedi Oetomo (BO) dan perkumpulan lainnya, ia menyampaikan gagasan untuk membahas masalah kebudayaan dalam bentuk kongres. Memang ada dua pemikiran yang dijadikan sebagai sumber gagasan untuk mengadakan kongres. Pertama, inisiatif datang dari D. Van Hinloopen Labberton, seorang teosof yang terkenal, pada awalnya mengusulkan agar diselenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Panitianya dibentuk di Batavia, terdiri atas Dr. Hoesein Djajadiningrat, Dr. FDK. Bosch, Dr. B. Schrieke dan Dr. Hazeu. Diusulkan pula agar yang menjabat sebagai Ketua Panitia kongres adalah Mangkoenegoro VII atau PAAP. Prangwadono. Sementara yang kedua pemikiran datang dari kalangan kaum terpelajar bumiputra anggota BO di Surakarta. Menyikapi kenyataan ini, kelompok Belanda memutuskan dan membiarkan para anggota BO di Surakarta mengambil langkah-langkah untuk mengatur sendiri penyelenggaraan kongres.³⁰ Akhirnya mereka menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Jawa, dan bukan Kongres Bahasa Jawa, seperti yang dikehendaki pihak Batavia.

Dari gambaran ini dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh kaum pergerakan (peran Dr. Radjiman dkk) sehingga bagaimana pun kuatnya gagasan itu datang dari pihak Belanda, akhirnya mereka harus mengalah dengan kekuatan BO cabang Surakarta. Kenyataan itu juga merupakan suatu hasil dari tahapan perjuangan yang dapat menjadi pendorong semangat untuk terus maju ke depan dalam memperjuangkan kehadiran bangsa baru. Dalam buku Takashi Shiraishi yang dikutip oleh penulis buku *'KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa,'* posisi Dr. Radjiman diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: *"...maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang Radjiman yang tetap merupakan 'think tank' bagi Boedi Oetomo maupun bagi 'elite power' keraton Surakarta Hadiningrat. Bahkan, walaupun Koperberg seorang anggota ISDV³¹, ditunjuk menjadi sekretaris panitia pengarah karena hubungannya yang akrab dengan*

³⁰ Dari pendapat Takashi Shiraishi, Satria VS Pandita Sebuah Debat Dalam Mencari Identitas, hal. 164-165 dalam *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*, Penyunting Akira Nagazumi, Jakarta: Yayasan Obor, 1986, yang dikutip oleh Soebaryo Mangoenwidodo, dalam bukunya yang berjudul *'Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat, Hasil Karya dan Pengabdianannya,'* hal.57-65,.

³¹ Singkatan dari Indische Sociaal Democratische Vereniging sebagai Embrio dari Partai Komunis Indonesia.

Pangeran Mangkoenegoro VII dan yang lain-lain, nampaknya sudah jelas bahwa pimpinan kongres berada di tangan kelompok 'Wederopbouw'.³²

Yang dimaksud oleh Shiraisi dengan kelompok 'Wederopbouw' adalah kelompok yang menghendaki pembangunan (kebangkitan) kembali 'bangsa Jawa' yang dalam hal ini dimotori oleh kaum terpelajar bumiputra. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran kaum terpelajar penggerak kebangkitan nasional dalam penyelenggaraan KK pada saat itu.

Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa jalan untuk terseenggarannya Kongres Kebudayaan bagi sebuah bangsa terjajah tidaklah mudah. Kongres diselenggarakan di Surakarta, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Juli tahun 1918, dengan nama '**CONGRES VOOR JAVAANSCHЕ CULTUUR ONTWIKKELING**',³³ atau kalau diterjemahkan menjadi '**Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa.**' Kongres inilah yang dapat dicatat sebagai KK I yang diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka.

Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara kongres, R. Sastrowidjono pada sambutannya telah menyinggung masalah pentingnya meletakkan landasan sejarah dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Ia mengatakan: '*...telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi.*'³⁴ Selanjutnya Sastrowidjono menyatakan bahwa budaya milik suatu bangsa merupakan cerminan paling sempurna dari kesadaran nasional dan jati diri bangsa yang bersangkutan. Untuk itu ia '*menyerukan kepada seluruh bangsa di Jawa, tanpa membedakan antara orang Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura bahkan termasuk Bali guna membahas bersama jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.*'

Kongres diselenggarakan di bangsal Kepatihan Kraton Surakarta. Dalam kongres tersebut yang ditunjuk sebagai Pemrasaran adalah:

- Dr. Satiman Wirijosandjojo
- R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo
- Tjipto Mangoenkoesoemo
- R. Ng. Wediodipoero (Dr. Radjiman)
- R.A. Notosoedirdjo geb. Karlinah.

³² Soebaryo Mangoenwidodo, *Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa (1879-1952)*: 1994, hal. 62

³³ *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, Programma en Tekstboekje Prae-Adviezen*, Stoomdrukkerij CA MISSET, Semarang: 1918, hal. 3

³⁴ Jaap Erkelens, *Java-Instituut Dalam Foto*, hal. 2

- D. van Hinloopen Labberton³⁵
- A. Muhlenfeld
- J. Rottier
- Z. Stokvis

Acara kongres disusun sebagai berikut:

Tanggal 5 Juli 1918:

- Berkumpul di Kepatihan Kraton Surakarta, lalu mengunjungi Kraton dan Sriwedari.
- Ramah-tamah peserta kongres di '*Societeit Harmonie*', mendengarkan musik dan pertunjukan tari Wireng. Pembukaan Kongres di Kepatihan Mangkunegaran, oleh Ketua R. Sastrowidjono.

Tanggal 6 Juli 1918:

- Penyajian prasaran dan diskusi.
- Perumusan hasil diskusi.
- Pergelaran Wayang Wong di Pura Mangkunegaran.

Tanggal 7 Juli 1918:

- Mengunjungi Prambanan, dengan kendaraan kereta api, berangkat bersama-sama dari stasiun Balapan.

Banyak pertanyaan yang diajukan dalam kongres tersebut. Pertanyaan menarik yang muncul antara lain:

1. Ke arah mana perkembangan bangsa Jawa dibawa dan bagaimana bangsa Jawa dapat membangun kembali peradabannya yang tinggi di masa lampau?.
2. Dalam usaha pembangunan kembali bangsa Jawa itu, apakah peranan peradaban Barat dan kebudayaan Jawa?
3. Kemana perkembangan kebudayaan Jawa harus diarahkan, dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar ke dalam masyarakat Jawa masa kini?
4. Sejauh mana mutlak diperlukan untuk mengembangkan masyarakat Jawa atas dasar pendidikan Barat?
5. Pengetahuan-pengetahuan dan metode Barat mana yang perlu mendapat perhatian untuk diajarkan dalam rangka mengembangkan masyarakat Jawa masa kini?
6. Sejauh mana kebudayaan Jawa masa kini yang dengan sadar dan tidak sadar hidup dalam jiwa (*psyche*) penduduk, dapat digunakan pada pendidikan (suku) bangsa Jawa?

³⁵ Seorang tokoh pimpinan Teosofi dan pernah menjabat sebagai Ketua Teosofi Dunia pada tahun 1912. Setelah Dr. Radjiman bertemu dengan tokoh ini, cakrawala dunia pemikiran tesofinya bertambah luas.

7. Mungkinkah dan diinginkankah menghidupkan kembali kebudayaan Jawa yang terancam punah?
8. Apa yang perlu diubah dalam sistem pendidikan masa kini berhubung satu dan lain hal?

Di dalam diskusi dibahas pula berbagai hal lain, misalnya tentang unsur sejarah dan kebudayaan dalam pendidikan dan sejauh mana pendidikan berdasarkan sistem Barat perlu diberikan tempat dalam kurikulum sekolah. Juga dibahas cabang-cabang ilmu Barat mana yang harus diprioritaskan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Masalah lain yang paling penting dibahas adalah mencari jawaban tentang perlu tidaknya dihidupkan kembali unsur budaya Jawa yang digambarkan pada saat itu telah hampir punah.

Buku laporan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan tahun 1918 telah diterbitkan dengan judul '*Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, Programma en Tekstboekje Prae-Adviezen*' oleh Stoomdrukkerij CA MISSET, Semarang, tahun 1918. Di samping di dalamnya dimuat agenda kongres, juga dimuat secara lengkap prasaran dari R. Ng. Wediodipoero (Dr. Radjiman), A. Muhlenfeld, R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo, Z. Stokvis, D. van Hinloopen Labberton, R.A. Notosoedirdjo geb. Karlinah, J. Rottier, Dr. Satiman Wirijosandjojo, dan Tjipto Mangoenkoesoemo.

Dari sembilan nama-nama pemrasaran di atas, 5 orang berkebangsaan Jawa dan 4 orang Belanda. Empat dari pemakalah yang berkebangsaan Jawa itu, dua orang sangat mendukung nasionalisme Jawa (Soetatmo dan Satiman dari Komite Nasionalisme Jawa) dan 2 orang mendukung faham nasionalisme Jawa (Dr. Radjiman dan A. Muhlenfeld). Sedangkan dua orang pemrasaran lagi berpandangan lain, bertolak dari pandangan mereka masing-masing. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo mengemukakan pandangan yang sangat kritis terhadap faham nasionalisme Jawa sedangkan Z. Stokvis, ke arah faham nasionalisme Hindia Belanda dan pencerahan moral.³⁶

Dalam kongres tersebut para pemrasaran (*prae-advies*) menyampaikan pendirian yang harus dipertahankan atau dalil (*stelling*)³⁷ dan kesimpulan. Beberapa dalil dan kesimpulan yang dilontarkan oleh para pemrasaran antara lain disampaikan Dr. Satiman Wirijosandjojo yang intinya adalah sebagai berikut:

³⁶ Soebaryo Mangoenwidodo, *Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa (1879-1952)*: 1994, hal. 63.

³⁷ Istilah '*dalil*' sebagai terjemahan kata '*stelling*' digunakan pada Kongres Kebudayaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka, dan juga sesudah Indonesia merdeka (tahun 1948, 1951 dan 1954)

1. Usaha pengembangan kebudayaan Jawa yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketinggalan dilakukan dengan menyerap ilmu pengetahuan Barat dan melakukan upaya melalui cara-cara Barat adalah untuk mencapai kedaulatan dan kemerdekaan dalam waktu dekat.
2. Cara-cara Timur yang digunakan di sini dan di seluruh Asia tidak dapat mengimbangi cara-cara Barat dan tidak memungkinkan tercapainya tujuan. Cara-cara Barat telah berkembang ke arah bentuk yang sempurna sedangkan dari Timur dalam kondisi statis, bahkan cenderung mengalami kemunduran karena tidak dirawat.
3. Proses perkembangan ke arah Barat dapat terjadi karena adanya gerakan hati (*inisiatief*) dan desakan dari dalam, sehingga terjadi kesesuaian dengan perubahan yang terjadi di alam sekeliling kita.
4. Perjuangan untuk kebebasan tanpa pertumpahan darah hanya dapat dicapai melalui '*peperangan*' antara kemampuan intelektual melawan intelektual, dan kemampuan intelektual kita harus dibuat sama dengan intelektual Eropa.
5. Pendidikan harus diatur sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan Barat dapat diserap oleh peserta didik. Di samping penguasaan bahasa asing (Belanda) bahasa Ibu wajib diajarkan di semua lembaga pendidikan.
6. Pertemuan peradaban Barat dan Timur harus saling mengisi bagi keduanya.³⁸

Sementara itu R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo dalam prasarannya menekankan pada masalah perlunya upaya pembimbingan dalam mengembangkan kebudayaan (Jawa) menuju ke arah jalan yang pernah dilalui oleh para leluhur yang memang diakui memiliki sikap budaya yang terbuka bagi kita masa kini. Selanjutnya beliau menyampaikan dalil-dalilnya pada intinya sebagai berikut:

1. Pendidikan yang didirikan menurut dasar Barat perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi bangsa dan negeri kita. Jangan dilupakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan intelek – daya pikir – akal budi manusia Jawa.
2. Perlu dikembangkan ilmu pengetahuan teknik guna memajukan industri dan pertanian sendiri, juga ilmu kedokteran yang paling utama untuk diajarkan.

³⁸ *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, hal. 12

3. Sebelum kebudayaan yang lain, kebudayaan sendiri harus menjadi dasar pendidikan bangsa kita. Mungkin cara yang mudah untuk mencapai tujuan itu adalah menggunakan media wayang.
4. Perlu mempertahankan keberadaan kebudayaan kita dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan kita.³⁹

Bagian pertama yang harus dilakukan dalam mendidik bangsa adalah menyadarkan mereka tentang keberadaannya dengan memberikan pengetahuan sejarah dan pengetahuan kebudayaan sendiri. Sebagai orang Jawa sejati ia memandang wayang sebagai salah satu media pendidikan yang amat baik, karena di dalam cerita wayang penuh dengan ajaran moral, etika, estetika dan ilmu pengetahuan lahir dan batin. Bagian lain yang menarik adalah pandangan tentang pentingnya memajukan kebudayaan dengan cara memberikan jiwa baru atau nilai-nilai baru yang berarti menghendaki adanya perubahan dalam kebudayaan.

Sementara itu Wediodiningrat yang lebih dikenal dengan sebutan Dr. Radjiman menyampaikan pendapatnya tentang kebudayaan Jawa seperti dikutip oleh George D. Larson sebagai berikut:

*'Pada waktu sekarang tidaklah hanya diinginkan, melainkan diperlukan bahwa bangsa Jawa bereaksi positif lagi terhadap rangsangan dari luar, kali ini datang dari Barat untuk menemukan kembali semangat dan kesadaran akan tujuan murni yang lebih menjiwai kebudayaan Jawa di masa lampau. Sekali masyarakat Jawa menjadi muda kembali maka ia akan memberi sumbangannya yang unik bagi peradaban dunia, sumbangan yang sesuai dengan bakat leluhur yang bertahan terus, tempat masing-masing orang merasakan harmoni dan kegunaan bagi dirinya, serta bagi kesenian dan kepercayaan yang terjalin dengan sangat eratnyanya dan yang berada di tengah-tengah kegiatan manusia.'*⁴⁰

Selanjutnya Dr. Radjiman mengatakan bahwa dalam hubungan antara mereka dengan kebudayaan lama dan dengan kebudayaan yang datang dari Barat, perlu tetap menjalin hubungan dengan yang lama, dan ia yakin bahwa tidak mungkin membaratkan orang Jawa. Antara lain ia menyatakan: *'Jika pribumi dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban.'*⁴¹

³⁹ *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, hal. 17-18

⁴⁰ Soebaryo Mangoenwidodo, *Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa (1879-1952)*: hal. 63-64

⁴¹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid I*: 2000, hal 235.

Dalam kongres Dr. Radjiman menggariskan tentang 7 buah dalil yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Kebudayaan Jawa Kuno berdasarkan sosiologi keagamaan.
2. Dasar ini ditemukan kembali dalam jiwa bangsa masyarakat Jawa meskipun banyak yang tidak menyadarinya.
3. Kebudayaan Jawa Kuno diperlukan untuk menjadi penggugah kesadaran masyarakat pribumi (*karaktervorming*).
4. Pengaruh baru mutlak diperlukan untuk berhubungan secara internasional guna menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin.
5. Pendidikan harus berlangsung serasi dalam bentuk penanaman nilai etika dan estetika dan yang bersifat mendidik, serta harus memperhatikan dasar adat istiadat bangsa.
6. Latihan dan penggunaan bahasa Jawa, seni budaya dan sejarah harus mendapat tempat yang besar dalam pendidikan.
7. Kesempatan mempelajari bahasa Belanda harus terbuka lebar untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang memungkinkan diterapkan dalam hubungan internasional.⁴²

Pemrasaran Z. Stokvis mengajukan 2 buah kesimpulan (*conclusies*): pertama, apabila orang Jawa mau membentuk suatu bangsa yang di bawah kekuasaan sendiri dan dihormati, maka harus melatih diri dalam hal pengetahuan dan teknologi yang dapat diperoleh dari Barat, yang dapat memberikan pada pengembangan kepribadian nasional dan sosial. Kedua, untuk mencapai tujuan itu diperlukan antara lain sistem pengajaran yang berhubungan sedekat mungkin dengan dasar kebudayaan dan lingkungan yang dikenal sejak lahir.

Sementara itu D van Hinloopen Labberton setelah menyajikan 10 dalil dalam prasarannya, menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Gegeven de tegenwoordige westersche beïnvloeding van Java is een op weterschen grondslag ingericht onderwijs voor de ontwikkeling van een zeker percentage van de Javanen noodzakelijk, waarbij al datgene in aanmerking komt om te worden onderwezen wat tot vermeestering van de westersche techniek zoowel theoretisch als praktisch, noodig is.*

⁴² *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, hal. 12-13

2. *Naast dit Westersch onderwijs dat aangevuld moet worden door bestuurdeering en vernieuwing van eigen taal en traditie, dient aan de cene kant onderwijs in het Javaansch (lezen en schrijven met Javansche karakters) aan alle Javanen te worden gebracht, en aan de andere zijde hooger onderwijs in Javanen en Kawi te worden verzorgd. Doorde veralgemeening van de leesen schrijfkunst onder Javanen, en daarnaast de critisch wetenschappelijke berstuudering van de Javaansche taal en letteren in een daarvoor te scheppen centrum, zal het behoud van de Javaansche taal en het opboeien tot nieuwe glorie verzekerd zijn.*
3. *De z.g. Volksschool dienst te worden vervangen door rondreizende Goeroe-djâwâ's die tot taak hebben de disakinderen het Adji Sâkâ-alfabet (tjatjarakan) te leeren, gevolgd door verspreiding van echt Javaansche lectuur.⁴³*

Sedangkan pemrasaran A. Muhlenfeld pada bagian akhir dari prasarannya menyampaikan 18 butir dalil yang amat jelas dan lugas tentang pembangunan rasa kebangsaan melalui pendidikan yang materinya disebutkan antara lain berupa pendidikan sejarah, pendidikan bahasa terutama untuk penguasaan bahasa asing, penguasaan ilmu pengetahuan Barat dan lain-lain. Terjemahan tentang dalil-dalil tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut:

1. Dipandang dari sudut politik Hindia Belanda di negeri ini, sebagian pemimpin gerakan Jawa makin menyadari bahaya gerakan Hindia Belanda terhadap pertumbuhan yang sehat terhadap bangsa Jawa dan harus diadakan upaya pertahanan.
2. Pembangunan kembali bangsa Jawa hanya mungkin berhasil apabila dilandasi oleh dasar (*fondamen*) kebudayaan sendiri yang telah berabad-abad diabaikan.
3. Untuk membangkitkan kesadaran terhadap kebudayaan sendiri itu ke seluruh wilayah, maka pengajaran dan pengkajian sejarah bangsa merupakan sarana yang terbaik, terkuat dan terpenting. Untuk sebuah '*natie*' atau bangsa, juga untuk perorangan atau individu, tuntutan pertama adalah mengenal dirinya sendiri sehingga mereka memiliki perangai, watak (*karakter*), dan mendapatkan kembali rasa percaya diri kembali setelah kehilangan selama berabad-abad.
4. Harus dijaga benar agar pengajaran dalam bahasa sendiri (Jawa) tidak terdesak oleh pengajaran bahasa Belanda dan Melayu.

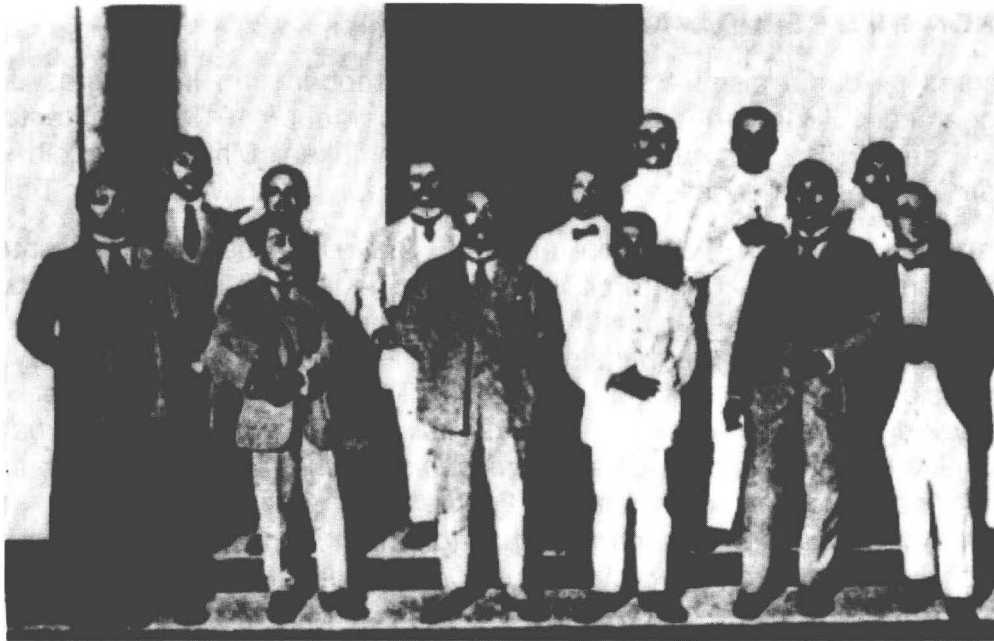
⁴³ *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, hal. 7-8

5. Bahasa Belanda tidak boleh dijadikan satu-satunya pintu gerbang memasuki pengetahuan Barat. Usaha sadar dari orang Jawa yang nasionalis wajib diarahkan bahwa bahasa Jawa secepat mungkin dapat menjadi bahasa pengantar bagi jenis pengajaran apapun. Untuk itu perlu dibentuk lembaga yang diurus oleh orang Jawa yang berpendidikan Barat, menterjemahkan buku-buku pelajaran, kajian Eropa ke dalam bahasa Jawa.
6. Tentang posisi bahasa Belanda yang untuk sementara masih sangat berarti, bahasa Melayu sebagai bahasa negeri daerah Melayu dapat menjadi bahasa pengantar antarsuku bangsa. Lebih baik menguasai sebuah bahasa dunia seperti bahasa Inggris untuk masa kemudian dan untuk daerah-daerah yang memang telah menggunakan bahasa Melayu bahasa Belanda tidak diajarkan terlalu banyak.
7. Perlu memberikan perhatian besar pada pengajaran sejarah dan bahasa Jawa, namun pelajaran jangan terlalu menyimpang dari cara yang dianut oleh Negara-negara beradab lainnya.
8. Dalam mengajarkan sejarah Jawa, pelajaran sejarah kebudayaan harus berperan penting supaya para pelajar menyadari betapa besarnya arti peradaban kuno sendiri dan kemampuan nenek moyang.
9. Perlu juga diajarkan sejarah abad-abad yang baru berlalu agar keturunan kita yang sedang tumbuh menyadari betapa buruk akibat yang menyedihkan bagi bangsa yang berselisih dan bercerai-berai.
10. Bahwa pada zaman yang akan datang daerah Jawa dan juga pulau-pulau lain di Nusantara akan mendapatkan kedaulatan penuh. Hanya atas dasar kesatuan nasional bangsa Jawa akan mampu mempertahankan kedaulatan itu, dan untuk hal ini harus ditanamkan melalui pendidikan.
11. Pengajaran harus merupakan pendidikan yang mutlak diperlukan untuk menjadikan warga dunia (*worldcitizenship*). Untuk ini diperlukan metode yang sama dengan yang digunakan di Negara Barat yang demokratis, dengan pengertian bahwa perhatian pada perkembangan fisik tidak dikurang seperti yang ada di koloni-koloni Inggris dan Amerika.
12. Pengajaran teknik (pertukangan) dan pertanian, sangat diperlukan oleh tanah Jawa yang masih banyak bagian yang harus diperbaiki, dan hal ini belum diberikan di sekolah rendah untuk memeberikan pengetahuan dasar dengan catatan tanpa merugikan pada jumlah pelajaran yang demikian banyak. Sekolah-sekolah lanjutan, kursus-kursus malam dan sebagainya diselenggarakan untuk mengisi kekurangan.

13. Dengan pertimbangan masih banyaknya kekurangan pengetahuan teknis pada tiap-tiap bidang, maka perlu diperluas secepat mungkin pada sekolah-sekolah kejuruan tingkat menengah dan tingkat tinggi, termasuk masalah perdagangan.
14. Pada lembaga-lembaga pendidikan seperti tersebut di atas harus diperlakukan sama dengan pendidikan dasar, yaitu harus diberikan perhatian pada pelajaran lanjutan tentang sejarah dan bahasa negeri di samping tentang ekonomi, karena pengetahuan ekonomi orang Jawa masih terbatas.
15. Kebudayaan Jawa sekarang, kecuali yang bentuk pertunjukan musik, merupakan perwujudan kebudayaan yang semakin melemah bila dibandingkan dengan abad-abad pertengahan. Tingkat peradaban sejak 1500-an mulai menurun dan bila dihubungkan dengan kondisi sekarang, dan hanya dengan menggunakan media wayang dapat diajarkan nilai-nilai peradaban yang dulu.
16. Agama, dalam bentuk apapun di sekolah-sekolah umum kurang tepat walaupun tidak dapat dihindari bahwa dengan mengenal karya-karya sastra Jawa Kuno dan juga penulis-penulis abad kini pada banyak orang menggugah kembali perhatian pada aturan-aturan lama.
17. Tidak menjadi keharusan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Jawa Kuno yang mulai punah, dan dengan cara lain yaitu melalui pelajaran umum dalam sejarah dan memberikan lebih banyak perhatian pada pendidikan dalam bahasa sendiri.
18. Akhirnya harus dijaga tentang pengajaran dalam bahasa negeri dan sejarah, pada tingkatan yang lebih tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Bahwa untuk pendidikan tingkat tinggi perlu diadakan sekolah tinggi untuk studi pengetahuan sastra Timur di Solo dan Yogya, di mana sehari-hari memang diajarkan tentang bahasa dan sastra, sejarah dan seni budaya bangsa Jawa dan merupakan tempat jiwa bangsa Jawa menimba kekuatan hidup lebih banyak.⁴⁴

Dari 18 butir dalil A. Muhlenfeld di atas, bagian yang menarik bila dikaitkan dengan upaya membangun kesadaran berbangsa adalah pada butir nomor 3, yang menyatakan tentang betapa pentingnya kita memiliki rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa. Rasa percaya diri itu hilang karena sengaja ditindas oleh pihak penjajah agar tidak ada keberanian untuk bebas.

⁴⁴ *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*: 1918, hal. 32 - 35



Para anggota Panitia Kongres Guna Men bahas Pengembangan Kebudayaan Jawa - Comité van de Javaansche Cultuur Ontwikkeling (Repro G. D. Larsen)⁴⁵

Dari sekian banyak pandangan para pemrasaran seperti dikutip di atas, membuktikan bahwa KK Jawa yang diselenggarakan pada tahun 1918 itu memiliki arti yang amat penting dan strategis bagi penanaman kesadaran berbangsa di samping bagi perkembangan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu kongres ini menjadi awal kebangkitan kesadaran budaya bangsa yang amat bersejarah.

Selain kongres membahas masalah-masalah di atas, pada penutupan disampaikan sebuah rekomendasi tentang **perlunya didirikan sebuah lembaga penelitian kebudayaan**. Kehadiran lembaga penelitian ini dipandang sangat penting dalam rangka menyelamatkan kekayaan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan Jawa khususnya. Pada akhir sidang usulan tersebut mendapatkan persetujuan peserta secara bulat, dan menjadi sebuah rekomendasi kongres yang amat penting artinya bagi perkembangan kebudayaan di Jawa, Sunda, Madura, dan Bali serta bagi kebudayaan di Indonesia.

⁴⁵ Soebaryo Mangoenwidodo, *Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa (1879-1952)*: 1994, hal. 227

2. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1919 (II)

Kongres ini dapat disebut sebagai Kongres Kebudayaan II. Kongres diselenggarakan di Surakarta pada bulan Desember tahun 1919. Data tentang KK II tahun 1919 secara lengkap belum ditemukan. Materi yang dibahas dalam kongres mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa, Madura dan Bali.

Salah satu pandangan disampaikan oleh Dr. FDK. Bosch adalah tentang persoalan sampai di mana peninggalan-peninggalan purbakala itu dapat berfungsi kembali sebagai unsur yang hidup dalam alam pikiran bumiputra waktu itu. Peninggalan purbakala itu harus dicari nilainya bagi kebudayaan Indonesia yang akan datang. Dasar pemikiran ini menjadi sumber dari adanya dua macam usaha: (1) *penyelidikan yang mendalam terhadap peranan unsur-unsur Indonesia dalam pembangunan monument-monumen yang begitu megah dan indah*; (2) *mengembalikan kemegahan serta keindahan bangunan-bangunan yang telah runtuh itu dengan jalan membina kembali setelah rekonstruksinya di atas kertas dapat dipertanggungjawabkan.*⁴⁶

Sebelum kongres tahun 1919 diselenggarakan, kaum terpelajar berkumpul di Yogyakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati pada acara penutupan Kongres Kebudayaan I (1918), yaitu tentang pembentukan sebuah lembaga penelitian kebudayaan. Hasil dari pertemuan itu pada tanggal 4 Agustus 1919 didirikanlah lembaga penelitian yang diberi nama **JAVA-INSTITUUT**, berkantor di Surakarta. Lembaga ini dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan surat keputusan No. 75 pada tanggal 17 Desember 1919. Yang menarik dari status lembaga ini, sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar disebutkan bahwa masa hidup Java-Instituut dibatasi, hanya untuk waktu selama 29 tahun dihitung mulai tanggal 4 Agustus 1919. Tepat pada tanggal 4 Agustus 1948 Java-Instituut harus menyatakan diri bubar demi hukum.

Kongres ini merupakan langkah pertama dari Java-Instituut setelah tanggal 4 Agustus 1919, melakukan persiapan dan pelaksanaan kongres. Berkenaan dengan peran Java-Instituut yang dominan dalam menyiapkan dan melaksanakan kongres, maka sejak saat itu dan kongres-kongres selanjutnya, namanya berganti menjadi '**CONGRES VAN HET JAVA-INSTITUUT**' atau '**Kongres dari Java Instituut**'. Meskipun namanya berubah, tetapi tujuan dasar dari kongres masih tetap sama dengan ketika pertama diselenggarakan yakni mengembangkan kebudayaan (*Cultuur Onwikkeling*), dan sasarannya tidak hanya terbatas pada kebudayaan Jawa saja.

⁴⁶ 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, hal. 3.

Gambaran tentang status, tugas, fungsi dan susunan organisasi lembaga penelitian kebudayaan itu, tercantum dalam Anggaran Dasar Java-Instituut yang mendapatkan persetujuan No. 75 tahun 1919. Bunyi Pasal demi pasal Anggaran Dasar tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Perhimpunan itu bernama Java-Instituut, berkedudukan di Surakarta.

Pasal 2

Perhimpunan ini didirikan untuk masa waktu 29 tahun dimulai pada tanggal 4 Agustus 1919.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perhimpunan ini ialah untuk mengembangkan kebudayaan pribumi dalam arti yang seluas-luasnya dari Jawa, Madura dan Bali.

Pasal 4

Perhimpunan ini berusaha mencapai tujuan:

- a. tujuan mengumpulkan data selengkap mungkin tentang bentuk dan karya kebudayaan Jawa, baik dari sekarang maupun yang telah berkembang dari waktu ke waktu.
- b. memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis) dan karang-mengarang.
- c. membantu tiap usaha yang mengarah pada kegiatan seperti yang dilakukan oleh perkumpulan Java-Instituut.
- d. mengupayakan ikhtiar lain yang sah yang bermanfaat bagi Java-Instituut dan dapat membantu dalam mencapai tujuan.

Pasal 5

Perhimpunan terdiri atas anggota-anggota biasa, anggota kehormatan, anggota dengan surat-menyurat dan sebagai penyumbang. Perkumpulan-perkumpulan, Badan-badan bersifat apapun dapat masuk sebagai anggota atau penyumbang atau simpatisan.

Pasal 6

Keanggotaan biasa dan anggota penyumbang atau simpatisan dapat diminta dengan mendaftar pada pengurus. Anggota melalui surat-menyurat diangkat oleh Pengurus. Kepada orang-orang yang berjasa dalam hal menggerakkan Perhimpunan ini dapat dijadikan Anggota Kehormatan, diputuskan dalam rapat umum.

Pasal 7

Pengurus terdiri atas paling sedikit lima anggota, dipilih dalam Rapat Umum dari anggota-anggota biasa dan anggota-anggota kehormatan. Ketua dipilih secara itu. Ditambah lagi Perkumpulan-perkumpulan dan Badan sebagai anggota atau penyumbang diberi kuasa untuk menunjuk wakilnya paling banyak 2 orang untuk duduk dalam pengurus setelah dipilih melalui Rapat Umum. Keputusan dapat diambil apabila disetujui $\frac{3}{4}$ suara yang diambil. Mereka yang ditunjuk oleh Perkumpulan atau Badan sebagai wakil untuk duduk dalam pengurus Perhimpunan Java-Instituut akan menjadi anggota sejak mulai menjabat. Jumlah anggota yang dipilih Rapat Umum sebagai anggota pengurus selalu harus paling sedikit seorang dari sejumlah wakil yang duduk dalam pengurus. Kewajiban-kewajiban pengurus oleh Pengurus dibagi antara kepada seluruh anggota. Untuk pimpinan sehari-hari dipilih oleh Pengurus di antara mereka, terdiri paling sedikit tiga orang, di antaranya Ketuanya.

Pasal 8

Pengurus mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar hukum dan berwewenang bertindak atas namanya. Atas nama Pengurus, Ketua dan Penulis.

Pasal 9

Organisasi dan tata kerja Perhimpunan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Anggaran Dasar. Peraturan ditetapkan pada rapat umum dengan suara terbanyak. Suara berhenti, nasib ditentukan.

Pasal 10

Tidak dapat diadakan perubahan dalam Anggaran Dasar dan tidak dapat diadakan pembubaran Perhimpunan untuk sementara kecuali atas keputusan Rapat Umum, atas usul Pengurus dengan sedikit-dikitnya dihadiri $\frac{1}{4}$ dari anggota dan diambil sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ dari suara rapat. Keputusan pembubaran hanya berlaku apabila mayoritas mutlak anggota menyetujui.

Pasal 11

Dalam hal pembubaran Perhimpunan dikuatkan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan milik Perhimpunan dalam suatu Rapat Umum.⁴⁷

Untuk operasionalisasi lembaga Java-Instituut, anggaran belanja didapatkan dari subsidi Pemerintah Batavia dan keempat kerajaan, yaitu: Kasunanan

⁴⁷ *Majalah 'DJAWA'*, tahun 1921, hal. 65-66

Surakarta dan Mangkunegaran di Surakarta, serta Kasultanan dan Puro Pakualaman di Yogyakarta. Di samping itu juga dari pendapatan lain, berupa: iuran anggota, uang langganan majalah dan tiket masuk museum Sonobudoyo. Sesekali mendapat pemasukan dari undian dan subsidi dari perusahaan besar dan beberapa pemerintah kotapraja.

Sebagai pendiri adalah PAAP. Prangwadono (yang kelak menjadi Mangkunegoro VII), Dr. R. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. FDK. Bosch. Dewan Pengurus pertama terdiri atas R. Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua, S. Koperberg sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan beberapa anggota, antara lain Dr. FDK. Bosch, R. Ng. Poerbatjaraka, Ir. Th. Karsten, serta beberapa wakil dari perkumpulan lain, seperti Boedi Oetomo dan Sentral Sarekat Islam.

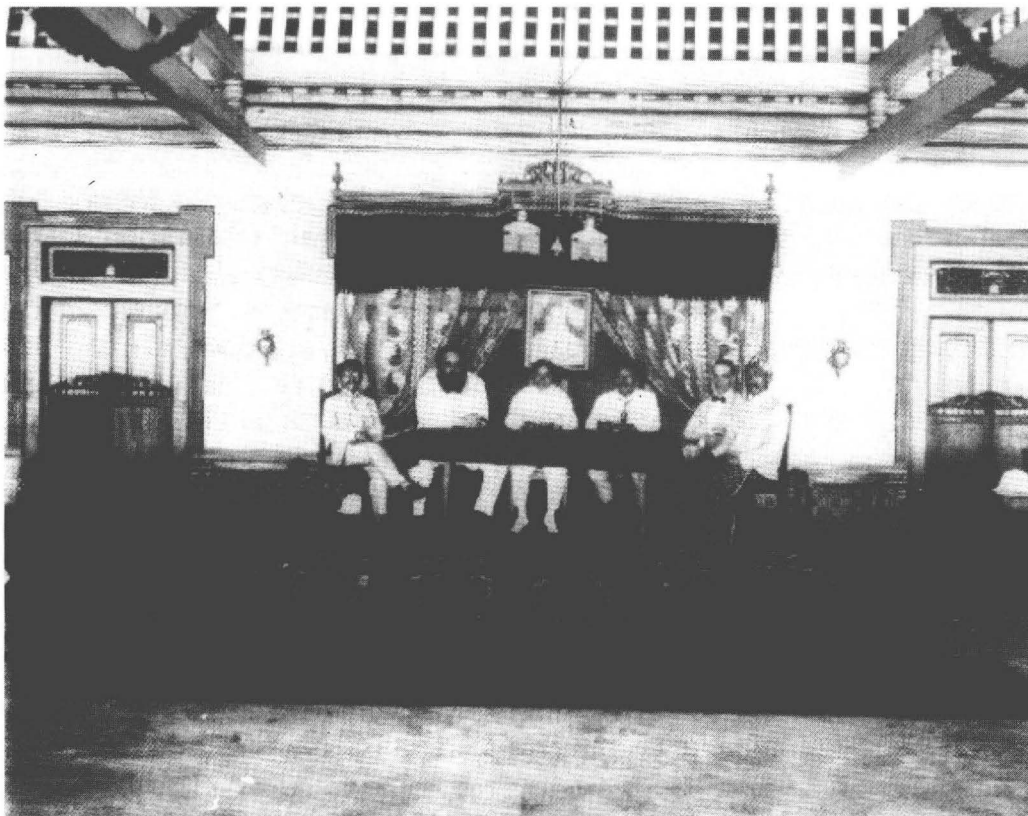
Dalam perjalanan hingga menyatakan diri bubar tanggal 4 Agustus 1948, Java-Instituut telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi sejarah dan perkembangan kebudayaan di Indonesia. Di samping melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, pencatatan dan perekaman, Java-Instituut banyak melakukan kegiatan yang amat berguna bagi pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Kegiatan itu antara lain berupa penelitian, penyelenggaraan kongres, pameran, ceramah, sayembara, pertunjukan tari, wayang (wayang wong dan wayang kulit), pendirian lembaga pendidikan kerajinan, penerbitan majalah dan buku. Di samping menyelenggarakan pameran bersamaan dengan penyelenggaraan kongres juga kegiatan khusus, seperti pameran kerajinan tangan di Cirebon (1937), kerajinan tangan dari Jawa, Madura, Bali dan Lombok bersamaan dengan sekaten (1939). Di samping itu juga menyelenggarakan berbagai macam sayembara: sistem pencatatan musik Jawa dan buku pegangan dan pelajaran sejarah (1921), tatakrama Jawa, Sunda, Madura (1928), terjemahan Serat Wedotomo (1935), penulisan roman Jawa, Sunda dan Madura (1937).

Java-Instituut merintis berdirinya museum Sonobudoyo yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, 6 November 1935, yang sekaligus menjadi Pelindung Museum. Beliau juga menghibahkan sebidang tanah di sebelah Alun-alun Lor (Utara) untuk Museum. Dewan pengurus harian terdiri atas: PH. Hadinegoro sebagai Ketua, JL. Moens sebagai Wakil Ketua, dan S. Koperberg sebagai Sekretaris merangkap Bendahara. Bentuk arsitektur bangunan museum dirancang menurut gaya bangunan Jawa oleh seorang arsitek terkenal bernama Ir. Thomas Karsten dari Semarang.

Pada tahun 1939-1940 bangunan diperluas lagi yaitu dibangun sebuah pendopo di bagian Timur, dan sebuah sekolah kerajinan di bagian belakang museum. Tujuan utama didirikannya museum ini adalah untuk memberikan

gambaran tentang perkembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Oleh karena itu museum ini sangat berjasa dalam menyelamatkan berbagai macam benda koleksi peninggalan sejarah dan budaya dari wilayah tersebut. Koleksi yang dikumpulkan antara lain berupa wayang, keris, alat musik, pakaian adat, topeng, berbagai macam ukiran, barang-barang seni kerajinan, patung, arca, dan berbagai macam buku yang dihimpun sebagai bukti sejarah perkembangan kebudayaan di pulau Jawa dan Bali.

Di samping itu Java-Instituut juga sangat memperhatikan masalah pendidikan kesenian. Pada tahun 1939 mendirikan Sekolah Kerajinan Tangan (*Kunst Ambachtsschool*), dengan bantuan dana dari Batavia dan Den Haag. Persemiannya dilaksanakan pada 1 Maret 1941. Bertindak sebagai Pelindung adalah KGPA. Praboe Soeradilaga, yang juga menjabat sebagai Pengurus Java-Instituut. Gedung sekolah dan sebuah asrama berlokasi di belakang Museum Sonobudoyo.



dang pandai emas, perak dan ukiran kayu. Melalui pendidikan ini anak-anak

dididik untuk menguasai secara teknik dan artistik. Kelak salah satu di antara pengajarnya, yakni MJ. Katamsi merintis berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, yang kini berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Java-Instituut juga telah berjasa dalam mengembangkan majalah di Indonesia antara lain menerbitkan majalah Djawa, Poesaka Djawi, Poesaka Soenda dan Poesaka Madhoera.

3. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1921 (III)

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1921 merupakan kongres III. Topik yang dibahas dalam kongres di Bandung adalah mengenai pendidikan musik dan sejarah, khususnya untuk pada siswa-siswa bumiputra. Sesuai keputusan Panitia kongres menentukan topik dan pemrasaran sebagai berikut.

1. Tentang perlunya pelajaran sejarah, pemrasaran adalah:

- R. Darna Koesoema
- MW. Dwidjosewojo
- Nyonyah W. Mees-Mees
- R. Hassan Sumadipradja
- RM. Soetatmo Soeriokoesoemo
- Z. Stokvis

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain:

- a. Andaikan mungkin dan diinginkan untuk melakukan penyebaran pengetahuan sejarah Jawa demi perkembangan suku Jawa, bagaimana maksud ini dapat diupayakan, baik secara umum maupun khusus dalam pendidikan?
- b. Dengan nama apa dalam pendidikan pengetahuan ini disampaikan dan diatur menurut cara dan isinya?
- c. Tentang kategori-kategori mana lembaga pendidikan harus membenarkan pelajaran ini?
- d. Dengan cara apa penelitian sejarah Jawa dapat dimajukan dan peraturan mana yang diperlukan baik untuk tercapainya hasil-hasil pengetahuan maupun terhadap perluasan ilmu yang sudah didapat?

2. Topik tentang kecenderungan perkembangan musik Jawa, yang ditunjuk sebagai pemrasaran adalah:

- IS. Brandes
- RT. Djojodipoero
- Nyonyah S. Holland (Linde Bandara)
- J. Kats

- RMA. Soerjo-Poetro
- RM. Wreksodiningrat

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain:

- a. Apakah pendapat Anda tentang keadaan seni nada masa kini di Jawa, dibandingkan dengan yang dahulu. Oleh sebab-sebab yang mana keadaan sekarang ini berkembang dari yang terdahulu?
- b. Apa yang dapat diharapkan dari seni nada ini dalam waktu yang akan datang dan arah perkembangannya harus dilakukan menurut pendapat Anda?
- c. Apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan menjamin perkembangan seni nada ini?
- d. Adakah peraturan khusus demi kepentingan seni nada di Jawa, dari pemerintah atau atasan Lembaga Jawa atau badan-badan umum lainnya, dan aturan manakah itu?

Susunan Panitia Kongres adalah sebagai berikut:

1. Panitia Penerimaan

- a. Ketua Kehormatan: AJH. Eyken (Residen Priangan)
- b. Ketua:
 - SA. Reitsma (Walikota Bandung)
 - RT. Wira Nata Koesoema (Bupati Bandung)
 - Ir. MH. Damna (Kepala Perwakilan NV Pabrik Minjak Insulinde)

c. Panitia Perayaan:

- Raden Ayoe Wira Nata Koesoema
- KPA. Hadiwidjojo
- KPA. Soeriodiningrat
- Ir. HJ. Kriewet de Jonge

2. Panitia Kongres, berasal dari pengurus Java-Instituut.

Dalam Majalah Sri Poestaka Tahun III, dimuat berita tentang Kongres Kebudayaan III di Bandung. Di dalamnya antara lain ditulis tentang perhatian masyarakat terhadap kongres itu.

Pada tanggal 17,18, dan 19 Juni 1921 telah diadakan kongres Java-Instituut yang pertama di kota Bandung, dikunjungi oleh beratus-ratus orang, ya beribu-ribu orang. Dalam kongres itu dibicarakan Sejarah dan Bunyi-bunyian Jawa. Tetapi lain dari pada membicarakan kedua perkara yang tersebut, kongres itu mempertunjukkan juga: Tari Banyuwangi, Ukir-ukiran, Tonil Sunda dan Wayang Wong. Maka inilah lebihnya kongres ini dari pada kongres yang telah diadakan di kota Solo. Dalam

*kongres ini orang tidak tinggal pada perkataan saja, melainkan cita-cita itu dibuktikan pula.*⁴⁸

Tanggapan tentang penyelenggaraan kongres di Bandung juga datang dari Ir. Karsten. Antara lain ia berkata: *'kongres ini patut disebut Cultuurcongres yang sebenarnya. Kongres ini lebih mendekati tempat yang ditujunya.*⁴⁹ Hal lain yang menarik dari Kongres Kebudayaan III tahun 1921 adalah sambutan Walikota Bandung SA. Reitsma sebagai tuan rumah, karena di sana disinggung tentang pengembangan kebudayaan nasional. Antara lain ia mengatakan demikian:

*'Java-Instituut sebagai perkumpulan muda, tetapi telah mampu mengadakan kongres di Bandung yang pertama, yang tujuannya adalah mengembangkan kebudayaan nasional yang dalam keadaan tertindas, akan dihidupkan kembali berkembang di daerah-daerah, seperti yang dikatakan oleh Soeriokoesoemo yang telah menyampaikan prasaran tentang pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional. Untuk ke depan harus dipilih garis-garis yang tetap kukuh, karena masa kini adalah akibat-akibat dari masa lalu, yang sebabnya dapat ditemukan kembali.*⁵⁰

Di samping itu ia berpendapat bahwa dalam mengembangkan kebudayaan tidak perlu cepat-cepat tetapi yang penting adalah harus kuat. Reitsma mengambil perumpamaan sebagai berikut: *'De regenboom wast snel, een storm en hij ligt geknakt. De djatiboom ontwikkelt zich langzaam, heel langzaam, maar hij trotseert het geweld van eeuwen.*⁵¹ Maksudnya, kalau perkembangan kebudayaan itu terlalu cepat diibaratkan seperti tumbuhnya *'regenboom'* atau pohon hujan (*regen* berarti hujan, dan *boom* berarti pohon atau dalam bahasa Jawa *'udan'* dan *'wit'*). Di Jawa pohon ini disebut Trembesi⁵² atau dalam bahasa Latin *'Pipturus Velutinus'*⁵³ atau *'Pipturus Nicanus'*.⁵⁴ Pohon itu akan cepat tumbuh, tetapi ketika datang badai, maka robohlah pohon ini. Sebaliknya, jika pohon Jati (*Djatiboom*), tumbuhnya sangat lambat, tetapi dapat bertahan lama, berabad-abad. Pohon Jati akan dapat bertahan kukuh di tempatnya apabila badai datang menerjangnya.

Sementara itu wakil Direktur Pendidikan dan Agama, Hardeman dalam sambutannya menyatakan simpati bahwa bangsa Timur telah berupaya men-

⁴⁸ Majalah Sri Poestaka, Balai Pustaka, Tahun III, 1921, hal.187

⁴⁹ Majalah Sri Poestaka, hal. 187

⁵⁰ Majalah 'DJAWA', tahun 1921, hal. 231

⁵¹ Majalah 'DJAWA' tahun 1921, hal. 232

⁵² Dr. TH. PIGEAUD, Nederlands-Javaans Handwoordenboek, NV. Groningen, Batavia, 1948, hal. 445.

⁵³ A. Teeuw, *Kamus Indonesia- Belanda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 824.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 1988, hal. 960.

dapatkan kemajuan lebih tinggi dari Barat, tanpa meninggalkan budaya sendiri. Yang baik dari budaya dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan evolusinya. Diharapkan akan terjadi asosiasi harmonis antara kebudayaan Jawa dan Belanda. *'Pemerintah (Hindia Belanda) tidak tinggal diam dan telah mendirikan Algemene Middelbare School (AMS). Sekarang giliran masyarakat Jawa untuk membawa pengembangan dan kejayaan organisasi muda ini'*, demikian katanya.⁵⁵

Di samping penyampaian prasaran diselenggarakan acara kesenian dengan pengantar J. Kunst antara lain permainan: Calung, Karinding, Doger, Reng-kong-Hatong, Gondang, Kecapi, orkes Tarawangsa, Celempung, Angklung, Renteng dan Degung. Sedangkan untuk acara musik yang diikuti dengan tarian adalah: Gandrung Banyuwangi, Bali-balian, Salatun, Giru Bali, Ayah Samirah, Gunung Sari, Angleng, Lebak-lebak, Rembe, Dril, Tetel-tetel, Ugo-ugo, Cap Gomeh dan Lia-liu. Beberapa di antara tarian di atas dewasa ini sudah tidak pernah ditampilkan lagi.

Sementara itu untuk pameran ukiran kayu diselenggarakan secara *'besar-besaran'*, lengkap dengan susunan Komisi sebagai berikut:

Ketua : PAJ. Moojen
 Sekretaris : S. Koperberg
 Anggota : PAAP. Prangwedono, G. Bagoes Djelantik, RM. AA. Koesoemo Oetojo dan JW. Teillers.

Selain itu dilengkapi dengan Komisi Wilayah:

- Jawa Barat: Bupati Bandung, Serang, Purwakarta, dan Cirebon.
- Jawa Timur: Asisten Residen dan Bupati Pasuruan, Bangkalan, Mojokerto, Rembang (masuk Jawa Timur?), dan Banyuwangi.
- Jawa Tengah: PAAP. Prangwedono, PAAP. Soeriodilogo, KPAA. Hadiwidjojo, PAA. Danoeredjo, RA. Djojonegoro, RM. AA. Koesoemo Oetojo, Bupati Jepara, Batang, Semarang, Ponorogo (masuk Jawa Tengah?) dan Pekalongan.
- Bali: I Gusti Bagoes Djelantik (Karangasem) dan Tjokorda-Raka (Ubud)
- Palembang: CJ. Batenburg.

Pameran diselenggarakan di sebelah kanan gedung kabupaten Bandung. Barang-barang yang dipamerkan dikirim dari seluruh tanah Jawa dan Madura, Bali dan Palembang. Tentang kesungguhan penyelenggaraan pameran ukiran digambarkan sebagai berikut:

⁵⁵ Majalah 'DJAWA' tahun 1921, hal. 233

'Orang-orang bangsawan Djawa, Madoera dan Bali dengan beberapa orang Eropah sebagai sehati mereka itoe roepanya akan memberi pertolongan boeat pertoenjoekan ini (maksudnya pam eran). Kandjeng Soesoehoenan Solo dan Kandjeng Soeltan Djokdjapoen mengirimkan perkakas jang indah-indah perboeatannja.

Diantara segala kiriman itoe jang teroetama, ialah Mimbar Mesdjid Paromosono di Solo. Asal mimbar ini dari istana Demak. Kata orang diperboeat kira-kira pada tahoen 1400. Oekiran mimbar ini boekan sadja bagoes roepanya, melainkan sangat dalam poela artinya. Kabongan (Pelaminan) Tengkoek Besar Istana Djokdja, dipertoenjoekkan djoega. Pelbagai benda kiriman dari Karangasem, menghiasi pertoenjoekari itoe. Sebuah bilik hanja diisi dengan kiriman KGP. Pakoe Alam saja. Kiriman dari Djepara sangat haloes oekirannya, lakoe sekali. Orang bereboet-reboet membelinja.⁵⁶

Sementara itu untuk pertunjukan kesenian yang disebut sebagai 'Tooneel (Komidi) Loetoeng Kasaroeng' digambarkan bahwa cerita rakyat Sunda itu jarang diketahui orang, karena dianggap sakral. Tentang kesakralan cerita itu digambarkan bahwa orang yang mengetahui tentang bunyi ceritanya, jarang yang berani menceritakan, sebab takut tertimpa 'daulat marhum' (maksudnya kena bala) Jangankan orang biasa, tukang pantun sekali pun jarang yang berani menceritakan lakon itu.

Komidi ini dibagi atas 18 bagian, dan tiap-tiap bagian dimainkan dengan diiringi musik yang sesuai dengan suasana cerita. Musik yang mengiringi adalah degung, renteng, angklung, tarawangsa dan celempung. Dalam berita tersebut juga dijelaskan tentang pakain (kostum) yang digunakan, yang disebutnya sebagai model 'pakaian Sunda purba,' menurut adat Badui.

Tempat pertunjukan bukan di gedung atau di pendopo seperti halnya Wayang Wong. Pentas darurat dibangun di halaman kabupaten sehingga pertunjukan itu disebutnya sebagai 'komidi halaman' (maksudnya teater taman). Penataan panggung dan tempat duduk penonton agar dapat melihat pertunjukan dengan enak dan jelas dilukiskan sebagai berikut:

'...tempat itoe bertingkat tiga, tingkat jang kedoea lebih tinggi dari pada tingkat jang pertama, dan jang ketiga (jang teringgi) sampai ke pagar batoe (kota) kaboepaten. Lebar moeka tooneel itoe 25 M dan lebar tingkat (kebelakang) 2-3 M sadja. Tanah sekeliling tempat permainan itoe, selainnja jang sebelah belakang, digali, semangkin djaoeh semangkin naik, sehingga mendjadi lereng jang landai. Lereng ini oentoek

⁵⁶ Majalah Sri Poestaka, Tahun II, 1921, hal. 187.

tempat penonton jang lebih soeka bersila. Pada sekeliling lereng ini diletakkan koersi berderet-deret, djadi setengah boelat bangoennja, dan sekeliling tempat ini ada beberapa batang pohon-pohonan. Tingkat jang ketiga, djadi jang tertinggi dan jang belakang sekali, pertengahannja dihiasi dengan kasang (tenoenan Soenda), dan disitoe didirikan seboeah singgasana. Sebelah depannja dikiri ada gambar hiasan hoetan, dikanan gambar hiasan goenoeng. Tempat permainan ini banjak lagi lagi jang perloe diperbaiki, tetapi oentoek permoelaan boleh diseboet telah amat baik' ⁵⁷

Sedangkan mengenai tata lampu sudah diatur seperti tata panggung 'modern' dengan menggunakan lampu listrik. Seperti yang ditulis dalam majalah Sri Poestaka, penerangan panggung diatur '*dengan lampoe lestri jang besar dan jang dapat dipoetar-poetar, disinari bagian tempat orang sedang bermain pada soeatoe waktoe, ja'ni singgasana hoetan ataoe goenoeng; maka pada waktoe itoe tempat itoe sadjalah jang diterangi benar-benar dan tempat-tempat jang lain dibiarkan gelap.*'⁵⁸

Lakon Lutung Kasarung itu baru pertama kali dipentaskan dan pemainnya pun bukan pemain yang profesional. Tetapi secara keseluruhan pertunjukan ini dinilai sangat berhasil. Bagaimana jalannya pertunjukkan itu digambarkan sebagai berikut:

'Akan permainan boleh dikatakan oentoeng benarlah telah dapat di-koempoelkan orang-orang jang soeka dan berani bermain, lagi bagoes poela permainannja. Hal ini teroetama djasa R. Kartabrata, Kdj. Regent Bandoeng, toean D.K. Ardiwinata dan M. Joedadibrata.

Adapoen hal permainan Loetoeng Kasaroeng itoe, oemoemnja bagoes, bagoes sekali, meskipoen baharoe sekali ini dipertoendjoekkan, dan lakonnja amat soekar akan dilakoekan dan jang bermain boekan toekang main.

Akan kesoetjian riwayat itoe njata benar-benar pada bahagian 13, pada waktoe hendak memotong padi. Pada bahagian itoe, tatkala beberapa orang dewa toeroen dari kajangan, membawa segala keperluan oentoek memotong padi, seorang-seorang berloetoet dan menjembah dengan tertib dan saksama; kesoetjian lakon itoe terasa meresap kedalam toelang soemsoem, menghentikan napas dan debar djan-toeng... .. (tak terbaca, karena sebagian dari halaman ini sobek)

⁵⁷ Majalah Sri Poestaka, tahun III, 1921, hal. 189.

⁵⁸ Majalah Sri Poestaka, tahun III, 1921, hal. 189.

*orang jang beriboe-riboe itoe diam tidak berkata, sehingga dikomidi halaman itoedan sepi sekali rasanja. Inilah bagian permainan Loetoeng Kasaroeng jang amat bagoes sekali.*⁵⁹

Pertunjukan ini dihadiri oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda lengkap dengan pengiringnya. Pertunjukan ini amat menarik perhatian masyarakat Bandung yang sedang haus hiburan, dan dirasakan meresap ke dalam tulang sumsum, menghentikan napas dan debar jantung dan membuat terdiam ribuan orang, juga disimpulkan dalam kalimat: *'Barang siapa jang melihat permainan itoe, sekaliannja mendapat belaka perasaan kehaloesan, dan didalam hatinya terbit keinginan akan mengenal diri. Sebab itoelah permainan Loetoeng Kasaroeng itoe besar sekali artinja bagi orang Soenda. Bersama-sama dengan roeat (ruw atan (Jawa), upaya menolak bala) gedung kaboepaten Bandoeng....'*

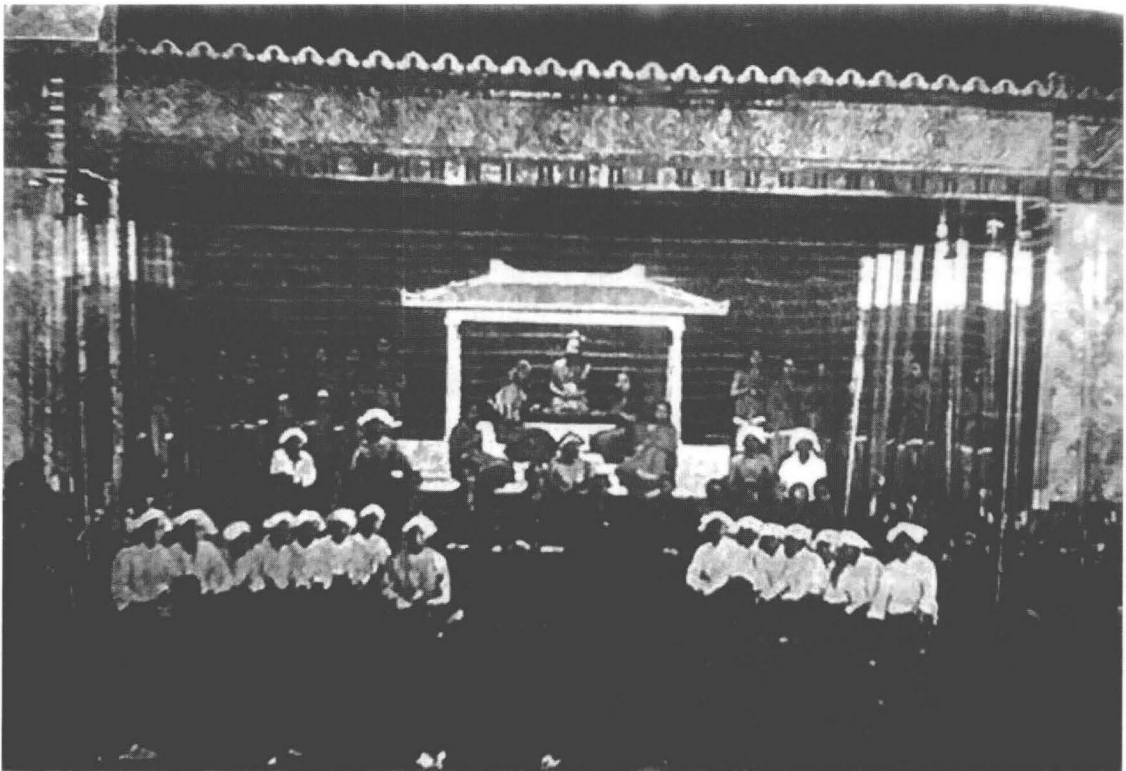


Foto panggung pertunjukan tonil Lutung Kasarung pada Kongres Kebudayaan tahun 1921, di Bandung. Di samping dipergelarkan tonil Lutung Kasarung juga dipertunjukkan Wayang Wong yang berupa 'pethilan' yaitu hanya adegan-adegan pilihan

⁵⁹ Majalah Sri Poestaka tahun III, 1921, hal. 189.

(*episode*) dari keseluruhan lakon yang saat itu dinilai terlalu panjang. Jadi hanya '*dipilih loekisan jang mendjadi bidjinya sadja.*' Oleh karena itu pertunjukan dengan model '*pethilan*' itu dinilai sebagai '*atoeran baru.*'

Sedangkan untuk tari disajikan tari dari Jawa yakni dari Yogyakarta dan Jawa Timur. Untuk tari gaya Yogyakarta yang ditampilkan adalah tarian menurut '*pengadjaran istana Djokja. Gerak badan jang haloes dan gemalai, diiringi boenji gamelan jang merdoe dan menjenangkan hati, meloekiskan kebagoesan jang lama telah tertjapai, terdiri bertjaja-tjaja, indah berseri menjedapkan penglihatan. Jang dipertoendjoekkan itoe, tari moerid-moerid Sekolah Menengah di Djokjakarta, dipimpin oleh Pangeran Soerjodiningrat.*'

4. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1924 (IV)

Tiga tahun kemudian setelah Kongres Kebudayaan III, pada bulan Desember tahun 1924 diselenggarakan Kongres Kebudayaan IV, di gedung Kepatihan Yogyakarta. Topik yang dibahas mengenai sejarah bangunan kuno di Jawa dan manfaatnya bagi kehidupan dan pengembangan kebudayaan Jawa masa itu maupun masa yang akan datang. Di samping itu juga dibahas mengenai cara bagaimana agar kebudayaan daerah mendapat perhatian lebih banyak dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka telah menempatkan posisi pendidikan bagi anak negeri dengan muatan sejarah dan nilai yang terkandung dalam bangunan-bangunan kuno tinggalan leluhur.

Kongres diselenggarakan di Kepatihan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Desember 1924. Acara secara lengkap disusun sebagai berikut:

Tanggal 24 Desember 1924:

- Sidang perkenalan para peserta di Kepatihan Yogyakarta.
- Sambutan selamat datang oleh Panitia Penerimaan, JH. van Mook.
- Pertunjukan Wayang Orang Langen Wanara di Kepatihan Yogyakarta dengan lakon Patih Prahasto, dipimpin oleh PAA. Danoeredjo. Pertunjukan ini telah menarik perhatian para peserta kongres. Susunan adegan adalah sebagai berikut:
 1. Adegan Rahwana di Ngalengko diiringi gending: Pucung, pelog barang.
 2. Adegan Rama di Suwelogiri diiringi gending: Pangkur, Pelog barang
 3. Adegan Rahwana di Ngalengka diiringi gending: Maskumambang, Pelog barang.

4. Adegan kedatangan Kumbakarna, diringi gending: Ricik-ricik, Slendro, patet manyura.
5. Ramawijaya di Suwelogiri diiringi gending: Rina-rina, Slendro patet manyura.

Tanggal 25 Desember 1924:

- Pembukaan Kongres oleh Prof. Dr. RA. Hoesein Djajadiningrat
- Penyajian prasaran yang berjudul: *'Dengan cara apa kebudayaan daerah dijadikan bahan ajar pendidikan anak negeri? (Op welke wijze kan bij de opvoeding van de Landkinderen de inheemsche cultuur meer tot haar recht komen?)'*, oleh WDP. Corporaal, Pastoor van Lith, M. Soeridiradja, dan R. Sasrasoeganda.
- Pembukaan pameran tentang seni bangunan Jawa di kediaman Patih Danoeredjan.
- Ceramah tentang *'Candi Prambaman' (De Prambanan Temple)* di Kapatihan (dengan gambar), oleh FDK. Bosch.
- Ceramah tentang *'Bangunan Jawa' (De waarde der letere Javaasche bouwkunt)*, diikuti dengan gambar di Kapatihan, oleh Ir. Thoman Karsten dan diskusi.

Tanggal 26 Desember 1924:

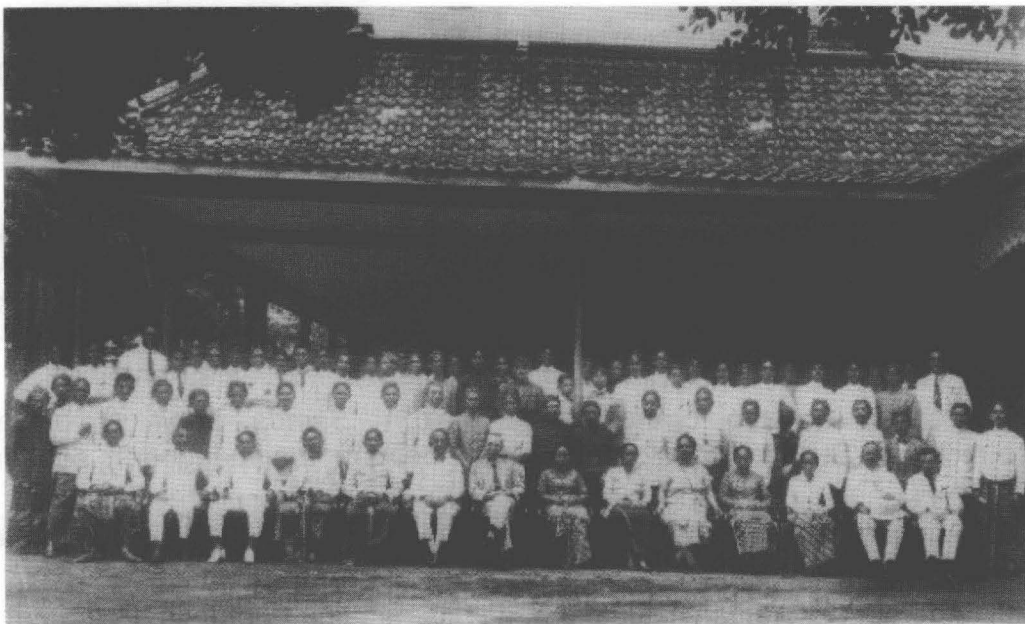
- Kunjungan (*excursie*) ke candi Prambanan dipandu oleh Lembaga Purbakala (*Oudheid-kundige Dienst*).
- Kunjungan ke Kota Gede dipimpin oleh Ir. Thoman Karsten dan Ir. H. Maclaine-Pont
- Penyajian prasaran: *'Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang? (Welke waarde hebben de oud-Javaansh monumenten voor de huidige en toekomstige Javaansche cultuur?)'*, disajikan di Kapatihan oleh Ir. KJH. Van Leeuwen, Dr. FDK. Bosch, Dr. Radjiman, Ir. Maclaine Pont.
- Pergelaran wayang orang dengan lakon *'Samba Sebit'* di bawah bimbingan Sultan Yogyakarta lengkap dengan uraian adegan sebagai berikut:
 1. Adegan di kerajaan Dwarawati diiringi gending Mulatsih, Pelog patet barang.
 2. Adegan di kerajaan Trajutrisno, diiringi gending Luntursih, Pelog patet barang.
 3. Adegan di Pesanggrahan di hutan Ngargabaya, diiringi gending Rina-rina, Slendro patet manyura.

4. Raja Suteja dengan pasukannya diiringi gending Klumpuk patet manyura.

Tanggal 27 Desember 1924:

- Perumusan hasil diskusi tentang '*Dengan cara apa kebudayaan daerah dijadikan bahan ajar pendidikan anak negeri?*'
- Perumusan hasil diskusi tentang '*Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang?*'
- Penutupan, dipergelarkan tari Bedoyo dan Fragmen lakon Mintaraga (Arjuna Wiwaha), serta pergelaran Wayang Purwa di Ndalem Pakoel-alaman.

Dalam kongres ini Dr. FDK. Bosch secara khusus membahas, soal arti peninggalan sejarah dan purbakala bagi bangsa dan kebudayaan Indonesia saat itu maupun yang akan datang. Antara lain ia mengemukakan pendapatnya bahwa arti yang penting sekali dari bangunan-bangunan kuno itu terkandung dalam tenaga dorongnya yang luar biasa untuk meluhurkan dan memberi inspirasi kepada perkembangan kesadaran serta alam pikiran Indonesia.



Para peserta Kongres Kebudayaan di Klaten Yogyakarta, tahun 1924
(Bawa Institut Dalam Foto:2001)

Ditegaskan pula betapa kelirunya orang yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia sekarang sudah terputus hubungannya dari masa silamnya, justru

oleh karena bangsa Indonesia sendirilah yang memegang peranan utama dalam pembangunan candi-candi, maka tidak adalah jurang yang secara mutlak memisahkan masa sekarang dari masa silam. Maka berhubung dengan hal-hal ini Bosch mengemukakan pula betapa pentingnya pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan purbakala itu diajarkan kepada anak-anak sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah-sekolah menengah. Pandangan yang disampaikan Bosch itu telah menjadi perintis ke arah perkembangan baru dari ilmu purbakala Indonesia.⁶⁰

Sementara itu Ir. A. van Leeuwen dengan prasaran berjudul 'Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang?' (*Welke beteekenis hebben de oud-Javaansche monumenten voor de huidige en toekomstige Javaansche Cultuur*). 'Sebagai jawaban dari pertanyaan itu diuraikan tentang peran peninggalan budaya Jawa sebagai kekuatan yang dapat membangkitkan kesadaran Nasional (*Nationale Bewustzijn*). Kutipan secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. *Wanneer door waarlijk nationaal (Indonesisch) onderricht en opvoeding, aan de hand van de oude Nationale Cultuur-monumenten, belanstelling, trots en vereering is opgewekt bij den cultuur-Indonesieër voor de geschiedenis van Indonesië, zal het Nationale Bewustzijn weer tot ontplooiing, tot zelf-bewuste kracht worden gebracht.*
2. *Wanneer het Nationale Bewustzijn is ontwaakt, zullen de Oud-Indonesische monumenten, centra worden van het leven en in alle lagen van het volk inspireerend werken als een voorbeeld ter naleving.*
3. *Wanneer de inspiratie is ontvlamd, zal de ziel van 't Volk zich ontplooiën in een drang tot schepping en nerwerkelijking van Idealen, welke drang door de Cultuutragers van het Ras tot uiting zal worden gebracht aan de hand van hun kennis opgedaan aan de Oude Cultuurmonumenten.*
4. *En op de hechte basis van het Oude, zal dan verrijzen, als een nieuw en schitterend monument, getuigende van ongebluschte kracht en de genialiteit van het Indonesische volk een nieuwe cultuur.*
5. *De beteekenis van het oude ligt (niet in zijn vorm, maar) in zijn wezen, als grondslag voor het nieuwe.*⁶¹

Hal lain yang menarik dari kongres ini adalah masalah biaya untuk penyelenggaraan kongres, yang ternyata juga tidak tersedia banyak. Untuk meringankan beban Panitia Penyelenggara, antara lain telah disampaikan

⁶⁰ 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1977, hal. 4.

⁶¹ Majalah 'DJAWA', tahun 1924, hal. 197.

permohonan keringanan ongkos transportasi dengan kereta api bagi peserta kongres. Permohonan itu dikabulkan oleh pihak Nederlandsch-Indie Staatspoorwegen (NIS), kepada para peserta diberikan potongan (*reductie*) harga karcis sebesar 50%. Potongan harga karcis kereta api itu berlaku sampai dengan 1 Januari 1925, dengan cara menunjukkan bukti pemberian *reductie* kepada kondektur yang bertugas.

Dalam kata sambutannya Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua Java-Instituut antara lain menyampaikan ucapan terima kasih kepada S.S. dan N.I.S. atas bantuan yang diberikan. Antara lain ia mengatakan: *'Voorts brengt het bestuur van het Java-Instituut zijn openlijken dank aan de besturen van de S.S. en de N.I.S. voor de aan de conressisten verleende tegemoetkoming ten aanzien van de spoorkosten.'*⁶²

5. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1926 (V)

Kongres urutan ke-5 diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1926. Kongres diselenggarakan di Gedung Kesenian, Embong Malang No. 63-65 Surabaya. Temanya adalah: Bahasa, Bumi dan Suku Bangsa Jawa Timur dan Madura. Dalam kongres ini antara lain disajikan makalah tentang musik Hindu-Jawa, sejarah, musik dan sastra Madura, dan makna sisa-sisa bangunan Majapahit. Laporan kongres dimuat dalam majalah *'DJAWA'* tahun 1927.

Susunan Acara kongres secara lengkap adalah sebagai berikut:

Kamis, tanggal 23 September 1926

- Kata Sambutan Walikota Surabaya, Ir. GJ. Dijkkerman. Hadir pada pembukaan kongres antara lain: Mangkoenegoro VII dan Ratu Timur, Residen Yogyakarta, Pekalongan, Pasuruan, Besuki, Madura, I Gusti Bagoes Djelantik, anggota Volksraad, wakil-wakil: Susuhunan, Sultan dan Direktur Pendidikan dan Agama.
- Paparan tentang Musik Hindu-Jawa khusus Jawa Timuran, oleh J. Kunst.
- Paparan tentang Musik Madura diikuti dengan demonstrasi menyanyi, menari dan bermain oleh JS. Brandes Buys.

Tanggal 24 September 1926

- Pidato Pembukaan Kongres oleh Ketua Java-Instituut.

⁶² Majalah DJAWA, tahun 1925, hal. 150

- Paparan tentang '*Tari Gandrung Banyuwangi*,' oleh John Scholte.
- Paparan dengan judul: '*Meninjau Madura Zaman Dulu*', oleh Abdul Azis.
- Paparan tentang '*Kesusastraan dan Seni Budaya Madura*' oleh R. So-srodanoekoesoemo.
- Pengantar kunjungan ke lapangan melihat bekas kerajaan Majapahit oleh Ir. H. Maclaine Pont.
- Peninjauan berbagai jenis Perahu Jawa Timur dan Madura.
- Pertunjukan tari Srimpi dan Wayang Orang dengan lakon Menak Jinggo Lena, diselenggarakan oleh KGPAA. Mangkoenegoro VII.

Tanggal 25 September 1926.

- Pembukaan dan peninjauan '*Pasar Tahunan*' atau '*Jaarmarkt*' yang memamerkan hasil seni kerajinan Jawa Timur dan Madura.
- Lomba perahu di Taman Utara Surabaya
- Ceramah tentang Seni Budaya Jawa Timur oleh Dr. W.F. Stutterheim.

Tanggal 26 September 1926

- Darmawisata ke Bangkalan dan melihat Karapan Sapi serta Lomba Layar dan Dayung.
- Pertunjukan Wayang Orang dengan lakon Jaladara oleh Sekolah Musik dan Tari '*Kridho Bekso Wiromo*' dari Yogyakarta.

Tanggal 27 September 1926

- Darmawisata ke Bekas Kerajaan Majapahit, dipimpin oleh Ir. H. Maclaine Pont.

Dalam laporan kongres disebutkan, bahwa Walikota Surabaya dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas diselenggarakannya kongres di Surabaya dan mengharapkan akan dapat menghidupkan kembali perhatian dan pengembangan kerajinan di Jawa Timur. Di samping itu juga ucapan terima kasih atas kehadiran Mangkunegoro VII dan Ratu Timur, Residen Yogyakarta, Pekalongan, Pasuruan, Besuki, Madura, I Goesti Bagoes Djelantik, raja Karangasem, anggota Volksraad (Parlemen), Wakil Susuhunan Surakarta dan Sultan Yoga. Sementara itu Prof. Dr. RA. Hoesein Djajaningrat selaku menyampaikan terima kasih dan mengharapkan kongres ini sukses.

Dalam paparan tentang Musik Hindu-Jawa khusus Jawa Timuran, J. Kunst menyatakan bahwa musik Jawa Timur menunjukkan perbedaan dengan

musik Pasundan yang dikategorikan masih sederhana, tetapi justru karena itu sangat menarik. Instrumen yang terbuat dari bambu sangat mendominasi musik Sunda seperti Celempung, Calung, Angklung, Rengkong dan Hatong. Sedangkan di Jawa Timur musik dengan instrumen perunggu lebih berse- ragam dan memiliki kesamaan dengan yang ada di lingkungan kerajaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Sementara itu mengenai musik Hindu-Jawa menurut J. Kunst tidak begitu banyak yang dapat disampaikan, tetapi dapat diidentifikasi terutama tentang instrumen yang dipakai dengan melihat pada relief candi, di samping patung perunggu dan terakota yang sedang membawa alat musik, pada dinding belanga perunggu, gong, serta pada naskah kuno dari tulisan Cina kuno, Jawa kuno, Bali, dan Sumatera. Sedangkan menurut Brandes Buys musik Madura memiliki ciri yang berbeda dengan musik Jawa. Sejak orang-orang Madura berdatangan ke Jawa, musik Madura memberikan pengaruh pada seni nada Jawa Timur khususnya.

Permasalahan yang muncul dalam kongres yang lain adalah:

1. Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang?
2. Dengan cara apa kebudayaan daerah dijadikan bahan ajar pendidikan anak negeri?

Kongres diawali dengan sambutan Walikota Surabaya Mr. Ir. GJ. Dijkerman, yang menaruh harapan kongres ini akan dapat menghidupkan kembali perhatian dan kegiatan kerajinan Jawa Timur. Pandangannya tentang kejayaan masa lalu seni kerajinan Jawa Timur dan Madura itu disampaikan oleh Mr. Ir. GJ. Dijkerman beberapa bulan sebelum kongres diselenggarakan. Antara lain Dijkerman menyatakan sebagai berikut:

'Merupakan suatu kepuasan yang sangat istimewa bagi saya, karena oleh Java-Instituut dan majalah 'DJAWA' diberikan kesempatan menjadi penyelenggara pertama (maksudnya di Surabaya) kongres ini. Suatu kepuasan karena dengan diadakannya kongres di Surabaya salah satu dari keinginan saya terwujud. Jawa Timur yang dikenal sebagai Java's Oosthoek (Sudut Timur) dan khususnya kota Surabaya, sangat memerlukan kongres ini. Ketika pada zaman kebesaran kebudayaan Jawa bersinar di pusat-pusat kerajaan seperti Kediri, Singasari, Blambangan dan terutama Majapahit, telah memiliki tempat tersendiri di antara lainnya. Sedangkan Jawa Timur sendiri dalam banyak hal

sekarang banyak mundur dibandingkan dengan Tanah Sunda dan Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.

Terus terang, Jawa Timur benar-benar bekerja keras dan terus melakukan kegiatan di bidang kebudayaan, tetapi dalam hal seni dan kerajinan tidak lagi memiliki tempat terhormat. Bagi para pengrajin kuningan yang dulu sangat terkenal, pengrajin seni batik bahkan di bidang seni tari Jawa, sekarang tinggal sedikit dari kebesaran zaman dulu. Dan yang paling parah ialah bahwa tidak hanya masyarakat Eropa, tidak hanya, bahkan penduduk asli sendiri sebagian besar tidak tahu betapa besar kejayaan masa lalu dan kini hilang atau terancam akan hilang.

Syukurlah ada tanda-tanda juga untuk Jawa Timur, akan terjadi perubahan yang baik. Dari banyak pihak diusahakan untuk menghidupkan kembali perhatian pada yang dulu, yang begitu tinggi tingkatannya.

Berbagai karya seni penduduk asli seperti ukiran, kerajinan kuningan, anyaman, baik, dsb. dengan segala kelebihan atau kekurangannya akan diusahakan untuk menghidupkan kembali seni kerajinan, mengembangkan bakat seni penduduk asli yang besar dan sekarang sedang 'tidur-ayam'. Saya berpendapat bahwa seni dapat berkembang apabila didukung oleh semangat dan kegairahan hidup dari bangsa yang sedang berkembang. Seni berkembang kuat pada saat bangsa itu sedang dalam kondisi kuat. Dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan suku bangsa Indonesia (*Indonesische volkeren*) dan khususnya orang Jawa (*Java bevolken*) memperhatikan masalah pengungkapan seni mereka sendiri. Apa yang masih tinggal dari kebesaran orang-orang Jawa Timur ialah kehebatan mereka sebagai pelaut yang gagah berani.

Benar juga bahwa pada zamannya orang-orang Jawa seperti sebelum abad ke-17 dengan kapal-kapal mereka berlayar sampai ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) dan Madagaskar. Juga pelaut besar dari Madura dan Bawean sangat penting artinya karena mereka berlayar sampai Banjarmasin dan Makassar. Bagi mereka perahu sangat berarti dan sangat disayangi dan dibuat demikian baik dengan memberikan hiasan pada haluan dan buritannya. Barang siapa mengenal kegiatan pelaut di Jawa Timur dan terutama di Madura harus setuju dengan saya bahwa di dalamnya masih terdapat ungkapan atau simbol-simbol penting dari bumi kelahirannya yang menjadi dasar yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan seni dan kerajinan yang dimilikinya. Karena itu saya menganggap bahwa lebih khusus untuk Jawa Timur sekaranglah saatnya untuk mengembangkan bakat dan ekonomi masyarakat yang

sedang tidur, dan juga saatnya untuk menghidupkan kembali kegiatan seni.

Berbagai bidang studi tentang Indonesia melakukan pengkajian seni kerajinan dalam kegiatan mereka. Tetapi kegiatan kajian yang terbaik dan tertinggi maknanya hanya terdapat pada Java-Instituut. Dan sekarang di Surabaya baik oleh Paguyuban Studi Indonesia maupun Ikatan Lingkar Seni Budaya Jawa, dilakukan kajian dan kegiatan musik, tari, dsb. dimulai lagi. Maka kongres yang akan datang ini harus menghasilkan stimulasi kuat yang dapat mendorong munculnya kegiatan yang baik dan lebih banyak mengkaji dan mengungkapkan budaya dari waktu yang lalu.

Di samping ceramah-ceramah dan diskusi harus diadakan juga penyelenggaraan pameran, karena merupakan hal sangat penting. Badan yang khusus menangani hal ini dengan tujuan menggelar sebanyak mungkin hasil karya masa lalu dan sekarang, memungkinkan diadakannya kajian tentang faktor-faktor yang mencerminkan kejayaan masa lalu dan harus diperhatikan dan dipertahankan dari pengaruh baru. Hal itu tidak dapat diselesaikan sekaligus dan satu pertanyaan, apakah tidak perlu sebagian dari pameran dibuat permanen dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmatinya di **museum** yang selalu terbuka untuk itu. Di samping itu timbul pertanyaan apakah tidak diinginkan untuk melakukan pendidikan kerajinan secara sistematis dan untuk itu dibuka sekolah kerajinan seni budaya?

Dan akhirnya mengadakan pameran-pameran model perahu, dan pameran itu lebih baik diselenggarakan di pelabuhan Surabaya, sehingga dapat menggugah perhatian tentang apa yang dihasilkan oleh penduduk pribumi dalam hal membangun kapal dan melayarkannya ke laut. Walau pelayaran di sungai-sungai sudah sangat berkurang diganti oleh transportasi darat, walau zaman kejayaan armada perahu di sungai sudah lewat, tetapi pelayaran di pantai, pantai penyeberangan dan penangkapan ikan masih tetap memiliki faktor penting untuk pengembangan ekonomi yang mandiri dari penduduk pribumi.

Dalam hal ini sebuah perjalanan melalui kampung-kampung nelayan di pantai utara Madura, lebih baik dibandingkan dengan yang terletak di pantai Sedayu dan Tuban. Di sana ada hidup dan kekuatan dan kegarahan hidup.

Bagian dari kinerja kongres di Surabaya sebagai kota pusat perdagangan dan lalu-lintas laut tanah Jawa, bahkan Indonesia. Surabaya

dengan tanah pedalaman mata pencaharian bertani sangat memerlukan alat transportasi darat dan air. Bagaimanapun juga mengharapkan hasil dari kongres ini dapat mendorong diadakannya pengkajian dan latihan keahlian seni dan budaya sebagai bentuk pengungkapan kebahagiaan hidup.⁶³

Dari kutipan di atas jelas sekali pandangan Dijkerman terhadap kebudayaan yang berkembang di Jawa Timur dan Madura. Ia sangat memperhatikan perkembangan seni kerajinan Jawa Timur yang pernah jaya pada masa sebelumnya tetapi sekarang sedang mengalami kemuduran. Ia melontarkan pertanyaan *'apakah tidak diinginkan untuk melakukan pendidikan kerajinan secara sistematis dan untuk itu dibuka sekolah kerajinan seni budaya?'* Pandangan itu menjadi bukti sejarah yang patut menjadi penggugah semangat masyarakat Jawa Timur masa kini dalam memajukan kebudayaannya.

6. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1929 (VI)

Di antara KK 1926 dan KK 1929 ditemukan data bahwa pernah juga diselenggarakan KK seperti yang tertulis dalam buku **'Java-Instituut Dalam Foto'** yang disusun oleh Jaap Erkelens. Pada halaman 4 disebutkan secara singkat bahwa pada bulan Desember 1927 diselenggarakan kongres di Yogyakarta dengan pokok bahasan tentang Arsitektur Jawa. Keterangan ini mengundang pertanyaan, karena selain pada buku tersebut tidak ditemukan keterangan yang menyebutkan tentang kegiatan itu.

Dalam majalah DJAWA yang sejak terbit pertama telah aktif memberitakan semua kongres sebelumnya, tidak ditemukan data yang menjelaskan tentang penyelenggaraan KK tahun 1927. Dalam majalah 'DJAWA' yang terbit tahun 1928 atau 1929 sedikitpun tidak ditemukan berita tentang kongres itu. Berdasarkan kenyataan ini maka disangsikan bahwa pada tahun 1927 tidak pernah diselenggarakan KK sebagaimana ditulis dalam buku Jaap Erkelens.

Kesangsian itu makin kuat, karena dalam majalah DJAWA terbitan tahun 1930, yang memuat sambutan Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat selaku Ketua Java-Instituut pada acara memperingati Ulang Tahun ke-10 Java-Instituut, juga tidak menyebut tentang KK tahun 1927. Dalam sambutan itu Prof. Hoesein Djajadiningrat menyampaikan laporan tentang perjalanan Java-Institut selama 10 tahun, yakni tentang keberhasilan dan ketidak-berhasilan Java-

⁶³ Majalah 'DJAWA' tahun 1926, hal. 179-181

Instituut mulai berdiri tahun 1919 hingga tahun 1929. Di dalamnya termasuk laporan tentang penyelenggaraan KK tahun 1919 di Surakarta, tahun 1921 di Bandung, tahun 1924 di Yogyakarta dan tahun 1926 di Surabaya.

KK yang diselenggarakan pada tahun 1929 merupakan kongres ke-5 dalam arti kongres yang diselenggarakan oleh Java-Instituut dan KK ke-6 dihitung sejak kongres pertama tahun 1918. Kongres diselenggarakan di Kepatihan Puro Mangkunegaran, Surakarta. Sebagaimana diuraikan di atas, kongres ini diselenggarakan sekaligus sebagai acara peringatan ulang tahun ke-10 Java-Instituut (1919-1929). Kongres tahun 1929 bersifat khusus dan mendapatkan perhatian sangat besar dan sangat meriah, dihadiri banyak undangan baik dari kalangan pejabat, masyarakat dan pengusaha. Kongres membahas topik tentang pendirian perguruan tinggi jurusan sastra, filsafat dan budaya Timur.

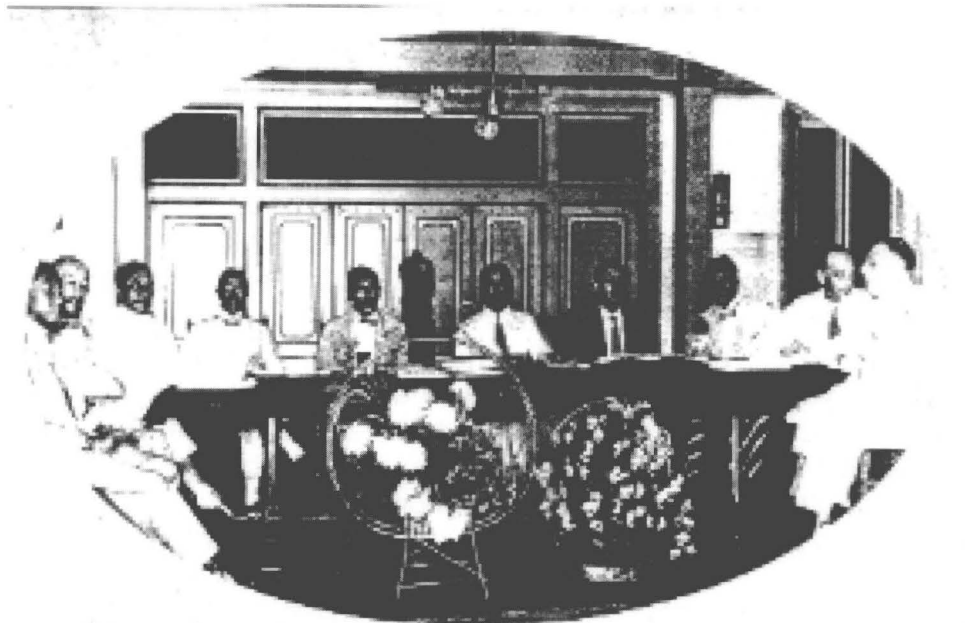
Dalam pidato sambutan BKPA Koesoemojoedo (Kepala Paprentahan Kraton Surakarta) sebagai Panitia Penerimaan menyampaikan selamat datang dan terima kasih telah memilih Solo sebagai tempat kongres dan tentunya tidak asing lagi bagi para peserta. Selanjutnya ia mengatakan:

'....apabila diingat, 10 tahun yang lalu (1918) Kongres Kebudayaan Jawa diadakan di sini dan sebagai hasilnya berdiri Java-Instituut. Ingatan kita menerawang pada saat kelahiran lembaga ini. Betapa besar antusiasme pada pembicaraan topik dan betapa perhatian kita pada waktu itu.

Java-Instituut telah berdiri 10 tahun dan kita percaya bahwa selama ini telah diuji penampilannya. Maka harus dikatakan bahwa kongres ini dengan perhatian yang besar dari masyarakat merupakan tanda keberhasilan Java-Instituut dalam mengembangkan kebudayaan.⁶⁴

Selanjutnya dilaporkan bahwa besarnya perhatian terhadap kongres tidak hanya diungkapkan dengan kehadiran tetapi juga berupa sumbangan dana dan keikutsertaan dalam kegiatan pameran kerajinan emas dan perak, sumbangan tarian dari perkumpulan Mardi Laras, pembuatan taman untuk minum teh dan pergelaran permainan anak-anak. Oleh Panitia Penerimaan sengaja ditampilkan pergelaran permainan anak-anak Jawa karena dulu permainan merupakan faktor penting dalam pendidikan tetapi pada saat itu mulai diabaikan, termasuk juga permainan rakyat.

⁶⁴ Majalah DJAWA, tahun 1930, hal. 7.



Peserta Kongres Kebudayaan tahun 1929, di Solo
(Majalah 'DJAWA' tahun 1930)

Sementara itu Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua Java-Instituut menyampaikan terima kasih apabila beberapa kali kongres yang diselenggarakan Java-Instituut merupakan prestasi dan mendapatkan sambutan dan perhatian yang besar dari masyarakat. Selanjutnya ia mengajak hadirin untuk berdiskusi tentang masalah kebudayaan Timur sambil memperingati 10 tahun berdirinya Java-Instituut.

Di samping itu oleh Prof. Hoesein Djajadiningrat dilaporkan tentang hasil-hasil yang dicapai oleh Java-Institut selama 10 tahun sebagai berikut:

*'Usia 10 tahun untuk sebuah perkumpulan belum termasuk lama, dan belum cukup lama untuk mengadakan peringatan secara besar-besaran. Ditambah lagi ada pertimbangan bahwa usaha Java-Instituut tidak selalu berhasil, setidaknya-tidaknya hasil yang bersifat langgeng. Memang benar dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan bahwa tujuan Java-Institut adalah meningkatkan pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali, dalam arti kata yang seluas-luasnya, namun pada umumnya sukar dan harus secara berangsur-angsur dan tidak langsung dapat memberikan pengaruh.'*⁶⁵

⁶⁵ Majalah DJAWA, tahun 1930, hal. 8.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat itu upaya pengembangan kebudayaan di lingkungan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan Bali ada hambatan yang harus dihadapi. Contoh yang disampaikan oleh Prof. Hoesein adalah masalah penerbitan majalah. Majalah 'DJAWA' terbit tahun 1921, tiga bulan kemudian terbit majalah bahasa Jawa 'POESAKA DJAWI' dan berbahasa Sunda majalah 'POESAKA SOENDA', kemudian disusul bahasa Madura tahun 1924 majalah 'POESAKA MADOERA'. Setelah beberapa kali terbit majalah 'POESAKA MADOERA' dihentikan, kemudian disusul oleh majalah 'POESAKA SOENDA'. Hanya majalah bahasa Jawa 'POESAKA DJAWI' yang masih dapat bertahan, sedangkan untuk majalah 'DJAWA' yang berbahasa Belanda sudah mendapatkan tempat sebagai berkala Ilmu Pengetahuan dan Budaya, termasuk dikenal di luar negeri. Dengan demikian majalah ini hanya merupakan keberhasilan yang kecil dari Java-Instituut meskipun yang memimpin adalah orang memiliki budaya pribumi dan padanya pengembangan budaya itu bergantung.

Sementara itu keberhasilan yang dicapai oleh Java-Instituut selama sepuluh tahun adalah penyelenggaraan Kongres Kebudayaan (1919, 1921, 1924, dan 1926) dan Kongres Bahasa Jawa dan Sunda (1924 dan 1927). Di samping itu juga penyelenggaraan berbagai pameran benda hasil kerajinan yang terbuat dari emas, perak, kayu, anyaman, dan seni ukir, serta berbagai pertunjukan kesenian. Program yang dianggap masih menjadi *'hutang'* oleh Java-Instituut adalah penelitian tentang kerajinan dan pertukangan serta tata cara pergaulan di lingkungan bumiputra, karena belum dapat diselesaikan.

Susunan Panitia kongres adalah sebagai berikut:

Pelindung : Sri Paduka Susuhunan Surakarta
Ketua Kehormatan: - Prof. Dr. BJO. Schrieke
- Raden Adipati Djajanegara
Ketua Kongres : - R.A. Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat
- S. Koperberg

Panitia Bidang Umum terdiri atas: BKPA. Koesoemojoedo sebagai Ketua, RMA. Woerjaningrat sebagai Sekretaris, dan Anggota adalah: KPA. Hadiwidjaja, RT. Dr. Wediadiningrat, Dr. Soemeroe, R. Ng. Doetadilaga, M. Ng. Jasawidagda, JE. Van Naersen. Untuk Panitia Bidang Penerimaan terdiri atas: M. Ng. Jasawidagda sebagai Ketua, Hr. Soehoed sebagai Sekretaris merangkap bendahara, sedangkan Anggota adalah: AW. Karjasa, Hr. Hadisepoetra, Hr. Sasrasoedigda, M. Ng. Hardjasoekasta, M. Ng. Tjitrahoebaja.

Sementara itu untuk Panitia Bidang Logistik: Dr. Soemeroe sebagai Ketua, S. Sastrakarjana sebagai Sekretaris, dan Anggota adalah: RS. Koesoemadirdja, R. Ng. Sarasoedaka. Sedangkan untuk Panitia Bidang Pameran: KPA. Hadiwidjaja sebagai Ketua, JE. Van Naersen sebagai Sekretaris, dan Anggota adalah: KPA. Soerjaamidjaja, M. Ng. Tjitrahiranja, Dr. L. Adam, dan Ir. JL. Moens.

Dari susunan Panitia kongres tampak sekali semua bidang kegiatan telah dipegang sendiri oleh kaum terpelajar bumiputra. Demikian pula halnya pada penyajian makalah para cendekiawan dan budayawan pribumi telah banyak mengambil peran.

Acara Kongres Kebudayaan VI adalah sebagai berikut.

Tanggal 27 Desember 1929:

- Sambutan selamat datang oleh PA. Koesoemojoedo, dilanjutkan dengan pertunjukan tari Wireng Mandrakusuma (Srikandi-Larasati) dan tari Klana sumbangan dari Sri Paduka Tuanku Paku Buwono X Surakarta.

Tanggal 28 Desember 1929:

- Sambutan oleh Prof. Dr. R. A. Hoesein Djajadiningrat.
- Penyajian dan debat mengenai topic yang sama yaitu Pengajaran Kesusastraan Timur di Perguruan Tinggi (*Oostersch Letterkundig Hooger Onderwijs*), oleh para pemrasaran: Dr. GWJ. Drewes, DR. SJ. Esser, RAA. Soejono, dan L. van Rijckevorsel (Ambarawa). Sedangkan untuk Mr. R. Hadi judul agak berbeda, yaitu: *'Eeige Desiderata in Verband Met de Oprichting van een Litteraire Faculteit in Indonesie.'*
- Mengunjungi Museum Radya Pustaka (Sriwedari, Kebon Raja). Pada acara ini disuguhkan permainan anak-anak, antara lain: Srandul, Gulo-ganti, Cublak-cublak Suweng, Jo-Ratu dan Nini Towok).
- Ceramah tentang *'Bumi dan Rakyat Bali'* (diikuti dengan pemutaran film), oleh Tjokorde Gde Raka Sukawati di Sriwedari.
- Klenengan di Kepatihan Mangkunegaran oleh perkumpulan *'Mardi Laras'*, Surakarta.

Tanggal 29 Desember 1929:

- Mengunjungi Istana – Sitinggil kraton Surakarta (Alun-alun Utara)
- Lanjutan perbincangan pokok mengenai Pengajaran Kesusastraan Timur di Perguruan Tinggi, dilanjutkan dengan ceramah mengenai hasil penyelidikan tentang perlunya menguasai kepandaian membuat barang-barang seni (*De noodzakelijkheid van ambachtsen kunstnijverheids onderzoek*)

- Penutupan kongres, dilanjutkan dengan Pergelaran wayang orang, dengan cerita 'Hanoman Duta.'⁶⁶

Dalam kongres kali ini masalah Pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi (*Oostersch Letterkundig Hooger Onderwijs*), menjadi topik bahasan yang utama dan dijarah dari berbagai pandangan para pemakalah. L. van Rijckevorsel menyampaikan pertanyaan, antara lain (1) Haruskah dilakukan pengajaran kesusasteraan Timur dan filsafat di Perguruan Tinggi di Hindia Belanda?; (2) Haruskah pengajaran sejarah?; dan (3) Mana yang lebih ideal dan mana tujuan yang praktis pengajarannya?

Dalam prasarannya yang berjudul Pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi (*Oostersch Letterkundig Hooger Onderwijs*), RAA. Soejono, menyampaikan 7 buah dalil (*stellingen*) sebagai berikut:

1. *De studie in een bepaalde taal zal daar het deugdelijkst zijn, waar die taal de landstaal is.*
2. *Verijking van de Indonesische talen is noodig ten einde deze te doen beantwoorden aan de eischen des tijds. Daarnaast dient voor wat het Javaansch betreft, ernstig te worden overwogen, of vereenvoudiging – voornamelijk door beperking van het aantal taalsoorten tot één, liefst het Krāmā – niet wenschelijk is.*
3. *Bij de verrijking en ontwikkeling dier talen zal, naast het Kantoor voor de Volklectuur en een eventueel te creëren Taalkundige Bureau, een in Indië gevestigd, overwegend inheemsch centrum van studie in de landstalen geode diensten kunnen bewijzen.*
4. *Met het onderwijs in talen behooren zoo veel mogelijk personen te worden belast, die de natuurlijke kennis dier talen bezitten.*
5. *Op een der examens van een in het eigen land – Indië – in te stellen Indonesisch-letterkundige faculteit kan, ja moet mede als eisch worden gesteld: vaardigheid in het schriftelijk en mondeling gebruik van den als hoofdvak gekozen taal.*
6. *Voor de hoogere rangen bij het inlandsch B.B. word teen academische opleiding hoe langer hoe meer een eisch des tijds; een Indonesische studie in Indië, steunend op de vereeniging der rechts-en letterkundige faculteiten, is daarvoor als aangewezen.*
7. *De instelling van een Indonesisch-letterkundige faculteit in Indië is niet alleen wenschelijk, maar – gelet o.m. op de beschikbaarheid van een vildoend aantal voor leerkrachten geschikte personen en*

⁶⁶ Majalah 'DJAWA' tahun 1929.

op het in het Bataviaasch Genootschap in ruime mate aanwezige studiemateriaal, ook mogelijk.⁶⁷

Sedangkan Dr. GWJ. Drewes dalam membahas tema pengajaran sastra Timur dan filsafat di Perguruan Tinggi dalam sebuah Fakultas Sastra menyampaikan 6 dalil (*stellingen*) sebagai berikut:

1. *Het scheppen van de gelegenheid tot academisch onderwijs in Oostersche letteren en wijbegeerte – vroeger herhaaldelijk bepleit op grond van in hoofdzak ideële overwegingen, welke ten volle haar geldigheid hebben behouden – is meer en meer gebiedende eisch der praktijk geworden.*
2. *Dit onderwijs zal het beste tot zijn recht komen aan een zelfstandige Faculteit der Letteren liefst, indien mogelijk, met de andere Bataviaasche hoogeschoolen in universitair verband vereenigd.*
3. *Conform het doel van alle Hooger Onderwijs zal de nieuw te stichten Faculteit der Letteren moeten opleiden tot zelfstandige beoefening van de door haar bestreken vakken, i.c. de Indische cultuurwetenschappen. Daarbij zal de blik niet uitsluitend gericht moeten worden op het verleden, doch evenzeer ook op het levende heden, waardoor het onderwijs tevens diensbaar zal zijn aan de vorming en voorbereiding tot het bekleeden van allerlie maatschappelijke betekkingen.*
4. *Met hot oog daarop dient het onderwijs aan de Bataviasche Faculteit der Letteren in hoofzaak wel dezelfde vakken te omvatten die in het Nederlandsch Academisch Statuut zijn voorgeschreven voor de studie in de Taal- en Letterkunde van de Oostindischen Archipel, doch met vermijding van al te groote differentiatie en van de gbreken, welke de moederlandsche opleiding aankleven.*
5. *De combinatie van Letterkundige Faculteit en taal- en volkenkundig studiecentrum, als aangekondigd in de rede waarmee Z.E. de Gouverneur-Generaal de jongste Volksraadszitting opende, zal aan het te geven onderwijs buitengemeen ten goede komen, en kan derhalve ten zeerste worden toegejuicht.*
6. *Bij de inrichting van dit taalkundig bureau dient men in het belang van het onderwijs de moderne hulpmiddelen voor het experimenteel taalonderzoek niet achterwege te laten.⁶⁸*

⁶⁷ Majalah DJAWA, tahun 1938, hal. 286

⁶⁸ Majalah DJAWA, tahun 1938, hal. 287

Sementara itu Ki Hajar Dewantara yang hadir pada kongres tersebut menyampaikan sambutan, yang lebih menekankan pada tanggapan atas prasaran L. van Rijckevorsel dan RAA. Sujono. Dalam majalah 'DJAWA' tahun X, bulan Januari 1930 dimuat laporan dalam tulisan stenografi dalam bahasa Belanda tentang pandangan Ki Hajar Dewantara berkenaan dengan adat dan bahasa, terutama tentang Bahasa Indonesia. Cuplikan dari terjemahan tulisan steno tersebut adalah sebagai berikut:

'Pembicara memulai pidatonya dengan menyatakan kekagumannya terhadap pemrasaran yang dengan kata-kata berapi-api menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia oleh dunia cendekiawan dan merasa terharu akan adanya kenyataan, bahwa telah ada sementara orang Eropa yang mulai mengerti jiwa orang Jawa dan mulai mendekatinya. Misalnya Pastoor van Rijckevorsel. Pembicara berpendapat, bahwa dari prasaran dan keterangannya telah bisa dimengerti, bahwa ia (R) lebih mengerti orang Jawa dan jiwa orang Jawa daripada banyak orang lain. Ini terutama dinyatakan oleh parstoor van Rijckevorsel dengan menyatakan, bahwa kita terutama harus bekerja dengan bahasa hidup. Tetapi pembicara berpendapat, bahwa orang-orang Jawa telah mampu menetapkan sendiri materi hidup bagi bahasa mereka, sehingga dengan demikian dengan senang hati mereka ingin memikul sendiri tanggung jawabnya

Dengan pembicaraannya tentang penyederhanaan bahasa Jawa – yang telah dikupas juga oleh tuan Sujono - sebetulnya Dr. Radjiman telah mendahului maksud pembicara. Berlawanan dengan gerakan Jawa Dwipa, pembicara berpendapat, bahwa usaha tuan Sujono untuk meniadakan Jawa Ngoko dan menyederhanakan bahasa Krama, yang disebut gerakan Krama Dewa itu kurang memperhatikan kenyataan, sebab bahasa Jawa telah berkembang sedemikian rupa, hingga orang Jawa menganggap bahwa adanya kedua macam bahasa itu merupakan suatu kekayaan, hingga orang tak akan mudah menyederhanakannya.

Selanjutnya pembicara sependapat dengan tuan Sujono ialah bahwa kesukaran dalam penggunaan bahasa merintang evolusi bangsa. Pergerakan Jawa Dwipa, kata pembicara selanjutnya, adalah suatu gerakan rakyat demokratis. Rakyat sekali bangun, merasa, bahwa dengan adanya kedua bahasa semangat demokrasi kurang dapat kesempatan untuk bergerak secara leluasa; oleh karenanya ia terpaksa mempergunakan Jawa Dwipa. Demikian pula halnya dengan gerakan Krama Dewa. Itu adalah suatu pernyataan kaum bangsawan.

Bila orang ingin mencapai hasil-hasil yang lebih baik mengenai evaluasi rakyat, hendaknya orang lebih memperhitungkannya dengan kenyataan.

Mereka yang mengira bahwa pembicara adalah seorang idealis, hendaknya sekarang maklum, bahwa ia adalah seorang realis. Nah, bahasa itu adalah suatu bagian dari adat dan bila adat itu berubah, bahasa pun akan berubah juga. Kini telah tampak gejala-gejala ke arah perubahan itu. Kini dengan sadar rakyat telah mulai meniadakan beberapa bentuk adat dan dengan demikian akan hilang pulalah bentuk-bentuk bahasa kuno sedikit demi sedikit.

Sederhanakanlah bentuk-bentuk adat dan dengan begitu saudara dengan sendirinya menyederhanakan bahasa.

Pembicara memberikan pertimbangan, agar demi kepentingan penyederhanaan adat itu Java-Instituut suka menghubungi Pemerintah dan memohon agar Pemerintah melarang segala macam bentuk adat yang beku, yang merintang jalannya evolusi. Hal ini bukanlah melulu pendapat pembicara, melainkan juga pendapat seorang kolega tuan Soejono di Jawa Timur, sebab Pemerintah telah memberitahukan melalui Residen, bahwa sirkuler Bupati Probolinggo mendapat simpati Pemerintah. Oleh karena pembicara di sini mengnajukan lenyapnya segala macam bentuk adat yang merintang, maka sebetulnya ia adalah juru bicara Pemerintah. (Ketawa, tepuk tangan)

Selanjutnya diusulkan agar Pemerintah mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka yang karena jabatannya, bergaul dengan rakyat, haruslah mengenal bahasanya, sebab tanpa itu mereka hanya akan dapat mengenal bagian luarnya saja dan tidak mungkin lebih mendalam lagi.

Bila orang ingin agar pelajaran bahasa itu hidup, hendaknya orang dapat melihat bahasa itu sebagai alat kebudayaan rakyat yang hidup, dan bila segala proses kematian, maka dengan begitu evolusi bisa dipupuk. Pembicara menekankan pentingnya usaha untuk membasmi kebiasaan-kebiasaan yang sudah usang, dan segala yang merintang jalannya evolusi.’⁶⁹

⁶⁹ Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan Bagian II*, 1994, hal. 285-287

7. KONGRES KEBUDAYAAN Tahun 1937 (VII)

KK VII diselenggarakan di pulau Bali. Jarak waktu penyelenggaraan KK VI (1929) ke KK VII (1937) cukup lama (8 tahun) bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena pada sekitar awal tahun 1930-an pemerintah Hindia-Belanda sedang mengalami krisis keuangan, dan masa itu lebih dikenal dengan sebutan '*zaman malaise*'. Pemerintah terpaksa melakukan penghematan di berbagai bidang kegiatan. Di samping itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak ada kegiatan kongres, yaitu faktor politik menjelang pecahnya Perang Dunia II dan penjajahan digantikan oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, praktis kegiatan Java-Instituut termasuk kegiatan menyelenggarakan KK menjadi terhenti, hingga bubar tahun 1948.

Para peserta dari Jawa datang ke Bali dengan menggunakan kapal laut bernama '*Op ten Noort*'. Karena pelabuhan Padangbai tidak terlalu dalam, sementara ukuran dan bobot kapal cukup besar, terpaksa kapal tidak dapat merapat ke tepi dermaga pelabuhan. Para peserta diangkut dengan sekoci menuju daratan. Yang menarik, untuk menampung akomodasi peserta selama mengikuti kongres tidak di tempatkan di hotel atau penginapan, tetapi menginap di atas kapal tersebut. Di atas kapal itulah sebagian dari kegiatan kongres dilaksanakan.

Acara kongres di Bali disusun sebagai berikut:

Tanggal 18 Oktober 1937

- Kapal '*Op ten Noort*' (pulang-pergi) membawa peserta kongres dari pelabuhan Surabaya tiba di Bali. Pada tanggal itu para peserta mendengarkan uraian tentang keanekaragaman dan keunikan seni kerajinan Bali. Pidato penjelasan (**keynote address?**) dengan judul '*Kerajinan dan perkembangannya di Bali*', disampaikan oleh Ir. PHW. Sitsen.

Tanggal 19 Oktober 1937:

- Tiba di pelabuhan Padangbaai pk. 09.00 dan diawali dengan makan pagi sebelum berangkat menuju Denpasar.
- Pkl. 11.00 tiba di Puri kediaman Bupati Denpasar.
- Sambutan selamat datang Ketua Panitia
- Pidato Pembukaan oleh Ketua Java-Instituut, Prof. Dr. RA. Hoesein Djajadiningrat.
- Pidato Residen Bali dan Lombok.

- Pidato wakil Susuhunan Kraton Surakarta
- Pidato Wakil Sultan Jogjakarta
- Penjelasan tentang '*Kehidupan sosial masyarakat Bali,*' oleh Bupati Karangasem.
- Penjelasan tentang '*Kehidupan Keluarga masyarakat Bali,*' oleh Bupati Gianyar.
- Penyajian tentang '*Bangunan tua di Bali*' oleh Dr. WF. Stutterheim.
- Penyajian tentang '*Bangunan Pura di Bali*', oleh Dr. R. Goris.

Tanggal 20 Oktober 1937:

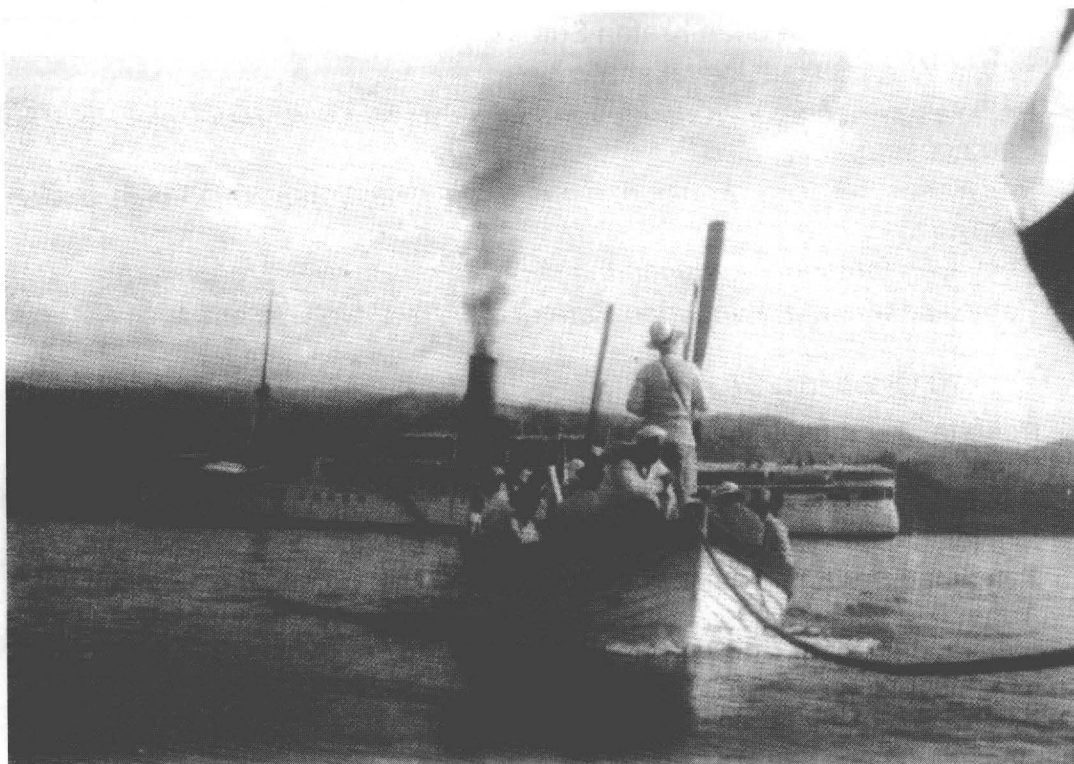
- Peserta berangkat ke Klungkung, meninjau Kertagosa dan pameran barang-barang seni.
- Peserta meninjau Pura Besakih, dan makan siang di Puri Karangasem.
- Meninjau pameran kerajinan, antara lain ukiran kayu, dan tenun dari Tenganan serta menikmati tarian Bali: Legong, Rejang, dan cerita Calon Arang.
- Makan malam di atas kapal '*Op ten Nort*', dihibur dengan pertunjukan musik Bali, konser piano, oleh Heeren Colin McPhee dan Walter Spies.

Tanggal 21 Oktober 1937:

- Peserta meninjau Goa Gajah, Jeh Pulu, pura Pejeng dan Gunung Kawi, dipandu oleh Dr. WF. Stutterheim.
- Makan siang di Tirta Empul, dan meninjau pameran kerajinan perak dari Mas, ukiran prada, demonstrasi tari Legong dan pembacaan lontar.
- Menonton tarian Gong Kebyar, pemain dari Gianyar dan Peliatan, dan tari topeng.
- Menonton tari Kecak di Bedulu.

Tanggal 22 Oktober 1937:

- Mengunjungi Pura Kehen.
- Pertunjukan tari di Kintamani: tari Baris Gede, Baris Goak, Baris Presi, Baris Dadap, di samping itu juga pertunjukan angklung Sabi Bali Utara.
- Menuju Gelgel untuk melihat pameran seni kerajinan tenun dari Kamasan dan Nusa Penida, kerajinan perak dari Kamasan, kerajinan besi dan melihat tari Janger dan Barong.



Peserta Kongres Kebudayaan di Bali tahun 1937 meninggalkan kapal 'Op ten Nort' dengan menggunakan sekoci menuju pelabuhan Padangbai. (Java-Instituut Dalam Foto:2001)

Tanggal 23 Oktober 1937:

- Mengunjungi Museum Bali, dipandu oleh Ir. T. Resink, melihat fragmen tari Ramayana, dilanjutkan makan siang di Hotel Bali.

Tanggal 24 Oktober 1937:

- Dengan kapal 'Op ten Noort', peserta meninggalkan Padangbai menuju Surabaya.⁷⁰

Dalam pidato penjelasannya dengan judul '*Kerajinan dan perkembangannya di Bali*', Ir. PHW. Sitsen menguraikan berbagai cabang perkembangan seni kerajinan di Bali. Bagian yang disorot adalah tentang perkembangan: seni kerajinan tenun (*weefnijverheid*), seni ukir kayu (*houtsnijkunst*), yang berkaitan dengan pekerjaan logam (*edelmetaal-bewerking*), seni kerajinan (*houtsnijnijverheid*), seni kerajinan perak (*zilvermeden*), pekerjaan besi (*ijzerbewerking*), dan pekerjaan kulit (*leer-bewerking*).

⁷⁰ Majalah 'DJAWA' tahun 1938, hal. 1



Peserta kongres berwisata ke Pura Kehen
(foto:Vistarini, Java-Instituut Dalam Foto:2001)



Prof. Hoesein Djajadiningrat bersama istri Partini
Djajadiningrat di Kintamani
(Java-Instituut Dalam Foto:2001)

Selanjutnya oleh Sitsen juga disinggung tentang pengaruh perkembangan kegiatan seni kerajinan tersebut dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat Bali. Dengan berkembangnya seni tersebut ekonomi masyarakat meningkat, terutama dikaitkan dengan turisme. Pada saat itu pulau Bali telah dikenal di mancanegara dan banyak turis yang datang ke Bali. Disebut-sebut tentang jumlah turis yang datang ke Bali, pada tahun 1936 sebanyak 3000 orang, dan pada tahun 1937 meningkat menjadi 5000 orang. Mereka datang ke pulau Bali untuk menikmati keindahan alam dan keunikan budayanya. Mereka banyak yang berbelanja barang-barang seni tersebut.

Di samping itu Sitsen antara lain menyarankan agar seni kerajinan di Bali terus didorong perkembangannya dan jangan sampai terhambat karena beban pajak. Sementara itu mengenai tata-teknis dan tata-ekonomi dalam seni kerajinan perlu diatur guna menjadi arahan dalam mengembangkan seni kerajinan Bali. Perlu pula didirikan sebuah **museum** yang merupakan bagian dari kegiatan Museum Bali guna memamerkan produksi kerajinan Bali.

Pada akhir pemaparannya Sitsen menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Het is gewenscht, bepaalde taken van nijverheid op Bali te stimuleeren, teneinde den economischen druk, die het cultuur-eigene op Bali bedreigt, op te heffen.*
2. *Het is gewenscht, de Balische nijveren in contact te brengen met goede producties, die elders in de op Bali te activeeren taken van nijverheid, worden vervaardigd.*
3. *Oprichting van een museum, b.v. een afdeling van het Bali-museum, ter tentoonstelling van producties, waarvan voor eigen werkzaamheid kan worden geprofiteerd, is geboden.*
4. *De bedrijfstechnische en bedrijfseconomische voorlichting zal voor de te ontwikkelen takken van nijverheid moeten worden verstrekt.*
5. *Teneinde op de beste manier de stimulans te kunnen inzetten, moet over groote plaatselijke kennis worden beschikt. De wijze waarop de activeering moet geschieden, ware vast te stellen in overleg met een te vormen Balische nijverheidscommissie.*
6. *Teneinde de bestaande taken van nijverheid tot verderen bloei te doen komen, zal de grondstofvoorziening moeten worden bestudeerd en geregeld.*
7. *Teneinde de kwaliteit van de nijverheidsproducties voor den export op peil te houden, wordt verkoop op certificaat aangeraden.*⁷¹

Dari gambaran tentang penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka di atas tampak jelas Pemerintah Hindia Belanda telah menaruh perhatian secara khusus terhadap kebudayaan yang berkembang di bumi nusantara. Pemerintah Hindia Belanda telah banyak melakukan kegiatan dalam upaya memelihara, memajukan dan mengembangkan kebudayaan, namun oleh kaum pribumi upaya ini tetap dipandang sebagai upaya memecah belah secara sistematis. Pendirian Java-Instituut dan lain-lain dipandang sebagai upaya memecah belah kesatuan budaya bangsa. Pandangan itu datang antara lain dari Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan: *'Di jaman Belanda kita dipecah-pecah secara sistematis, hingga daerah yang satu dijaughkan dari daerah yang lain. Usaha memajukan kebudayaan oleh Belanda itu sungguhpun sudah diadakan, namun nampak jelaslah maksudnya, yaitu untuk "memurnikan" kebudayaan-kebudayaan daerah-daerah masing-masing. Untuk itu didirikan 'Java-Instituut', di samping ada 'Batak Instituut', ada pula 'Bali Instituut' dan lain-lain.*⁷²

⁷¹ Majalah DJAWA, Tahun 1938, hal. 10

⁷² Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan Bagian II*, hal. 98.

Di samping juga terlihat besarnya perhatian kaum terpelajar terhadap permasalahan kebudayaan bangsa. Melalui forum kongres mereka dapat menyampaikan pandangan-pandangannya. Tidak kalah pula besarnya perhatian yang diberikan oleh para raja dan bangsawan di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan Bali dalam setiap penyelenggaraan kongres.

Setelah kongres di Bali berakhir, tidak ada lagi Kongres Kebudayaan berikutnya yang dikoordinasikan oleh Java-Instituut, hingga bubar demi hukum pada tanggal 4 Agustus 1948. Kondisi politik dan sistem pemerintahan telah berubah total dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Penanganan masalah kebudayaan sepenuhnya ada di tangan rakyat Indonesia. KK yang diselenggarakan setelah Indonesia adalah Kongres Kebudayaan Indonesia dan ditangani sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

BAB IV KONGRES KEBUDAYAAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA

Tentang penyelenggaraan KK sesudah Indonesia merdeka sudah banyak orang yang mengetahui, tetapi kapan KK pertama diselenggarakan pernah menjadi pertanyaan banyak pihak. Sebagian orang menyatakan bahwa KK yang diselenggarakan di Magelang tahun 1948 sebagai Kongres Kebudayaan II, bahkan yang III. Kekacauan tentang awal kongres didasarkan pada pertimbangan bahwa pertemuan kebudayaan yang diselenggarakan di Sukabumi pada akhir tahun 1945 dapat dijadikan sebagai tonggak di bidang kebudayaan sebagai Kongres Kebudayaan yang pertama sesudah Indonesia merdeka, dan kongres di Magelang merupakan lanjutannya.

Tetapi tentang pertemuan budaya di Sukabumi itu sendiri juga masih terdapat silang pendapat. Menurut buku *Kronik Revolusi I*, pertemuan itu diselenggarakan tanggal 31 Desember 1945 dan beritanya dimuat dalam majalah *Pantja Raja*, tanggal 15 Januari 1946.⁷³ Tetapi menurut Mr. Wongsonegoro pertemuan itu diselenggarakan pada bulan November 1946. Mana yang benar, pada akhir 1945 atau tahun 1946?

Selanjutnya, oleh Mr. Wongsonegoro pertemuan di Sukabumi itu disebutnya sebagai Kongres Kebudayaan I dan Kongres Pendidikan di Solo tahun 1947 sebagai Kongres Kebudayaan II. Hal ini dikatakan pada hari kedua KK di Magelang sebagai berikut: *'Pertama kali disebut kongres di Sukabumi dalam tahun 1946 (bulan November) yang diliputi suasana pertempuran. Pada saat itu diterima sebuah resolusi mengenai perubahan ('hervorming') Kementerian Pengajaran menuju ke Kementerian Kebudayaan. Kedua kalinya adalah di Solo bulan April 1947, yaitu dengan dilangsungkannya Kongres Pendidikan yang dapat pula disebut Kongres Kebudayaan.'*⁷⁴ Dengan demikian KK di Magelang dapat disebut sebagai KK III. Kekacauan tentang urutan KK itu juga dilakukan oleh *Majalah Indonesia* (Nomor Kongres), karena dalam kata Pengantar pada terbitan No. I - II tahun 1950 disebutkan bahwa dalam terbitan itu dimuat laporan (*verslag*) *'Kongres Kebudayaan ke-2, diadakan akhir Agustus tahun 1948.'*⁷⁵

⁷³ Pax Benedento (penyunting) *Kronik Revolusi Indonesia, Bagian I (1945)*, KPG Jakarta 1999, hal. 283.

⁷⁴ *Majalah Indonesia*, No. I-II, Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1950, hal. 20.

⁷⁵ *Majalah Indonesia*, No. I-II, Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1950, hal. 1.

Sementara itu pihak lain berpendapat bahwa kongres di Magelang adalah Kongres Kebudayaan Indonesia pertama, karena pertemuan kebudayaan di Sukabumi belum dipersiapkan secara baik sebagai layaknya sebuah kongres. Masalah ini diakui juga oleh Wakil Presiden Moh. Hatta yang menyatakan bahwa kongres tahun 1948 bukan yang pertama, tetapi beliau menyatakan setuju jika kongres itu dinyatakan sebagai Kongres Kebudayaan Indonesia pertama. Dalam sambutan di KK tahun 1948 antara lain beliau mengatakan alasannya sebagai berikut: *'Sebenarnya bukan yang pertama, karena yang pertama telah diadakan sebelumnya ini, akan tetapi boleh juga disebut bahwa ini adalah kongres yang pertama karena persiapan-persiapan dan sebagainya lebih luas daripada yang dahulu, yang diadakan pada permulaan revolusi.'*⁷⁶ Apa yang dimaksudkan dengan kata *'sebelumnya ini,'* oleh Bung Hatta itu adalah pertemuan kebudayaan yang diselenggarakan di Sukabumi.

Perbedaan pandangan ini sempat membuat bingung ketika akan menyebut Kongres Kebudayaan di Magelang. Hal itu terjadi karena belum disepakatinya makna kata kongres. Mereka belum sepakat apakah berbagai pertemuan budaya sebelumnya itu sebagai pertemuan budaya biasa, konferensi budaya, musyawarah budaya ataukah sebagai Kongres Kebudayaan? Oleh majalah Pantja Raja disebutnya sebagai *'Permusyawaratan Kebudayaan,'* yang lain menyebutnya sebagai *'Konferensi Kebudayaan'* dan ada yang malahan menyebutnya sebagai *'Kongres Kebudayaan.'*

Sesuai dengan penegasan Moh. Hatta, maka dasar hitungan untuk menentukan urutan KK dimulai dari Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di pendopo Kabupaten Magelang, tanggal 20 – 25 Agustus 1948 sebagai Kongres Kebudayaan I. Ini berarti tiga tahun setelah bangsa dan budaya Indonesia secara *'de facto'* dan *'de jure'* diakui keberadaannya. Kongres berupaya mencari dan menyepakati format bagaimana menata bangsa dan budaya arah ke depan. Dari pihak Panitia meminta kepada para pemrasaran dan pendebat agar memperhatikan dua hal: (1) bagaimanakah caranya mendorong kebudayaan kita supaya dapat maju cepat; dan (2) bagaimana caranya agar kebudayaan kita jangan sampai terus bersifat kebudayaan jajahan, akan tetapi supaya menjadi suatu kebudayaan yang menentang tiap-tiap anasir *'cultureel imperialisme.'*

Oleh karena itu posisi KK tahun 1948 amat penting karena melalui kongres tersebut akan disusun berbagai kesepakatan strategis dan konseptual

⁷⁶ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun 1950, hal. 14.

untuk kebijakan memajukan kebudayaan bangsa dalam suatu pemerintahan sendiri. Setelah KK I tahun 1948, disusul dengan KK II tahun 1951, KK III tahun 1954 dan KK IV tahun 1991. Untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan KK setelah Indonesia merdeka di bawah ini dipetik beberapa hal penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

1. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1948 (I)

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan 3 tahun sesudah Indonesia merdeka itu, berlangsung pada tanggal 20 - 24 Agustus 1948, di Pendopo Kabupaten Magelang. Kongres ini ditetapkan sebagai KK pertama, sebagai bentuk pelaksanaan dari keputusan konferensi persiapan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 1948.

Gagasan untuk menyelenggarakan kongres mula-mula datang dari Pusat Kebudayaan Kedu, kemudian diambil alih oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Campur tangan Kementerian itu menurut Mr. Ali Sastroamidjojo adalah sebagai *'campur tangan passief,'* saja.⁷⁷

Kongres Kebudayaan I diselenggarakan saat situasi pemerintahan dan keamanan Negara belum stabil. Dapat dibayangkan betapa sulitnya Panitia Penyelenggara dalam mempersiapkan penyelenggaraan sebuah KK dalam situasi pergolakan dan peralihan itu. Tentang *'kenekadan'* para budayawan, seniman dan cendekiawan untuk menyelenggarakan KK pada saat itu digambarkan oleh Dr. Bahder Djohan sebagai keberanian dan ketulusan pendekar-pendekar kita yang sangat membanggakan. Di saat Belanda bersiap-siap untuk menghancurkan pusat pemerintahan Republik Indonesia, di saat bangsa Indonesia secara halus telah dapat meraba akan bahaya yang mengancam lambang perjuangannya, di saat itulah Kongres Kebudayaan di Magelang diadakan sebagai tantangan yang nyata terhadap bala yang akan datang. Kondisi yang serba sulit itu juga digambarkan oleh Sutarjo yang menjabat sebagai Ketua Penyelenggara kongres sebagai berikut:

'Betul banyak kesukaran yang telah kami alami. Misalnya Bapak Mr. Wongsonegoro sendiri telah beberapa kali dalam malam gelap gulita mengadakan istirahat yang terpaksa di tengah-tengah sawah, karena mobilnya pun beristirahat, walaupun zonder izin beliau. Begitu pula Bapak Bupati Magelang telah mengerahkan beberapa Lurah membuat

⁷⁷ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 13

*balai-balai sekedar untuk menghilangkan kesukaran-kesukaran disebabkan masalah penginapan dsb.*⁷⁸

Kesulitan transportasi juga dialami oleh Ki Mangoensarkoro, salah seorang pemrasaran. Ia terpaksa harus menunda penyampaian prasarannya satu hari sebab ia berangkat dari Yogya pagi hari dan tiba di Magelang baru pada sore harinya. Tetapi semua kesulitan itu dapat diatasi berkat bantuan dan gotong royong dari berbagai pihak. Bantuan itu tidak hanya datang dari pendudukan Magelang tetapi juga dari Temanggung dan sekitarnya, mulai dari berupa pinjaman piring, cangkir, sendok, kursi dan pemasangan lampu-lampu penerang, hingga tukang angkut air ke balai-balai tempat para peserta kongres. Bantuan juga datang dari masyarakat Solo dan Yogyakarta.

Di samping itu juga dilaporkan oleh Wongsonegoro selaku Ketua Kongres, bahwa kongres diselenggarakan dalam situasi yang serba sulit. Antara lain diakui bahwa *'kini segala sesuatu dalam negara kita masih serba sulit, oleh sebab blokade politik dan terutama ekonomi Belanda, terlebih pula yang mengenai perhubungan.'* Ditambah lagi karena diselenggarakan setelah beberapa bulan pemberontakan PKI-Muso dan Belanda bersiap-siap melancarkan serangan terhadap Republik Indonesia. Sebagai gambaran bahwa situasi negara belum aman, sebelum menyampaikan pidatonya Mr. Wongsonegoro mengajak para peserta kongres untuk bersama-sama menghenjingkan cipta selama 1 menit untuk mendo'akan beberapa korban ketika terjadi insiden yang menimpa pemuda-pemuda kita yang sedang merayakan peringatan 3 tahun kemerdekaan pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1948 di Pegangsaan Timur, Jakarta.

Selanjutnya Mr. Wongsonegoro menjelaskan pertimbangan diselenggarakannya kongres, meskipun masih dalam situasi sulit, semata-mata karena pertama didorong oleh keinginan untuk turut merayakan Hari Ulang Tahun ke-3 proklamasi kemerdekaan RI. Yang kedua karena dengan didasari oleh *'hasrat yang bernyala-nyala untuk menyelenggarakan dan memperkembangkan kebudayaan kita, sebagai sumbangan menyelesaikan perjuangan dan revolusi kita'* dan *'didasarkan pada pada keinginan untuk merayakan ulang tahun ketiga kemerdekaan.'*

Di samping itu penyelenggaraan Kongres Kebudayaan tahun 1948 juga didorong oleh adanya krisis kebudayaan. Meskipun saat itu masih dalam suasana sulit karena berlangsung revolusi perjuangan, dengan *'hasrat yang bernyala-nyala'* mereka menyelenggarakan Kongres Kebudayaan. Oleh

⁷⁸ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 7.

karena itu kongres ini bertujuan akan *'mengupas, meninjau, memecahkan segala soal, pula mengumpulkan segala anasir yang berguna sebagai pokok yang mengakibatkan lancarnya perjuangan kita. Titik berat, kita letakkan kepada hari kemudian, untuk itu perlu dipakai pangkalan keadaan sekarang yang sebagai di atas diterangkan tidak pula dapat dilepaskan dengan sekaligus dari keadaan yang telah lampau.'*⁷⁹

Dalam pidato sambutannya Mr. Ali Sastroamidjojo, selaku Menteri PP dan K lebih menekankan pengertian tentang krisis kebudayaan, bahwa penyebabnya bukan saja karena kita sedang dalam revolusi, melainkan sudah dimulai sejak jaman penjajahan. Mr. Ali Sastroamidjojo mengatakan bahwa: *'tiap-tiap revolusi mempunyai krisis kebudayaan. Pada permulaan ialah rusaknya keseimbangan kebudayaan yang lahir dan kebudayaan yang batin, akan tetapi selain daripada itu saya kekukakan di sini bahwa krisis itupun disebabkan oleh karena angkatan muda yang berhadapan dengan angkatan tua, yang di dalam riwayat kebudayaan selalu berhadapan dan menimbulkan pertentangan yang hebat sekali.'*⁸⁰

Sementara itu Moh. Hatta dalam sambutannya menyinggung tentang perlunya memajukan kebudayaan bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, kita memiliki riwayat kebudayaan yang hebat, harum dan tidak kalah dengan kebudayaan negeri-negeri lain. Selanjutnya beliau mengatakan: *'Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan Negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa.'* Dalam hal memajukan kebudayaan Moh. Hatta mengatakan: *'Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merubah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bias maju.'*⁸¹

Sedangkan Presiden Soekarno, dalam pidatonya menyatakan bahwa pada kongres inilah kita mulai dengan memperbincangkan **'kebudayaan nasional.'** Mengapa demikian? Karena, *'...kita ini di dalam sejarah kita yang telah lampau ribuan tahun yang telah lalu, belum pernah mengalami kebudayaan nasional, tidak di jaman Belanda, tidak pula di jaman kebesaran kita sebelum jaman Belanda, tidak di jaman Sriwijaya atau di jaman Majapahit.'*⁸²

⁷⁹ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 12.

⁸⁰ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 13.

⁸¹ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I 1950, hal. 14-15.

⁸² Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 17.

Meskipun KK Magelang banyak hambatan yang dihadapi, tetapi tidak menyurutkan hasrat yang bernyala-nyala untuk menyelenggarakan dan memperkembangkan kebudayaan kita. Ketua kongres Wongsonegoro mengatakan bahwa justru pada masa pergolakan dan peralihan itu kebudayaan mengalami krisis yang sangat hebat, sehingga harus ditinjau kembali secara seksama. Krisis tersebut, katanya, merupakan keadaan yang harus segera diatasi, dan untuk itu kebudayaan kita membutuhkan rekonstruksi dan renaissans agar bisa menjadi motor dan energi segala alat perjuangan kita.

Dengan demikian kebudayaan sebagai tenaga penggerak segenap usaha perjuangan tentu tidak terbatas pada kesenian saja, seperti yang biasanya ditafsirkan orang. Kongres yang menurutnya merupakan pengisi jiwa dan kekuatan baru bagi bangsa kita untuk meneruskan perjuangan dan penyelesaian revolusi itu, bertujuan meninjau mengupas, dan memecahkan masalah krisis yang ada agar kebudayaan bisa dikembangkan untuk melancarkan perjuangan bangsa. Kongres ini mendapatkan perhatian besar dari segala lapisan masyarakat.

Pada malam Resepsi dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Ny. Fatmawati, Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Ny. Rahmi Hatta, Konsul India, Moh. Junus, Panglima Besar Sudirman dan lain-lain Pembesar Tentara, Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Penerangan Moh. Natsir, Sekretaris Negara Mr. Iksan, Sekretaris Kementerian PP dan K, budayawan, seniman dan pemangku adat serta para pemrasaran. Perhatian terhadap KK pertama amat besar, sehingga persediaan tempat duduk 600 kursi kurang dan banyak peserta dan undangan resepsi terpaksa berdiri. Acara Malam Pertunjukan diselenggarakan di Pendopo Gubernuran. Gedung ini dulunya bekas gedung Residen Belanda, dan di tempat inilah Pangeran Diponegoro ketika perang melawan Belanda tertipu lalu ditangkap.

Judul prasaran (*prae-advies*) dan pemrasaran (*prae-adviseur*) yang dibahas dalam kongres antara lain sebagai berikut:

- Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat, oleh Ki Mangoensarkoro.
- Kebudayaan dan Hukum Masyarakat, oleh Prof. Mr. Djokosoetono.
- Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi, oleh Prof. Mr. Soenarja Kolo-paking.
- Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota, oleh Prof. Ir. Poerbodiningrat.
- Kebudayaan dan Pembangunan Negara, oleh Mr. Koentjoro Poerbo-pranoto.
- Kebudayaan dan Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantoro.

- Kebatinnan sebagai Alat dalam Pembangunan Negara, oleh Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedjodiningrat dan Ki Mangoensoedarso.

Selanjutnya, pembicaraan mengenai lembaga kesenian disampaikan Armijn Pane, sedangkan pembicaraan mengenai cabang kesenian yakni seni suara, sastra, seni rupa, dan sandiwara yang masing-masing disampaikan oleh B. Sitompul, Anas Ma'ruf, B. Resobowo, dan Aboe Hanifah.

Acara Kongres secara lengkap disusun sebagai berikut:

8. Jum'at, tanggal 20 Agustus 1948

Resepsi jam 19.30 di Pendopo Kabupaten Magelang, dengan acara:

- Pembukaan oleh Ketua Umum, Mr. Wongsonegoro
- Ucapan Selamat Datang oleh Ketua Penyelenggara Kongres, Sdr. Soetarjo
- Lain-lain sambutan
- Amanat PYM. Presiden
- Keterangan: dalam resepsi akan diperdengarkan lagu-lagu Barat (musik) dan gamelan.

9. Sabtu, 21 Agustus 1948

- a. Pembukaan Stelling Kebudayaan di Gedung Sekolah Guru Negeri (Alun-alun Selatan) pada jam 09.00 pagi.
- b. Rapat ke-1 (Panti Perri jam 11.00-12.00), dengan acara:
 - Pembukaan oleh Ketua Umum
 - Menetapkan acara dan cara perundingan
 - Membicarakan prae-advies Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat, oleh Ki Mangoensarkoro
 - Debat
 - Kesenimpulan
- c. Malam pertunjukan ke-1 di Panti Perri jam 19.30, dengan acara:
 - Lagu Indonesia Raya
 - Pembukaan oleh Ketua Seksi Pertunjukan, Sdr. Soemanto
 - Koor (Himpunan Musik Indonesia Yogyakarta)
 - Sandiwara: Bayangan di waktu Fajar, gubahan Sdr. Usmar Ismail (Sumbangan 'Persari' pimpinan 'Bapersi').

10. Minggu, 22 Agustus 1948

- a. Rapat ke-2 (Panti Perri, jam 09.00-14.00), dengan acara:
 - Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Hukum Negara, oleh Prof. Mr. Djokosoetono.

- Debat
 - Kesimpulan
 - Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi, oleh Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking.
 - Debat
 - Kesimpulan
- b. Rapat ke-3 (Panti Perri, jam 19.30-23.00), dengan acara:
- Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota, oleh: Prof. Ir. Poerbaningrat
 - Debat
 - Kesimpulan
 - Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pembangunan Negara, oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto
 - Debat
 - Kesimpulan

11. Senin, 23 Agustus 1948

- a. Rapat ke-4 (Panti Perri, jam 09.00-14.00), dengan acara:
- Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pendidikan, oleh Ki Hadjar Dewantoro
 - Debat
 - Kesimpulan
 - Membicarakan prae-advies: Kebatinan sebagai alat dalam pembangunan Negara, oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat, KKA. Soejomentaram, dan Ki Mangoensoedarso
 - Debat
 - Kesimpulan
- b. Rapat ke-5 (Panti Perri, jam 19.30-23.00, dengan acara:
- Membicarakan Bentuk Organisasi penyelenggaraan Kebudayaan pada umumnya.
 - Membicarakan soal Pendirian Akademi Kesenian
 - Membicarakan Kesimpulan-kesimpulan dari pelbagai prae-advies di hari-hari yang telah lalu.

12. Selasa, 25 Agustus 1948

- a. Rapat ke-6 (Panti Perri jam 09-14.00), dengan acara:
- Jika perlu meneruskan pembicaraan rapat ke-5
 - Membicarakan berdirinya Lembaga Kebudayaan (Prae-advieseur sdr. Armijn Pane)
 - Lain-lain hal yang akan dikemukakan
 - Penutup

- b. Malam Pertunjukan ke-11 di Pendopo Gubernur mulai jam 19.30, dengan acara:
- Pembukaan oleh Ketua sub-panitia Pertunjukan, sdr. Madenan.
 - Musik 'GENTONO' ciptaan Sastrowidatan oleh Ikatan Seni Musik Surakarta, di bawah pimpinan Dr. Padmonegoro.
 - Konsert oleh Stafmusiek Kepolisian Negara Mertoyudan di bawah pimpinan RAJ. Soedjasmin.
 - Tari Minangkabau oleh 'Seniman Muda' Surakarta (pimpinan sdr. Abdulrachman)
 - Tari Nusantara, sumbangan P. Surjohamidjojo, pimpinan P. Prabuwino.
 - Tari Jawa (diperbaharui) sumbangan dari 'Instituut Kebudayaan Indonesia' Yogyakarta, pimpinan P. Pakuningrat.
 - Pencak, sumbangan dari IPSI (Ikatan Pencak Seluruh Indonesia)
 - Tari Bali, tari Legong, tari Baris, diselenggarakan oleh GRISK. Yogyakarta.
 - Tari Wireng (Sulyapati-Jayengsari) sumbangan P. Surjohamidjojo, Surakarta.

Sebelum acara Penutupan Kongres, dibacakan kesimpulan. Kutipan kesimpulan (**ejaan disesuaikan**) adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Negara

I. Berhubung prae-advies Ki Mangoensarkoro, Prof. Mr. S. Kolopaking dan Mr. K. Purboparanoto, serta perdebatan mengenai itu.

- 1. Kemerdekaan nasional adalah syarat mutlak, supaya dapat berkembang kebudayaan nasional Indonesia.*
- 2. Ditegaskan, bahwa kebudayaan meliputi segenap kehidupan manusia dalam masyarakat (baik lahir maupun batin). Tidak hanya mengenai kesenian saja.*
- 3. Bahwasanya di Indonesia ada kekacauan kebudayaan, terutama akibat penjajahan dan kapitalisme di zaman yang lalu, beserta peralihan sosial yang cepat sekali di waktu yang akhir-akhir ini.*
- 4. Bahwasanya perlu dalam pokoknya diperbaharui jiwa manusia Indonesia guna menciptakan manusia, masyarakat dan kebudayaan baru, dengan mewujudkan dan memperkembangkan nilai-nilai kebudayaan*

- (*cultuur-waarden*) yang telah dapat kita 'sublimeer' (resapkan) dalam 'Pancasila' negara kita.
5. Bahwasanya kemakmuran rakyat adalah satu syarat yang amat penting, supaya kebudayaan dapat berkembang secara merata dan demokratis.
 6. Bahwasanya kebudayaan itu pada pokok-sendinya bersifat 'universeel' dari kebudayaan tiap-tiap bangsa mempunyai coraknya sendiri (Nasional).
 7. Bahwasanya berhubung dengan adanya krisis kebudayaan barat di seluruh dunia, maka berkembangnya kebudayaan Indonesia baru itu akan memberikan bantuan yang berharga guna pembangunan dunia dalam lapangan batin dan kebudayaan.

Kebatinan dalam Hubungan dengan Kebudayaan

- II. Berhubung dengan *prae-advies* Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Mangoensoedarso dan Ki Hageng Soerjomentaram serta perdebatan mengenai itu.
 1. Kemajuan batin manusia adalah salah suatu keharusan untuk memajukan kebudayaan.
 2. Kebebasan jiwa yang dijalankan dengan tidak mengganggu keselamatan masyarakat, adalah suatu keharusan bagi tiap-tiap orang dalam usahanya menciptakan kebudayaan.
 3. Kemajuan batin manusia hendaknya jangan semata-mata ditujukan kepada kesempurnaan diri, melainkan hendaknya diperuntukkan guna keselamatan masyarakat seluruhnya.
 4. Kemajuan batin tidak bertentangan dengan kemajuan lahir: kemajuan kedua-duanya adalah syarat-syarat mutlak dalam kemajuan kebudayaan dan masyarakat.
 5. Batin manusia yang teguh adalah syarat mutlak dalam perjuangan kemerdekaan negara.

Kebudayaan dan Pendidikan

- III. Kesimpulan mengenai *prae-advies* Ki Hadjar Dewantoro, serta perdebatan hal itu.
 1. Sesuai dengan keputusan Kongres tentang pengertian kebudayaan (Panitia Satu), maka dapat ditentukan bahwa pendidikan termasuk usaha yang terpenting dalam memelihara, memajukan dan menyempurnakan kebudayaan.
 2. Kebudayaan Indonesia adalah nilai-nilai kebudayaan sebagai pancaran jiwa bangsa yang tumbuh antara segenap golongan di seluruh kepulauan Indonesia.

3. Dalam masa peralihan ini maka kewajiban pendidikan ditujukan kepada masyarakat baru adalah menghilangkan segala bekas-bekas dan sisa-sisa kebudayaan penjajahan dan feodal agar supaya benih kebudayaan baru yang telah tumbuh dapat berkembang dengan suburnya.
4. Pendidikan kita tujukan langsung kepada kebudayaan dan masyarakat baru dan kita dasarkan pada imbalan pendidikan lahir dan batin, hingga tercapailah kebudayaan nasional yang harmonis.
5. Dalam usaha pendidikan nasional paedagogis maupun metodis kita pergunakan pula segala syarat dan pendapat-pendapat yang ada di seluruh dunia dan yang berfaedah bagi kemajuan hidup dan penghidupan manusia.

Kesenian

- IV. Kesimpulan mengenai prae-advies Sdr. Anas Ma'ruf, Sdr. B. Sitompul, Sdr. B. Resobowo, dan Sdr. Abu Hanifah, serta perdebatan hal itu.
 1. Kesenian ialah penjelmaan getaran jiwa yang asli.
 2. Kesenian Indonesia baru sewajarnya memancarkan kesenian yang representatief universeel, selaras dengan tujuan pembentukan kebudayaan Nasional.
 3. Memelihara segala hasil seni serta mengembangkan dengan memakai segala anasir yang bernilai dari semua zaman dan tempat.

Pembangunan Kota

- V. Kesimpulan mengenai Prae-advies Purbodiningrat, serta perdebatan mengenai hal itu, belum dapat disimpulkan hingga kongres ditutup dan hanya dijelaskan : 'Soal ini akan disusun dan ditinjau kembali.'

Lembaga Kebudayaan

- VI. Disetujui berdirinya Lembaga Kebudayaan Indonesia. Sebagai Ketua sementara dipilih Mr. Wongsonegoro, Ketua Muda (sementara) Dr. Aboe Hanifah. Rancangan Anggaran Dasar diserahkan kepada Redaksi (Mr. K. Poerbopranoto, Armijn Pane cs.) untuk diselesaikan dalam waktu dua bulan.
- VII. Mengusulkan kepada Pemerintah segera berdirinya suatu Akademi Kesenian (Praeadvies Sdr. Sindoe Soewarno)

VIII. Memajukan kepada Pemerintah untuk mengadakan Kementerian sendiri untuk Kebudayaan.⁸³

Tentang rekomendasi No. VIII ini, yakni tentang **pembentukan Kementerian Kebudayaan**, merupakan hasil perdebatan yang materinya berasal dari resolusi yang dikeluarkan oleh 'Permusyawaratan Kebudayaan' yang diselenggarakan di Sukabumi pada akhir tahun 1945. Berita tentang permusyawaratan itu dimuat dalam Majalah Pantja Raja, tanggal 15 Januari 1946. Keputusan permusyawaratan itu antara lain menyampaikan usul sebagai berikut:

- *'Mendesak kepada Pemerintah Pusat supaya secepat mungkin menyelenggarakan pertemuan besar antara wakil-wakil Pemerintah, terutama yang bersangkutan, dengan wakil-wakil perkumpulan kebudayaan, serta ahli-ahli dan peminat lapangan tersebut untuk meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk pemeliharaan dan pembangunan Kebudayaan Nasional;*
- *Mengambil tindakan-tindakan yang tepat supaya secepat mungkin cita-cita Nasional dalam lapangan Kebudayaan berwujud, misalnya dengan:*
 - *Mengadakan Kementerian Kebudayaan lepas dari Pendidikan dan Pengajaran;*
 - *Menyokong dan menganjurkan pendidikan kebudayaan dengan dasar kemerdekaan.⁸⁴*

Usulan tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan, lepas dari Pendidikan dan Pengajaran mencerminkan konsep pemikiran para pendiri bangsa tentang pentingnya kebudayaan di dalam sistem pemerintahan. Kebudayaan sebagai salah satu unsur perekat persatuan kebangsaan dapat menjalankan misinya apabila diwadahi dalam lembaga yang mandiri.

Oleh karena itu sebelum perdebatan tentang Organisasi Kebudayaan dimulai kepada Dr. Abu Hanifah diminta untuk membentangkan isi resolusi yang telah disepakati itu. Dijelaskan oleh Abu Hanifah tentang resolusi Sukabumi, tentang perubahan Kementerian Pengajaran, bahwa diusulkan agar Kementerian Pengajaran dibagi menjadi, yaitu:

1. Kementerian Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, dan
2. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran.

⁸³ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 14.

⁸⁴ Pax Benedicto (penyunting), *Kronik Revolusi Indonesia, Bagian I (1945)*: 1999, hal. 283.

Resolusi kedua, apabila usul pertama tidak dikabulkan maka *'sedikit-dikitnya Kementerian PP dan K diubah nama dan susunannya mengenai tugas masing-masing bagian, dengan diberi nama: **Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Pengajaran**, dengan mengadakan satu Bagian sendiri untuk Bagian Kebudayaan.'*

Sehubungan dengan penjelasan itu pimpinan sidang lalu mempersilakan para peserta untuk memberikan tanggapan. Mr. Soenarjo menguatkan, agar jangan hanya namanya saja yang diubah, tetapi juga dalam bagian-bagian kementerian tersebut. Setelah diadakan perdebatan, kemudian diputuskan oleh rapat untuk mengambil alternatif kedua, yakni yang telah diputuskan dalam konferensi di Sukabumi dan kepada Dr. Abu Hanifah diminta untuk menyusun resolusi kepada Presiden mengenai perubahan sifat Kementerian PP dan K.

Bila dibandingkan dengan bunyi resolusi yang disampaikan oleh Dr. Abu Hanifah dibandingkan dengan yang dimuat dalam buku *Kronik Revolusi I* agak berbeda isinya. Seperti yang tercantum dalam kesimpulan No. VIII, rumusannya mirip dengan yang tercantum dalam buku *Kronik Revolusi I*, yakni: *'Memajukan kepada Pemerintah untuk mengadakan Kementerian sendiri untuk Kebudayaan.'*⁸⁵



Guna memberikan gambaran secara lengkap tentang KK I di Magelang ada baiknya juga disampaikan uraian langkah-langkah yang dilakukan setelah kongres selesai. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah pembentukan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) dan Konferensi Kebudayaan. Untuk LKI tindak lanjut itu berupa finalisasi konsep Anggaran Dasar yang sudah dibahas di dalam kongres dan mendapatkan tanggapan dan masukan dari peserta serta melengkapi nama-nama pengurus LKI.

Dalam kongres dibahas tentang perlunya sebuah lembaga kebudayaan, yang secara independen mengelola upaya memajukan kebudayaan bangsa. Setelah diadakan perdebatan akhirnya disepakati untuk membentuk Lembaga Kebudayaan Indonesia dan sebagai sebagai Ketua sementara ditunjuk Mr. Wongsonegoro dan sebagai Wakil Ketua dari angkatan muda ditunjuk Dr. Abu Hanifah. Berdasarkan putusan kongres tersebut kemudian disusun pengurus definitif LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA yaitu

⁸⁵ Pax Benedento (penyunting), *Kronik Revolusi Indonesia, Bagian I (1945)*: 1999, hal. 283.

sebagai Ketua: Dr. Bahder Djohan, dan Penulis Umum: Suratno Sastroamidjojo. Bahder Djohan selaku ketua LKI menjelaskan bahwa setelah kongres Magelang, ada rencana meresmikan organisasi LKI itu pada tanggal 1 Januari 1949 di Yogyakarta. Tetapi rencana ini gagal karena Yogyakarta sebagai Ibukota Republik pada saat itu diduduki Belanda. Akhirnya LKI baru dapat berdiri setahun kemudian, yakni pada tanggal 9 Maret 1950 di Jakarta.

Untuk memberikan gambaran tentang misi yang diperankan oleh lembaga tersebut dikutip Anggaran Dasar Lembaga Kebudayaan Indonesia (**ejaan disesuaikan**) sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA

Bab I. NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1.

Badan ini bernama 'LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA' dan berkedudukan di Jakarta.

Bab II. SIFAT

Pasal 3.

Tujuan Lembaga ialah:

- a. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang sudah meresap dalam Pancasila, sehingga terbentuk jiwa budaya Indonesia.*
- b. Menyatakan dan menggerakkan jiwa tersebut sehingga dapat berwujud, tumbuh dan berkembang kebudayaan Indonesia, sebagai pancaran jiwa bangsa Indonesia yang hidup dan tumbuh antara segenap golongan di seluruh kepulauan Indonesia.*

Bab IV. USAHA

Pasal 4.

Lembaga berusaha mencapai tujuan itu diantaranya dengan jalan:

- a. Menyelenggarakan museum-museum yang menyimpan hasil-hasil kebudayaan daerah-daerah Indonesia, dan kebudayaan-kebudayaan luar negeri, sehingga menjadi bahan menghidupkan jiwa budaya Indonesia.*
- b. Menyelenggarakan steling-steling (maksudnya pameran) dan pertunjukan-pertunjukan baik yang tetap maupun untuk seketika – tentang buah hasil kebudayaan Indonesia.*
- c. Memelihara perpustakaan untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia, dengan orientasi seluas-luasnya.*

- d. Mengadakan penyelidikan dan menggiatkan (membantu) usaha penyelidikan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kesenian.
- e. Membantu usaha Pemerintah (badan-badan resmi) dan usaha partikelir dalam mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
- f. Mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah-hadiah tahunan atau pun hadiah kehormatan untuk menggiatkan dan menghargai usaha yang terbaik dalam salah satu lapangan kebudayaan.
- g. Mencari kerja sama dengan usaha semacam itu di luar negeri, teristimewa di negeri-negeri yang bersamaan dasar kebudayaannya.
- h. Menyelenggarakan fonds kebudayaan dan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi tumbuhnya kebudayaan Indonesia.
- i. Mengadakan kongres kebudayaan.⁸⁶

Di samping lembaga ini mengadakan persiapan penyelenggaraan kongres kebudayaan juga menyelenggarakan konferensi kebudayaan. Sebagai lanjutan Kongres Magelang, pada tanggal 5-7 Agustus 1950, di Gedung Pertemuan Umum Kotapraja Jakarta Raya diselenggarakan **Konferensi Kebudayaan Indonesia**. Konferensi ini memilih tema: *'Kebudayaan Nasional dan Hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa lain.'* Konferensi ini memiliki makna yang amat penting dan penyelenggaraannya dirancang sama dengan kongres. Adapun kesimpulan (**ejaan disesuaikan**) yang didapatkan dari penyelenggaraan konferensi tersebut adalah sebagai berikut.

Kesimpulan-kesimpulan

KONFERENSI KEBUDAYAAN INDONESIA

Atas usaha dan pimpinan LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA

*Dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 5,6 dan 7 Agustus 1950;
Merundingkan acara Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan luar negeri
bersifat symposium:*

*Mendengarkan preadvis sdr.-sdr. Ki Hadjar Dewantara, Mr. St. Takdir
Alisjahbana, Trisno Sumardjo dan Prof. Soenaria Sanyatavijaya;*

*Memperhatikan kesimpulan-kesimpulan pada Kongres Kebudayaan Nasional
yang dilangsungkan pada tanggal 20-25 Agustus 1948 di Magelang;*

*Mendengar pembicaraan-pembicaraan 19 orang pendebat, di antaranya 5
orang ditunjuk lebih dahulu.*

⁸⁶ *Majalah Indonesia*, No. I-II Tahun ke-1: 1950, hal. 124

MELAHIRKAN PENDAPAT:

1. bahwa pada umumnya tiap-tiap kebudayaan sesuatu bangsa itu merupakan suatu kesatuan yang organis;
2. bahwa teristimewa semenjak bangsa Indonesia telah bernegara yang merdeka dan berdaulat, maka masyarakat Indonesia mencari isi dan bentuk kebudayaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan zaman baru;
3. bahwa terhadap perhubungan dengan kebudayaan luar negeri dalam hal menyempurnakan perkembangan kebudayaan Indonesia, bangsa Indonesia membuka diri secara aktif dan kritis terhadap pengaruh kebudayaan asing itu;
4. bahwa persetujuan KMB mengenai kebudayaan masih dapat dipergunakan asal dalam pelaksanaannya pihak Indonesia bersikap kuat dan sesuai dengan kedaulatannya.

MENGANJURKAN:**A. Kepada Masyarakat dan Pemerintah****Ke luar:**

1. mengadakan persetujuan-persetujuan kebudayaan dengan Negara-negara lain;
2. menempatkan atase-atase kebudayaan di Negara-negara lain;
3. mengirim ke luar negeri dan melakukan dengan luar negeri pertukaran mahaguru, mahasiswa, seniman, sarjana dan calon ahli;

Ke dalam:

1. mengadakan perubahan susunan komisi-bersama kebudayaan;
2. membantu dengan nyata tenaga-tenaga kreatif untuk berkembang;
3. menyempurnakan perlengkapan-perengkapan kebudayaan berupa konservatoria, laboratoria, musea, akademi-akademi kesenian, perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga ilmu;

B. Kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia, supaya mengusahakan terlaksananya apa yang disebut dalam Pasal A.

Jakarta, 7 Agustus 1950.

Kesimpulan-kesimpulan di atas diambil oleh Panitia Kesimpulan Konferensi Kebudayaan Indonesia yang terdiri dari: Ny. Dr. Sutarman, Anas Ma'ruf, Mr. K. Probopranoto,

R. Katamsi, Mr. M. Yamin, Prof. Sunaria Sanyatavijaya, G. Siagian, T. Sumardjo, Mr. St. Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, D. Suradji dan Dr. Bahder Djohan.⁸⁷

Oleh Redaksi majalah Indonesia disampaikan tanggapan 3 surat kabar di Indonesia mengenai tema konferensi seperti di atas. Tiga surat kabar itu adalah surat kabar 'De Locomotief,' Semarang tanggal 12 Agustus 1950, 'Sin Po,' Jakarta tanggal 19 Agustus 1950 dan Pemandangan, Jakarta, 12 Agustus 1950.

Harian 'De Locomotief' Semarang menyebut **konferensi tersebut sebagai Kongres Kebudayaan**, dan menyoroti kesimpulan konferensi yang dipandang tidak tepat, yakni kesimpulan yang menyatakan bahwa pada umumnya tiap-tiap kebudayaan sesuatu bangsa itu merupakan suatu kesatuan yang organis. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa kini bangsa Indonesia telah bebas merdeka 'dan masyarakat mencari bentuk yang sesuai dengan keinginan dan syarat-syarat bagi masyarakat modern.

Sementara itu 'Sin Po' di samping menyoroti masalah perlunya kerja sama kebudayaan di samping mengemukakan dampak negative yang ditimbulkan. Di samping itu Sin Po menyinggung masalah Atase Kebudayaan, bahwa ternyata bersama-sama Duta Besar RRT ((Republik Rakyat Tjina) Mr. Wang Yen Shu, ikut pula Atase Kebudayaan RRT untuk Indonesia Mr. Liang Sang Yuan. Sedangkan surat kabar 'Pemandangan' menyoroti tentang kehadiran Mahaguru Asing di Indonesia agar mendapatkan perhatian, dengan melalui seleksi pemilihan yang ketat agar tidak masuk mahaguru yang berjiwa kolonial, terutama untuk ilmu bidang hukum, sosiologi, ekonomi dan politik.

2. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1951 (II)

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di kota Bandung pada tanggal 6 sampai dengan 11 Oktober 1951, ditetapkan sebagai Kongres Kebudayaan II. Kongres ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Dibandingkan dengan kongres Magelang, kongres ini lebih mengkhususkan diri pada usaha pemecahan berbagai bidang kesenian, tidak pada kebudayaan secara umum.

Ada 4 masalah yang dijadikan bahan pembicaraan mengenai: (1) hak pengarang atau hak cipta; (2) perkembangan kesusastraan; (3) kritik seni, dan; (4) mengenai sensor film. Di samping itu juga secara khusus dibahas tentang organisasi kebudayaan.

⁸⁷ Majalah Indonesia No. 4-5, Tahun I, 1950, hal. 132

Acara Kongres Kebudayaan Indonesia II adalah sebagai berikut:

Saptu, 6 Oktober 1951

- Jam 12.00 siang sampai sore PENERIMAAN TAMU-TAMU oleh Panitia Kongres Kebudayaan.
- Jam 19.30 (malam) Resepsi di gedung Concordia, Jl. Pos Raya Timur Bandung, dengan acara:
 1. Lagu Indonesia Raya
 2. Ucapan selamat datang oleh Ketua Panitia, Dr. Djundjunan
 3. Pembukaan oleh Ketua Lembaga Kebudayaan Indonesia, Dr. Bahder Djohan
 4. Sambutan Menteri PP & K
 5. Amanat PYM. Presiden
 6. Istirahat
 7. Hidangan kesenian: Angklung Modern dan Musik Gentono

Minggu, 7 Oktober 1951.

- Jam 09.00 pagi RAPAT PLENO I, di Jl. Naripan No. 3 Bandung, dengan acara:
 1. Pembukaan oleh Ketua LKI.
 2. Usul Agenda Kongres oleh Pengurus LKI
 3. Usul prosedur Kongres oleh Ketua Panitia, Dr. Djundjunan
- Istirahat
- 4. Pembagian Seksi-seksi
- Jam 17.00 (sore) PEMBUKAAN SETELING (maksudnya: *pameran*) SASTERA di Jl. Naripan No. 1 Bandung
- Jam 20.00-23.00 (malam) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung.

Senin, 8 Oktober 1951

- Jam 09.00-12.00 (siang) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung
- Istirahat
- Jam 15.00-17.00 (sore) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung.
- Jam 20.00-23.00 (malam) MALAM SENI SUARA DAN DEKLAMASI di Jl. Naripan No. 3 Bandung. Musik Angklung, Gentono dengan irama musik Barat.

Selasa, 9 Oktober 1951

- Jam 09.00-12.00 (siang) PENINJAUAN di:
 1. Perguruan Tinggi Teknik
 2. Museum Geologi
 3. Dll.
- Jam 15.00-17.00 (sore) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung.
- Jam 20.00-23.00 (malam) RAPAT PENGURUS LKI DENGAN KETUA-KETUA DAN RAPORTEUR SEKSI-SEKSI (untuk menerima, mengkoordinasikan dan memilih usul-usul Seksi yang akan diajukan dalam Rapat Pleno) di Jl. Naripan No. 3 Bandung.

Rabu, 10 Oktober 1951

- Jam 09.00-12.00 (siang) RAPAT PLENO II, di Jl. Naripan No. 3 Bandung, membicarakan usul-usul dari seksi-seksi.
- Isatirahat
- Jam 15.00-17.00 (sore) Melanjutkan Rapat Pleno II di Jl. Naripan No. 3 Bandung.
- Jam 20.00-22.00 (malam) Malam pertunjukan Seni Drama oleh Sandiwara Ratu Asia di gedung Concordia, Jl. Pos Raya Timur, Bandung.

Kamis, 11 Oktober 1951

- Jam 09.00 (pagi) RAPAT PLENO II di Jl. Naripan No. 3 Bandung, membacakan resolusi, kesimpulan dan keputusan.
- Jam 20.00 (malam) MALAM PERPISAHAN di gedung Jl. Naripan No. 3 Bandung.

Meskipun dalam acara disebutkan akan hadir Paduka Yang Mulia Presiden, tetapi ternyata tidak hadir. Dalam acara pembukaan kongres, telah memberikan sambutan Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K dan Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Presiden RI. Dalam sambutannya Dr. Bahder Djohan melaporkan tentang proses pendirian Lembaga Kebudayaan Indonesia dan program-program untuk mendorong dan menggiatkan segala usaha kebudayaan. Di samping LKI telah menyelenggarakan Konferensi Kebudayaan dengan tema Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Asing, juga telah mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan di Bandung. Sementara itu Mr. Wongsonegoro selaku Menteri PP dan K mengharapkan agar kongres ini dapat lebih meningkat dibandingkan dengan KK I yang

seolah-olah lebih memandang kebudayaan dari segi teori semata. Kongres ini jangan hanya menitikberatkan pada kebudayaan kongkrit tetapi juga jangan melupakan inti hakikatnya.

Sedangkan Wakil Presiden Moh. Hatta menekankan bahwa kewajiban kita di samping melaksanakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga membangun kebudayaan dengan jiwa baru. Di samping itu juga menjelaskan tentang hubungan antara ekonomi dan kebudayaan. Bung Hatta tidak setuju dengan pandangan bahwa *'kebudayaan tidak akan bangun tidak akan maju, apabila ekonomi rakyat tidak maju.'*⁸⁸ Ekonomi dan kebudayaan selalu berjalan bersama. Ekonomi dan kebudayaan dapat berkembang dan subur, apabila *'memupuk timbal-balik, ganti-berganti mempengaruhi. Ada kalanya ekonomi meletakkan coraknya pada kebudayaan. Tetapi sebaliknya sering pula terjadi bahwa ciptaan manusia, yang dihidupkan oleh perkembangan kebudayaan, membuka pikiran ke jalan baru untuk memperbaiki dasar produksi.'*⁸⁹ Di samping itu Bung Hatta pun menegaskan bahwa dalam *'melaksanakan pembangunan, minat kita tidak boleh hanya ditujukan pada satu arah saja. Kita harus berkembang ke segala arah.'*⁹⁰

Khusus mengenai kebudayaan Indonesia, Hatta menjelaskan bahwa dalam kenyataan kita sebagai bangsa memiliki berbagai corak kebudayaan. Usaha memajukan kebudayaan agar tidak diarahkan untuk memaksakan menjadi satu, tetapi membangun keselarasan di antara bermacam-macam corak kebudayaan itu. Dengan demikian tercapailah *'bhinneka tunggal ika'* yang diistilahkan sebagai *'persatuan dalam puspa ragam'*. Selanjutnya menurut Hatta, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal akan semakin besar pengaruhnya terhadap kebudayaan kita, yakni akan memperbesar persamaan dan menciutnya perbedaan di antara corak-corak kebudayaan yang ada. Namun, ia tetap yakin bahwa *'persatuan sama sekali tidak akan tercapai, berbagai berbagai perbedaan akan tetap tinggal sebagai tanda hidup dalam masyarakat Indonesia yang begitu luas.'* Konsep inilah yang seharusnya menjadi acuan dan dijadikan bahan kampanye kepada masyarakat dalam rangka membangun kebudayaan sekaligus membangun persatuan bangsa.

Keputusan Kongres Kebudayaan Indonesia II secara lengkap (ejaan disesuaikan) adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Majalah Indonesia, No. 1-2-3, Lembaga Kebudayaan Indonesia, 1952, hal. 21.

⁸⁹ Majalah Indonesia, No. 1-2-3, 1952, hal. 21.

⁹⁰ Majalah Indonesia, No. 1-2-3, 1952, hal. 22.

**PUTUSAN-PUTUSAN KONGRES KEBUDAYAAN
INDONESIA II DI BANDUNG**

(dilangsungkan dari 6 s/d 11 Oktober '51)⁹¹

KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA memutuskan:

I. Mengenai HAK PENGARANG

- a. Istilah Hak Pengarang harus diganti menjadi Hak Cipta.
- b. Perlu diadakan dengan segera:
 - a. Perundang-undangan Hak Cipta Nasional yang sempurna.
 - b. Peninjauan kembali sikap Indonesia terhadap Konvensi Bern.
- c. Perlu didirikan suatu organisasi antara para pencipta yang berupa badan hukum yang diakui sah, untuk menyelenggarakan segala hubungan dan kepentingan pencipta mengenai ciptaannya.

II. Mengenai PERKEMBANGAN KESUSASTERAAN

Menganjurkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia supaya:

1. bekerja sama dengan badan-badan yang telah ada (seumpama: Balai Pustaka) untuk mengadakan Balai Penterjemah yang mengusahakan:
 - a. terjemahan dari bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah, di antaranya yang mengenai filsafat dan keagamaan.
 - b. pendidikan menterjemah.
2. mengadakan hadiah yang tertentu setiap tahun bagi ciptaannya yang terbaik dari sastrawan dan pengarang Indonesia.
3. mengumpulkan dan menerbitkan cerita-cerita lama dan lagu-lagu yang hidup di desa-desa, di antaranya juga lagu-lagu yang tumbuh semasa revolusi.
4. berusaha menyuburkan kesusasteraan dan bahasa daerah di samping kesusasteraan dan bahasa Indonesia.
5. bekerja sama dengan badan-badan kebudayaan di luar negeri, di antaranya dengan P.E.N. Club International, untuk mengadakan pertukaran visitorship para sastrawan.
6. mengadakan dana untuk membantu perkembangan karang-mengarang sandiwara dan film.
7. a. membentuk suatu badan penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku kebudayaan, sehingga buku-buku yang tidak akan menghasilkan

⁹¹ Majalah Indonesia, No. 1-2-3, 1952, hal. 475-479

keuntungan *commercieel* tetapi mempunyai nilai kebudayaan dapat juga diterbitkan.

b. mengusulkan kepada yang berwajib supaya Balai Pustaka dijadikan badan yang otonom, langsung di bawah pimpinan Menteri P.P. dan K. dan dapat bekerja sama dengan L.K.I.

8. mengusahakan berdirinya BALAI SASTERA, baik di Pusat maupun di Daerah-daerah.
9. mengusulkan kepada yang berwajib supaya Balai Bahasa dan Pemerintah dengan segera berangsur-angsur menyiarkan hasil-hasil pekerjaannya dan menganjurkan pemakaian bahasa Indonesia seluas-luasnya.

III. Mengenai KRITIK SENI

Seni adalah hasil dari getaran jiwa dan keselarasan perasaan serta pikiran yang mewujudkan sesuatu ciptaan yang indah dan luhur.

1. Kritik seni harus didasarkan atas:
 - a. pengetahuan dalam arti seni.
 - b. pengertian dari tiap-tiap seni yang akan dikritik.
2. Tujuan kritik seni ialah:
 - a. guna membangkitkan minat para seniman untuk memperbaiki dan mempertinggi mutu dari seni yang diciptakan.
 - b. guna memperkembang dan mempertinggi nilai membanding dari masya-rakat terhadap hasil seni.

Untuk melaksanakan tercapainya tujuan ini perlu diadakan perluasan kesempatan untuk mempertinggi nilai membanding dari masyarakat terhadap seni, misalnya dengan mengadakan:

- a. akademi seni.
- b. mata pelajaran seni dan estetika pada universitas.
- c. museum hasil kesenian.

Soal-soal yang muncul dalam pertikaian antara lain ialah:

1. Tentang Pancasila sebagai dasar atau pedoman seni tidak terdapat persesuaian faham.
2. Pada dasar seni ada perbedaan faham antara:
 - a. seni berdasar hukum yang ada.
 - b. seni untuk masyarakat, dan
 - c. seni bebas.
3. Sudah atau belum adanya seni Indonesia pada masa ini.

IV. Mengenai SENSOR FILM

A.

- I. *Menyetujui dengan suara bulat adanya Sensor Film.*
- II. *Menganjurkan agar Pemerintah segera memperbaharui film-ordonansi, film-verordening, film-besluit 1940 Pedoman Panitia Pengawasan Film dengan memperhatikan anjuran-anjuran sebagai berikut:*

Yang bersifat prefentif dan negatip:

1. *Supaya memperkeras dan memperluas sensor film.*
2. *Supaya dalam melakukan sensor masalah itu dipandang dari berbagai sudut.*
3. *Supaya jumlah anggota panitia sensor diperluas.*
4. *Supaya juga atas poster-poster film dan gambar-gambar reklame untuk film yang akan dipertunjukkan diadakan sensor.*
5. *Supaya sensor terutama terhadap film-film yang menggambarkan kehidupan masyarakat Timur lebih diperluas.*
6. *Supaya menolak film-film yang mengandung propaganda perang dan jua yang bersifat merendahkan bangsa atau golongan.*
7. *Menganjurkan kepada Jawatan Kepolisian supaya pengawasan atas kombinasi filem pokok (hoofdfilm) film pendahuluan (voorfilm) dan film reklame trailers, lebih diperkeras.*
8. *Supaya pembatasan umur yang telah ditentukan ditinjau kembali.*
9. *Mengadakan pemeriksaan kembali film-film yang kini beredar dan belum diperiksa oleh sensor sekarang.*

B.

- 1) *Supaya Pemerintah memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada usaha film nasional untuk berkembang dengan bantuan moril dan materiil.*
- 2) *Supaya mengadakan rencana pemasukan pilem-pilem dari luar negeri (invoerquota).*
- 3) *Supaya Pemerintah mengadakan gedung-gedung bioskop sendiri untuk mempertunjukkan film-film yang tinggi mutunya, yang oleh Pemerintah partikelir tidak dipertunjukkan karena tidak menguntungkan baginya.*
- 4) *Supaya Pemerintah mengadakan usaha-usaha untuk mendidik kader dengan mempergunakan perusahaan film negara.*
- 5) *Supaya Pemerintah berusaha membikin film-film yang tinggi mutunya, demikian juga film-film untuk anak-anak dan untuk sekolah-sekolah, dengan catatan jangan sampai usaha Pemerintah ini merupakan saingan bagi usaha partikelir.*

- 6) Supaya kepada guru-guru dan pendidikan-pendidikan diberikan tugas memberikan penerangan film.
 - 7) Supaya teks dan dialog-dialog bahasan Indonesia dalam film diawasi dan diperbaiki.
 - 8) Mengatur supaya bioskop-bioskop di daerah-daerah selalu ada pilemnya.
 - 9) Supaya Badan Penasihat yang diadakan oleh Kepala Daerah tentang pilem dipertinggi mutunya.
 - 10) Mengajukan kepada pemerintah supaya segera mengadakan hubungan yang nyata dengan UNESCO bagian Commission on Technical Needs of the Press, Film, and Radio untuk memperoleh perbaikan-perbaikan seperti tersebut dalam sub B.
- C. Mengusulkan kepada Pemerintah untuk mendirikan suatu Kantor Urusan Film dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, terdiri dari dua bagian, yaitu:
- 1) Badan Sensor.
 - 2) Badan yang terdiri dari Wakil-wakil Kementerian-kementerian yang ada hubungannya dengan film dan wakil-wakil organisasi kebudayaan, serta orang-orang yang dipandang ahli, dengan tugas memikirkan dan membantu pelaksanaan yang disebut dalam Pasal B.
- D. Mengajukan kepada khalayak ramai supaya menginsyafi bahaya yang dapat diakibatkan oleh film dan karena itu diserukan supaya turut membantu segala usaha Pemerintah untuk menghindari bahaya-bahaya tersebut.

V. Mengenai ORGANISASI KEBUDAYAAN

KONGRES memberikan tugas kepada PANITIA KESIMPULAN*) supaya dengan melalui Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu **2 (dua) bulan** setelah Kongres selesai, memajukan kesimpulan-kesimpulan kepada semua organisasi Kebudayaan/Kesenian, baik yang turut serta dalam Kongres di Bandung, maupun yang tidak sempat datang untuk dipertimbangkan.

Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima kesimpulan-kesimpulan itu, organisasi tersebut diminta supaya menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan-kesimpulan itu. Kemudian 6 (enam) bulan setelah Kongres selesai, yakni pada tanggal 11 Oktober 1951, Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia diminta mengusahakan KONFERENSI guna membicarakan dan

mengambil putusan tentang kesimpulan-kesimpulan itu, dan kemudian membentuk pengurus baru, (dalam konferensi itu hendaknya diundang semua organisasi Kebudayaan/Kesenian ini di seluruh Indonesia, baik yang menyetujui).

Jakarta, Oktober 1951

Pengurus LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA,

KETUA,

PENULIS UMUM

(Dr. Bahder Djohan)

(Soeratno Sastroamidjojo)

**) Panitia ini terdiri dari:*

- 1. Dr. Moerdowo (Solo)*
- 2. Moh. Said (Jakarta)*
- 3. M. Nasution (Jakarta)*
- 4. Mr. Moh. Sjah (Jakarta)*
- 5. Ki Mangoensarkoro (Jogyakarta)*
- 6. Mr. Koentjoro Poerbopranoto (Jakarta)*
- 7. Hamka (Jakarta)*
- 8. Dr. Bahder Djohan (Jakarta)*
- 9. Suratno Sastroamidjojo (Jakarta)*

Sebagai tindak lanjut dari keputusan kongres, pada tanggal 9 Desember 1951, di Jakarta, Panitia Kesimpulan mengadakan sidang lanjutan. Hadir dalam sidang 6 orang, yakni: Ki Mangunsarkoro, Dr. Murdowo, Moh. Said, M. Nasution, Dr. Bahder Djohan, (Ketua LKI), Mr. Moh. Sjah, dan Gaos Hardjasumantri (?). Anggota Panitia Kesimpulan yang tidak hadir adalah Hamka (berhalangan), Suratno Sastroamidjojo (sakit) dan Mr. Kuntjoro Probopranoto (berada di Luar Negeri). Dari Sekretariat LKI sebagai pencatat (notulis) sdr. Sarwedi Sosrosudigdo dan Murasad.

Setelah membaca laporan-laporan stenografis Kongres Kebudayaan Indonesia II di Bandung mengenai acara Organisasi Kebudayaan dan mendengar perdebatan-perdebatan mengenai soal tersebut dalam rapat Pleno Kongres tanggal 10 dan 11 Oktober 1951, maka Panitia menyimpulkan pembicaraan tersebut sebagai di bawah ini. Kesimpulan ini akan dibawa dalam Konferensi Kebudayaan yang akan datang pada bulan April 1952. Bunyi lengkap dari kesimpulan tersebut (**ejaan disesuaikan**) adalah sebagai berikut:

BAB I: TENTANG GERAKAN KEBUDAYAAN

- a. Gerakan Kebudayaan tumbuh dari Rakyat secara bebas.
- b. Gerakan itu bias bersifat Organisasi atau usaha perseorangan.
- c. Untuk melancarkan kerja sama antara Organisasi Kebudayaan dan Perseorangan itu, dan juga untuk memberi dorongan kepada gerakan kebudayaan umumnya, perlu diadakan suatu dewan (namanya terserah).
- d. Dewan tersebut terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh Kongres.
- e. Kewajiban Dewan ini ialah: Menyelenggarakan putusan-putusan Kongres.
- f. Untuk pekerjaan sehari-hari Dewan ini memilih di antara mereka beberapa orang yang merupakan suatu Badan Bekerja.

BAB II: ISI GERAKAN KEBUDAYAAN

Gerakan Kebudayaan meliputi usaha-usaha di lapangan:

1. Ilmu Pengetahuan. 2. Kesenian. 3. Pandangan Hidup.

BAB III: PEMERINTAH DAN USAHA KEBUDAYAAN

1. Pemerintah mengadakan kesempatan sebaik-baiknya untuk perkembangan kebudayaan rakyat.
2. Pemerintah menjaga terjaminnya kebebasan perkembangan usaha-usaha kebudayaan.⁹²

Sesuai dengan Keputusan Sidang Panitia Kesimpulan di atas, maka pada hari Senin, tanggal 12-14 April 1952 di Jakarta diselenggarakan **KONFERENSI KEBUDAYAAN INDONESIA**. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kongres di Bandung, pada tanggal 14 April 1952 peserta Konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya **BADAN MUSYAWARAH KEBUDAYAAN NASIONAL (BMKN)**.

Badan dibentuk sesuai dengan dasar-dasar yang telah disepakati oleh Konferensi tersebut khususnya pada bagian tentang Organisasi Kebudayaan. Peserta Konferensi adalah organisasi kebudayaan dan perorangan. Dari organisasi antara lain: Lembaga Kebudayaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, PEN Club, Taman Siswa, Himpunan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, ASRI Yogyakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongken-Werun Minahasa,

⁹² Majalah Indonesia No. 1-2-3, Tahun II, 1952, hal. 485-486

Yayasan Kebudayaan Batak, Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Rakyat Suara Timur Padang dan lebih dari 120 organisasi kesenian dan sebagainya dari berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Timur, dan Kalimantan.

Pada tanggal 12 Mei 1952, Lembaga Kebudayaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Kongres Kebudayaan I mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke dalam BMKN. Dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952, No. J.A.5/100/10, Anggaran Dasar (AD) BMKN disahkan dan BMKN diakui sebagai Badan Hukum.

Segara setelah dibentuk, dilanjutkan dengan penetapan pengurus. Adapun nama-nama pengurus BMKN adalah sebagai berikut:

1. Gaos Hardjasoemantri
2. Suratno Sastroamidjojo
3. Dr. Suharso
4. JE. Tatengkeng
5. Ki Mangunsarkoro
6. Moh. Said
7. Sugito
8. Achdiat Kartamihardja
9. Trisno Sumardjo
10. Anas Ma'ruf
11. Boejoeng Saleh
12. Intojo
13. Armijn Pane
14. Joebaar Ajoeb
15. Mr. St. Mohd. Sjah
16. Mr. Wongsonegoro
17. D. Marpaung
18. S. Sunardja
19. MA. Salmun
20. Prof. Mr. Sunarjo Kolopaking⁹³

Sedangkan untuk Badan Pekerja ditetapkan oleh Konferensi sebanyak 7 orang yang diambil di antara Pengurus, yaitu 5 orang dari Jakarta dan 2 orang dari luar Jakarta. Di samping itu Pengurus juga membuat ketetapan bahwa Ketua Pengurus akan berganti-ganti, dipilih untuk masa 3 bulan, tetapi apabila habis masanya, boleh dipilih lagi. Sebagai Ketua Pengurus pertama adalah S. Mangoensarkoro, dalam giliran kedua terpilih Mr. Wongsonegoro, dan yang ketiga Dr. Bahder Djohan.

⁹³ Laporan Hasil Rapat BMKN, 1954, hal. 4.

Sebagai Badan Pekerja dipilih sebagai berikut:

1. Gaos Hardjosoemantri, sebagai Ketua
2. Anas Ma'ruf, sebagai Penulis (hingga Trisno Soemardjo kembali dari perjalanannya ke laur negeri. Kemudian diangkat sebagai penulis Joebaar Ajoeb).
3. Moh. Said, kemudian diganti oleh Mr. St. Mohd. Sjah
4. Intojo
5. Armijn Pane
6. Dr. Soeharso, dari Surakarta; kemudian diganti oleh S. Sumardjo dari Bandung.
7. J.E. Tatengkeng, dari Makassar.⁹⁴

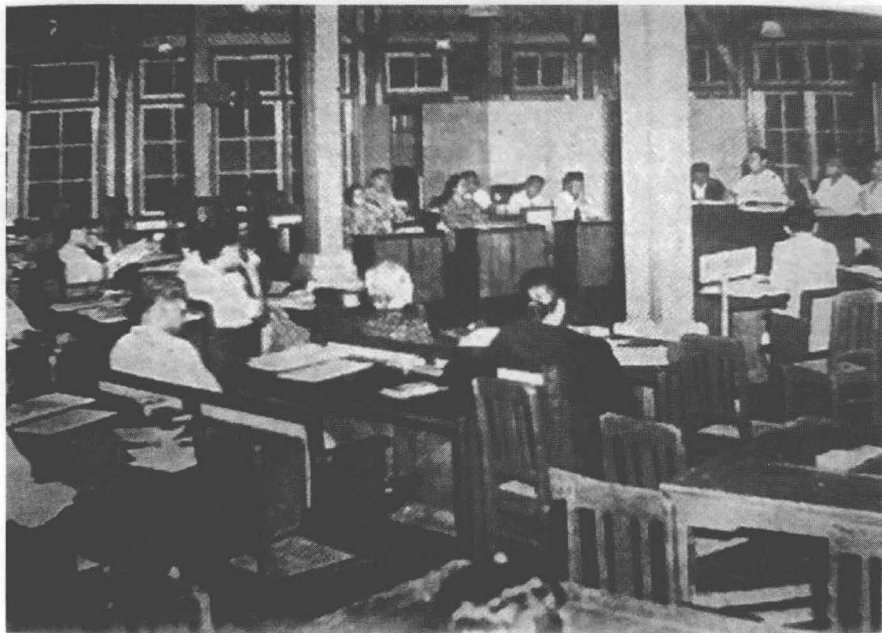


Wakil Presiden RI. Bung Hatta sedang menyampaikan sambutan pada pembukaan Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung

⁹⁴ Laporan Hasil Rapat BMKN, 1954, hal. 5.



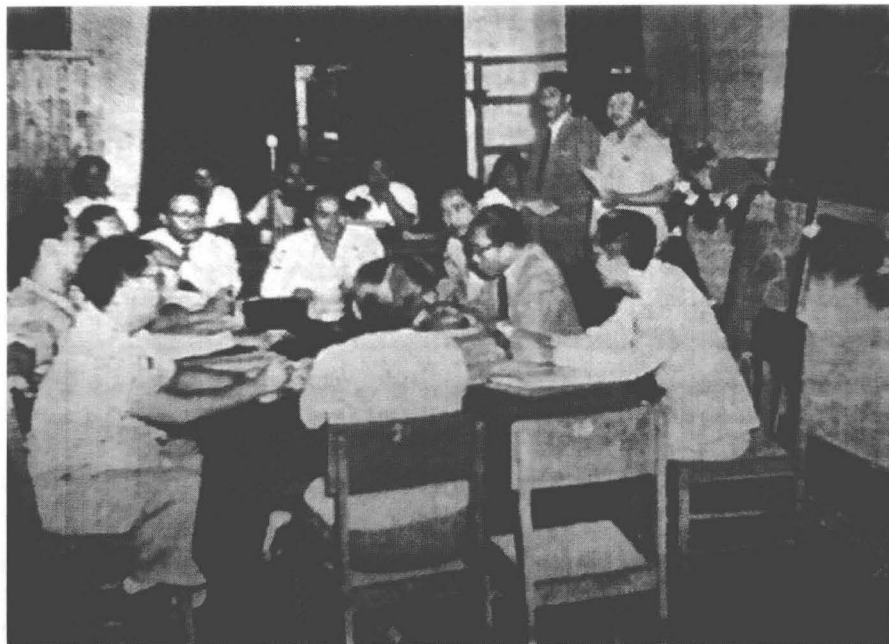
Sidang Seksi Kritik Seni pada Kongres Kebudayaan 1921 di Bandung



Sidang Seksi Sensor Film pada Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung



Sidang Seksi Perkembangan Kesusasteraan Indonesia, pada Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung



Sidang Panitia Kesimpulan, Kongres Kebudayaan 1951, di Bandung⁹⁵

⁹⁵ Foto-foto diambil dari Majalah Indonesia tahun 1951.

3. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1954 (III)

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun 1954, tiga tahun setelah Kongres Kebudayaan II, yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 23 September 1954 di Surakarta ditetapkan sebagai Kongres Kebudayaan III. Berbeda dengan kongres sebelumnya, Kongres Kebudayaan kali ini ada 2 keistimewaan:

1. Kongres disiapkan oleh lembaga kebudayaan baru, yaitu Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN).
2. Kongres diselenggarakan bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan Rapat Umum BMKN.

Kalau dalam kongres yang pertama di Magelang tahun 1948 baru sampai pada meletakkan dasar-dasar kebudayaan nasional, dan pada kongres yang kedua di Bandung tahun 1951 mempersoalkan sekitar kesusasteraan, hak cipta dan film, dalam kongres ketiga tahun 1954 menyoroiti masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum pelajar, masyarakat kota, buruh dan tani. Pilihan tema kongres diputuskan dalam sidang Pengurus BMKN keduabelas tanggal 18, 19 dan 20 Oktober 1953. Dalam sidang tersebut diputuskan dua hal:

1. Bahwa BMKN akan mengadakan **Rapat Umum** pada bulan April 1954 di Surakarta;
2. Bersamaan dengan Rapat Umum tersebut akan dilanjutkan dengan simposium dengan acara: '*Pendidikan Kebudayaan.*'

Dalam rapat tersebut juga disepakati kriteria penunjukan praeadvies (disebutnya sebagai referensi) yaitu:

1. seorang dari kalangan perguruan;
2. seorang dari kalangan seniman yang banyak mengetahui soal-soal pendidikan kebudayaan untuk masyarakat;
3. seorang kalangan masyarakat seniman yang mengetahui soal-soal pendidikan kebudayaan untuk massa buruh dan tani.

Ketika sidang keempat belas tanggal 1 dan 6 Februari 1954 terjadi perkembangan baru, yaitu rencana penyelenggaraan simposium diganti menjadi Kongres Kebudayaan III. Di samping itu mengenai waktu penyelenggaraan Rapat Umum BMKN dan Kongres Kebudayaan yang semula direncanakan bulan April 1954, akan diundur karena dikhawatirkan para peserta masih diliputi rasa cemas karena ancaman bahaya gunung Merapi yang meletus. Akhirnya, pada sidang kelima belas tanggal 3 Maret 1954 diputuskan bahwa kegiatan Rapat Umum BMKN dan Kongres Kebudayaan ditunda dan akan diselenggarakan pada tanggal 18 – 23 September 1954. Mengenai tema

pokok yang dibahas dalam kongres tetap seperti semula, yaitu masalah pendidikan kebudayaan, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) pendidikan kebudayaan bagi pelajar; (2) pendidikan kebudayaan bagi masyarakat di kota, dan; (3) pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani.

Dalam pidato laporannya pimpinan BMKN yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga kongres dapat terlaksana. Di samping itu juga mengatakan tentang banyaknya orang yang lebih mendewakan segala sesuatu yang datang dari negeri asing. Sikap seperti ini akan melemahkan penghargaan dan semangat untuk mengembangkan kebudayaan sendiri.

Sementara itu Menteri PP dan K, Mr. Muhamad Yamin mengingatkan kembali tentang *'kondisi bangsa yang telah mengalami penjajahan dan sebagai akibat dari tekanan jiwa itu telah pernah melumpuhkan budi dan daya Bangsa kita, dan telah mengakibatkan pula merosotnya daya cipta dan gaya cipta bangsa Indonesia yang dijamin yang lampau telah dapat mewujudkan ketatanegaraan, kesenian bangunan dan pahat, kesenian sastra dan kebudayaan pikiran.'*⁹⁶ Tekanan jiwa itu telah mengakibatkan pula hilangnya dalam beberapa hal kepercayaan atas diri sendiri dan timbulnya perasaan kecemasan yang sangat merintang perkembangan jiwa dan kemajuan bangsa.

Bertolak dari kenyataan itu M. Yamin memprihatinkan bahwa *'dalam jiwa rakyat Indonesia berkembang perasaan kagum pada hasil-hasil kebudayaan barat yang memuncak....'* Oleh karena itu kita harus kembali pada *'jiwa bangsa Indonesia yang di zaman dulu terang pendiriannya dan nyata tujuannya, yang memberi gaya kepada kesenian sebagai yang melahirkan fikiran dan tinjauan hidup.'*⁹⁷ Jiwa bangsa Indonesia yang tertekan berabad-abad itu ternyata masih mempunyai kemampuan yang terbuka untuk pandangan baru dan menampakkan semangat dan kekuatan dalam menghadapi perjuangan, yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan.

Bagian lain yang ditekankan oleh Yamin adalah konsep mengembangkan kebudayaan arah ke depan. Menurut Yamin dalam usaha mewujudkan kebudayaan Indonesia, kita harus tetap berpegangan pada sifat-sifat kebangsaan, walaupun jiwa kita akan terbuka bagi unsur-unsur kebudayaan Barat. Setiap warga Negara Indonesia harus menjadi tenaga kebudayaan, sehingga titik tujuan ialah terwujudnya: *'Bangsa Budaya; Bangsa yang*

⁹⁶ Majalah Budaya, September/Oktober 1954, hal. 2

⁹⁷ Majalah Budaya, September/Oktober 1954, hal. 3

*memiliki pikiran budaya, yang mempunyai daya budaya, yang meliputi segenap kehidupan lahir dan batin.*⁹⁸

Untuk mewujudkan cita-cita itu diperlukan pendidikan yang meluas dan mendalam. Mutu sekolah dan mutu pengetahuan pendidik harus ditingkatkan. Oleh karena itu Pemerintah telah merencanakan pembentukan Perguruan-perguruan Tinggi Pendidikan Guru.

Kesimpulan dan Usul KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA tahun 1954 adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNTUK MASYARAKAT SEKOLAH

1. *Agar pendidikan kebudayaan untuk masyarakat sekolah dapat berjalan sebaik-baiknya, maka haruslah jumlah maupun macam sekolah itu sampai cukup meskipun seluruh sektor kebudayaan itu harus mendapat perhatian yang seksama hingga dapatlah terjamin mutu-mutunya.*
2. *Yang terutama diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan kebudayaan itu ialah potensi kebudayaan yang memberi kemungkinan perkembangan daya kreasi.*
3. *Jalan pelaksanaan pendidikan kebudayaan ini berdasarkan azas-azas pendidikan nasional yang demokratis.*
4. *Dengan berkembangnya demokrasi di lapangan sosial ekonomi politik, kebudayaan Indonesia akan merupakan kebudayaan rakyat sebagai manifestasi daripada hidup kerakyatan.*
5. *Untuk menjamin pertumbuhan kebudayaan yang harmonis sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan kebudayaan tersebut di atas, haruslah diadakan sistem pendidikan sehingga pendidikan kesenian dan pandangan hidup mendapat tempat yang semestinya di samping ilmu pengetahuan dan kecakapan.*
6. *Tiap-tiap kebudayaan daerah mengandung kemungkinan berkembang menjadi kebudayaan persatuan, jika jiwa penggerak hidupnya tidak lagi bersifat kedaerahan melainkan perastuan dan daerahnya dapat meluas meliputi seluruh Indonesia. Lain daripada itu tiap-tiap kebudayaan daerah itu mengandung unsur-unsur yang dapat disumbangkan kepada pertumbuhan kebudayaan persatuan yang merupakan kebudayaan rakyat.*

⁹⁸ Majalah Budaya, September/Oktober 1954, hal. 5

7. Pendidikan pandangan hidup diberikan secara praktis bersifat tuntutan dalam menghadapi alam dan masyarakat sekitarnya hingga akhirnya dapat menentukan tujuan dan keyakinan hidup dengan teratur dan sek-sama.
8. Pendidikan agama diberikan dan diterima dalam suasana yang tidak ada paksaan supaya dapat berpengaruh baik dalam pembentukan keyakinan hidup.
9. Untuk menolong tumbuhnya kesadaran hidup batin dan pembentukan keyakinan hidup, diberikan pengajaran ilmu jiwa yang ditujukan pada hidup sosial dan pembentukan watak.
10. Agar pendidikan kesenian buat tiap anak dapat memberi hasil mak-simum maka haruslah diberikan dengan mengingat bakat perseorangan. Bagi yang berbakat baik dapatlah diadakan usaha tambahan pendidikan kesenian di luar hubungan kelas.
11. Lembaga pendidikan tinggi kesenian perlu lekas ada berdasarkan ke-mungkinan dan keadaan yang nyata.
12. Pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai bahasan budaya, haruslah mendapat tempat yang sewajarnya dalam rangka pendidikan kebu-dayaan.
13. Badan-badan kependuan dan organisasi-organisasi pelajar merupakan tempat perkembangan kebudayaan yang penting.

USUL-USUL SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNTUK MASYARAKAT SEKOLAH

1. Mengajukan kepada organisasi-organisasi kebudayaan untuk mengu-sahakan adanya Balai Budaya/Gedung Kesenian dengan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perwakilan-perwakilan Jawatan Kebu-dayaan.
2. Mengusulkan pada Pemerintah menyatakan sistem Karundeng sebagai sistem Nasional tulis cepat Bahasa Indonesia.
3. a) Mengusulkan kepada pemerintah untuk menyempurnakan susunan dan usaha Panitia Sejarah Nasional.
b) Mengusulkan pada pemerintah agar supaya selekas mungkin mengusahakan buku-buku pelajaran sejarah yang seragam dan ber-dasarkan garis Nasional.
4. Mengusulkan kepada pemerintah supaya meletakkan dasar nasional dan demokratis dalam pendidikan dan menyesuaikan buku-buku pelajaran dengan dasar-dasar ini.

5. Dalam menghadapi masa pembangunan kebudayaan dewasa ini, sudahlah sewajarnya anggaran belanja PPK sedikit-dikitnya harus 25 persen dari anggaran negara.
6. Benda-benda kebudayaan milik negara yang ada di luar negeri harus diminta kembali.
7. Supaya diadakan pendidikan kebudayaan di kalangan tentara dan polisi.
8. Membentuk Dewan Pertimbangan Lektur dan Filem.
9. Supaya diadakan pengawasan peredaran filem, dan reklame-reklame.
10. Mengadakan konservatori kesenian daerah.
11. Mengadakan Biro Penterjemah Negara.
12. Mengadakan Panitia Penyelidikan Buku-buku Lama tentang filsafat.
13. Mengadakan Pekan Raya Kebudayaan.
14. Memperluas Jawatan Kebudayaan sampai ke Kabupaten.
15. Membentuk Lembaga Filem dan Perpustakaan Lektur Filem yang baik di setiap kota.
16. Menggunakan filem sebagai alat pendidikan masyarakat.
17. Supaya soal kebudayaan daerah menjadi acara dalam kongres kebudayaan yang akan datang yaitu tentang hubungan kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional.
18. Menetapkan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pokok di semua sekolah (termasuk sekolah vak).
19. Bahasa dan huruf Jawa supaya diajarkan di daerah-daerah yang berkepentingan.
20. Membuat kode pendidikan bagi guru-guru.
21. Mengadakan rencana pelaksanaan pendidikan intergral yang berbentuk Undang-undang.

KESIMPULAN-KESIMPULAN SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNTUK MASYARAKAT KOTA

Bab I. Keadaan ekonomi dan sosial di kota-kota Indonesia dewasa ini yang bermacam-macam sifat dan coraknya, tidak dapat mengembangkan dengan sempurna potensi, dan hubungan kebudayaan yang ada, serta tidak dapat memperkuat gaya hidup yang memupuk daya cipta ke arah manusia bermartabat.

Bab II.

1. Tujuan pendidikan kebudayaan adalah membangun manusia budaya, yang cinta kepada tanah air, bangsa, kemanusiaan, serta memelihara keseimbangan kehidupan rohani dan jasmani.
2. Kebudayaan itu merupakan pernyataan pikiran, kehendak dan perasaan rakyat pada keseluruhannya (buruh, pelajar, pedagang, seniman-seni-man dan lain-lain) yang sama kepentingan hidupnya.
3. Kebudayaan itu merupakan gaya hidup yang dinamis kreatif dan nasional demokratis.
4. Kebudayaan itu hendaknya bersifat nasional yang menerima unsur-unsur kebudayaan daerah, kesempatan dan tradisi masa lampau maupun umum kebudayaan luar Indonesia secara kritis.

Bab III. Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas hendaknya kita memperbaiki gejala-gejala kebudayaan yang telah ada, serta meluaskan dan menyediakan kesempatan yang mungkin untuk pembentukan watak dan penyaluran tenaga dan bakat kreatif di lapangannya masing-masing dengan:

- a. Lingkungan hidup (asrama-asrama sosial, rukun tetangga, rukun kampung dan rumah sakit dan sebagainya).
- b. Lingkungan persekutuan: (perhimpunan kesenian, kebudayaan, sosial, politik dan sebagainya).
- c. Lembaga (museum, perpustakaan rakyat, laboratorium, taman-taman hiburan).
- d. Sekolah-sekolah dari segala tingkat.

Penjelasan:

- I. Untuk memperbaiki mutu gejala-gejala kebudayaan yang telah ada dalam lapangan:
 - a. Film:
 - 1) mengadakan perbaikan komposisi Panitia Sensor dengan sebagian besar terdiri dari pendukung-pendukung kebudayaan;
 - 2) meminta perlindungan Pemerintah bagi pengusaha-pengusaha film nasional untuk mempertinggi mutu dan memungkinkan perkembangan seni film.
 - b. Lektur:
 - 1) mengadakan pengawasan terhadap perhatian dan jenis bacaan.
 - 2) penambahan jumlah dan tempat-tempat bacaan.

- c. *Radio:*
 Mengadakan pengawasan terhadap mutu siaran dan tersebarnya siaran itu secara luas.
- II. *Supaya Pemerintah membentuk dewan pembangunan kota dan berke-wajiban membimbing dan memberi corak pada kota serta mem-bangkitkan keadaan kolektif dalam alam kehidupan kota.*
- III. *Mengingatkan research mengenai latar belakang pertumbuhan kota da-lam sejarahnya dan urbanisasinya untuk pembentukan pribadi kota.*
- IV. *Memikirkan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam pergaulan hidup ma-syarakat kota dengan di dalam pelaksanaannya menarik sebanyak mungkin tenaga kreatif antaranya dengan jalan:*
- a. *Menjadikan tempat-tempat penciptaan dan tempat-tempat yang me-nyalurkan hasil-hasilnya secara luas dan merata dengan mengadakan sanggar-sanggar bekerja, museum-museum, gedung pertunjukan, balai-balai budaya, taman-taman kebudayaan (taman untuk anak-anak dan rekreasi).*
 - b. *Memberikan motif-motif baru dan tanggapan-tanggapan yang sesuai terhadap tema-tema yang lama terdapat pada kumpulan-kumpulan kesenian rakyat (drama dan musik).*
- V. *Untuk mempertinggi kecerdasan berfikir dan pengertian kebudayaan haruslah diadakan bentuk-bentuk pendidikan dalam tempatnya yang leluasa, seperti ceramah-ceramah, kursus, sekolah, akademi, sekolah-sekolah tinggi.*
- VI. *Untuk menghilangkan hambatan-hambatan bagi perkembangan bakat dan tenaga kreatif haruslah diberikan perhatian terhadap: tempat pe-nampungan, pajak, subsidi, dana budaya dan sebagainya.*
- VII. *Dalam hubungan ini diserukan pada Kemeneterian Pendidikan, Penga-jaran dan Kebudayaan dan negara memperbesar jumlah anggaran be-lanja, terutama yang mengenai usaha-usaha kebudayaan.*

KESIMPULAN SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN UNTUK BURUH DAN TANI

- I. *Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 1954 yang berlangsung di Solo dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 September 1954, setelah melakukan perbincangan mengenai masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani, dapat menarik kesimpulan betapa pentingnya*

pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani sebagai unsur yang pertama dan utama guna pertumbuhan kebudayaan nasional dan bagi kehidupan kaum buruh dan tani itu sendiri. Kongres dapat menarik kesimpulan, bahwa sesuatu garis pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani yang dapat dilanjutkan kepada masyarakat, para budayawan, organisasi-organisasi kebudayaan dan pemerintah adalah suatu cara pendidikan yang mengubah kejiwaan pikiran, perasaan, kemauan yang meliputi pendidikan kesenian, kecerdasan, pandangan hidup, kesusilaan, kemasyarakatan dan kepribadian.

- II. 1. Yang berhubungan dengan Pemerintah:
 - a. Anggaran Belanja Kementerian PP dan K diperbesar terutama mengenai kebudayaan.
 - b. Menggiatkan pekerjaan-pekerjaan research di lapangan kebudayaan, dengan di dalam pelaksanaannya menarik sebanyak mungkin para budayawan.
 - c. Memikirkan bantuan bagi kegiatan kebudayaan di kalangan kaum buruh dan tani dengan menggunakan saluran-saluran organisasi-organisasi buruh dan tani.
 - d. Memperhebat pekerjaan kebudayaan PBH (Pemberantasan Buta Huruf) dengan memberikan juga peranan kepada para budayawan.
 - e. Untuk mencapai seluas mungkin kaum buruh dan tani, Jawatan Kebudayaan hendaknya diluaskan sampai ke kecamatan-kecamatan seperti halnya dengan Jawatan-Jawatan: Penerangan, Pendidikan Masyarakat dan Pertanian.
2. Yang berhubungan dengan BMKN:
 - a. supaya mulai melangkahakan usaha-usaha untuk menggiatkan pendidikan kebudayaan di kalangan kaum buruh dan tani.
 - b. Sebagai faktor stimulasi menyelenggarakan Pekan Kesenian untuk kaum buruh dan tani.
 - c. Menerbitkan sendiri lektur-lektur kebudayaan secara populer dan murah bagi kaum buruh dan tani.
 - d. Mendorong berdirinya Balai-balai Budaya secara meluas.
 - e. Supaya BMKN lebih menjelaskan usha-usahnya di lapangan kebudayaan kepada masyarakat dan memperjuangkan subsidi yang mencukupi.

USUL-USUL:

1. BMKN supaya menuntut kepada pemerintah keringanan terhadap pajak yang dibebankan kepada seniman dan hasil-hasil seni ciptaannya.

2. Masalah perkawinan dan segala konsekuensinya supaya dimasukkan sebagai masalah kehidupan kebudayaan bagi BMKN.
3. Menyambut terbentuknya Dewan Pertimbangan Siaran Radio sebagai langkah baik bagi Pemerintah, maka kongres supaya mengusulkan dibentuknya Dewan Pengawas Pemasukan Lektur dan Film dengan komposisinya yang terdiri dari sebagian besar kaum budayawan.⁹⁹

4. KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1991 (IV)

Kongres Kebudayaan tahun 1991 sebagai Kongres Kebudayaan IV diselenggarakan setelah hampir 40 tahun lamanya setelah Kongres Kebudayaan III tahun 1954. Suatu jarak waktu yang amat panjang bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres kebudayaan sebelumnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya yang perlu dicari jawabannya, sementara di dalam jarak waktu 40 tahun itu banyak masalah yang seharusnya dibahas dalam forum kongres.

Setelah KK III tahun 1954, BMKN pada bulan Juli 1960 di Bandung menyelenggarakan kongres yang diberi sebutan Kongres Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Sebagai suatu peristiwa kebudayaan kongres ini memilih tema '*Fungsi Kebudayaan dalam Pembangunan Ekonomi*', yang meliputi peranan ilmu dan sarjana, peranan seni dan seniman, dan peranan pendidikan dan pendidik. Masing-masing pemrasaran adalah Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Drs. Sudjoko, dan Sarino Mangunpranoto.¹⁰⁰

Kongres ini menjadi peristiwa yang cukup menghebohkan karena masalah Manifesto Politik (Manipol), yakni pidato resmi Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan tgl. 17 Agustus 1959, yang kemudian dikukuhkan dengan TAP MPRS No. I/MPRS/1960 sebagai 'Garis-garis Besar Haluan Negara.' Wakil-wakil utusan Lekra dalam sidang mengajukan sebuah resolusi, yang pokok intinya supaya BMKN dalam kongresnya di Bandung itu menerima Manipol dan Usdek sebagai landasan kegiatan kerjanya di masa depan. Sebab, menurut penilaian Lekra, selama ini belum pernah BMKN secara jelas menyatakan setuju atau tidak setujunya terhadap Manifesto Politik.

Selama ini Kongres BMKN tahun 1960 di Bandung tidak pernah disebut-sebut secara jelas sebagai sebuah Kongres Kebudayaan, meskipun DS

⁹⁹ Muhadjir (penyunting), *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*, hal. 31-37.

¹⁰⁰ DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI DKK*, Terbitan Mizan dan HU Republika, 1995, hal 34

Moeljanto dan Taufiq Ismail menyebutnya sebagai '*peristiwa kebudayaan*'. Mungkin kongres ini dipandang sebagai sebuah Rapat Umum BMKN sebagaimana terjadi di tahun 1954. Seperti telah diutarakan di muka, KK tahun 1954 di Surakarta diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Rapat Umum BMKN. Mungkin pula kongres ini dipandang sebagai sebuah kongres yang sarat dengan aroma politik sehingga DS Moeljanto dan Taufiq Ismail menyebutnya sebagai '*sekelumit peristiwa 'politik' yang mulai merembesi sektor kebudayaan, yang taktik dan strategi ofensifnya dilancarkan di tengah-tengah berlangsungnya Kongres BMKN,*'¹⁰¹ dan oleh karena itu maka tidak pernah disebut sebagai Kongres Kebudayaan. Tetapi sebagai sebuah '*peristiwa budaya*' kegiatan ini seharusnya patut dicatat sebagai bagian dari serangkaian Kongres Kebudayaan yang pernah diselenggarakan.

Kongres Kebudayaan IV diselenggarakan pada 29 Oktober hingga 3 November 1991 di Jakarta. Suasana sistem politik pemerintahan pada saat itu masih bersifat sentralistik, sehingga ketika Pemerintah melontarkan gagasan ini dilontarkan muncul berbagai komentar bernada sumbang dari kalangan sebagian masyarakat termasuk budayawan dan seniman. Muncul istilah-istilah yang bernada sinis terhadap rencana kongres seperti: *kongresnya baju Korpri, kongresnya baju safari, kongresnya pejabat pemerintah, kongres birokrasi, keputusan kongres sudah siap sebelum kongres dibuka, dan lain-lain*.

Suara-suara itu menjadi masukan yang amat berguna bagi Panitia Pengarah. Oleh karena itu diupayakan agar kesan negatif tersebut dapat dihilangkan dan para seniman, budayawan, cendekiawan, pemangku adat dapat menyampaikan aspirasinya secara total dan bebas. Materi kongres dijangkau dari seluruh daerah sebagai pemilik kebudayaan dan dari atas yakni dari para tokoh budayawan, seniman dan cendekiawan.

Penjaringan masukan dari daerah dilakukan melalui berbagai acara '*Temu Budaya Daerah*' dan '*Dialog Budaya*' di beberapa wilayah (region). Sementara itu di tingkat Pusat diselenggarakan '*Forum Kebudayaan*' yang dihadiri oleh para tokoh budayawan, seniman, cendekiawan dan pemangku adat yang memiliki pengaruh luas terhadap perkembangan kebudayaan bangsa.

Hasil dari penjaringan masukan itu dibahas bersama dalam acara '*Pra-kongres Kebudayaan IV*', pada bulan April 1991, 6 bulan sebelum kongres dilaksanakan. Prakongres diselenggarakan di Perpustakaan Nasional Jakarta, dihadiri oleh semua Panitia Pengarah, beberapa budayawan, seniman

¹⁰¹ DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI DKK*, 1995, hal. 36

dan pemangku adat dari Pusat maupun daerah. Dalam acara inilah dibahas dan disepakati topik-topik makalah, pemakalah dan peserta kongres serta hal-hal lain yang bersifat teknis penyelenggaraan kongres.

Gambaran tentang persiapan, pelaksanaan dan hasil kongres adalah sebagai berikut.

1. Tema Kongres Kebudayaan IV: KEBUDAYAAN KITA, KEMARIN, KINI DAN ESOK.
2. Logo: berbentuk lima lembar daun menyatu di ujungnya (pembuatan desain diserahkan kepada IKJ)



Logo Kongres Kebudayaan 1991

3. Waktu dan tempat Kongres.

Waktu penyelenggaraan Kongres Kebudayaan IV adalah tanggal 29 Oktober sampai dengan 3 November 1991. Pemilihan tanggal dan bulan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1991, di samping kegiatan-kegiatan yang lain.

Untuk menentukan tempat penyelenggaraan kongres diusulkan beberapa tempat, yaitu:

- Alternatif Lokasi: diusulkan beberapa tempat, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, Medan. Akhirnya pilihan yang disepakati adalah Jakarta
 - Alternatif Tempat: Hotel Horison, Hotel Indonesia dan Wisata, serta TMII. Akhirnya diputuskan tempat penyelenggaraan Kongres Kebudayaan IV di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.
4. Pokok Bahasan
- Pokok Bahasan dikelompokkan menjadi 5 dan masing-masing ditentukan topiknya, yaitu:
1. Warisan Budaya: Penyaringan dan Pengembangan, 5 Topik:
 - a. Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Budaya.
 - b. Kebudayaan Daerah dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya
 - c. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian serta Kerajinan Tradisional
 - d. Aturan-aturan Adat Berkenaan dengan Kekuasaan dan Pemilikan
 - e. Warisan Budaya Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan
 - a. Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional
 - b. Arah Perkembangan Kebudayaan Nasional
 - c. Kesusasteraan Indonesia dalam Kebudayaan Nasional
 - d. Media Massa dan Kebudayaan Nasional
 - e. Kebudayaan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional
 - f. Keterkaitan Antara Kebudayaan dan Pembangunan Nasional
 3. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional
 - a. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional
 - b. Peranan Seniman dalam Masyarakat
 - c. Daya Cipta Ilmu dan Teknologi dalam pertumbuhan Kebudayaan di Indonesia
 - d. Daya Cipta Budaya dan Media Massa
 - e. Generasi Muda dan daya Cipta Budaya
 - f. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesusasteraan Daerah dan Nasional
 4. Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat
 - a. Kebudayaan dan Ekonomi
 - b. Kebudayaan dan Ilmu dan Teknologi
 - c. Kebudayaan dan Sosial, Politik dan Hukum

- d. Kebudayaan dan Pertahanan dan Keamanan
 - e. Kebudayaan dan Wanita
 - f. Kebudayaan dan Olah Raga
 - g. Kebudayaan dan Lingkungan Alam
5. Kebudayaan Nasional dan Dunia (Umat Manusia)
- a. Kebudayaan Asing dan Kebudayaan di Indonesia
 - b. Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri
 - c. Pariwisata dan Kebudayaan di Indonesia
 - d. Kerja sama Kebudayaan Antarnegara
 - e. Penerjemahan Karya-karya Asing di Indonesia.
5. Persidangan
- a. Persidangan dipimpin oleh Pemandu (Moderator) didampingi oleh seorang atau 2 orang notulis. Pemandu harus memperhatikan waktu dan ti-dak terlalu banyak memberikan komentar. Sidang dibagi atas: (1) Sidang Pleno; (2) Sidang Kelompok; dan (3) Sidang Tim Perumus.
 - b. Sidang Pleno I, pembukaan kongres.
 - c. Sidang Pleno II.
Setelah pembukaan disampaikan Sambutan/Laporan tentang penyelenggaraan program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan 1987-1997 (*The World Decade for Cultural Development 1987-1997*), yakni oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Supardjo Rustam, selaku Ketua Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan (DASABUD). Program ini dicanangkan oleh UNESCO berlaku mulai tahun 1987-1997 dan sebagai anggota PBB Indonesia telah ikut menyelenggarakan program ini.
 - d. Sidang Pleno III.
Setelah Sambutan/Laporan Ketua Panitia Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, dilanjutkan dengan sidang Pleno III, menampilkan Makalah Utama dari Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana, Prof. Dr. Umar Kayam, Nirwan Dewanto, dan Barnabas Suebu.
 - e. Sidang kelompok.
Pembagian peserta pada sidang kelompok dilakukan secara kompromi antara masing-masing peserta dengan Panitia guna menghindari terjadinya '*penumpukan*' jumlah peserta sidang pada kelompok tertentu dan kekurangan pada sidang kelompok yang lain.

Sidang Kelompok dibagi menjadi 5 Kelompok:

- 1) Kelompok I: Warisan Budaya: Penyaringan dan Pemeliharaan, diketuai oleh AA Navis, Wakil Ketua Dr. Nico L Kana, sekretaris Ny. Koen Mulyono. Tempat sidang di Anjungan Maluku TMII, membahas 19 makalah. Kelompok I dipecah menjadi 2 sub yaitu: (1) Subkelompok I; (2) Subkelompok II.
 - 2) Kelompok II: Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan, diketuai oleh H. Sutanto Wiryoprasonto, Wakil Ketua Dr. Muchtar Naim, sekretaris Dr. Riris K. Sarumpaet. Tempat sidang di Istana Anak-anak TMII, membahas 25 makalah.
 - 3) Kelompok III: Daya Cipta dan Perkembangan Kebudayaan diketuai oleh Dra. Titi Said, Wakil Ketua Shofwan Karim MA, sekretaris Drs. Rusdi Saleh. Tempat sidang di Anjungan Sumatera Barat, membahas 17 makalah.
 - 4) Kelompok IV: Kebudayaan dan sektor-sektor Masyarakat, diketuai oleh Dr. Harry Chan Silalahi, Wakil Ketua Dr. Fachrurrozie Syarkawi, sekeratris Dra. Mince D. Rumbiak. Tempat sidang di Anjungan Lampung, membahas 14 makalah.
 - 5) Kelompok V: Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia), diketuai oleh Prof. Dr. Daulat P. Tampubolon, Wakil Ketua Dr. Sal Murgianto, sekretaris Irid Rachman Agus SS, MA. Tempat sidang di Istana Anak-anak TMII, membahas 12 makalah.
- f. Sidang Tim Perumus, terdiri dari beberapa anggota Panitia Pengarah, para Ketua Kelompok dan Sekretaris dan beberapa tokoh dan pemakalah.
- g. Sidang Pleno IV, dipimpin oleh H. Budihardjo, didampingi para Ketua Kelompok, dengan acara pembacaan rumusan hasil Kongres Kebudayaan IV. Untuk membacakan hasil kongres ditunjuk sdr. Christine Hakim.
6. Pembukaan dan Penutupan

Kongres dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden, Soedhamono, SH, serta dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat dan agama. Dalam pidato Pembukaan kongres, Presiden menyinggung masalah peranan kebudayaan, pembangunan yang bermatra kebudayaan. Antara lain Presiden mengatakan: *'Kita menyadari benar, pentingnya makna kebudayaan, terutama untuk memperkuat jatidiri kita sebagai bangsa.'* Sementara itu mengenai hubungan kebudayaan dan pembangunan mengatakan sebagai berikut:

'MPR yang merupakan pengejawantahan rakyat Indonesia juga telah menggariskan dalam GBHN 1988, bahwa: 'Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cita, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk meemberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.'

Selanjutnya pada bagian lain Presiden menyatakan: *'Pembangunan jelas memerlukan matra kebudayaan. Menyertakan matra kebudayaan dalam segenap upaya pembangunan itu harus kita serasikan dengan kemajuan yang kita capai dalam bidang-bidang pembangunan lainnya.'*

Sementara itu, dalam pidato Penutupan Wakil Presiden, Sudharmono, SH juga menekankan lagi tentang hal itu dengan menyatakan:

'Sebagai satuan budaya kita harus siap menghadapi perubahan zaman dengan segala konsekuensinya, dan kesiapan itu hendaknya dibangun melalui ikhtiar sadar dalam pembangunan nasional yang bertahap dan berkelanjutan. Setiap tahap pembangunan adalah landasan bagi aktualisasi tahap berikutnya, dan pada setiap tahap harus kita hindarkan terjadinya kesenjangan – apalagi keterasingan – terhadap budaya kita sebagai pengukuh identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Maka apa yang kini menjadi perumusan dalam GBHN 1988, yaitu bahwa 'pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya' sesungguhnya merupakan pesan yang semestinya berlaku bukan sementara ini saja, melainkan kelanjutan upaya pembangunan nasional di masa depan. Terlebih lagi mengingat bahwa kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia merupakan amanat konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya.'

Sungguh sangat disayangkan, pendapat Wakil Presiden RI bahwa rumusan dalam GBHN 1988 tentang *'pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya seharusnya berlaku sepanjang masa,'* itu justru tidak mendapatkan perhatian dari pihak MPR dan DPR-RI yang menyusun GBHN untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Rumusan isi kalimat yang amat penting dan mendasar itu justru hilang sama sekali dari GBHN 1993, 1998 dan 1999-2004.

Oleh karena itu forum seperti Kongres Kebudayaan perlu digunakan seoptimal mungkin untuk mengangkat kembali konsep '*pembangunan berwawasan budaya*' itu, sebagai keputusan penting yang harus diperhatikan oleh para pengambil keputusan di tingkat tinggi, dan dapat ditetapkan sebagai garis kebijakan dan acuan utama dalam melaksanakan pembangunan nasional selanjutnya. Tidak hanya sekedar dijadikan '*slogan*' tetapi benar-benar diterapkan dalam praktek pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

8. Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) dan Penyelenggara (Organizing Committee/OC)

a. Panitia Pengarah (SC):

- 1) Prof. Dr. Fuad Hassan, Ketua
- 2) Drs. GBPH Poeger, Wakil Ketua
- 3) Prof. Dr. S. Budi Santoso, Sekretaris
- 4) Prof. Dr. Umar Kayam, Anggota
- 5) Barnabas Suebu, SH, Anggota
- 6) Dr. Nurcholiz Majid, Anggota
- 7) H. Budiardjo, Anggota
- 8) AA. Navis, Anggota
- 9) Jakob Utama, Anggota
- 10) Prof. Dr. Mattulada, Anggota
- 11) Prof. Dr. Harsja Bachtiar, Anggota
- 12) Goenawan Mohamad, Anggota
- 13) Ki Suratman, Anggota
- 14) Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, Anggota
- 15) Prof. Ali Hasjmy, Anggota
- 16) Ny. RA Tahir, Anggota
- 17) Abdurrachman Wahid, Anggota

Catatan: Delapan dari 17 anggota SC yakni Nomer: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13 dan 15, kini telah almarhum.

b. Panitia Penyelenggara (OC):

- 1) Ketua Panitia: Prof. Dr. S. Budhisantoso
- 2) Ketua I : Drs. Bastomi Ervan
- 3) Ketua II : Drs. F.X. Soetopo Cokrohamijoyo
- 4) Sekretaris I : Drs. Nunus Supardi
- 5) Sekretaris II : Drs. Ahmad Yunus

Dalam susunan Panitia Penyelenggara dilengkapi dengan Bidang: Sekretariat, Keuangan, Logistik, Informasi, Teknis, serta Pergelaran Kesenian, dan Pameran Kebudayaan.



Ketua Panitia Pengarah, Prof. Dr. Fuad Hassan, akan memasuki ruang sidang pembukaan di Sasono Langenbudoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta

9. Rumusan Hasil Kongres

Kutipan Rumusan Hasil Kongres Kebudayaan IV secara lengkap adalah sebagai berikut:

Kongres Kebudayaan 1991, menurut penilaian semua pihak, diselenggarakan pada waktu yang tepat. Dikatakan demikian karena dewasa ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai perubahan, baik yang terjadi sebagai akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar. Ini menuntut penyeragaman jati diri.

Jati diri bangsa Indonesia dibangun dari pengalaman sejarah dan kerangka acuan nasional yang tercermin dalam dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu secara historis dan ideologis terbuka dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Jati diri yang terbuka itu sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang pada gilirannya dapat diubah menjadi kesempatan untuk membangun bangsa yang maju, modern, demokratis, dan tangguh kebudayaannya.

Keterbukaan sangat diperlukan untuk membangkitkan kreativitas, prakarsa, swakarsa, dan partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian hal itu juga akan memperbesar tanggung jawab sosial. Melalui keterbukaan itu pula Kedaulatan Rakyat, yang menjadi prinsip utama Undang-Undang Dasar 1945, harus semakin dapat diwujudkan.

Kebudayaan Indonesia harus sanggup membangun bangsa Indonesia yang tangguh, tegar, disiplin, dan ulet agar ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat direbut dan dikuasai. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Dalam kebudayaan Indonesia nilai dan rasa keadilan sangat mempengaruhi semangat hidup bersama. Oleh karena itu, nilai dan rasa keadilan itu harus diwujudkan dalam segala kehidupan dengan jalan menegakkan azas negara hukum serta mendayagunakan perangkat-perangkat pelaksanaan dan pengawasannya.

Tantangan pembangunan dan perubahan yang kita hadapi itu menuntut agar kita memiliki kebudayaan yang berorientasi ke hari esok. Sehubungan dengan hal itu, bahasa Indonesia sebagai wahana salah satu pokok kebudayaan harus digunakan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam segala perwujudannya seperti yang terungkap dalam Kongres Kebudayaan 1991, menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab itu hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta masyarakat guna memajukan kebudayaan bangsa melalui berbagai cara dan wahana yang tersedia, sebagaimana tercantum di dalam hasil kongres sebagai berikut.

Pembicaraan kongres melalui lima kelompok yang diselenggarakan secara bersama-sama menghasilkan pemikiran-pemikiran pokok sebagai berikut:

1. Tentang Warisan Budaya: Penyaringan dan Pemeliharaan

- 1.1. *Pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya nasional dan budaya daerah, yang harus ditanggapi lebih sebagai daya kemampuan yang dapat dimanfaatkan dari ancaman yang merugikan harus dilakukan tanpa harus bertahan pada nilai-nilai dan aturan-aturab tradisional yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan negara kita.*
- 1.2. *Peranan kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat pendukungnya harus tetap dihargai dan dilestarikan tetapi dengan cara pengembangan kebiasaan para pendukungnya demi persatuan bangsa, mewujudkan perilaku yang berpedoman pada kebudayaan nasional dalam hubungan antargolongan yang berbeda kebudayaan.*
- 1.3. *Pelestarian kegiatan-kegiatan, barang-barang kesenian dan kerajinan serta peninggalan sejarah harus diusahakan melalui pembangunan prasarana, sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan cagar budaya; serta pengembangan kebiasaan untuk bekerja dengan teliti sesuai dengan tuntutan tradisi budaya yang bersangkutan. Pengembangan kegiatan-kegiatan, dan barang-barang kesenian dan kerajinan harus diusahakan melalui penciptaan keadaan yang memungkinkan terwujudnya bentuk baru yang baik dan dapat diterima sebagai bentuk-bentuk kebudayaan yang wajar.*
- 1.4. *Aturan-aturan adat berkenaan dengan kekuasaan dan pemilikan perlu disesuaikan dengan tuntutan modern tetapi dengan tetap memperhatikan manfaat yang terkait pada aturan-aturan adat yang berkenaan dengan rasa keadilan anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.*
- 1.5. *Warisan budaya agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ditafsirkan secara rasional dengan tetap berdasarkan ajaran yang diamanatkan dalam kitab suci agama yang bersangkutan agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang berusaha menjadi masyarakat yang lebih modern dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa.*

2. Tentang Kebudayaan Nasional: Kini dan Masa Depan

- 2.1. *Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional harus ditanggapi sebagai dua jenis kebudayaan dengan ciri-ciri khas masing-masing tetapi diharapkan saling mendukung sehingga manusia Indonesia di masa depan memperoleh kepribadian terutama dari kebudayaan*

daerah asal masing-masing dan juga memperoleh kepribadian sebagai manusia modern terutama dari kebudayaan nasional.

- 2.2. Perkembangan kebudayaan nasional harus diarahkan pada tujuan nasional, yaitu masyarakat yang dalam kenyataan sepenuhnya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia yang berbudaya, bebas dari kebodohan dan kemiskinan dan semua jenis tindakan yang menurunkan martabat seseorang sebagai manusia, seperti penghinaan dan penindasan.
- 2.3. Kesusastraan Indonesia yang seharusnya merupakan bagian yang amat penting dari kebudayaan nasional, harus dikaji dan diperjelas demi memudahkan usaha mengatasi kelemahan yang kini mewujudkan kemiskinan kritik sastra, serta kandasnya majalah sastra dan ruang sastra di surat kabar.
- 2.4. Media massa harus dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk menyebarluaskan kebudayaan nasional, yang harus dibedakan dari kebudayaan daerah, di kalangan penduduk di wilayah negara kita. Unsur-unsur kebudayaan daerah tertentu dapat juga diperkenalkan di daerah-daerah lain dengan penggunaan media massa asal saja penduduk di daerah-daerah lain ini tidak menanggapi penyiaran yang bersangkutan sebagai paksaan terhadap mereka.
- 2.5. Karena kebudayaan suatu bangsa sangat menentukan sifat-sifat kepribadian anggota-anggota bangsa yang bersangkutan, maka pendidikan merupakan suatu jenis upaya yang ampuh dalam membentuk kepribadian. Untuk itu perlu diusahakan saling keterkaitan yang lebih erat antara kebudayaan nasional, termasuk nilai-nilai yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta penjabaran sistem pendidikan nasional.

3. Tentang Daya Cipta dan Perkembangan kebudayaan

- 3.1. Daya cipta para seniman, baik yang menghasilkan karya-karya seni yang bernilai budaya tinggi maupun yang menghasilkan barang-barang yang digunakan sehari-hari yang dapat memenuhi kebutuhan akan rasa indah, perlu senantiasa dirangsang dan dibantu perkembangannya agar menghasilkan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional yang berlangsung terus-menerus dan semakin tinggi nilai keindahannya.
- 3.2. Para seniman harus memiliki keleluasaan untuk menghasilkan karya-kebudayaan yang bernilai atas dasar keindahan yang diwujudkan dan bukan hanya atas dasar komersial.

- 3.3. *Dalam masyarakat modern ilmu pengetahuan dan teknologi menempati bagian yang semakin besar dan penting dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, oleh sebab itu daya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu senantiasa dipupuk dalam pertumbuhan kebudayaan di Indonesia.*
 - 3.4. *Daya cipta budaya perlu sebanyak mungkin memanfaatkan media massa, yang diharapkan dikelola dengan penuh kesadaran sosial dan tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan unsur-unsur baru kebudayaan nasional dan untuk mengurangi kesenjangan antara kebudayaan elite dan kebudayaan rakyat.*
 - 3.4. *Kemampuan generasi muda untuk menghasilkan bentuk-bentuk karya yang baru sebagai sumbangan generasi yang bersangkutan pada perkembangan kebudayaan harus dipupuk dan dibina, yang dimulai sedini mungkin.*
 - 3.5. *Daya cipta dan pertumbuhan kesusastraan daerah dan nasional harus dikembangkan dengan membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukungnya, seperti penyunting, penerbit, percetakan, toko buku dan perpustakaan, serta minat dan kemampuan para anggota masyarakat untuk menjadi pembaca.*
4. *Tentang Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat*
- 4.1. *Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan ekonomi harus dapat menghasilkan suatu keadaan yang memungkinkan semua golongan dalam masyarakat kita dapat mencari nafkah dengan penghasilan yang layak serta dapat merangsang anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka sebesar-besarnya tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial masing-masing.*
 - 4.2. *Kebudayaan yang kita kembangkan harus merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan tetap memperhatikan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, masyarakat setempat, bangsa dan negara.*
 - 4.3. *Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan politik harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya tidak semata-mata diselenggarakan dengan menggunakan bahasa perundang-undangan melainkan juga menggunakan pendekatan kebudayaan.*

- 4.4. *Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang tumbuh dari pengalaman dalam masa revolusi nasional dan upaya menegakkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Republik kita, harus dikembangkan lebih lanjut agar sesuai dengan tuntutan masalah-masalah yang akan dihadapi di masa depan dan yang akan jauh lebih sulit diatasi daripada tuntutan masalah-masalah yang dihadapi di masa lampau.*
 - 4.5. *Kebudayaan yang dijadikan acuan oleh penduduk di kepulauan kita yang amat luas dalam menentukan hak dan kewajiban antara pria dan wanita harus mengandung azas persamaan derajat yang terutama terwujud sebagai kemitraan antara suami dan istri, dua manusia yang sama-sama bermartabat.*
 - 4.6. *Kebudayaan penduduk di tanah air kita harus kembali mendorong para pendukungnya untuk menanggapi lingkungan alam, tidak hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan melainkan juga sebagai ciptaan Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana ke arah pelestarian dan pemantapan kearifan serta ketangguhan kebudayaan bangsa.*
5. *Tentang Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia)*
- 5.1. *Kontak-kontak budaya antarbangsa telah meningkat di masa kini dan akan semakin meningkat lagi di masa depan sebagai proses glo-balisasi. Sikap saling menghargai antarbudaya dan kerjasama kebudayaan perlu ditingkatkan.*
 - 5.2. *Pengembangan kebudayaan di luar negeri perlu ditingkatkan dengan berbagai cara dengan memperhatikan tiga taraf perolehan budaya: pengenalan, pemahaman, serta penghayatan dan pengamalan. Pengadaan pusat informasi budaya, misi kebudayaan, program pertukaran, pengajaran bahasa Indonesia dan pemanfaatan media massa adalah di antara cara-cara yang dapat digunakan.*
 - 5.2. *Pariwisata diharapkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, namun dalam usaha pariwisata, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional harus selalu diperhatikan. Dalam menghindari dampak negatif pariwisata, masyarakat perlu diikutsertakan, di samping diadakannya peraturan-peraturan pemerintah yang mantap. Demikian pula masyarakat berpendapatan rendah dan kelestarian lingkungan perlu selalu mendapat perhatian.*
 - 5.4. *Usaha-usaha penerjemahan berbagai karya tulis bermutu perlu sungguh-sungguh ditingkatkan, baik dari bahasa asing ke dalam*

*bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Usaha-usaha penerjemahan dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta.*¹⁰²

10. Beberapa Catatan Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan IV.

Sebagai langkah evaluasi dari keseluruhan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan IV telah ditugasi Dr. Andre Hardjana untuk merangkum berbagai tanggapan masyarakat dan media massa yang disampaikan sebelum ketika berlangsung dan sesudah kongres. Beberapa hal penting yang dapat dicatat dari catatan Sdr. Andre Hardjana (16 halaman) adalah sbb.:

- 1) Kongres Kebudayaan IV (KK IV) merupakan "*peristiwa kebudayaan terbesar sepanjang tahun*" yaitu tahun 1991;
- 2) Kongres telah memperoleh tanggapan pers yang luar biasa dari semua jenis penerbitan pers, semua jenis surat kabar harian, dan semua penerbitan pers ibu-kota maupun daerah secara luas, merata dan teratur;
- 3) Pencetusan gagasan dan inisiatif penyelenggaraan KK IV itu sendiri disambut sebagai "*ide dan langkah yang tepat*", meskipun "*agak terlambat*."
- 4) Ide penyelenggaraan KK IV telah berhasil memikat perhatian pers, melibatkan berbagai tokoh dan ahli kebudayaan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Depdikbud dan berhasil menggerakkan partisipasi dan pemikiran masyarakat luas;
- 5) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinilai telah menunjukkan kembali kesungguhan minatnya pada masalah kebudayaan, meskipun semula dikawatirkan akan menjadi sebuah "*forum kedinasan*", "*rapat dinas*", "*pertemuan rekayasa birokrasi Depdikbud*", "*materi sudah disiapkan sebelum kongres ditutup*", "*didominasi oleh para birokrat*" dsb. tetapi kesemuanya itu tidak terjadi;
- 6) Ada sementara pihak yang merasa tidak puas (Rendra dan Mochtar Lubis) dengan hasil kongres karena "*rumusan hasilnya yang kurang menggigit*", dan "*pembicaraan kebudayaan yang kehilangan konteks dominasi politik*", rumusan yang kurang efektif sebagai suatu "*public policy*."
- 7) Beberapa tokoh seniman dan budayawan Jawa Timur menyatakan "*Kongres Kebudayaan Terkesan Pincang*", dan menghendaki suatu kongres yang elitis terbatas pada mereka yang betul-betul kompeten,

¹⁰² Kongres Kebudayaan 1991, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta 1991/1992, hal. 20-26

dan kurang setuju kongres menjadi forum tukar pendapat dari berbagai tingkatan sosial dan aneka macam latar belakang.

- 8) Yang masih menjadi pergunjingan di kalangan para seniman dan budayawan adalah masalah belum tampaknya sebuah "*cultural policy*", yang sudah lama ditunggu-tunggu.
- 9) Di balik rumusannya yang "*datar*", KK IV sesungguhnya telah menyuarakan kepentingan-kepentingan yang terabaikan, yaitu: demokratisasi, debirokratisasi dan desentralisasi, keterbukaan dan keadilan.
- 10) Oleh beberapa surat kabar diingatkan agar "*operasionalisasi*" keputusan kongres tidak semata-mata menjadi tanggung jawab budayawan, seniman atau pejabat, melainkan tanggung jawab semua pihak dan segenap anggota masyarakat.
- 11) Di samping berbagai catatan penting tentang KK IV di atas, menjelang dan selama kongres berlangsung ternyata muncul kelompok-kelompok lain yang memberikan reaksi yang berbeda:
- 12) 'Simposium Islam', 'Kelompok Bandung', 'Kelompok Surabaya', bahkan organisasi politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menyelenggarakan diskusi sendiri dan mengeluarkan pernyataan budaya.
- 13) Berlangsungnya '*Kongres Tandingan*' di Ujung Pandang (sekarang Makassar). Yang menarik dari 'Kongres Tandingan' ini adalah berupa desakan yang kuat agar segera dibentuk **Kementerian Negara Urusan Kebudayaan**, dan merubah nama Departemen Pendidikan menjadi **Departemen Pendidikan dan Pengajaran**.
- 14) Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada mengeluarkan pernyataan tentang "*Sikap Budaya Kaum Muda*", yang berisi 7 butir dan salah satu di antaranya adalah '*partisipasi masyarakat dalam membangun kebudayaan Indonesia menuntut secara aktif setiap pribadi untuk memikirkan dan merencanakan arah kebudayaan yang mampu memberikan alternatif baru pada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.*' Ketujuh butir pernyataan tersebut disampaikan oleh dua orang wakil sebagai peserta kongres.
- 15) Komentar lain yang menarik setelah kongres berlangsung adalah permintaan dari beberapa tokoh yang pernah terlibat dalam Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) yang menginginkan dibentuknya sebuah badan independen semacam BMKN.

Ada beberapa bagian penting lain yang tidak tertuang dalam rumusan hasil kongres tetapi menjadi bahan diskusi dan di antaranya dirumuskan sebagai

hasil sidang kelompok, yang patut menjadi perhatian kita bersama, karena memiliki bobot yang penting bagi usaha pengembangan kebudayaan. Bahkan di antaranya sudah berkali-kali dibicarakan orang tetapi belum ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata. Beberapa isu yang penting itu antara lain sebagai berikut:

1. Dalam sidang-sidang kelompok disuarakan kembali tentang usul agar dibentuk Departemen Kebudayaan terpisah dengan Departemen Pendidikan (Kelompok II:7,8), Menteri Muda Kebudayaan (Kelompok II:8), Departemen Kebudayaan dan Pendidikan (Kelompok II:8), dan diusulkan pula agar tidak perlu dilakukan pemecahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kelompok II:10).
2. Disulkan agar anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinaikkan menjadi 25% dari APBN (Kelompok II:8).
3. Kebudayaan tidak perlu Undang-undang karena kebudayaan adalah suatu proses (Kelompok II:7)
4. Perlu segera didirikan atau diprakarsai oleh Pemerintah adanya Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan lokal di setiap provinsi (Kelompok I)
5. Perlu dibentuknya Lembaga Budaya Nasional sebuah lembaga kebudayaan independen yang akan menjadi penampung aspirasi kebudayaan nasional (Kelompok II)
6. Untuk itu perlu dibentuk semacam Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau sejenisnya (Kelompok III)
7. Perlu dibentuk Pusat Informasi Budaya di dalam dan di luar negeri (Kelompok V)
8. Pembuatan film dengan latar belakang etnis agar diperbanyak (Kelompok II:13)
9. Pariwisata pada tahun 1995 diharapkan dapat menduduki peringkat No. 1 dalam mengumpulkan devisa (Kelompok V:3)
10. Peserta dalam sidang kelompok mengusulkan agar KK dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan paling lambat sepuluh tahun sekali, jangan terlalu lama jaraknya seperti KK tahun 1954 ke 1991 (Kelompok II:10).
11. Disampaikan oleh peserta dalam sidang kelompok agar setelah kongres selesai dapat diselenggarakan kongres-kongres lain dari aspek kebudayaan seperti kesenian, kesejarahan, kebudayaan daerah, dan bahasa daerah, kecuali untuk bahasa dan sastra Indonesia yang selama ini secara rutin telah berlangsung kongres lima tahun sekali.

Setelah hampir 40 tahun tidak diselenggarakan kongres, perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan Kongres Kebudayaan IV, tergolong luar biasa. Minat untuk menjadi peserta, pemakalah, maupun sebagai undangan, amat besar. Pemberitaan melalui media cetak dan elektronik sebelum kongres dilaksanakan telah berperan besar dalam mensosialisasikan kongres. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, dapat diketahui jumlah pemakalah dan peserta serta daerah asalnya .

REKAPITULASIPESERTA DAN PEMAKALAH KONGRES KEBUDAYAAN IV (1991)

No.	PROVINSI	PEMAKALAH UTAMA	PEMAKALAH	PEMAKALAH SUMBANGAN	PESERTA BIAYA PANITIA	BIAYA PEMDA/INSTANSI/SENDIRI	PESERTA UNDANG-AN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DI ACEH		2		6	12		
2	SUMUT		3	5	2	21		
3	SUMBAR		2		8	26		
4	RIAU		2		8	3		
5	JAMBI				5	3		
6	BENGGKULU				5	2		
7	SUMSEL.		2		8	1		
8	LAMPUNG		2		3	11		
9	DKI	2	41		9	185	164	
10	JABAR		2		11	20		
11	JATENG		9		2	30		
12	DI Y	1	9		2	27		
13	JATIM		11		5	10		
14	KALBAR				5	9		
15	KALTENG		2		3	9		
16	KALSEL		2		5	7		
17	KALTIM				5	1		
18	SULUT		2		3	7		
19	SULTENG				5	8		
20	SULSEL		2		8	15		
21	SULTRA		2		3	4		
22	BALI		2		5	16		
23	NTB		2		3	6		
24	NTT		2		3	4		
25	MALUKU				5	1		
26	IRJA	1	2		3	10		
27	TIMTIM		2		3	1		
	LUAR NEGERI					5		
	JUMLAH	4	105	5*)	133	454	164**)	11

- *) Data makalah sumbangan yang tidak akurat karena makalah diserahkan kepada Panitia ketika kongres sedang berlangsung.*
- ***) Jumlah Peserta Undangan termasuk wartawan. Jumlah keseluruhan peserta belum termasuk Panitia, pembantu Panitia, dan para seniman/penari pertunjukan*

BAB V HUBUNGAN ANTARA KONGRES KEBUDAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA

Membicarakan hubungan antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka kurang lengkap kalau hanya dilihat dari sudut budaya semata, tanpa mengaitkan dengan perjuangan untuk menjadi satu bangsa pada saat itu. Seperti yang telah dikutip di depan, dalam sejarah kehidupan kita berma-syarikat, berbangsa, dan bernegara, kebudayaan mempunyai peran yang berbeda-beda, dapat dilihat dari penilaian dalam (1) zaman pra-revolusi; (2) zaman revolusi; dan (3) peran zaman pembangunan. Dalam zaman pra-revolusi, kebudayaan Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam membentuk kesadaran nasional. Hal itu dapat berbagai kegiatan kebudayaan yang dilakukan pada saat itu, termasuk beberapa kali diselenggarakan Kongres Kebudayaan. Kegiatan-kegiatan itu mencerminkan mulai bangkitnya kesadaran untuk memajukan kebudayaan bangsa sendiri sekaligus juga mencerminkan bangkitnya rasa kebangsaan kita.

Suasana KK antara dua masa itu sangat berbeda. Pada masa yang satu yaitu masa pra-revolusi, keberadaan (eksistensi) bangsa Indonesia masih dalam proses karena masih dalam masa penjajahan Belanda. Sedangkan pada masa yang satu lagi secara *'de facto'* dan *'de jure'* keberadaan bangsa dan budaya Indonesia sudah diakui, karena telah menjadi bangsa merdeka. Hal ini berpengaruh besar terhadap keluasan cakupan materi yang dibahas dan kedalaman pembahasan dalam kongres sebelum Indonesia merdeka. Meskipun dalam kongres-kongres sebelum Indonesia merdeka telah mulai muncul pemikiran tentang *'bangsa Indonesia, kebudayaan nasional dan kebudayaan Indonesia'*, namun dalam kenyataan titik berat materi yang dibahas masih terbatas pada kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali.

KK sebelum Indonesia merdeka telah lama berlalu dan telah menjadi sejarah, sementara dampaknya masih ditunggu perkembangannya masa-masa mendatang. Sengaja dalam Bab II dan III dikutip mengenai agenda, topik-topik yang dibahas dan kesimpulan dari setiap kongres serta cuplikan pidato sambutan. Dengan ilustrasi singkat itu kita akan mendapatkan gambaran tentang adanya hubungan konsep pemikiran, materi yang dibahas, dan aktivitas yang dilakukan pada setiap KK baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka.

Terlepas dari masalah bobot dan isi kongres pada saat itu, dari segi penamaan pertemuan dengan sebutan '*Kongres Kebudayaan*' telah memberikan kesan kuat bahwa peristiwa budaya itu patut dicatat sebagai bagian penting dari perjalanan sejarah kebudayaan dan lahirnya rasa kebangsaan kita. KK I sebelum Indonesia merdeka diselenggarakan pada pertengahan dua peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Peristiwa pertama adalah kebangkitan rasa kebangsaan Indonesia yang sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia, yang ditandai dengan berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo (BO) tanggal 20 Mei 1908. Peristiwa kedua adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda atau lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, yang pada hakikatnya merupakan sebuah ikrar dan kesepakatan (*komitmen*) dari semua suku bangsa untuk bersatu. Kedua-duanya berlangsung dengan diwarnai oleh semangat kebangsaan yang kuat serta menempatkan kebudayaan sebagai unsur penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

Adanya hubungan itu makin tampak setelah kita mengamati dari sisi yang lain seperti: dasar pemikiran, tujuan, topik dan peserta kongres. Ditilik dari segi makna kata, kongres yang diselenggarakan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka pada hakikatnya sama yaitu sebagai rangkaian pertemuan para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah.

Para pemrakarsa sama-sama memandang bahwa forum pertemuan yang disebut '*kongres*' merupakan pilihan yang tepat untuk mendiskusikan langkah kebijakan untuk mengembangkan kebudayaan. Para ahli dan wakil organisasi kebudayaan saat itu hadir sebagai peserta aktif dalam kongres.

Memang harus diakui, cakupan materi yang didiskusikan masih terbatas pada kebudayaan Jawa, tetapi sesungguhnya termasuk juga mulai meluas karena termasuk kebudayaan Sunda, Madura dan Bali. Berawal dari materi yang terbatas itu kemudian mendorong diselenggarakannya kongres-kongres berikutnya dengan cakupan materi yang meluas, terutama pada kongres-kongres setelah Indonesia merdeka.

Oleh karena itu tidak terlalu sulit untuk mencari hubungan dari serangkaian Kongres Kebudayaan yang pernah diselenggarakan. Dari kongres kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka dapat ditelusuri adanya '*benang merah*' yang memberikan indikasi yang kuat tentang keterkaitan itu. Masalah arah pengembangan kebudayaan, penataan kota, masalah bangunan tua, pendidikan sejarah, kesenian, sastra, budaya dan filsafat, telah menjadi perbincangan serius.

Pemikiran tentang pentingnya pendidikan kesenian telah muncul pada Kongres Kebudayaan II tahun 1921 dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan kerajinan tangan. Cita-cita itu dapat terwujud setelah berdiri Pendidikan Kerajinan Tangan di *Kunst Ambachtschool* (KAS) di Yogyakarta tahun 1939. Hasil karya siswa hasil lomba melukis dan karya murid-murid KAS yang berupa *'lukisan'* sebagian masih tersimpan rapi di Museum Sonobudoyo. Karya-karya tersebut patut dipamerkan agar masyarakat mengetahui hasil karya awal pendidikan kesenian di Indonesia.

Pada masa sesudah Indonesia merdeka masalah seperti tersebut di atas masih tetap aktual untuk diangkat kembali sebagai topik kongres. Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1948 hingga 1991 masalah pendidikan kesenian diangkat lagi menjadi topik bahasan. Sebagai realisasinya lahirlah Sekolah Menengah Kerajinan Indonesia (SMKI), Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI), Konservatori (tari dan musik), Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), Akademi Tari Nasional Indonesia (ATNI), Akademi Seni Drama, dan Film Indonesia (ASDRAFI), hingga berdirinya Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Institut Seni Indonesia (ISI) dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Demikian pula halnya dengan pendirian jurusan-jurusan bahasa, sastra, filsafat, sejarah, budaya di berbagai perguruan tinggi tidak terlepas dengan ide yang dilontarkan pada masa sebelum Indonesia merdeka.

Dalam kaitan dengan pembentukan lembaga kebudayaan sebagai wadah untuk melakukan aktivitas kebudayaan, tampak adanya konsep pemikiran yang sama. Dalam Kongres Kebudayaan I tahun 1918 dikeluarkan rekomendasi agar didirikan lembaga penelitian kebudayaan. Realisasi dari rekomendasi tersebut lahir **Java-Instituut** pada tanggal 4 Agustus 1919. Lembaga inilah yang menyiapkan dan melaksanakan kongres-kongres kebudayaan dan bahasa berikutnya. AD-ART Java Instituut disahkan oleh Gubernur Jenderal melalui surat keputusan No. 75 tanggal 17 Desember 1919 dan memiliki masa hidup 29 tahun. Pendirinya antara lain PAAP, Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. FDK. Bosch.

Seperti halnya pada Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka, pada kongres-kongres setelah Indonesia merdeka, juga diusulkan berdirinya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebudayaan. Lembaga-lembaga itu antara lain: Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI (1948), Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN (1951), Badan Sensor Film atau BSF (1951), Dewan Pengawas Pemasukan Lektur dan Film (1954). Menarik untuk dicatat adalah tentang lahirnya LKI dan BMKN yang memiliki banyak kemiripan dengan berdirinya Java-Instituut. Berdasarkan rekomen-

dasi Kongres Kebudayaan I tahun 1948, maka berdirilah LKI. Lembaga ini berstatus sebagai pelaksana berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk menyiapkan dan melaksanakan KK. Pada Kongres Kebudayaan II, secara khusus dibentuk siding yang membahas tentang kelembagaan kebudayaan. Dari perbincangan dalam siding kelompok tersebut disepakati untuk dibentuk lembaga kebudayaan baru. Melalui Konferensi Kebudayaan di Jakarta, pada tanggal 14 April 1952, dibentuklah Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Penetapan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/100/10, tanggal 23 Agustus 1952. Sayangnya prestasi BMKN tidak secerah Java-Instituut yang berhasil menyelenggarakan Kongres Kebudayaan sebanyak 7 kali, sementara BMKN hanya satu kali saja, yaitu Kongres Kebudayaan tahun 1954. Java-Instituut bubar demi hukum pada tanggal 4 Agustus 1948 setelah berusia 29 tahun, sementara BMKN secara pelan-pelan menjadi tak berdaya dan kini tinggal nama.

Mungkin ada yang menyangsikan tentang adanya hubungan Kongres Kebudayaan sebelum dengan sesudah Indonesia merdeka, karena waktu itu Nusantara masih dijajah Belanda. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan tidak terlepas dari kepentingan politik penjajah dan dengan sendirinya konsep pemikiran kongres tidak jauh dari kepentingan Pemerintah penjajah. Keberadaan lembaga penelitian kebudayaan Java-Instituut bila ditilik dari perspektif pemerintahan penjajah dapat diposisikan sebagai lembaga yang sengaja dibentuk untuk melakukan kajian budaya guna memberikan masukan bagi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

Sementara itu bila ditilik dari perspektif pergerakan kesadaran berbangsa, kongres-kongres itu justru menjadi forum untuk menggalang dan memperkuat kesadaran itu. Kesadaran itu tumbuh di samping akibat dari tekanan dari pemerintahan yang berkuasa (penjajah) juga karena adanya kesadaran bahwa pada dasarnya semua suku bangsa memiliki unsur budaya yang sama. Oleh karena itu Kongres Kebudayaan saat itu memiliki hubungan timbal balik antara tumbuhnya kesadaran untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan kesadaran berbangsa. Kongres menjadi forum untuk menggalang kekuatan baru yang setahap demi setahap mulai mengkristal dalam bentuk tuntutan agar segera terwujud satu bangsa dan satu budaya.

Tumbuhnya kesadaran berbangsa, dan kepedulian terhadap nasib kebudayaannya, merupakan suatu perwujudan dari sebuah pendapat ahli sejarah, yang menyatakan bahwa kekuatan baru dapat tumbuh akibat dari tekanan kekuatan lama (dalam hal ini penjajah). Akibat dari mendapatkan

tekanan yang kuat, justru membangkitkan semangat dan kekuatan yang makin hebat. Seperti yang dikutip oleh HB. Jassin dkk. sebagai berikut:

*'Berdasarkan fenomena-fenomena sejarah maka seorang ahli sejarah mengatakan bahwa kebudayaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudayaan dari kelas yang berkuasa. Akan tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa justru karena tidak termasuk dalam kelas yang berkuasa maka orang berhasil membentuk kekuatan baru. Dan politik, sebagai kekuatan baru yang terbentuk di tengah-tengah penindasan kekuatan lama, merupakan faktor positif yang menentukan perkembangan kebudayaan dan kesenian.'*¹⁰³

Sebagai bukti telah lahir kekuatan baru dapat dilihat dari pencetus dan peserta kongres. Dalam kongres-kongres itu telah banyak terlibat nama-nama kaum terpelajar bumiputra yang di antaranya juga terlibat dalam pergerakan nasional. Telah aktif mengambil peran antara lain: PH. Hadi-negoro, PAAP Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, Soejono, Ki Hajar Dewantara, Dr. Radjiman, R. Ngabei Poerbatjaraka, dr. Soetomo, RP. Soeroso, Mr. Singgih, Tjipto Mangoenkoesoemo, RA Wira Nata Koesoema, R. Hassan Suma Di Pradja, dan Abdul Azis. Bahkan inisiatif untuk menyelenggarakan kongres pertama tahun 1918 justru datang dari kalangan bumiputra, yaitu PAAP. Prangwadono.

Pendapat mereka tentang kesadaran berbangsa dan berkebudayaan sangat jelas dan tegas. Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, R. Sastrowidjono pada saat itu mengatakan: *'...telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi.'*¹⁰⁴ Selanjutnya Sastrowidjono menyatakan bahwa budaya milik suatu bangsa merupakan cerminan paling sempurna dari kesadaran nasional dan jati diri bangsa yang bersangkutan. Untuk itu ia menyerukan kepada seluruh bangsa di Jawa, tanpa membedakan antara orang Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura ataupun Bali guna membahas bersama jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Bagian lain yang menarik dari serangkaian Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka adalah perhatian para raja dan pejabat pemerintah pada masa itu terhadap kegiatan kongres. Para raja dan bangsawan yang pernah hadir dalam kongres antara lain: Sultan Hamengkoeboewono VIII, Sri Soesoehoenan Pakoeboewono X, KGPA. Mangkoenegoro VII, Pakoe

¹⁰³ E. Ulrich Kratz, *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*, hal. 496.

¹⁰⁴ Jaap Erkelens, *Java-Instituut Dalam Foto: 2001*, hal. 2.

Alam, Tjokorde Gde Raka Soekawati, Tjokorde Raka (Ubud), dan I Gusti Bagoes Djelantik, dari Karangasem.

Pada masa setelah Indonesia merdeka, Kongres Kebudayaan juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara. Pada Kongres Kebudayaan I tahun 1948 hadir Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Penerangan Moh. Natsir. Pada pada KK 1948 dan 1951, Bung Hatta menyampaikan prasarannya. Hadir pula Panglima Besar Soedirman dan beberapa orang menteri. Pada Kongres Kebudayaan II tahun 1951 Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri PP dan K. Mr. Wongsonegoro. Sedangkan pada Kongres Kebudayaan III tahun 1954 hanya dihadiri oleh Menteri PP dan K, Mr. Muh. Yamin.

Pada Kongres Kebudayaan IV tahun 1991, kongres dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Soedharmono, SH. Hadir pula pada kongres tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Soepardjo Roestam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Di samping itu, banyak juga nama-nama dari luar suku Jawa yang terlibat dalam kongres seperti: Muh. Husni Thamrin, St. Sjahrir, St. Moeh. Zain, Tjokorde Gede Raka Soekawati, I Gusti Bagoes Djelantik, dan lain-lain. Banyak di antara mereka adalah kaum terpelajar dari perkumpulan Boedi Oetomo dan organisasi lainnya yang telah memiliki kesadaran berbangsa yang tinggi. Bahkan sebagian besar dari mereka kelak terlibat langsung dalam Kongres Kebudayaan tahun 1948, 1951 dan 1954.

Bagaimana halnya dengan pendapat kaum terpelajar keturunan Belanda tentang kebudayaan bangsa? Dari sejumlah nama yang terlibat dalam kongres adalah para pemerhati dan peneliti kebudayaan yang penuh dedikasi dan hasil karyanya menjadi dokumen yang penting bagi sejarah kebudayaan kita. Nama-nama seperti: Dr. FDK. Bosch, Samuel Koperberg, A. Muhlenfeld, Z. Stokvis, PAJ. Moojen, Ir. Th. Karsten, J. Kats, Dr. GAJ. Hazeu, Dr. WF. Stutterheim, Ir. H. Maclaine Pont, Dr. R. Goris, Dr. GWJ. Drewes dan JW. Teillers, adalah nama-nama yang pendapat dan karyanya menjadi acuan bagi para peneliti kebudayaan pada masa sekarang.

Salah dari sekian banyak cendekiawan Belanda yang memiliki pandangan yang sama dengan jiwa bangsa Indonesia adalah A. Muhlenfeld, yang antara lain pada tahun 1918 menyatakan pendiriannya bahwa perlu juga diajarkan sejarah abad-abad yang baru berlalu agar keturunan kita yang sedang tumbuh menyadari betapa buruk akibat yang menyedihkan bagi

bangsa yang berselisih dan bercerai-berai. Bahwa pada zaman yang akan datang daerah Jawa dan juga pulau-pulau lain di Nusantara akan mendapatkan kedaulatan penuh. Hanya atas dasar kesatuan nasional bangsa Jawa akan mampu mempertahankan kedaulatan itu, dan untuk hal ini harus ditanamkan melalui pendidikan.

Di samping nama-nama yang memang terlibat dalam penelitian kebudayaan, terdapat nama pejabat Pemerintah Hindia Belanda yang tidak perlu diragukan lagi pendapat dan pikirannya tentang kebudayaan bangsa. Dari sekian banyak pejabat warga Belanda yang menarik untuk disimak karena memiliki perhatian besar terhadap kebudayaan Indonesia, adalah Walikota Bandung, Mr. SA. Reitsma, dan Mr. Dijkerman, Walikota Surabaya, masing-masing selaku tuan rumah Kongres Kebudayaan.

Dalam pidato pembukaan Kongres Kebudayaan tahun 1921 di Bandung, SA. Reitsma mengatakan bahwa tujuan diadakannya kongres adalah untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang dalam keadaan tertindas, dan akan dihidupkan kembali berkembang di daerah-daerah. Sementara itu Walikota Surabaya Mr. Dijkerman juga telah menyampaikan pandangannya bahwa seni dapat berkembang apabila didukung oleh semangat dan kegairahan hidup dari bangsa yang sedang berkembang. Seni berkembang kuat pada saat bangsa itu sedang dalam kondisi kuat. Dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan bangsa Indonesia.

Seorang pejabat yang lain adalah Mr. Samuel Koperberg, yang menjabat Sekretaris Java-Instituut dan Sekretaris Panitia Kongres dari tahun 1919 - 1937. Mr. Samuel Koperberg sangat serius untuk mengembangkan kebudayaan Jawa sebagai alat untuk memperkuat kepribadian Jawa. Sebagai Sekretaris Java-Instituut ia menerbitkan majalah kebudayaan dan bahasa. Dialah yang mengambil prakarsa untuk mendirikan Museum Sonobudoyo, di Yogyakarta yang koleksinya kebanyakan berasal dari Jawa, Sunda, Madura dan Bali.

Terakhir ia menjadi pegawai Museum Sonobudoyo dengan SK dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dengan SK. No. 5316, tanggal 7 Juni 1946. Tahun 1947 diangkat sebagai pegawai pada Dinas Purbakala dan tahun 1949 menjadi Kepala Dinas Perpustakaan pada Kementerian PP dan K.

Sebagai gambaran tentang pendiriannya tentang kebudayaan Barat dan Timur, dituangkan dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada Sutan Sjahrir, yang berbunyi sebagai berikut:

*'Waktu saya menerbitkan majalah De Taak bersama J.E. Stokvis dan kemudian majalah Timbul bersama Mr. Singgih tujuan utama saya adalah kebangunan kebudayaan sebagai unsur penting dalam renaisans orang Jawa. Inilah pedoman saya selama bekerja bagi Java-Instituut, majalah Jawa dan Museum Sonobudoyo. Mengenai nilai hasil pekerjaan itu orang dapat berselisih pendapat, namun saya tetap yakin bahwa di antara kebudayaan Indonesia lama dan alam pikiran orang Barat perlu ada kompromi.'*¹⁰⁵

Pendapat ini sejalan dengan Ki Hajar Dewantara yang pada tahun 1937 menyatakan: *'...bahwa untuk kemajuan hidup tumbuhnya kebudayaan diperlukan adanya hubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain.'*¹⁰⁶ Selanjutnya Ki Hajar mengatakan: *'Karena itu perlu diambil bahan-bahan kebudayaan dari luar, yang dapat memperkembangkan (yakni memajukan) atau memperkaya (yakni menambah) kebudayaan sendiri.'* Dalam berhubungan dengan kebudayaan asing itu harus *'...diusahakan menjadi asimilasi, dalam arti 'mengolah' dan 'memasak' bahan baru tadi.'* Pendapat inilah kemudian menjadi amat penting perannya karena dipilih untuk menjadi sebagian dari kalimat penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: *'....dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.'*



Hal lain yang perlu disimak adalah mengenai posisi Pemerintah dan penyelenggaraan kongres. Mengenai pemrakarsa dan pelaksana KK, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka, kebanyakan datang dari kalangan budayawan, seniman dan cendekiawan yang menaruh perhatian besar kepada kebudayaan. Pada KK sebelum Indonesia merdeka inisiatif untuk menyelenggarakan KK pertama datang dari seorang terpelajar bumiputra, yaitu PAAP. Prangwadono yang didukung oleh kaum terpelajar lainnya. Ia adalah seorang bangsawan terpelajar yang kemudian dinobatkan menjadi Mangkunegoro VII. Hampir pada setiap penyelenggaraan kongres sebelum Indonesia Pangeran Prangwadono selalu aktif berperan.

Dari penyelenggaraan KK pertama tahun 1918 melahirkan sebuah lembaga penelitian kebudayaan, yang diberi nama **Java-Instituut**. Dalam Anggaran Dasar Java Instituut, Pasal 4 butir b disebutkan bahwa misi Lembaga ini

¹⁰⁵ Jaap Enkelens, *Java-Instituut Dalam Foto: 2000*, hal.13.

¹⁰⁶ Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan II: 1994*, hal. 78

adalah melakukan kegiatan untuk memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis) dan karang-mengarang. Sebagai bentuk realisasi dari Anggaran Dasar tersebut mulai dari KK tahun 1919 hingga kongres terakhir tahun 1937, segala persiapan dan pelaksanaan dikoordinasikan oleh Java Instituut. Dengan demikian peran Pemerintah Hindia Belanda dan para raja yang terlibat dalam kongres sebatas memberikan bantuan kepada lembaga tersebut.

Sama dengan penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka, pada KK sesudah Indonesia merdeka, inisiatif datang dari kalangan budayawan, seniman, cendekiawan, dan pemangku adat yang merasa terpanggil untuk memikirkan nasib kebudayaan bangsanya. Sebagian dari mereka yang terlibat dalam persiapan KK pertama tahun 1948 adalah kaum terpelajar yang telah terlibat dalam kegiatan Kongres Kebudayaan dan Kongres Bahasa sebelum Indonesia merdeka. Nama-nama seperti Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Dr. Radjiman, Ki Hadjar Dewantara, Dr. Porbatjaraka, Mr. Wongsonegoro, Armijn Pane, telah banyak berperan dalam kongres-kongres sebelum Indonesia merdeka.

Persiapan penyelenggaraan kongres diawali dengan diselenggarakannya Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi pada bulan Desember 1945.¹⁰⁷ Setelah pertemuan Sukabumi, Pusat Kebudayaan Kedu mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan lanjutan dan sepakat untuk mengusulkan agar segera diselenggarakan Kongres Kebudayaan. Usul yang sangat penting dan strategis itu kemudian diambil alih oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan dilanjutkan dengan konferensi persiapan kongres di Magelang pada tanggal 6 Mei 1948. Dari pertemuan ini kemudian dibentuk Panitia Penyelenggara dan kemudian berhasil menyelenggarakan KK pertama pada tanggal 20 – 24 Agustus 1948 di kota Magelang. Dengan demikian dalam KK I pengambil prakarsa dan pelaksanaannya pihak organi-sasi non pemerintah yang lebih banyak berperan.

Sesudah KK I di Magelang disusul KK II di Bandung tahun 1951. Dalam kongres ini segala persiapan hingga pelaksanaannya ditangani oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia, yakni sebuah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan salah satu rekomendasi KK di Magelang. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari KK II di Bandung, dibentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional Indonesia (BMKN). Status LKI masuk sebagai salah satu organisasi dalam BMKN.

¹⁰⁷ Pax Benedento (penyunting), *Kronik Revolusi Indonesia, Bagian I (1945)*: 1999, hal. 283.

Pada KK ketiga tahun 1954 di Surakarta, kegiatan persiapan dan penyelenggaraan sepenuhnya ditangani oleh BMKN. Kongres itu diselenggarakan bersamaan dengan diselenggarakannya Rapat Umum BMKN.

Dari sedikit gambaran di atas jelas bahwa dalam hal penyelenggaraan tiga KK sesudah Indonesia merdeka, posisi Pemerintah hanya pasif, dalam arti sebagai falitator saja. Peran aktif lebih banyak dilakukan oleh organisasi kebudayaan yang bersifat non pemerintah, seperti yang dinyatakan oleh Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo pada sambutan pembukaan KK tahun 1948. Mr. Alisastroamidjojo antara lain mengatakan: *'...tjampur tangan Kementerian itu adalah pasief, oleh karena saja berpendirian, meskipun pemerintah telah mempunyai garis politik jang tertentu terhadap kebudajaan pada waktu sekarang ini, tidak seharusnjalah Kementerian PP dan K tjampur tangan sehingga seolah-olah merupakan tekanan atau merupakan perintah dari atas untuk menjelenggarakan sesuatu....'*¹⁰⁸ Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Menteri PP dan K, Mr. Wongsonegoro yang hadir pada KK kedua tahun 1951 di Bandung, dan oleh Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin pada pembukaan KK ketiga tahun 1954 di Surakarta dalam pidato sambutannya di samping menyatakan terima kasih kepada Panitia juga menyatakan terima kasih kepada BMKN karena telah mengambil peran yang besar dalam mengembangkan kebudayaan. Mr. Moh. Yamin mengatakan bahwa BMKN adalah: *'...jang secara langsung merupakan koordinasi dalam usaha-usaha guna perkembangan kebudajaan dalam arti luas menampakkan kegiatan jang memberi dasar kepada pengharapan umum untuk mentjapai hasil yang baik. Berdasarkan keinsyafan itu maka Pemerintah tak segan-segan untuk mentjurahan perhatian kepada Kongres ini dan memberikan bantuan sebaik-baiknya dimana perlu dan dimana mungkin.'*¹⁰⁹

Berbeda dengan ketiga KK tersebut, pada penyelenggaraan KK keempat tahun 1991 inisiatif untuk menyelenggarakan KK datang dari pihak pemerintah, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Langkah ini dilakukan mengingat kondisi organisasi kebudayaan sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah KK III tahun 1954, perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ketika itu politik telah menjadi panglima. Karena politik dinomorsatukan, tak terelakkan kebudayaan pun menjadi sarat bermuatan politik dan ajang pertarungan politik. Dan terbukti *cultural approach* (pendekatan budaya) memang merupakan sarana ampuh untuk mencapai

¹⁰⁸ Majalah Budaya, Tahun 1950, hal. 13.

¹⁰⁹ Majalah Budaya, September-Oktober 1954, hal.2

tujuan-tujuan politik.¹¹⁰ Akibatnya tidak hanya terjadi perang ideologi antara komunis dan non komunis, tetapi juga perang budaya dalam arti dua kelompok budayawan, cendekiawan dan wartawan yang menganut paham komunis dengan yang tidak setuju dengan paham komunis. Mencermati situasi pada saat itu DS Moeljanto dan Taufiq Ismail sampai pada kesimpulan bahwa telah 'terjadi prahara budaya yang menggeleгар di tahun 60-an itu.'¹¹¹

Gejala itu sudah mulai tampak setelah KK III tahun 1954 berlangsung. Selain keberadaan lembaga BMKN, masing-masing partai politik mendirikan lembaga kebudayaan sendiri. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), SOKSI mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (Lekri), yang bertentangan dengan Lekra, Partai Nasional Indonesia (PNI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Partai NU mendirikan Lembaga Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), Partai Kristen Indonesia mendirikan Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (Lekrindo), Partindo mendirikan Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), dan Partai Katolik mendirikan Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia (LKKI).¹¹²

Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965 meletus keberadaan organisasi kebudayaan menjadi semakin terpuruk. BMKN sebagai organisasi kebudayaan yang bersifat nasional tidak berdaya lagi, dan bahkan diindikasikan di dalam tubuh BMKN terdapat juga seniman dan budayawan yang berfaham komunis. Perkembangan kebudayaan setelah tahun 1965 dapat dikatakan aktivitas kebudayaan kebanyakan dikoordinasikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menyadari betapa pentingnya peran kongres yang secara khusus membahas masalah kebudayaan, pada sekitar tahun 1987 para pejabat Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan memperbincangkan tentang perlunya diselenggarakan Kongres Kebudayaan berikutnya. Ketika ide ini mulai disosialisasikan berbagai komentar bernada sumbang bermunculan. Tidak sedikit yang memberikan komentar yang bernada sinis terhadap rencana kongres, mulai dari ungkapan bahwa kongres itu akan menjadi kongresnya baju Korpri, kongresnya baju safari, kongresnya pejabat pemerintah, kongresnya birokrat, hingga pada sindiran bahwa keputusan kongres sudah siap sebelum kongres dibuka.

Berbagai komentar seperti demikian itu tidak menyurutkan semangat untuk menyelenggarakan kongres. Berbagai komentar itu menjadi masukan yang

¹¹⁰ DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk*, 1995, hal.9

¹¹¹ DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk*, 1995, hal. 6

¹¹² DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk*, 1995, hal. 449

amat berguna bagi Pemerintah. Posisi Pemerintah dalam penyelenggaraan kongres lebih banyak pada penyediaan fasilitas untuk memperlancar penyelenggaraannya, di samping ikut berperan dalam penentuan materi kongres. Bersama-sama unsur seniman, budayawan, cendekiawan, dan pemangku adat, serta beberapa pejabat di bidang kebudayaan masuk dalam susunan Panitia Pengarah (*Steering Committee*), yang mempunyai tugas mengarahkan isi dan materi kongres.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak dari KK I sebelum Indonesia merdeka (1918) hingga KK III sesudah Indonesia merdeka (1954) baru pada KK IV tahun 1991, untuk pertama kali Pemerintah mengambil prakarsa dan memberikan fasilitas kemudahan dalam penyelenggaraan Kongres Kebudayaan. Peran Pemerintah seperti ini tampaknya masih diperlukan pada penyelenggaraan Kongres Kebudayaan berikutnya, karena sesuai dengan keinginan para peserta KK IV tahun 1991, KK V seharusnya sudah diselenggarakan tahun 1996 yang lalu (5 tahun sekali).

BAB VI SEKILAS TENTANG TOPIK-TOPIK MATERI KONGRES KEBUDAYAAN DARI SEBELUM HINGGA SESUDAH INDONESIA MERDEKA

Perbincangan tentang kebudayaan dalam forum berbentuk kongres baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka telah berlangsung sebelas kali. Jarak waktu yang paling lama antara kongres yang satu dengan yang lain adalah antara Kongres Kebudayaan tahun 1954 dan 1991. Ini berarti hampir 40 tahun lamanya, baru ada Kongres Kebudayaan lagi. Mengapa jarak itu demikian lama menjadi pertanyaan tersendiri.

Meskipun demikian bukanlah berarti selama masa vakum perbincangan tentang kebudayaan tidak ada sama sekali. Kebudayaan tetap menjadi bagian yang sering diperbincangkan, dalam forum-forum seperti simposium, seminar, diskusi, dialog dan temu budaya serta sarasehan budaya. Bahkan ada yang berpendapat sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah berlangsung periodik selama masa vakum itu dipandang sebagai sebuah bentuk '*Kongres Kebudayaan*' juga.

Dari gambaran seluruh penyelenggaraan Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, pada Bab II dan III di atas dapat diketahui tema-tema pokok yang dijadikan topik perbincangan dari kongres ke kongres. Keinginan untuk menyelenggarakan kongres berikutnya masih tetap ada, karena sejak disadari tentang perlunya pembinaan kebudayaan bangsa, berapa banyak jumlah kongres yang sudah diselenggarakan tidak dapat dijadikan ukuran apakah perbincangan itu sudah cukup atau belum.

Dengan kondisi Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan kepercayaan, banyak pendapat yang menyatakan bahwa belum ada masukan yang dirasakan cukup untuk dapat mendudukan faktor budaya sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu, masalah kebudayaan itu sendiri masih banyak mengundang minat orang untuk memperbincangkannya, karena '*kebudayaan itu memang penting untuk dibi-cayakan*' dan sekaligus juga '*senantiasa menarik minat kita karena di satu sisi kebudayaan bersangkutan paut dengan keberadaan suatu bangsa, namun di sisi lain ia merupakan konsep yang cakupan dan artinya sulit disepakati bersama,*' seperti yang dikatakan oleh Sapardi Djoko Damono.

Oleh karena itu, ada baiknya jika dilakukan penyimpulan terhadap pemrakarsa dan pelaksana kongres serta tema pokok yang diperbincangkan

dalam serangkaian kongres itu, untuk memahami konsep pemikiran dan strategi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa yang dituangkan dalam rumusan-rumusan hasil kongres. Di samping akan diketahui topik apa yang sudah dan belum dibahas dalam kongres-kongres itu. Juga dapat pula diketahui langkah apa saja yang belum dan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil kongres.

Untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang pokok bahasan yang telah diperdebatkan sejak Kongres Kebudayaan tahun 1918 hingga 1991, disajikan cuplikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

CUPLIKAN POKOK BAHASAN YANG DIPERDEBATKAN DALAM KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1918 HINGGA 1991

1	2	3	4	5
1.	Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya pelajaran sejarah. ▪ Pengembangan kebudayaan Jawa ▪ Penguasaan ilmu pengetahuan Barat 	1918, di Surakarta	Pergelaran musik, tari Wireng, Wayang Womg (orang) dan mengunjungi Prambanan
2.	Congres van het Java-Instituut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajaran Sejarah Jawa, Sunda, Madura dan Bali ▪ Pengajaran Kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali 	1919, di Surakarta	Pergelaran tari dan Wayang kulit.
3.	Congres van het Java-Instituut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan seni musik dan Sejarah pada pendidikan Bumiputra. ▪ Pelestarian dan Pengembangan seni musik ▪ Perbandingan seni musik sekarang dengan masa lalu 	1921, di Bandung	Pergelaran tari, musik Sunda, tonil Lutung Kasarung, dan Pameran seni ukir
4	Congres van het Java-Instituut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sejarah bangunan kuno di Jawa ▪ Nilai yang terkandung dalam bangunan kuno untuk Kebudayaan Jawa masa kini dan akan datang? ▪ Pelestarian dan Pemanfaatan bangunan kuno 	1924, di Yogyakarta	Pergelaran tari Bedoyo, Wayang Wong, Wayang Kulit dan kunjungan ke candi Prambanan dan Kota Gede
5.	Congres van het Java-Instituut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musik Hindu-Jawa di Jawa Timur ▪ Sejarah dan manfaat bangunan Majapahit. ▪ Seni musik Madura ▪ Seni sastra Madura ▪ Sejarah Madura ▪ Kebudayaan daerah dalam pendidikan 	1926, di Surabaya	Pergelaran Wayang Wong, tari Srimpi, Pasar Tahunan dengan pameran kerajinan, Lomba Perahu, dan kunjungan ke acara Karapan Sapi di Bangkalan dan

				situs Majapahit
6.	Congres van het Java-Instituut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajaran sastra, filsafat dan budaya Timur di Perguruan Tinggi ▪ Perguruan Tinggi Sastra, Filsafat dan Budaya Timur ▪ 10 Tahun Java-Instituut 	1929, di Surakarta	Pergelaran Permainan Rakyat (anak-anak), Klenengan, Wayang Wong, mengunjungi Sriwedari dan Radya Pustaka
7.	Congres van het Java-Instituut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan tua di Bali ▪ Kehidupan keluarga masyarakat Bali ▪ Kehidupan sosial masyarakat Bali ▪ Seni kerajinan Bali 	1939, di Bali	Pergelaran aneka tari, Gong Kebyar, pembacaan lontar, pameran kerajinan dan kunjungan ke pura Keheh, Gunung Kawi, ke Goa Gajah, Kintamani dll.
8.	Kongres Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebudayaan dan pembangunan masyarakat, oleh Ki Mangoensarkoro. ▪ Kebudayaan dan Hukum Masyarakat, oleh Prof. Mr. Djokosoetono. ▪ Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi, oleh Prof. Mr. Soenarja Kolopaking. ▪ Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota, oleh Prof. Ir. Poerbodiningrat. ▪ Kebudayaan dan Pembangunan Negara, oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto. ▪ Kebudayaan dan Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantoro. ▪ Kebatinan sebagai Alat dalam Pembangunan Negara, oleh Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedjodiningrat dan Ki Mangoensoedarso. ▪ Seni Suara dan Soal-soalnya, B. Sitompul ▪ Kebudayaan dan Seni Sastra Baru, Anas Ma'ruf ▪ Kebudayaan dan Seni Rupa Indonesia Baru, Basoeki Resobowo ▪ Seni Sandiwara, Abu Hanifah ▪ Mendirikan Akademi Kesenian, Sindoesoewarno ▪ Pembentukan Lembaga Kebudayaan, Armijn Pane ▪ Soal Kementerian Kebudayaan, Abu Hanifah 	1948, di Magelang, Jawa Tengah	Diikuti dengan acara pertunjukan musik 'GENTONO' dari Surakarta, Konser Musik Kepolisian Negara, Tari Minang, Jawa, Bali, tari Nusantara, dan Pencak silat serta pameran kebudayaan dan seni kerajinan.
9.	Kongres Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengenai Hak Mengarang: <ul style="list-style-type: none"> - Hak Cipta, Anas Ma'ruf - Hak Pengarang dan Pencipta, Nasrun, AS ▪ Mengenai Perkembangan Kesusasteraan: <ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan Kesusasteraan Bangsa Indonesia, HAMKA 	1951, di Bandung	Pergelaran Drama oleh Ratu Asia, musik Gentono, dan berbagai macam tarian serta pameran kebudayaan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Perkembangan Sastra Indonesia, AS. Dharta ▪ Mengenai Kritik Seni: <ul style="list-style-type: none"> - Kritik Seni, Mr. N. Nasrun ▪ Mengenai Sensor Film: <ul style="list-style-type: none"> - Sensor Film dan Peristiwa Film, Rustam St. Palindih. - Sensor Film, Asrul Sani - Film dan Kesusilaan, JB. Moningka ▪ Mengenai Organisasi Kebudayaan: <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Kebudayaan, Mr. Kuntjoro Purbopranoto - Organisasi Kebudayaan, oleh DE VLETTER - Organisasi Kebudayaan, Moh. Yamin - Organisasi Kebudayaan, Lim Ek Cheang 		
10.	Kongres Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Kebudayaan dalam Masyarakat Sekolah, S. Mangunsarkoro ▪ Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat, Rivai Apin ▪ Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Buruh dan Tani 	1954, di Surakarta	
11.	Kebudayaan Kita: Kemarin, Kini dan Esok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warisan Budaya: Penyaringan dan Pengembangan, dengan 5 Topik: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Budaya. ○ Kebudayaan Daerah dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya ○ Pelestarian dan Pengembangan Kesenian serta Kera-jinan Tradisional ○ Aturan-aturan Adat Berke-naan dengan Kekuasaan dan Pemilikan ○ Warisan Budaya Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ▪ Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan <ul style="list-style-type: none"> ○ Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional ○ Arah Perkembangan Kebudayaan Nasional ○ Kesusastraan Indonesia dalam Kebudayaan Nasional ○ Media Massa dan Kebudayaan Nasional ○ Kebudayaan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional ○ Keterkaitan Antara Kebudayaan dan Pembangunan Nasional ▪ Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional <ul style="list-style-type: none"> ○ Daya Cipta dan Pertumbuh- 	1991, di Jakarta	<p>Pokok bahasan ini dijabarkan ke dalam 19 judul makalah</p> <p>Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 25 judul makalah.</p> <p>Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 17 judul makalah</p>

		<p>an Kesenian Daerah dan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peranan Seniman dalam Ma-syarikat ○ Daya Cipta Ilmu dan Teknologi dalam pertumbuhan Kebudayaan di Indonesia ○ Daya Cipta Budaya dan Media Massa ○ Generasi Muda dan daya Cipta Budaya ○ Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesusasteraan Daerah dan Nasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ○ Kebudayaan dan Ekonomi ○ Kebudayaan dan Ilmu dan Teknologi ○ Kebudayaan dan Sosial, Politik dan Hukum ○ Kebudayaan dan Pertahanan dan Keamanan ○ Kebudayaan dan Wanita ○ Kebudayaan dan Olah Raga ○ Kebudayaan dan Lingkungan Alam ▪ Kebudayaan Nasional dan Dunia (Umat Manusia) <ul style="list-style-type: none"> ○ Kebudayaan Asing dan Kebudayaan di Indonesia ○ Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri ○ Pariwisata dan Kebudayaan di Indonesia ○ Kerja sama Kebudayaan Antarnegara ○ Penerjemahan Karya-karya Asing di Indonesia. 		<p>Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 14 judul makalah</p> <p>Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 19 judul makalah</p>
--	--	---	--	---

Dari tabel di atas, agak lebih dalam merunut pokok-pokok materi yang diperbincangkan. Tampak dengan jelas, pokok masalah yang paling menonjol dan berulang kali dijadikan topik perbincangan adalah **masalah hubungan antara kebudayaan dan pendidikan**. Hampir pada setiap kali ada KK masalah kaitan antara kebudayaan dan pendidikan dan sebaliknya pendidikan dan kebudayaan selalu ditampilkan dan menjadi seperti tidak pernah kering untuk diperdebatkan. Pendidikan sebagai sebuah proses pembudayaan telah diposisikan sebagai bagian penting dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan manusia yang beretika, bermoral, beriman dan bertakwa. Pendidikan merupakan media yang utama untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan.

Untuk dapat menemukan strategi yang tepat '*guna mengembangkan kebudayaan Jawa*' para pemrasaran pada kongres tahun 1918 memusatkan per-

hatiannya pada masalah pendidikan bagi anak-anak dan remaja bumiputra. Perbincangan diawali dengan memperdebatkan masalah pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Jawa, serta penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan kebudayaan bangsa. Di samping itu juga masalah pengajaran bahasa asing dalam kaitan dengan penyerapan ilmu pengetahuan Barat (1918).

Topik ini pada kongres berikutnya diperluas cakupannya, tidak hanya masalah pendidikan sejarah dan kebudayaan Jawa saja, tetapi termasuk pendidikan sejarah dan kebudayaan Sunda, Madura dan Bali (1919). Perbincangan tentang pendidikan sejarah meningkat lagi ke arah pemanfaatan bangunan tua serta benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala (monument) di Jawa Tengah (1921, 1924), Jawa Timur, Madura (1926) dan Bali (1937) bagi pendidikan kesadaran berbangsa.

Di samping masalah pendidikan sejarah juga masalah pendidikan seni. Pada kongres tahun 1921, masalah pendidikan seni dalam hal ini seni sastra serta musik (seni nada) dari suku Sunda menjadi fokus perbincangan. Topik ini dilanjutkan lagi pada kongres tahun 1926 yaitu mengenai pendidikan seni sastra serta musik Jawa Jawa Timur dan Madura. Di samping itu juga perdebatan tentang hubungan dengan seni musik Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Sunda, serta masalah pendidikan seni kerajinan, karena di Jawa Timur seni ini mengalami kemunduruan. Sedangkan pada kongres tahun 1937 di Bali dibahas tentang perkembangan berbagai macam seni kerajinan (tenun, ukir, patung, emas, perak, anyaman dan kulit) dan seni lukis.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa materi pokok bahasan sejak dari kongres tahun 1918 sampai dengan tahun 1991, terus berputar-putar pada masalah pendidikan (sejarah, seni, sastra, bahasa, etika dll). Pengulangan topik perbincangan itu di samping menunjukkan bahwa antara kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang kompleks, juga dimaksudkan untuk lebih memperluas cakupan dan memantapkan konsep tentang pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Bahkan perhatian tidak hanya ditujukan pada pendidikan di tingkat rendah tetapi juga pendidikan di Perguruan Tinggi, antara lain dengan memperbincangkan tentang perlunya dibuka jurusan sastra, budaya Timur dan filsafat (KK 1918, KK 1929).

Pada KK setelah Indonesia merdeka masalah kaitan kebudayaan dan pendidikan tetap menjadi topik yang penting. Dalam KK tahun 1948, masalah kebudayaan dan pendidikan dijadikan tema khusus dengan pemrasaran Ki Hadjar Dewantara, sementara dalam KK 1951 meskipun topik yang dibahas mengenai kritik seni dan film, tetapi dalam pembahasan tetap

menyinggung masalah pendidikan. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tercapainya tujuan kritik seni perlu diadakan perluasan kesempatan untuk mempertinggi nilai membanding dari masyarakat terhadap seni, misalnya dengan mengadakan: akademi seni, mata pelajaran seni dan estetika pada universitas, serta pendirian museum hasil kesenian.

Topik mengenai kebudayaan dan pendidikan lebih diperdalam dan diperluas pada KK tahun 1954 dengan mengelompokkan rumusan menjadi 3 bagian, yaitu kebudayaan bagi pendidikan masyarakat sekolah, masyarakat kota dan masyarakat buruh dan tani. Sedangkan pada kongres tahun 1991, masalah pendidikan kebudayaan sudah tidak terlalu dominan, hanya menjadi bagian dari topik tentang kaitan kebudayaan dengan sektor-sektor masyarakat.

Peran Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang pendidik dan juga seorang budayawan dalam perdebatan tentang kebudayaan dan pendidikan sangat menonjol sejak dari kongres sebelum Indonesia merdeka. Pokok-pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara memberikan masukan yang penting bagi perumusan hasil kongres.

Dari serangkaian penyelenggaraan Kongres Kebudayaan, hal lain yang menarik perhatian adalah munculnya usul yang sesungguhnya lebih mengarah pada kepentingan pengelolaan bidang pendidikan. Dalam KK tahun 1954 diusulkan agar segera ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan mengenai masalah perlunya anggaran pendidikan dan pengajaran pada KK tahun 1954 telah diusulkan agar anggaran Departemen PP dan K dinaikkan menjadi 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Usul mengenai kenaikan anggaran tersebut mendapatkan tanggapan dari Dewan Perancang Pembangunan Nasional. Dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I 1961-1969, dalam **Lampiran C** anggaran Departemen PP dan K sebesar 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹¹³ Usul tentang UU Sistem Pendidikan Nasional kini telah menjadi kenyataan, setelah keluar UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan tentang usul dinaikkannya anggaran pendidikan, kini telah menjadi kenyataan, yaitu dengan dicantumkannya anggaran sebesar 20% dari APBN dalam UUD 1945 hasil Amandemen.

¹¹³ KETETAPAN MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting Bagi Anggauta Angkatan Bersendjata, 1966, hal. 431.

Pokok bahasan lain yang dipandang penting untuk diperbincangkan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Dalam kongres sebelum Indonesia merdeka, masalah **kebudayaan nasional** sesekali muncul dalam prasaran atau pidato sambutan. Pada kongres tahun 1948, setelah Indonesia merdeka masalah itu dijadikan topik utama, karena saat itu diperlukan suatu konsep strategi dalam memelihara, memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional seperti yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945: *'Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.'* Tetapi ada hal yang menarik dari penyelenggaraan KK 1948, 1951, dan 1954, keberadaan Pasal 32 UUD 1945 sama sekali tidak disinggung baik dalam prasaran maupun diskusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan perlu dilakukan kajian.

Pada KK tahun 1948 topik pembahasan diarahkan pada: (1) kebudayaan dan pembangunan masyarakat dan Negara; (2) kebatinan dalam hubungan dengan kebudayaan; (3) kebudayaan dan pendidikan; (4) kesenian; dan (5) pembangunan kota. Pada KK 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1951, materi menjadi menyempit karena membahas sebagian dari aspek kebudayaan. Topik yang dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut: (1) Hak Pengarang; (2) Perkembangan Kesusastraan; (3) Kritik Seni; dan (4) Sensor Film.

Setelah KK tahun 1954, hampir 40 tahun kemudian baru diselenggarakan Kongres Kebudayaan lagi. Jarak waktu yang cukup panjang bila dibandingkan dengan kongres-kongres kebudayaan sebelumnya. Setelah demikian lamanya tidak ada kegiatan kongres, maka Kongres Kebudayaan Tahun 1991 seperti menjadi ajang *'pelampiasan'* keinginan yang tak tersalurkan. Meskipun ada forum-forum perdebatan seperti simposium, seminar, diskusi, dialog dan temu budaya serta sarasehan budaya, tetapi forum itu dianggap belum dapat dijadikan forum penyaluran yang tepat. Di samping jumlah pesertanya cukup banyak, materi yang dibahas juga amat luas cakupannya. Hampir mencakup seluruh permasalahan kebudayaan baik dilihat dari sisi dalam (*intern*) maupun dari sisi luar (*ekstern*).

Dilihat dari sisi intern masalah yang diperbincangkan adalah: (1) tentang keberadaan warisan budaya bangsa. Di samping ada bagian kebudayaan yang perlu dikembangkan, ada pula bagian yang perlu dikesampingkan, dan untuk itu perlu dilakukan penyaringan (seleksi). Bagian (2) perlu memperbincangkan kembali tentang kebudayaan nasional setelah keberadaannya (eksistensinya) diakui secara *'de facta'* dan *'de jure'*. Setelah berjalan selama 45 tahun, dipandang perlu untuk mengkaji perkembangannya pada masa kini dan tentang harapan di masa di masa depan. Sedangkan bagian (3) tentang masalah daya cipta dan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional kebudayaan dijadikan topik bahasan karena pada saat itu masyarakat

dilanda kegelisahan dengan arah perkembangan kesenian daerah dan nasional yang cenderung banyak terpengaruh oleh kesenian asing.

Perbincangan kebudayaan dilihat dari sisi ekstern mencakup: (1) tentang kebudayaan dalam kaitannya dengan sektor-sektor kehidupan masyarakat, yaitu mencakup kaitan kebudayaan dengan ekonomi, ilmu dan teknologi, sosial, politik dan hukum, pendidikan, agama, pertahanan dan keamanan, wanita, olah raga, serta kebudayaan dan lingkungan alam. Pada bagian (2) dibahas tentang kebudayaan nasional dalam kaitan dengan dunia luar bahkan dalam hubungan dengan umat manusia yang ada di bumi ini, yaitu mencakup masalah hubungan kebudayaan asing dengan kebudayaan di Indonesia, kebudayaan Indonesia di Luar Negeri, pariwisata dan kebudayaan, kerja sama kebudayaan antarnegara, dan masalah penerjemahan karya-karya asing ke dalam bahasa Indonesia dan daerah. Hal lain yang menarik dari sekian banyak pokok bahasan pada Kongres Kebudayaan 1991, adalah masalah penterjemahan. Meskipun diperdebatkan sejak tahun 1951 tetapi karena belum ada langkah yang kongkrit maka masih dipandang perlu untuk diangkat lagi.

Dari gambaran tentang topik-topik perbincangan dalam kongres seperti di atas, masih ada beberapa bagian yang menurut hemat kami masih perlu dibahas lebih lanjut dalam kongres yang akan datang. Masalah mendasar yang belum pernah diangkat tuntas, misalnya tentang konsep kehidupan berbangsa dalam semboyan '*Bhinneka Tunggal Ika.*' Bangsa Indonesia yang terdiri atas beberapa suku bangsa, agama dan budaya, memerlukan konsep yang jitu dalam hal tata hubungannya. Lebih-lebih dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Di samping juga masalah perubahan (amandemen) UUD 1945, khususnya yang menyangkut Pasal-pasal yang berkaitan erat dengan kebudayaan, di samping Pasal 32 tentang kebudayaan, adalah bagian yang paling mendasar, karena pada Pasal 32 nasib kebudayaan bergantung. Dalam kaitan dengan peraturan perundang-undangan, apakah diperlukan adanya Undang-undang tentang Kebudayaan?

Hal lain yang perlu disimak secara tajam adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu aspek budaya. Kemajuan yang tidak seimbang telah membawa banyak perubahan terhadap konsep berkebudayaan masyarakat. Kegiatan kebudayaan bahkan sudah dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan industri. Demikian pula masalah hubungan antarbangsa semakin terbuka dan tidak ada sekat-sekat yang mampu membatasinya. Keterbukaan (globalisme) pada gilirannya akan membuka peluang seluas-luasnya persentuhan budaya antarbangsa. Dan masih banyak lagi yang perlu diperbincangkan sehingga harus dapat

dilakukan seleksi secara tepat mana yang prioritas dan mana yang dapat ditanggguhkan.

Sekarang beralih ke rumusan hasil kongres yang lain, yaitu yang berkaitan usul pembentukan kelembagaan atau kepanitiaan. Kalau diamati, dari hasil berbagai kongres, ada beberapa rumusan berupa usul atau rekomendasi tentang kelembagaan dan kepanitiaan yang sudah ditindaklanjuti, tetapi ada pula yang realisasinya belum ada.

Untuk mendapatkan gambaran tentang usul dibentuknya berbagai lembaga kebudayaan selama KK berlangsung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

DAFTAR RUMUSAN HASIL KONGRES KEBUDAYAAN 1918-1991 TENTANG KELEMBAGAAN DAN KEPANITIAAN

No.	RUMUSAN HASIL/ REKOMENDASI	KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perlu dibentuk Lembaga penelitian kebudayaan Jawa	1918	Berdiri Java-Instituut, tanggal 4 Agustus 1919	
2.	Perlu didirikan Sekolah Kerajinan	1929	Berdiri Sekolah Kerajinan Tangan (Kunst Ambacht School) tahun 1939	
3.	Perlu didirikan Jurusan Sastra, Filsafat dan Budaya Timur	1929	Tahun 1940 dibuka Fakultas Sastra dan Filsafat (Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten) ¹¹⁴	
4.	Perlu didirikan Akademi Kesenian	1948	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, IKJ, Konservatori	
5.	Perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan sendiri	1948	Belum ada realisasinya	
6.	Perlu didirikan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)	1948	Berdiri tahun 1948	
7.	Perlu dibentuk Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN)	1951	Tahun 1951 berdiri BMKN, LKI ikut bergabung di dalam BMKN.	
8.	Perlu didirikan Balai Penterjemah	1951	Belum ada realisasinya	
9.	Perlu didirikan Pendidikan Penterjemah	1951	Di Universitas Nasional Jakarta	
10.	Perlu didirikan Badan Penerbit Buku Kebudayaan	1951	Belum ada realisasinya	
11.	Perlu didirikan Akademi Kesenian	1951	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, IKJ, AMI.	

¹¹⁴ Majalah Arkeologi (Saraswati:Esai-esai Arkeologi), No. 9, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 1990, hal. 3

12.	Balai Pustaka sebagai Badan Otonom	1951	Th. 1963 menjadi Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetak-an Balai Pustaka, th. 1985 menjadi Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka	
13.	Perlu didirikan Balai Bahasa	1951	Tahun 1947 telah berdiri Balai Bahasa di Bali, 1952 di Yogyakarta dan 1953 di Makassar, kemudian disusul dengan Balai-balai yang lain	Dalam Kongres Bahasa Indonesia 1938 diusulkan Institut Bahasa Indonesia
14.	Perlu didirikan Museum Kesenian	1951	Galeri Nasional, tahun 1998 dan banyak Museum Seni Rupa (Pribadi)	Di setiap Provinsi telah berdiri Museum Negeri Prov.
15.	Perlu dibentuk Badan Pengarah Film (di daerah-daerah)	1951		
16.	Perlu didirikan Kantor Urusan Film (di bawah Kementerian PP dan K)	1951	Tahun 1951 dibentuk Panitia Sensor Film berada di bawah Dep. PP dan K. Tahun 1964 pindah ke Dep. Penerangan.	
17.	Perlu dibentuk Badan Sensor Film	1951	Tahun 1965 Panitia Sensor Film berubah menjadi Badan Sensor Film (BSF) dan tahun 1994 berubah lagi menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Tahun 1999 sekretariat LSF pindah ke Depdiknas, dan mulai 2001 di bawah BP BUDPAR.	
18.	Perlu didirikan Gedung-gedung Bioskop	1951	Pihak swasta telah membangun berbagai gedung bioskop di berbagai tempat	
19.	Perlu didirikan Balai Budaya/Gedung-gedung Kesenian	1954	Telah berdiri Taman Budaya di seluruh provinsi	
20.	Perlu dibentuk Panitia Sejarah Nasional	1954	Telah dibentuk Panitia Nasional dan menghasilkan Buku Sejarah Nasional Indonesia (7 jilid) dan sejumlah Kongres Sejarah.	
21.	Perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Lektur dan Film	1954	Belum ada realisasinya	
22.	Perlu didirikan Biro Penerjemah	1954	Belum ada realisasinya	
23.	Perlu dibentuk Panitia Penyelidikan Buku-Buku lama tentang Filsafat	1954	Belum ada realisasinya	
24.	Perlu diselenggarakan Pekan Raya Kebudayaan	1954	Telah diselenggarakan berbagai festival, pameran, pertunjukan berbagai macam seni, tingkat nasional dan internasional.	
25.	Perlu dibentuk Jawatan Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1954	Sebelum berlaku Otonomi Daerah di setiap Kabupaten/Kotamadya berdiri Seksi Kebudayaan dan di tingkat Kecamatan Penilik Kebudayaan.	

26.	Perlu didirikan Lembaga Film dan Perpustakaan Lektur Film	1954		
27.	Perlu dibentuk Panitia Sensor	1954	Dibentuk Badan Sensor Film, sekarang Lembaga Sensor Film	
28.	Perlu didirikan Dewan Pertimbangan Siaran Radio	1954		
29.	Perlu dibentuk Dewan pengawas Pemasukan Lektur dan Film	1954		
30.	Perlu didirikan Pendidikan Tinggi Kesenian	1954	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, IKJ, AMI	
31.	Perlu didirikan Konservatori Seni Daerah	1954	Telah berdiri di beberapa daerah (Surakarta, Medan, Padang Panjang, Bali)	
32.	Perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Kota	1954	Belum ada realisasinya	
33.	Perlu didirikan Sanggar-sanggar, museum, gedung pertunjukan, balai budaya, Taman-taman Kebudayaan (untuk anak-anak dan rekreasi)	1954	Telah berdiri berbagai sanggar sampai ke desa-desa, telah berdiri museum, taman budaya dan tempat-tempat hiburan dan rekreasi	
34.	Perlu diselenggarakan Pekan Kesenian	1954	Telah diselenggarakan berbagai macam pameran, pertunjukan dan festival seni di berbagai tempat.	
35.	Perlu dibentuk Pusat Informasi Budaya	1991	Telah dirintis Website Kebudayaan	
36.	Perlu dibentuk Unit Misi Kebudayaan/ Pertukaran Budaya	1991	Belum direalisasikan.	
37.	Perlu didirikan Lembaga Penterjemah	1991	Belum direalisasikan	

Masalah kelembagaan kebudayaan, tampaknya telah menjadi bahan perbincangan sejak awal kongres. Rekomendasi untuk mendirikan lembaga penelitian kebudayaan (1918) diwujudkan dengan pendirian Java-Instituut tahun 1919. Telah diusulkan pula berdirinya lembaga pendidikan yang menampung anak-anak berbakat di bidang seni kerajinan. Pada tahun 1939 berdirilah sekolah kerajinan (*Kunst Ambaachtsschool*) di Yogyakarta. Sedangkan usul agar didirikan jurusan untuk studi sastra, filsafat dan budaya Timur direalisasikan dalam bentuk pendirian dibuka Fakultas Sastra dan Filsafat (*Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten*) tahun 1940.

Di samping itu pada periode tersebut di beberapa tempat didirikan museum, sebagai tempat penyelamatan benda peninggalan sejarah dan purbakala seperti: (1) tahun 1920, Museum Trowulan, Mojokerto; (2) tahun 1929,

Museum Geologi, Bandung; (3) tahun 1932, Museum Bali; (4) tahun 1933, Museum Rumah Adat Banjuang, Bukittinggi; (5) tahun 1935, Museum Sonobudoyo, Yogyakarta; dan (6) tahun 1938, Museum Simalungun, Sumatera Utara. Untuk melengkapi upaya perlindungan bagi penyelamatan benda-benda tersebut dari tindakan pengrusakan, pembongkaran, pencurian, dan perdagangan dikeluarkan peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan sebutan '*Monumenten Ordonnantie Stbl. Tahun 1931.*'

Pada Kongres Kebudayaan sesudah Indonesia merdeka, banyak disampaikan usul dan rekomendasi kepada Pemerintah untuk membentuk dan menata berbagai lembaga guna mendukung keberhasilan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Hampir semua lembaga yang ada sekarang seperti: Museum, Galeri, Taman Budaya, Perpustakaan, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Balai Bahasa, Balai Penelitian Arkeologi, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Studi dan Konservasi, Lembaga Sensor Film, dan masih banyak lagi, adalah merupakan realisasi dari hasil kongres. Data tentang hal ini dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 sampai dengan 7.

Ada beberapa usul yang hingga kini belum ada realisasinya. Salah satu usul yang paling penting adalah tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan yang mandiri, seperti yang diusulkan oleh Musyawarah Kebudayaan tahun 1945 di Sukabumi, KK tahun 1948 dan desakan para peserta yang disuarakan pada sidang kelompok KK tahun 1991, dan Kongres Kesenian I tahun 1995. Usul pembentukan lembaga Pemerintah yang menangani kebudayaan setingkat Menteri bagi sebuah negara yang terdiri atas 483 suku bangsa dan masing-masing memiliki budaya yang beranekaragam, cukup rasional di samping peran kebudayaan yang amat besar dalam '*memajukan persatuan bangsa,*' sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945. Paling tidak lembaga itu dalam bentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) bagi kebudayaan.

Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan bersatu dengan bidang pendidikan selama 55 tahun, dalam naungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian PP dan K, 1945-1964) kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kementerian PD dan K, 1964-1966) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud, 1966-1999), dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 1999-2000). Mulai awal tahun 2000 bergabung dengan Pariwisata, menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Departemen ini baru berjalan beberapa bulan diganti menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) yang mempunyai misi menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Di samping itu dibentuk satu lembaga yang lain yaitu Badan Pengembangan

Kebudayaan dan Pariwisata (BP BUDPAR), yang mempunyai misi melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang digariskan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Tetapi belum berusia 2 tahun berdasarkan Keputusan Presiden No. 29, 30, 31, dan 32 tanggal 26 Mei 2003 BP BUDPAR yang menangani kegiatan operasional kebudayaan dibubarkan.

Dengan sering terjadinya perubahan bentuk kelembagaan itu telah memberikan pengalaman yang amat berharga bagi para pengelola kebudayaan, sehingga sampai pada pemikiran tentang perlunya penataan kembali posisi (*reposisi*) kelembagaan kebudayaan. Ketidakstabilan lembaga pastilah akan membawa dampak yang kurang baik bagi kinerja lembaga dan bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri. Oleh karena sudah saatnya kebudayaan dapat berdiri secara mandiri dalam kelembagaan Pemerintah, sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan tahun 1948.

Dalam Bab ini sekedar sebagai contoh sengaja dikutip garis kebijakan di bidang kebudayaan yang mencerminkan besarnya perhatian Pemerintah terhadap saran, usul dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh setiap kongres. Bagi Dewan Perancang Pembangunan Nasional (Depernas) hasil-hasil kongres itu telah dijadikan bahan masukan, seperti yang terlihat dalam kebijakan pembangunan di bidang Kebudayaan yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I 1961-1969. Dalam **Lampiran A**, Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I 1961-1969 (setelah disempurnakan), dalam Bab II KETENTUAN UMUM, Bidang Mental/Agama/ Kerohanian/ Penelitian, butir 6 disebutkan untuk: *'Mengusahakan agar segala bentuk dan perwujudan kesenian menjadi milik seluruh rakyat dan menyiarkan sifat-sifat nasional.'*¹¹⁵

Sedangkan pada bagian program, dalam pembangunan 1961-1969, khusus untuk bidang kebudayaan sasaran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 'Pembangunan semesta di bidang kebudajaan dititik-beratkan pada:*
- a. Projek-projek jang dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan kebudajaan setjara missal diseluruh Indonesia,*
 - b. Melindungi kebudajaan nasional terhadap pengaruh kebudajaan asing jang merusak kepribadian Indonesia,*
 - c. Pusat konsentrasi kekuatan kebudajaan nasional, ialah: desa, sekolah, pabrik, angkatan bersendjata dan lain sebagainya,*

¹¹⁵ KETETAPAN MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting Bagi Anggauta Angkatan Bersendjata, 1966, hal. 382.

- d. *Pembangunan kebudayaan harus diselenggarakan dalam rangka nation building,*
- e. *projek-projek urgen meliputi:*
- (i) *seni suara/musik,*
 - (ii) *senitari,*
 - (iii) *sandiwara/senidrama,*
 - (iv) *perpustakaan/kesusasteraan,*
 - (v) *film,*
 - (vi) *taman-kebudajaan (museum/national artgallery) – rakjat sedikit-sedikitnja sebuah ditiap ibu kota Daswati I,*
 - (vii) *perundang-undangan musik, sastera, dan sebagainya,*
 - (viii) *film: Film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, sesuai dengan politik luar negeri jang bebas dan aktif. Film Indonesia perlu dilindungi dari persiangan dengan luar negeri. Hanya dengan demikian ia terdjamin dalam kemajuan dan perkembangannja.¹¹⁶*

Pelaksanaan rencana baru berjalan beberapa tahun dan kemudian terhenti karena meletus peristiwa G30S/PKI, yang mengakibatkan terjadi perubahan pimpinan pemerintahan. Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, dan kebijakan pembangunan nasional mengalami perubahan pula. Mulai tahun 1969 dilaksanakan Pembangunan Nasional di segala bidang atau lebih dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dalam penyusunan perencanaannya, dituangkan ke dalam Sektor, Subsektor dan program-program, termasuk pula di dalamnya program pembangunan bidang kebudayaan beserta aspek-aspeknya. Melalui program pembangunan Subsektor Kebudayaan Nasional, dibangun fasilitas berbagai lembaga kebudayaan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian gambaran sekilas tentang pokok-pokok bahasan dan rumusan hasilnya sejak dari Kongres Kebudayaan tahun 1918 hingga tahun 1991. Dari uraian di atas dapat kita petik bagian-bagian yang perlu dipikirkan tindak lanjutnya, karena masalah itu masih layak untuk diperbicangkan ulang pada Kongres Kebudayaan yang akan datang.

¹¹⁶KETETAPAN MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting Bagi Angauta Angkatan Bersendjata, 1966, hal. 387.

BAB VII PENYELENGGARAAN KONGRES BAHASA DAN KESENIAN

Di samping KK telah diselenggarakan beberapa kali kongres lain yang berkaitan dengan kebudayaan, antara lain adalah Kongres Bahasa Indonesia, Kongres Kesenian, Kongres Bahasa Jawa, dan Bahasa Sunda, serta Kongres Bahasa Daerah lainnya. Penyelenggaraan kongres-kongres tersebut dipacu oleh semangat KK pertama tahun 1918. Dengan lahirnya lembaga penelitian kebudayaan Java-Institut tahun 1919, keinginan untuk menyelenggarakan kongres aspek budaya yang lain makin berkembang. Kongres Bahasa yang diselenggarakan pada masa itu disiapkan oleh pengurus Java-Instituut yang kebanyakan kaum terpelajar bumiputra. Aktivitas ini berlanjut hingga setelah Indonesia merdeka.

Gambaran sekilas tentang kongres-kongres yang berhasil dicatat antara lain adalah sebagai berikut:

A. Kongres Bahasa Jawa sebelum Indonesia Merdeka

1. Kongres Bahasa Jawa I diselenggarakan pada tanggal 11 – 17 Oktober 1924 di Yogyakarta.
2. Kongres Bahasa Jawa berikutnya (II) diselenggarakan pada tanggal 25 – 27 Maret 1927 di Yogyakarta.

B. Kongres Bahasa Sunda sebelum Indonesia merdeka

1. Kongres Bahasa Sunda I diselenggarakan pada tanggal 7 – 9 Oktober 1924 di Bandung.
2. Kongres Bahasa Sunda II diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 Oktober 1927, di Bandung.

C. Kongres Bahasa Jawa sesudah Indonesia merdeka

1. Kongres Bahasa Jawa I, tahun 1991 di Semarang.
2. Kongres Bahasa Jawa II, tahun 1996 di Malang.
3. Kongres Bahasa Jawa III, tahun 2001 di Jogjakarta.

Perkembangan Kongres Bahasa Daerah tidak sama dengan Kongres Kebudayaan atau Kongres Bahasa Indonesia. Tidak banyak kongres bahasa yang dilakukan, lebih-lebih setelah lahir Pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan: *'Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.'* Bahasa Jawa menyelenggarakan kongresnya baru pada tahun 1991. Sedangkan bahasa daerah yang lain belum pernah diperbincangkan dalam bentuk kongres.

Beberapa kegiatan yang pernah diselenggarakan dalam bentuk forum pertemuan, konferensi dan seminar. Pusat Bahasa telah menyelenggarakan seminar Pengembangan Sastra Daerah di Jakarta tahun 1975, seminar Bahasa Daerah tahun 1976 di Yogyakarta, dan seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra daerah di Jakarta tahun 1982. Selanjutnya pertemuan Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan 2 kali, yaitu tahun 1985 untuk wilayah Timur di Ujung Pandang (Makassar) dan tahun 1986 di wilayah Barat di Pekanbaru, Riau.

Pada tahun 1939 di Medan diselenggarakan Konferensi Sastra yang khusus membicarakan penerbitan roman yang waktu itu sangat banyak beredar. Banyak terbitan buku *'yang bersifat komersial yang cenderung berisi hal-hal yang sensasional, asulila dan cabul, berarti bermutu rendah.'*¹¹⁷ Penerbitan-penerbitan itu adalah di luar Balai Pustaka, dan kebanyakan penerbit Medan dan Padang. Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah diselenggarakan di Jakarta tahun 1982, dan yang terakhir konferensi Bahasa Daerah di Jakarta tahun 2000.

Sementara itu perhatian terhadap perkembangan bahasa dan sastra Sunda setelah Indonesia merdeka dalam bentuk kongres tidak ada sama sekali. Keadaan agak mengalami perubahan ketika Yayasan Kebudayaan Rancage tahun 1989 memberikan penghargaan kepada para sastrawan Sunda. Tetapi mulai tahun 1994, hadiah sastra *'Rancage'* tidak hanya diberikan kepada sastrawan Sunda saja tetapi juga sastrawan yang menggunakan media bahasa Jawa. Mulai tahun 1998 dikembangkan lagi mencakup sastrawan yang menggunakan media bahasa Bali. Langkah ini mirip sekali dengan yang dilakukan oleh perkumpulan Java-Instituut, yang hanya terbatas pada bidang bahasa dan kebudayaan Jawa kemudian meluas ke bahasa dan kebudayaan Sunda, Madura dan Bali.¹¹⁸

D. Kongres Bahasa Indonesia

Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan sebelum dan setelah Indonesia merdeka sebanyak 7 kali:

¹¹⁷ Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Nomor 3 tahun 1970, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 39.

¹¹⁸ Yus Rusyana, *Penghargaan Bahasa dan sastra Daerah*, makalah pada Konferensi Bahasa Daerah Jakarta, 2000, hal.1-2

1. Kongres Bahasa Indonesia I, diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka, tahun 1938, di Solo.
2. Kongres Bahasa Indonesia II, diselenggarakan tahun 1954 di Medan.
3. Kongres Bahasa Indonesia III, diselenggarakan tahun 1978 di Jakarta.
4. Kongres Bahasa Indonesia IV, diselenggarakan tahun 1983 di Jakarta.
5. Kongres Bahasa Indonesia V, diselenggarakan tahun 1988 di Jakarta.
6. Kongres Bahasa Indonesia VI, diselenggarakan tahun 1993 di Jakarta.
7. Kongres Bahasa Indonesia VII, diselenggarakan tahun 1998 di Jakarta.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia mulai tahun 1978 hingga 1998 berlangsung secara rutin, setiap lima tahun. Sangat berbeda dengan yang terjadi di bidang kebudayaan. Untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama (1938), sengaja pada Bab ini diuraikan agak lebih rinci. Kongres kali ini memiliki arti dan posisi yang berbeda bila dibandingkan dengan Kongres Bahasa yang lain. Meskipun kongres diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka, tetapi semua kalangan sepakat untuk dinyatakan sebagai Kongres Bahasa Indonesia pertama.

Kongres ini diselenggarakan pada 25-26 Juni 1938 di Surakarta. Hal ini berarti 10 tahun setelah bahasa Melayu-Riau dinobatkan sebagai bahasa nasional, pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kongres itu juga berarti diselenggarakan 7 tahun sebelum Indonesia memproklamasikan diri menjadi bangsa merdeka. Dengan demikian Kongres Bahasa tahun 1938 memiliki arti yang sangat penting, karena menjadi forum pertama untuk mendiskusikan konsep, strategi dan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Setelah bahasa Melayu-Riau diikrakan menjadi bahasa Indonesia, posisi bahasa itu menjadi semakin dominan di mata masyarakat bumiputra. Bahasa Indonesia telah berperan besar dalam mengobarkan semangat membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bahasa pergaulan semua orang berusaha untuk dapat menggunakan Bahasa Indonesia dalam segala bidang kehidupan misalnya dalam administrasi pemerintahan, pers, agama, surat menyurat, dalam pendidikan dan lain-lain. Orang dari luar kalangan suku Melayu merasa bangga dan menjadi terpelajar apabila dapat berbahasa Indonesia (Melayu).

Di satu sisi peningkatan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan sangat menggembirakan. Tetapi di lain sisi pembinaan dan pengembangan bahasa masih dirasakan kurang, sehingga menimbulkan kesan umum pada waktu itu, Bahasa Indonesia tidak memiliki aturan yang baku dalam pemakaian terutama menyangkut tata bahasa, tata kalimat, tata

istilah, dan tata penulisan.¹¹⁹ Oleh sebab itulah kemudian para ahli bahasa berkumpul menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan di bidang kebahasaan, terutama pada masalah pengaturan bahasa dan masyarakat agar menjadi bahasa yang baku dan mudah digunakan banyak orang. Dengan cara itu Bahasa Indonesia akan dapat segera tersebar luas.

Menurut Mr. Sumanang dalam suratnya kepada Redaksi Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1983, pencetus Kongres Bahasa Indonesia ialah Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan harian Soeara Oemoem Surabaya yang pada waktu rajin sekali menciptakan istilah-istilah baru, dan sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat kabar Cina. Dalam suatu obrolan Soedardjo menanyakan kepada Soemanang bagaimana kalau diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Soedardjo sanggup menggerakkan pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh di Solo, dan Soemanang kemudian menyanggupi untuk menghubungi tokoh-tokoh dan kaum terpelajar di Jakarta.

Mereka berdua berhasil meyakinkan para penulis yang tergabung dalam Pujangga Baru serta para jurnalis, guru, dan peminat yang lain. Jadi pemrakarsa kongres ini bukannya ahli bahasa profesional, melainkan wartawan pencinta Bahasa Indonesia. Kedua orang itu kemudian menyusun suatu '*Pengoeroes Komite*' di Jakarta sebagai berikut:

1. Ketua Kehormatan : Prof. RA. Hoesein Djajadiningrat
2. Ketua : Dr. RM. Ng. Poerbatjaraka
3. Wakil Ketua : Mr. Amir Sjarifoeddin
4. Sekretaris : - Soemanang
- Armijn Pane
- Katja Soengkana
5. Bendahari : - Mr. Maria Ulfah Santosa
- Soegiarti

Seperti halnya dengan Kongres-kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka, di tempat kongres yakni di Solo dibentuk '*Panitia Penerimaan*' Kongres Bahasa Indonesia, dipercayakan kepada Soedardjo Tjokrosisworo. Acara kongres secara lengkap disusun sebagai berikut:

- Sabtu, 25 Juni 1938, Pkl. 20.00-23.00:
 - a. Penyerahan kongres oleh Ketua Komite Penerimaan kepada Pengurus Kongres.

¹¹⁹ Dalam penyusunan Tata Bahasa Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana mempunyai jasa yang amat besar, dan untuk itu Universitas Indonesia memberikan gelar Doktor Honoris Causa.

- b. Pembukaan oleh Ketua Kongres Dr. Poebatjaraka di Societeit Habi-prodjo.
 - c. Menerima ucapan selamat.
- Minggu, 26 Juni 1938 mulai pukul 09.00:
Rapat terbuka dan yang berbicara menyampaikan prasaran adalah:
 - Sanoesi Pane: Sejarah Bahasa Indonesia.
 - Ki Hadjar Dewantara: Bahasa Indonesia dalam pergoeroean.
 - Adinegoro: Bahasa Indonesia di dalam persoerat-kabaran.
 - Mr. Amir Sjarifoeddin: Menjesoeaikan kata dan faham asing ke dalam Bahasa Indonesia.
 - Mr. Muh. Yamin: Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatoean dan bahasa keboedajaan Indonesia.
 - Minggu, 26 Juni 1938 pada malam harinya:
Rapat tertutup buat memperdalam tentang soal-soal yang dikemukakan rapat terbuka, serta untuk menarik kesimpulan.
 - Senin, 27 Juni 1938 mulai pukul 09.00:
Rapat terbuka, dan yang akan berbicara adalah:
 - Tuan Soekardjo Wirjopranoto: Bahasa Indonesia di Dalam Badan Perwakilan.
 - Tuan St. Takdir Alisjahbana: Pembaharoean Bahasa dan Oesaha Pengatoernja.
 - Tuan K. St. Pamoentjak: Hal Edjaan Bahasa Indonesia.
 - Tuan Sanoesi Pane: Tentang Instituut Bahasa Indonesia.
 - Tuan Tabrani: Mentjepatkan Penjebaran Bahasa Indonesia.
 - Hari Selasa, 28 Juni 1938 siang dan malamnya disediakan untuk rapat tertutup.

Patut dicatat bahwa prasaran dengan topik '*Bahasa Indonesia di dalam persurat kabaran*' bukan disampaikan oleh H.B. Perdi seperti yang tercantum dalam Sejarah Kongres Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Harimurti Kridalaksana, tetapi oleh seorang tokoh jurnalis Adi Negoro. H.B. Perdi sendiri merupakan singkatan dari nama perhimpunan para jurnalis, yakni Hoofbestuur Perhimpunan Djurnalis Indonesia (*De Inheemsche Journalisten-vereeniging*)

Pada waktu Kongres dibuka hadir sekitar 500 orang, termasuk di antaranya wakil-wakil dari Sultan Yogyakarta, Sunan Solo, Paku Alam, Mangkunegoro, Pers Indonesia, maupun Tionghoa, dan wakil dari Java-Instituut. Berkenaan

Kongres Bahasa Indonesia Pertama tahun 1938, Harimurti Kridalaksana menulis catatan sebagai berikut:

*'Sambutan tentang kongres ini tampaknya sangat besar, bukan hanya berupa pemberitaan-pemberitaan di surat kabar, melainkan juga membanjirnya surat dan telegram dari segala penjuru tanah air. Orang-orang yang sekarang kita kenal sebagai tokoh pergerakan hadir dalam kongres ini, karena kelihatan bahwa masalah bahasa sejak awal bukan hanya dianggap dianggap sebagai masalah pengajaran bahasa di sekolah saja, melainkan juga masalah nasional. Komentar mengenai kongres ini sungguh menarik untuk dibaca. Ada yang menganggap bahwa pembahasan dalam kongres ini sangat orisinil, misalnya prasaran Takdir Alisjahbana untuk mengatur bahasa secara lebih baik dengan menyusun tata bahasa Indonesia yang baru. Uraian Muh. Yamin dan Moh. Tabrani mendapat sambutan yang hangat karena kedua orang itu sangat pandai berpidato.'*¹²⁰

Hal menarik lain dari diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 satu tahun setelah diselenggarakan Kongres Kebudayaan VIII di Bali mulai tanggal 18 sampai dengan 23 Oktober 1937. Peserta Kongres Bahasa kebanyakan adalah para pengurus dan peserta Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Java-Instituut.

Di samping itu tanggapan masyarakat tidak semua pihak di Indonesia menyambut baik kongres ini. Surat kabar Belanda misalnya sangat skeptis tentang masa depan bahasa Indonesia. Ada pula yang menuduh bahwa kongres ini tidak ilmiah, padahal para pendukung kongres yang Prof. Hoesein Djajadiningrat (Ketua Java Instituut) dan Dr. Poerbatjaraka adalah sarjana Indonesia yang keahliannya diakui di dunia internasional.

Salah satu hasil nyata kongres ini ialah bahwa setelah selesai kongres ini fraksi nasional dalam Volksraad yang dipimpin oleh M. Hoesni Thamrin memutuskan untuk memakai Bahasa Indonesia dalam pandangan umum dewan tersebut – suatu sikap yang menimbulkan reaksi negatif dari penjajah.

Berita tentang kongres itu antara lain dimuat dalam majalah 'DJAWA' tahun 1938 halaman 336-337, yang diterbitkan oleh Java-Instituut dengan judul '*Besluiten van het eerste Congres Bahasa Indonesia.*' Kongres menghasilkan '*Poetoesan Konggeres Bahasa Indonesia*' yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut.

¹²⁰ Harimurti Kridalaksana, *Buku Panduan Kongres Bahasa Indonesia 1988*, hal. 20-21.

- I. *Gehoord en besproken hebbende het prae-advies van Mr. Amir Syarifoeidin omtrent vreemde woorden en begrippen in de bahasa Indonesia ("Menjoesoeaikan kata dan faham asing ke dalam bahasa Indonesia"), bleek het congres het in algemeen eens te zijn met het overnemen van vreemde woorden voor de wetenschap. Voor de huidige wetenschap kon het congres zich ermee vereenigen, dat die woorden aan de algemeene woordenschat worden ontleend. Die moet zeer voorzichtig gebeuren, en daarom behoort dit aan een comite toevertrouwd te worden.*
- II. *Gehoord en besproken hebbende het prae-advies van den heer St. Takdir Alisjahbana omtrent taalnieuwing en de regeling hiervan ("Pembaharoean bahasa dan oesaha mengantoernja"), is er volgens het congres reeds een taalvernieuwing, ontstaan doordat ere en nieuwe denkwijze is; hierdoor wordt de behoefte gevoeld aan een regeling van de taalvernieuwing.*
- III. *Gehoord hebbende de prae-adviezen van de heeren St. Takdir Alisjahbana stelling VI en van Mr. Muh. Yamin, is het congres van meening, dat de tegenwoordige grammatica's niet meer bevredigend zijn met het wezen der bahasa Indonesia; daarom moet een nieuwe grammatical samengesteld worden overeenkomstig het wezen der bahasa Indonesia.*
- IV. ~~Matig~~ *gehoord en besproken te hebben het pae-advies van den heer K. St. Pamoentjak omtrent de spelling der bahasa Indonesia ("Hal ejaan bahasa Indonesia"), zijn de aanwezigen, afkomstig uit verschillende groepen van verschillende streken, samengekomen op het congres te Solo gehouden van 25-28 Juni 1938, van meening, dat het niet noodig is een nieuwe spelling te maken, totdat het congres zelf een spelling maakt,
dat de gebruikelijke spelling van van Ophuysen voorloping aanvaardbaar is,
gedachtig aan de bezuiniging en de versobering moeten de veranderingen door prae-adviseur voornoemd in gedachte worden gehouden, en daarom hoopt het congres, dat:*
 1. *de Indonesiers steeds bovengenoemde spelling zullen volgen,*
 2. *de Nationale fractie in de Volksraad er bij de Regeering op zal aandringen die spelling te volgen, als door het congres bedoeld wordt,*
 3. *de onderwijzers-vereenigingen de besluiten van het congres zullen wilen steunen.*

- V. *Gehoord hebbende het prae-advies vanden heer Adi Negoro omtrent de bahasa Indonesia in journalistiek ("Bahasa Indonesia didalam persoerat kabaran"), is het congres van meening, dat het nu de tijd is waarin de journalisten zich met de borst moeten toeleggen op het zoeken van wegen ter verbetering der taan in de journalistiek. Daarom hoopt het congres, dat Perdi (De Inheemsche Journalisten-vereening) hierover zal beraadslagen met haar leden en de commissie te vormen door het nieuwe Congres-Bestuur en het Hoofdbestuur van de Perdi.*
- VI. *Gehoord hebbende het prae-advies van Ki Hadjar Dewantara stelling X, gesteund door R.M. Ng. Dr. Poerbatjaraka, heft het congres besloten, dat het congres voorstaat en voorstelt op de middelbare scholen ook de internationale spelling te onderwijzen.*
- VII. *Gehoord hebbende het prae-advies van den heer Soekadjo Wirjopranoto omtrent de bahasa Indonesia in de vertegenwoordigende lichamen ("Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan"), uitgesproken en verdedigd door R.P. Soeroso, is het congres van meening en spreekt de hoop uit, dat*
1. *vanaf heden de bahasa Indonesia in alle vertegenwoordigende lichamen als vertaal zal worden gebezigd.*
 2. *steun verleend zal worden aan de pogingen om de bahasa Indonesia te erkennen als wettige taal en taal voor regeeringen.*
- VIII. *Gehoord hebbende het prae-advies van den heer Sanoesi Pane omtrent een Instituut Bahasa Indonesia en vernomen hebbende de oprichting van een commissie in te stellen om te onderzoeken de kwestie van de oprichting van een Instituut Bahasa Indonesia, en het congres verwacht, dat de commissie haar besluiten over bovengenoemde kwestie zal publiceeren.*
- IX. *Gehoord hebbende de prae-advies van de heeren St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh. Yamin en Sanoesi Pane, is het congres van meening, dat in het belang van de vooruitgang der Indonesische maatschappij, van de talen letterkundige studie en van de vooruitgang van het Indonesische volk zoo gauw mogelijk een letterkundige faculteit opgericht moet worden.¹²¹*

¹²¹ Majalah DJAWA tahun 1938 hal. 336-337

Terjemahan dari 'POETOESAN KONGGERES BAHASA INDONESIA' di atas adalah sebagai berikut:

- I. Sesoedah mendengarkan dan memeperkatakan prae-advies toean Mr. Amir Sjarifoedin tentang "Menjesoeaikan kata dan faham asing kedalam bahasa Indonesia", maka Konggres ternjata pada oemoemnja setoedjoe mengambil kata-kata asing oentoek ilmoe pengetahoean. Oentoek ilmoe pengetahoean jang sekarang, Konggres setoedjoe kalau kata-kata itoe diambil dari perbendaharaan oemoem. Pekerdjaan itoe hendaklah didjalankan dengan hati-hati, karena itoe perkara itoe patoetlah diserahkan kepada satoe badan.
- II. Sesoedah mendengarkan dan bertoekar pikiran tentang prae-advies toean St. Takdir Alisjahbana hal "Pembaharoean bahasa dan oesaha mengatoernja", maka sependjang pendapatn Konggres, soedah ada pembaharoean bahasa jang timboel karena ada tjara jang baroe, sebab itoe merasa perloe mengatoer pembaharoean itoe.
- III. Sesoedah mendengarkan prae-advies toean-toean St. Alisjahbana dalil ke-IV dan Muh. Yamin, maka Konggres berpendapatan bahwa gramatika jang sekarang tidak memuaskan lagi dan tidak menoeroet woedjoed bahasa Indonesia, karena itoe perloe menjoesoen gramatika baroe, jang menoeroet woedjoed bahasa Indonesia.
- IV. Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, berkonggres di Solo pada tanggal 25-27 Juni 1938, setelah mendengarkan prae-advies toean K. St. Pamoentjak tentang "Hal edjaan bahasa Indonesia", dan setelah bertoekar pikiran tentang hal itoe, maka jang hadir berpendapat:
 - bahwa edjaan baroe tidak perloe diadakan, sampai Konggres mengadakan sendiri,
 - bahwa edjaan jang soedah berlakoe, jaitoe edjaan van Ophuysen oentoek sementara boleh diterima, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perloe dipikirkan peroebahan seperti jang diseboetkan oleh praeadviseur, karena itoe berpengharapan:
 1. soepaja orang Indonesia selaloe memakai edjaan jang terseboet;
 2. soepaja fractie Nasional Volksraad mendesak Pemerintah oentoek memakai edjaan seperti jang dimaksoedkan oleh Konggres;
 3. soepaja perhimpunan kaoem goeroe soeka membantu poetoesan Konggres.

V. Sesoedah mendengar prae-advies toean Adinegoro, tentang “Bahasa Indonesia di dalam persoerat kabaran”, maka sependjang pendapat Konggres, soedah waktoenya kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa di dalam persoerat kabaran, karena itu itoe berharap soepaja Perdi bermoeepakat tentang hal itoe dengan angoota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoeok oleh Bestuur Konggres jang baroe bersma-sama dengan Hoofdbestuur Perdi.

VI. Sesoedah mendengarkan prae-advies Ki Hadjar Dewantara dalil jang ke-X jang disokong oleh toean R.M. Ng. Dr. Poerbatjaroko, maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan:

bahwa Konggres berpendapatan dan mengandjoerkan, soepaja didalam pergoeroean menengah diadjarkan djoega edjaan internasional.

VII. Sesoedah mendengarkan prae-advies toean Soekardjo Wirjopranoto tentang “Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan”, jang dioetjapkan dan dipertahankan oleh toean R.P. Soeroso, maka Konggres berpendapatan dan mengeloearkan pengharapan:

pertama: soepaja moelai saat ini bahasa Indonesia dipakai dalam segala badan perwakilan sebagai bahasa perantaraan (voertaal),

kedua: mengeloearkan pengharapan soepaja menoenjang oesaha oentoek mendjadikan bahasa Indonesia bahasa jang sjah dan bahasa oentoek oendang-oendang negeri.

VIII. Sesoedah mendengar prae-advies toean Sanoesi Pane tentang “Institut Bahasa Indonesia” dan mendengar pendirian Komite tentang hal itoe; maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan: soepaja diangkat soeatoe komisi oentoek Institut Bahasa Indonesia dan Konggres mengharap soepaja mengoemoemkan pendapat komisi tentang soal terseboet.

IX. Sesoedah mendengarkan prae-advies toean-toean St. Takdir Ali-sjahbana, Mr. Muh. Yamin dan Sanoesi Pane, maka Konggres berpendapatan, bahwa oentoek kemadjoean masjarakat Indonesia, penjelidikan bahasa dan kesoesasteraan dan kemadjoean keboedajaan bangsa Indonesia, perloe didirikan Pergoeroean Tinggi Kesoesasteraan dengan selekas-lekasnya.¹²²

¹²² Harimurti Kridalaksana, *Buku Panduan Kongres Bahasa Indonesia 1988*, hal. 22-24

Di samping sembilan POTOESAN tersebut juga diputuskan untuk menetapkan alternatif tempat Kongres Bahasa Indonesia II, yaitu: *‘Semarang, Djokjakarta, Batavia, Medan, Benteng Fort de Kock Makassar, Bandoeng, Soerakar-ta.’* Akhirnya yang dipilih adalah kota Medan sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia II, tahun 1954.

Atas dasar pada keputusan kongres itulah pada tahun 1947 lahir *‘Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ICTO)’* di Fakultas Sastra dan Filsafat yang pada saat itu berada di bawah naungan *Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen*. Tujuannya adalah untuk menampung kegiatan ilmiah di bidang bahasa dan kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1952, ICTO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahasa dari Balai Bahasa Jogjakarta, menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya, dan tahun 1959 berganti nama menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusatraan. Pada tahun 1966 nama lembaga ini berganti menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusatraan, kemudian tahun 1969 berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional (LBN). Sejak tahun 1975 hingga kini nama lembaga tersebut berganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang sekarang diganti menjadi Pusat Bahasa.¹²³

E. Kongres Kesenian Indonesia

Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 Desember 1995, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, sebagai salah satu kegiatan memperingati 50 tahun Indonesia merdeka. Kongres Kesenian yang pertama kali diselenggarakan adalah inisiatif Prof. Dr. Edi Sedyawati, yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Di samping menggagas penyelenggaraan Kongres Kesenian, Prof. Edi Sedyawati juga menjadi pencetus diselenggarakannya *‘Pameran Seni Rupa Kontemporerer Negara-Negara Non-Blok’ (Contemporary Art of the Non-Aligned Countries: Unity in Diversity in International Art)* untuk yang pertama dan *‘Art Summit Indonesia: Music and Dance’* juga untuk yang pertama. Keduanya juga diselenggarakan pada tahun 1995.

Kegiatan *‘Pameran Seni Rupa Kontemporerer Negara-Negara Non-Blok’* yang diprakarsai oleh Indonesia mendapatkan sambutan dan penghargaan dari Negara-negara anggota. Pameran itu merupakan perwujudan nyata dari kerja sama kebudayaan yang diikrarkan dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang lalu. Sayang kegiatan ini belum diikuti dengan penyelenggaraan

¹²³ Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia (1947-1997), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta 1998, hal. 6.

pameran berikutnya. Berbeda halnya dengan kegiatan *'Art Summit,'* setelah yang pertama tahun 1995 kini sudah mencapai yang ketiga kalinya, yakni kedua tahun 1998 dan ketiga tahun 2001. Bidang yang dipergelarkan tidak hanya terbatas musik dan tari tetapi meluas menjadi *'Art Summit Indonesia: Performing Arts,'* dengan peserta terpilih dari berbagai negara.

Kegiatan Kongres Kesenian Indonesia I, mempunyai arti yang penting bagi sejarah perkembangan seni di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka belum pernah diselenggarakan kongres, seperti yang tertulis di dalam buku Panduan, yang menyatakan bahwa: *'selama 50 tahun Indonesia merdeka, dunia kesenian belum pernah mendapatkan perenungan yang menyeluruh, meluas dan mendalam. Selama itu, telah terjadi riak dan gejolak, yang sebab-sebab dan dampaknya seyogyanya dikenali. Mengenali daya-daya yang ada di belakang dinamika kesenian sangat penting bagi perencanaan ke depan.'*¹²⁴

Adapun tujuan diselenggarakan Kongres Kesenian adalah untuk mengadakan tinjauan dan mencari jalan menumbuhkan kesenian, baik secara intuitif maupun melalui jalan penelitian, mengenai masalah-masalah apa yang pernah ataupun sedang dihadapi dalam kehidupan kesenian di Indonesia, serta mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh selama 50 tahun perjalanan negara Indonesia merdeka. Bertolak dari permasalahan tersebut, serta berlandaskan pengetahuan faktual yang handal, Kongres diharapkan dapat mengajukan saran-saran strategis untuk pembinaan kehidupan kesenian di Indonesia untuk selanjutnya.



Logo Kongres Kesenian Indonesia I, tahun 1995

¹²⁴ Panduan Kongres Kesenian Indonesia I (1995), Direktorat Jenderal Kebudayaan 1995/1996, hal. 1.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh dunia kesenian Indonesia. Masalah bagaimana menciptakan kondisi masyarakat yang dapat menumbuhkan gairah dalam penciptaan seni, merupakan masalah yang penting, di samping kerasnya desakan pertimbangan ekonomi yang semakin kuat. Bahkan seperti tak dapat dielekkkan keniscayaan bahwa kesenian untuk sebagian besar harus bergantung kepada usaha yang bersifat industri. Masalah kesenian berkait erat dengan sistem lain seperti perdagangan, produksi, informasi, pemasaran, dan perundang-undangan.

Kongres mengambil tema '*Restrospeksi dan Ancangan ke Depan*' ini membahas 9 topik dengan 40 makalah serta 30 orang pembicara "*talk-show*" atau '*mimbar bebas*.' Tampil masing-masing 5 orang dari setiap cabang seni: seni rupa, seni tari, seni teater, seni sastra, seni media dan seni musik untuk saling adu argumentasi. Persidangan dibagi dalam sidang-sidang pleno dan kelompok. Sidang Pleno dan Kelompok dilaksanakan sebagai berikut:

1. Topik I, Fungsi Kesenian dalam Masyarakat

- Perjalanan Fungsi Seni dalam Masyarakat Kita, oleh Umar Kayam, pemandu Bakdi Sumanto.
- Peristiwa-peristiwa Kesenian yang Terjadi Selama Kurun Waktu 50 Tahun, oleh Asrul Sani, pemandu Jakob Sumadjo.
- Peranan Seni dalam Membina Ketahanan Budaya Bangsa, oleh Letnan Jenderal Ma'ruf, Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI, pemandu Susanto Zuhdi.
- Persepsi dan Perkembangan Pandangan Masyarakat Terhadap Kesenian, oleh Taufik Abdullah, pemandu Pudentia MPSS.
- Perubahan Nilai Moral dan Nilai Sosial dalam Kaitannya dengan Perkembangan Kesenian, oleh Ignas Kleden, pemandu Melani Budianta.

2. Topik II, Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah'

- Pengertian, Kedudukan, Hubungan Timbal Balik, serta Fungsi Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah,' oleh Mukhlis Paeni, pemandu Amir Rochkyatmo.
- Masa Depan Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah,' oleh Sapardi Djoko Damono, pemandu Kasim Ahmad.
- Kajian dan Pembinaan Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah Sumatera Utara, oleh Tengku Lukman Sinar, pemandu Singgih Wibisono.

- Perkembangan Nilai-nilai Artistik Kesenian Nasional dan Kesenian ‘Daerah,’ oleh Putu Wijaya, dengan pemandu Riris K. Toha Sarumpaet.
- Khalayak Kesenian Nasional dan Kesenian ‘Daerah,’ Rahayu Supanggah, dengan pemandu Rahayu Hidayat.

3. Topik III, Seni dan Media

- Media sebagai Sarana, oleh JB. Kristanto, pemandu Edwina S. Tanojo.
- Dekade Transformasi 1995 – 2000: Konfigurasi Baru Kesenian Indonesia, oleh Garin Nugroho, pemandu Ibnu Wahyudi.
- Media sebagai Konsep/Pengkodean, oleh Primadi Tabrani, pemandu Ibnu Wahyudi.
- Media sebagai Penentu Standar, oleh Ishadi SK, pemandu Kasijanto.

4. Topik IV, Kajian Seni

- Sastra Kita: Estetika dan Teori, oleh Budi Darma, pemandu Iwan Fridolin.
- – Dialog Tatap Seni Rupa - Estetika: Estetika, oleh Mudji Sutrisno, pemandu Iwan Fridolin.
- Estetika, oleh Harry Rusli, pemandu Agus Darmawan T.
- Kajian Seni: - Estetika dan – Seni dalam Masyarakat, oleh Edi Sedyawati, pemandu Bakdi Sumanto.
- Multikulturisme/Multimodernisme, oleh Jim Supangkat, pemandu Pudentia MPSS.

5. Topik V, Seni dan Pendidikan

- Lembaga Pendidikan Tinggi Kesenian Indonesia, oleh Mursal Esten, pemandu Suryadi.
- Pendidikan Kesenian di Sekolah Umum, oleh AA. Navis, pemandu Jakob Sumardjo.
- Pendidikan Kesenian di Luar Sekolah, oleh Saini KM, dengan pemandu Amir Rochkyatmo.
- Fungsi Didaktis Kesenian, oleh FX. Sutopo Cokroamijoyo, pemandu Suryadi.

6. Topik VI, Seni dan Pariwisata

- - Pariwisata Budaya - Seni sebagai Komoditi Pariwisata – Konsep Seni Wisata, oleh RM. Soedarsono, pemandu Pudentia MPSS.

- Seni, Pariwisata dan Bugaya Global, oleh oleh Yusuf Affendi, pemandu Josefina Mantik Kumaat.
- Pariwisata Budaya, oleh H. Boediardjo, pemandu Agus Aris Munadar.
- - Pariwisata Budaya - Seni Budaya sebagai Andalan Pariwisata, oleh Andi Mappisameng, pemandu Supratikno R.

7. Topik VII, Seni dan Hukum

- Perlindungan Hak Cipta, Atas Karya Seni Sebagai Dasar Pemikiran Terhadap Pemahaman Industri Kultural, oleh Arnel Affandi, dengan pemandu Melani Budiarta.
- Lembaga-lembaga Karya Seni dan Hak Cipta, oleh Chandra Darusman, dengan pemandu Ugrasena.
- Peraturan dan Perizinan, oleh Nico Kansil dengan pemandu Edwina S. Tanojo.
- Seni dalam Persinggungannya dengan Peraturan dan Perizinan, oleh Alfons Taryadi dengan pemandu Rahayu Hidayat.
- Perpajakan, oleh Fuad Bawazier dengan pemandu Susanto Zuhdi.

8. Topik VIII, Seni dan Pengayoman

- - Peran pemerintah dalam mengayomi kesenian - Peran swasta dalam Memajukan Kesenian - Seni sebagai Komoditi, oleh Kusnadi Hardjasumantri, dengan pemandu Kasim Ahmad.
- - Peran Pemerintah dalam Mengayomi Kesenian - Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian - Seni sebagai Komoditi, oleh Mochtar Kusumaatmadja, pemandu Singgih Wibisono.
- - Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian, oleh Susrinah Sanyota Sastrowardoyo, pemandu Rahay Hidayat.
- - Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian, oleh Salim Said, pemandu Agus Darmawan T.

9. Topik IX, Seni dan Tata Lingkungan

- Seni dalam Bidang Tata Perkotaan, oleh Djoko Sujarto, dengan pemandu Supratikno R.
- Seni dalam Tata Lingkungan Perumahan, Toto Rusmanto, dengan pemandu Josefina Mantik Kumaat.
- Seni dalam Arsitektur, oleh Eko Budihardjo, dengan pemandu Agus Aris Munandar.
- Seni dalam Bidang Tata Ruang Luar (Seni dan Arsitektur Kota), oleh Slamet Wirasonjaya, dengan pemandu Ugrasena.

10. Sidang Topik X, Talk Show atau Debat Panggung

Sidang Topik X, dengan pokok masalah *'Refleksi atas Perkembangan seni'* dalam bentuk Talk Show, mencakup bidang-bidang:

- a. Seni rupa, dengan penyaji: Amang Rahman, Wagiono Sunarto, Dwi Kundoro, Rita Widagdo dan Nyoman Nuarta, dengan pemandu Darmanto Yatman.
- b. Seni tari, dengan penyaji: Gusmiati Suid, Tom Ibnur, Ati Ganda, Sardono W. Kusumo, dan Yulianti L. Parani, dengan pemandu Emha Ainun Nadjib.
- c. Seni teater, dengan penyaji: Adi Kurdi, Dedi Gumelar, Putu Wijaya, Deri Syrna dan Dindon, dengan pemandu S. Sinansari Ecip.
- d. Seni sastra, dengan penyaji: Sutardji Calzoum Bachri, Arswendo Atmowiloto, La Rose, Mustofa Bisri, dan Taufiq Ismail, dengan pemandu Satyagraha Hoerip.
- e. Seni musik, dengan penyaji: Rhoma Irama, Suka Hardjana, Jadug Ferianto, dan Sam Bimbo, dengan pemandu Remy Silado.
- f. Seni media, dengan penyaji: Misbach Yusa Biran, Arizal, Rizal Mantovani, Ayu Azhari, dan Eros Jarot, dengan pemandu: Salim Said.

Untuk memberikan arah dan tujuan dari kongres dibentuk Tim Penasihat dan Tim Pengarah. Susunan Tim Penasihat terdiri atas:

1. Prof. Dr. Fuad Hassan
2. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
3. Prof. Dr. Haryati Soebadio
4. Prof. H. Ali Hasmy
5. H. Budiardjo

Tim Pengarah adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Edi Sedyawati, Ketua
2. Drs. Saini Kosim, Sekretaris
3. Drs. Nunus Supardi, Anggota
4. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, Anggota
5. Prof. Dr. Umar Kayam, Anggota
6. Prof. Dr. Budi Darma, Anggota
7. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc. , Anggota
8. Prof. Dr. Mursal Esten, Anggota
9. Dr. Salim Said, Anggota
10. Dr. Mukhlis Paeni, Anggota
11. Drs. Yustiono
12. Drs. F.X. Sutopo Cokrohamijoyo, Anggota
13. Asrul Sani, Anggota

14. Putu Wijaya, Anggota
15. Drs. M. Samsudin Hardjakusuma, Anggota
16. Tatiek Malyati Sihombing, Anggota

Berdasarkan hasil sidang Tim Perumus, Kongres Kesenian Indonesia I menghasilkan sejumlah rumusan dan rekomendasi. Kutipan secara lengkap hasil Kongres Kesenian Indonesia I sebagai berikut:

RUMUSAN
KONGRES KESENIAN INDONESIA I TAHUN 1995
Jakarta, 3 – 7 Desember 1995

Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 bertujuan untuk mengadakan tinjauan dan mencari jalan menumbuhkan kesenian, baik secara intuitif maupun melalui jalan penelitian, mengenai masalah-masalah yang pernah ataupun sedang dihadapi, serta mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh selama 50 tahun perjalanan negara Indonesia merdeka. Bertitik tolak dari tujuan tersebut, kongres diharapkan dapat mengajukan saran-saran untuk pembinaan kehidupan kesenian di Indonesia selanjutnya. Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 ini diadakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dari tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 1995 dan diikuti oleh 475 peserta dari seluruh propinsi di Indonesia, yang terdiri atas seniman, pemikir dan kritikus seni, pengelola, pengusaha atau sponsor seni, pelindung seni, wartawan kesenian, serta penentu kebijakan (pemerintah).

Dalam kongres ini dibahas pokok-pokok permasalahan yang mengambil tema Retrospeksi dan Ancangan ke depan,, dengan pemilahan sudut pandang untuk tinjauan Kajian, Penilaian, dan Strategi. Dengan memperhatikan:

1. *Undang-undang Dasar 1945, Bab XIII pasal 32, yang menyatakan bahwa Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, beserta penjelasannya;*
2. *Garis-garis Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nomor II/MPR/1993;*
3. *Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 desember 1995 di Istana Negara;*
4. *Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pembukaan Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 pada tanggal 4 Desember 1995;*

5. *Makalah-makalah yang disajikan dan dibahas di dalam sidang pleno dan sidang kelompok;*
6. *Pandangan, tanggapan, usul, dan saran para pembicara dalam panggung debat;*
7. *Pandangan, tanggapan, usul, dan saran para peserta kongres;*

maka Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 menghasilkan rumusan sebagai berikut:

I. Fungsi Kesenian dalam Masyarakat

Kesenian tumbuh dari dialektika antar unsur dalam sosok budaya masyarakat. Oleh karena itu, fungsi kesenian adalah membantu manusia untuk lebih memahami kehidupan. Untuk itu dibutuhkan keadaan yang kondusif agar penciptaan seni dan penikmatan seni dapat terjadi dengan optimal.

Salah satu persoalan yang mendesak adalah masalah perizinan untuk pertunjukan kesenian. Persoalan itu harus dipecahkan bersama oleh seniman, masyarakat, dan aparat penentu perizinan. Dalam hal ini diperlukan pengertian yang lebih baik dari semua pihak mengenai fungsi dan kedudukan seni dalam masyarakat. Pelarangan buku, sensor, pencekalan, dan pembajakan tercakup dalam persoalan.

Kesenian pada hakekatnya adalah tanggapan dan penilaian terhadap kehidupan. Hal ini memberikan isyarat pentingnya didorong kajian sosiologi terhadap seni untuk mendudukan sifat hakikat persoalan kesenian dan kemasyarakatan secara lebih tepat.

II. Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah

Istilah kesenian nasional dan kesenian daerah timbul ketika kita sepakat untuk membentuk negara kesatuan. Pertemuan antara kesenian-kesenian daerah, nasional, dan asing telah menumbuhkan jenis-jenis kesenian yang merupakan wujud baru dalam kebudayaan kita. Dalam kaitannya dengan itu kita harus segera menyusun peta kesenian Indonesia yang baru yang tidak sekedar didasarkan pada dikotomi nasional-nasional daerah atau klasik moderen.

Dalam kaitannya dengan pengembangan wisata budaya, kita harus menumbuhkan sikap yang hati-hati terhadap berbagai jenis kesenian yang sudah sejak lama tumbuh di daerah-daerah. Karena fungsi dan perannya

yang khas, beberapa jenis kesenian tertentu tidak dapat diubah untuk kepentingan pariwisata.

Perkembangan kesenian tidak bisa dilepaskan dari usaha mencari khalayak yang lebih luas. Usaha itu wajar dan sah, serta harus dilaksanakan atas dasar kerja sama antara seniman, pemerintah, dan masyarakat. Namun kita juga harus sepenuhnya menyadari bahwa kecenderungan tersebut berakibat pergeseran fungsi dan kedudukan kesenian dalam masyarakat.

Pergelaran kesenian dari berbagai daerah dalam festival nasional hendaknya tidak diselenggarakan sebagai lomba, tetapi digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan kesenian selanjutnya.

Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jatidiri budaya masyarakatnya hendaknya tidak dikorbankan untuk kepentingan upaya mewujudkan kesenian nasional.

III. Seni dan Media

Agar media massa dapat memenuhi fungsinya dengan baik, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan:

Pendokumentasian kesenian oleh badan-badan pemerintah yang berwenang dalam masalah kesenian, lembaga-lembaga swasta, dan media massa perlu dimulai atau ditingkatkan.

Penyebarluasan informasi mengenai kesenian, termasuk peta kesenian, perlu dilakukan secara intensif, dan media massa perlu mengambil peran yang penting dalam penyebaran informasi ini.

Tenaga kerja di media massa perlu menguasai ilmu dan data-data kesenian, agar penyebaran informasi kesenian melalui media massa dapat dipertanggungjawabkan dari segi estetika, serta dapat memacu perkembangan kesenian. Di samping itu, penguasaan teknologi untuk meningkatkan mutu kesenian dan mutu informasi perlu terus ditingkatkan.

Agar media massa dapat menyebarkan informasi dengan baik dan agar masyarakat dapat menyerap informasi itu dengan baik, maka kebiasaan menulis dan kebiasaan membaca perlu ditingkatkan.

Memberikan perhatian yang lebih besar kepada karya seni yang tidak sekedar memenuhi selera pasar, agar media massa ikut memacu apresiasi masyarakat terhadap seni dan memacu kreativitas seni.

Meningkatkan fungsi media sebagai sarana internalisasi nilai-nilai seni yang bermutu tinggi.

IV. Kajian Seni

Kajian sejarah kesenian yang dilakukan oleh orang Indonesia masih sangat langka sementara yang sudah adapun sangat terbatas penyebarluasannya. Karena pentingnya jenis kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan kesenian, pemerintah perlu menyediakan kemudahan dan dana yang lebih besar agar penelitian di bidang itu di kalangan peminat seni maupun perguruan tinggi bisa ditingkatkan.

Banyaknya istilah yang beredar dalam kesenian kita sekarang ini di satu pihak menunjukkan kekayaan-kekayaan, namun di lain pihak juga bisa menyiratkan kekaburan konsep-konsepnya. Pengembangan kajian kesenian kita menuntut usaha yang terus menerus untuk lebih memahami konsep-konsep itu agar hasil-hasil yang dicapainya lebih bermanfaat untuk semua kalangan.

V. Seni dan Pendidikan

Dalam mengupayakan terciptanya manusia seutuhnya, pendidikan umum seyogyanya memantapkan kedudukan mata ajaran kesenian sebagai bagian integral dalam kurikulum.

Perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan kesenian yang terarah, bertingkat, dan berkala, untuk terbinanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat.

Hendaknya ada hubungan saling menunjang antara pendidikan kesenian di lembaga-lembaga formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi seni, dengan pendidikan non-formal kesenian.

Disamping seniman kreatif, perlu mulai dipikirkan pengadaan dan pembinaan sumber daya manusia lain, seperti kurator, dramaturg, kritikus, peneliti, seni dan impresario.

Pembinaan perguruan tinggi seni hendaknya juga diarahkan kepada upaya menjadikan perguruan tinggi seni sebagai pusat kebudayaan, dimana kreativitas, pengkajian, penelitian dan eksperimentasi seni dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perguruan tinggi seni hendaknya dianggap dan dijadikan modal utama di dalam melestarikan dan mengembangkan jatidiri kebudayaan di tempat perguruan tinggi seni itu berada.

Pendidikan kesenian hendaknya dimulai sejak usia dini.

VI. Seni dan Pariwisata

Dalam era kebudayaan global yang ditandai oleh teknologi informasi yang sangat canggih, keterkaitan unsur seni dalam industri pariwisata tidak dapat dielakan. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah tiga hal penting, yaitu wawasan dan kobaran semangatnya, teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, dan pencarian visi.

Untuk menghadapi hal tersebut perlu peningkatan kualitas seni dan senimannya. Hanya dengan kulaitas pribadi tinggi sebuah penciptaan karya seni yang bermutu dapat dihasilkan. Sehubungan dengan itu diperlukan segera adanya dokumentasi terhadap karya yang berupa ciptaan-ciptaan baru.

Namun demikian secara ideal pengembangan seni dan pembinaan seni tidak seluruhnya diperuntukan bagi kepentingan pariwisata, karena seni adalah bagian dari jatidiri bangsa yang perlu dijaga sebagai cerlang budaya kita.

VII. Seni dan Hukum

Pengaturan lebih lanjut mengenai undang-undang Hak Cipta yang menyangkut kesenian perlu segera di susun.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta, perlu diupayakan penyebarluasan pemahaman hak cipta kepada segenap pihak yang terkait. Dalam kaitannya dengan itu, perlu dibuat kajian tentang konsep penciptaan pada masyarakat tradisi.

VIII. Seni dan Pengayoman

Seniman hendaknya memiliki sikap yang tegas terhadap campur tangan pengayom dalam menciptakan karyanya.

Keprofesionalan seniman perlu ditingkatkan agar kesenian dapat lebih disebarluaskan.

Di setiap daerah perlu dibentuk yayasan yang bertugas untuk mencari dan menghimpun dana yang berupa subsidi, donasi, sponsor, dan bantuan lainnya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan kesenian di daerahnya.

Mengingat kesenian merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan sosial budaya, maka dalam penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kesenian sebagai unsur seni budaya perlu ikut diperhitungkan.

Mekanisme perlindungan hak cipta karya seni perlu ditingkatkan sehingga perlindungan tersebut dapat terlaksana secara efektif.

Lembaga-lembaga kesenian yang ada sebagai mitra Pemerintah dalam pelayanan masyarakat di bidang kesenian di daerah perlu meningkatkan mekanisme kerjanya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Anggota DPR dan DPRD dari komisi yang menyangkut bidang kebudayaan perlu memperjuangkan anggaran yang memadai untuk pembiayaan pengembangan kesenian.

Mengingat kesenian sebagai komoditi merupakan aset pembangunan yang produktif maka KADIN perlu memberikan dukungan dan bantuan dalam pemasaran hasil kesenian.

IX. Seni dalam Tata Lingkungan

Tata lingkungan yang menyangkut arsitektur lansekap, perumahan, dan perkotaan hendaknya menampilkan kekhasan dan jatidiri yang bertumpu pada iklim dan budaya setempat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang selalu berkembang.

Pembangunan kota perlu mempertimbangkan aspek fungsi, ekonomi, harmoni, dan estetika, dengan memperhitungkan persepsi dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

Perencanaan ruang luar dengan kelengkapan berupa perabot lansekap dan papan iklan berikut tata lampunya perlu ditata agar kota tidak sekedar fungsional tetapi juga estetis.

Upaya pelestarian warisan arsitektur dan konservasi kawasan kota kuno bersejarah perlu lebih digalakkan agar setiap kota dapat tampil sebagai

karya seni sosial yang mencerminkan sejarah perkembangan masyarakatnya dari waktu ke waktu.

Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mencari akar arsitektur tradisional dari khazanah budaya di segenap pelosok tanah air, untuk dijadikan landasan dalam pengembangan tata lingkungan di masa mendatang.

Sangat dirasakan pentingnya panduan perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan dengan mekanisme pengawasan pembangunan yang dilengkapi sistem insentif dan disinsentif.

X. Refleksi atas Perkembangan Seni

Agar kekuasaan birokrasi dalam bidang kesenian di daerah dapat dikurangi karena sering menghalangi perkembangan kreativitas.

Agar penilaian dalam festival tari di tingkat nasional ditiadakan untuk mengurangi kecurigaan antar daerah.

Lebih memacu festival kesenian daerah daripada kesenian nasional untuk memberi peluang kreativitas lebih banyak kepada daerah.

Sistem pemberian anugerah seni perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Semua pihak dihimbau untuk mengerahkan opini dan lobi ke arah peningkatan masukan mengenai kesenian dalam persiapan naskah GBHN 1998.

Dalam hubungannya dengan perkembangan sastra, diusulkan agar pengajaran bahasa dan sastra ditunjang oleh kegiatan ekstra kurikuler.

Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan fungsi Balai Pustaka sebagai penerbit buku-buku sastra, dan budaya di samping buku-buku teks dan umum.

Kemajuan seni perlu didukung oleh manajemen yang baik sesuai dengan bidang seninya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan industri kebudayaan perlu diupayakan untuk mencari penyantun dana untuk jangka panjang.

Apresiasi masyarakat terhadap seni merupakan salah satu faktor penting. Oleh karena itu, perlu didukung oleh pendidikan kesenian yang memadai.

Kendala yang dihadapi dalam teater terutama adalah masalah pendanaan dan penonton atau konsumen teater.

Kehidupan teater yang normal tidak lepas dari hubungan antara seni dan masyarakat. Namun teater tidak boleh datang dengan intensitas kampanye politik atau sebagai alat propaganda.

Untuk menyasiasi keberadaan teater di Indonesia, hendaknya dibentuk sebuah jaringan kerja teater.

Rekomendasi

1. *Kongres Kesenian agar dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.*
2. *Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan menindaklanjuti keputusan kongres.*
3. *Agar Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan porsi yang lebih besar kepada kesenian dan kurikulum nasional.*
4. *Pemerintah perlu membuat kebijakan baru dalam pendidikan guru kesenian dengan mengaitkan lembaga pendidikan guru dan lembaga pendidikan kesenian.*
5. *Agar para seniman yang sudah mapan mendirikan sanggar kesenian untuk dapat meningkatkan apresiasi seni masyarakat.*
6. *Agar aparat pemerintah yang menangani kesenian dengan meningkatkan pengetahuannya mengenai kesenian sehingga dapat membantu perkembangan kesenian dan tidak mempersulit pertumbuhan kesenian.*
7. *Agar dipikirkan keberadaan lembaga bantuan hukum bagi seniman.*
8. *Agar dibentuk sebuah lembaga kesenian yang bersifat nasional yang menangani berbagai masalah kesenian yang muncul.*

Jakarta, 7 Desember 1995

Tim Perumus :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Sapardi Djoko Damono | (Ketua) |
| 2. Bakdi Sumanto | (Sekretaris) |
| 3. Yulianti L. Parani | (Anggota) |
| 4. Budi Darma | (Anggota) |
| 5. Saini K.M | (Anggota) |

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 6. <i>Eko Budiardjo</i> | <i>(Anggota)</i> |
| 7. <i>Singgih Wibisono</i> | <i>(Anggota)</i> |
| 8. <i>Mukhlis Paeni</i> | <i>(Anggota)</i> |
| 9. <i>Samsudin Hardjakusumah</i> | <i>(Anggota)</i> |

BAB VIII PENUTUP

Sebagai penutup dapat disimpulkan, forum kongres merupakan pilihan yang tepat sebagai ajang pertemuan untuk membahas dan menyepakati konsep, kebijakan dan strategi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan I tahun 1918, datang dari kalangan terpelajar bumiputra, dalam hal ini diprakarsai oleh PAAP Prangwadono dan dilaksanakan bersama dengan kaum terpelajar lainnya. Untuk selanjutnya, penyelenggaraan KK tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937 disiapkan dan dilaksanakan oleh lembaga penelitian kebudayaan Java-Instituut.

Sementara itu untuk penyelenggaraan KK I setelah Indonesia merdeka tahun 1948, diprakarsai oleh kelompok budayawan, seniman, cendekiawan yang sebagian terlibat dalam dalam KK sebelum Indonesia merdeka. Sebelum kongres itu berlangsung terlebih dahulu diselenggarakan musyawarah kebudayaan di Sukabumi, tahun 1945 dan konferensi kebudayaan di Kedu 6 Mei tahun 1948. KK II tahun 1951, disiapkan dan dilaksanakan, Lembaga Kebudayaan Indonesia, sedangkan KK tahun 1954 disiapkan dan dilaksanakan oleh BMKN. Pada KK tahun 1991, inisiatif penyelenggaraan KK datang dari pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan selanjutnya dalam menyiapkan materi kongres dilakukan bersama-sama dengan unsur budayawan, seniman, cendekiawan dan pemangku adat.

Sebagai awal dari serangkaian kongres-kongres kebudayaan, KK I tahun 1918, cakupan masalah yang dibahas masih terbatas pada kebudayaan Jawa, dan dalam kongres selanjutnya semakin meluas, termasuk kebudayaan Sunda, Madura dan Bali. Aktivitas ini merupakan peristiwa budaya yang amat bersejarah bagi sejarah kebudayaan Indonesia. Kongres ini telah menjadi motor penggerak untuk mendorong diselenggarakannya kongres-kongres kebudayaan berikutnya.

Kongres Kebudayaan tahun 1918 diselenggarakan di pertengahan masa bangkitnya kesadaran nasional (1908) dan masa puncak kesadaran berbangsa yang diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Seiring dengan bangkitnya kesadaran berbangsa, bangkit pula kesadaran kaum terpelajar terhadap nasib kebudayaannya. Sebaliknya, dengan bangkitnya kesadaran tentang nasib kebudayaannya, bahasa Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan makin memperkuat semangat persatuan untuk menjadi

satu bangsa. Dengan demikian antara kesadaran berbudaya dan kesadaran berbangsa atau sebaliknya, memiliki hubungan timbal balik yang dekat.

Meskipun jarak waktu antara kongres sebelum dan sesudah Indonesia merdeka amat berjauhan, tetapi bila ditilik dari tujuannya memiliki kesamaan. Sama-sama mencari format yang tepat untuk memajukan kebudayaan bangsa. Pandangan yang dilontarkan dalam Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka merupakan embrio lahirnya pemikiran tentang konsep, kebijakan dan strategi pembinaan kebudayaan Indonesia yang masa kini.

Dari gambaran tentang materi yang telah dibahas dalam kongres ke kongres masih terdapat bagian penting yang perlu diperbincangkan pada Kongres Kebudayaan berikutnya. Demikian pula halnya dengan rumusan dan rekomendasi dari kongres-kongres yang telah dilaksanakan, sebagian telah ditindaklanjuti dengan langkah dan tindakan yang kongkrit, tetapi juga masih terdapat rumusan dan rekomendasi yang perlu mendapatkan pertimbangan untuk realisasinya. Kongres-kongres itu memang telah lama sekali berlalu, tetapi berbagai pemikiran yang dirumuskan apabila digali lebih dalam lagi tidak tertutup kemungkinan ditemukan butir-butir yang berbobot dan bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada masa sekarang.

Setelah sampai pada akhir dari uraian tentang **'Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka'**, penyusun menghadapi sebuah pertanyaan yang tidak berani menjawab sendiri: **'Apakah jumlah Kongres Kebudayaan yang pernah terjadi dapat berubah?'**

Jakarta, 11 Maret 2003

Lampiran-lampiran:

Tabel 1

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum

No.	Nama Museum	Kabupaten/ Kota/Media	Keputusan	
1.	Museum Nasional (1778)	Jakarta	Kepmendikbud No. 093/O/1979, tanggal 29 Mei 1979.	Berdiri sejak 1778, beberapa kali mengalami perubahan nama (Lembaga Museum Nasional, Museum Pusat)
2.	Museum Kebangkitan Nasional (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 030/O/1984, tanggal 7 Februari 1984	Kepmendikbud. No. 058/U/1983, tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.
3.	Museum Sumpah Pemuda (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 029/O/1984, tanggal 7 Februari 1984	Kepmendikbud. No. 057/U/1983, tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.
4.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi (1992)	Jakarta	Kepmendikbud, No. 0476/O/1992, tanggal 24 November 1992	Kepdirjenbud, No. 05/F1.IV/ R.82, tgl. 12-6-1982, tentang Penggunaan Sementara untuk Kantor Perpustakaan Nasional.
5.	Museum Basuki Abdullah (1999)	Jakarta	Kepmendikbud, No. 257/O/ 1999, tanggal 13 Oktober 1999	
6.	Museum Benteng Yogyakarta/bekas benteng Vredeburg (1992)	Yogyakarta	Kepmendikbud, No. 0475/O/1992, tanggal 23 November 1992	
7.	Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1979)	Banda Aceh	Kepmendikbud No.093/O/1979, tanggal 29 Mei 1979	Sekarang bernama Provisis Nangroe Aceh Darussallam
8.	Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara (1992)	Medan	Kepmendikbud, No. 0134/O/1982, tanggal 17 April 1992	
9.	Museum Negeri Provinsi Riau (1991)	Pakan Baru	Kepmendikbud No.001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
10.	Museum Negeri 'ADITYAWARAN,'	Padang	Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal	

	Provinsi Sumatera Barat (1979)		28 Mei 1979.	
11.	Museum Negeri Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud, No. 0754/O/1987, Tanggal 2 Desember 1987	
12.	Museum Negeri Provinsi Jambi	Jambi	Tanggal 6 Juni 1988	
13.	Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan 'BALA PUTRA DEWA'	Palembang	Tanggal 5 November 1984	
14.	Museum Negeri Provinsi Lampung 'RUWA JURAI'	Tanjung Karang	Kepmendikbud, No. 0754/O/1987, Tanggal 2 Desember 1987	
15.	Museum Negeri Provinsi Jawa Barat 'SRI BADUGA'	Bandung	Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
16.	Museum Negeri Provinsi DI Yogyakarta 'SONOBUDOYO' (1935)	Yogyakarta	Diperbaharui dengan Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
17.	Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah 'RONGGOWARSITO'	Semarang	Kepmendikbud, No. 0754/O/1987, tanggal 2 Desember 1987	
18.	Museum Negeri Provinsi, Jawa Timur 'MPU TANTULAR' (1933)	Surabaya	Diperbaharui dengan Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
19.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur 'MULAWARMAN' (1979)	Tenggarong	Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
20.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah 'BALANGA'	Palangkaraya	Tanggal 6 April 1973	
21.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Tanggal 2 April 1988	
22.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan 'LAMBUNG MANGKURAT' (1979)	Banjarmasin	Kepmendikbud, No. 092/O/1979	
23.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara 'Wanua Paksinata' (1991)	Manado	Kepmendikbud No. 001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
24.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah (1991)	Palu	Kepmendikbud No. 0754/O/1987, tanggal 2 Desember 1987	

25.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan 'LA GALIGO' (1979)	Makassar	Kepmendikbud, No. 093/O/1979	
26.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara (1991)	Kendari	Kepmendikbud No.001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
27.	Museum Negeri Provinsi Bali (1936)	Denpasar	Kepmendikbud, No. 092/O/1979	
28.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat (1982)	Mataran	Kepmendikbud No. 022/O/1982, tanggal 21 Januari 1982	
29.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (1991)	Kupang	Kepmendikbud No.001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
30.	Museum Negeri 'Siwa Lima,'Provinsi Maluku (1979)	Ambon	Kepmendikbud, No. 092/O/1979	
31.	Museum Negeri Provinsi Irian Jaya	Jayapura	Tanggal 23 Oktober 1990	Sekarang bernama Provinsi Papua
32.	Museum Negeri Provinsi Timor-Timur (1995)	Dilli	Kepmendikbud, No. 0123/O/1995, tanggal 24 Mei 1995	

Tabel 2

**Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang
Kepurbakalaan**

1.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, DI Aceh (sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam)	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: DI Aceh dan Sumatera Utara
2.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Sumatera Barat	Batusangkar	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Sumatera Barat dan Riau
3.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jambi	Jambi	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu
4.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jawa Barat	Serang/ Banten	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung
5.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jawa Tengah	Prambanan	Kepmendikbud No.0200/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0645/O/1985, tanggal 26 Desember 1985, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja Jawa Tengah
6.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, DI Yogyakarta	Bogem	Kepmendikbud No.0200/O/1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 645/O/1985, 26 Desember 1985 diperbaharui dg. Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja DI Yogyakarta
7.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jawa Timur	Mojokerto	Kepmendikbud No.0200/O/1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 0645/O/1985, tanggal 26 Desember 1985, diperbaharui dg. Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember	Wilayah kerja Jawa Timur

			ber 1989	
8.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Bali	Gianyar	Kepmendikbud No.0200/O/1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 0645/O/1985, tanggal 26 Desember 1985.dan diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja, Bali, NTB, NTT dan Tim-Tim
9.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Sulawesi Selatan (1989)	Makassar	Kepmendikbud No.0200/O/1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 0645/O/1985, tanggal 26 Desember 1985, diperbaharui dg. Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
10.	Balai Studi dan Konservasi di Borobudur (1991)	Borobudur, Magelang	Kepmendikbud No. 0605/O/1991, tanggal 30 November 1991	Wilayah kerja, seluruh Indonesia

Tabel 3

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana teknis (UPT) di bidang Kebahasaan

No.	Nama	Provinsi	Keputusan	Keterangan
1.	2	3	4	5
1.	Balai Bahasa Yogyakarta	DI Yogyakarta	0272/O/1978 tanggal 12 Agustus 1978	
2.	Balai Bahasa Makassar	Silawesi Selatan	0272/O/1978 tanggal 12 Agustus 1978	
3.	Balai Bahasa Denpasar	Bali	0272/O/1978 tanggal 12 Agustus 1978	
4.	Balai Bahasa Padang	Sumatera Barat	Kepmendikbud, No. 022/O/ 1999,tanggal 28 Januari 1999	
5.	Balai Bahasa Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Kepmendikbud, No. 022/O/ 1999,tanggal 28 Januari 1999	
6.	Balai Bahasa Jayapura	Irian Jaya	Kepmendikbud, No. 022/O/ 1999,tanggal 28 Januari 1999	
7.	Balai Bahasa Surabaya	Jawa Timur	Kepmendikbud, No. 022/O/1999, tanggal 28 Januari 1999	
8.	Balai Bahasa Bandung	Jawa Barat	Kepmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
9.	Balai Bahasa Semarang	Jawa Tengah	Kepmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
10.	Balai bahasa Banda Aceh	DI Aceh	Kepmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	Sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam
11.	Balai Bahasa Medan	Sumatera Utara	Kepmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
12.	Balai bahasa Pekanbaru	Riau	Kepmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
13.	Balai Bahasa Palembang	Sumatera Selatan	Kepmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
14.	Kantor Bahasa Pontianak	Kalimantan Barat	Kepmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	

15.	Kantor Bahasa Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Kepmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	
16.	Kantor Bahasa Menado	Sulawesi Utara	Kepmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	
17.	Kantor Bahasa Palu	Sulawesi Tengah	Kepmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	

Tabel 4

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Arkeologi

No.	Nama UPT	Lokasi	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Lokasi
1	Balai Arkeologi Yogyakarta	Yogyakarta	Kepmendikbud, No. 0207/O/ 1978, tanggal 23 Juni 1978	DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur
2.	Balai Arkeologi Bali	Denpasar	Kepmendikbud, No. 0207/O/ 1978, tanggal 23 Juni 1978	Bali, NTB, NTT, dan Tim-tim
3.	Balai Arkeologi Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud, No. 0290/O/ 1992, tanggal 1 Juli 1992	Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat
4.	Balai Arkeologi Sumatera Selatan	Palembang	Kepmendikbud, No. 0290/O/ 1992, tanggal 1 Juli 1992	Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu
5.	Balai Arkeologi Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud, No. 0290/O/1992, tanggal 1 Juli 1992.	Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
6.	Balai Arkeologi Sumatera Utara	Medan	Kepmendikbud No.:0274/O/1993	Sumatera Utara, DI Aceh, Riau, Sumatera Barat
7.	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepmendikbud No.:0274/O/1993	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
8.	Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No.:0274/O/1993	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
9.	Balai Arkeologi Maluku	Ambon	Kepmendikbud, No.:015/1995, tanggal 10 Februari 1995	Maluku
10	Balai Arkeologi Irian Jaya (sekarang bernama Provinsi Papua)	Jayapura	Kepmendikbud, No.:015/1995, tanggal 10 Februari 1995	Irian Jaya

Tabel 5

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kesenian

1.	Taman Budaya D I Aceh (1978)	Banda Aceh	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978	Sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2.	Taman Budaya Sumatera Utara (1978)	Medan	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978	
3.	Taman Budaya Sumatera Barat (1978)	Padang	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978	
4.	Kalimantan Barat (1978)	Pontianak	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978	
5.	Taman Budaya Kalimantan Timur (1978)	Samarinda	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978	
6.	Taman Budaya Sulawesi Utara (1978)	Manado	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978	
7.	Taman Budaya Sulawesi Selatan (1978)	Makassar	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978.	
8.	Taman Budaya Jawa Tengah (1978)	Surakarta	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978.	
9.	Taman Budaya D I. Yogyakarta (1978)	Yogyakarta	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978.	
10.	Taman Budaya Jawa Timur (1978)	Surabaya	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978.	
11.	Taman Budaya Bali (1978)	Denpasar	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O /1978, tanggal 16 Agustus 1978.	
12.	Taman Budaya Kalimantan Selatan (1982)	Banjarmasin	Keputusan Mendikbud No.: 0249/O /1982, tanggal 3 Agustus 1982	
13.	Taman Budaya Bengkulu (1982)	Bengkulu	Keputusan Mendikbud No.: 0249/O /1982, tanggal 3 Agustus 1982	

			Agustus 1982.	
14.	Taman Budaya Lampung (1984)	Bandar Lampung	Keputusan Mendikbud No.: 0350/O / 1984, tanggal 23 Agustus 1984.	
15.	Taman Budaya Jawa Barat (1991)	Bandung	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O / 1991, tanggal 23 Agustus 1991.	
16.	Taman Budaya Riau (1991)	Pekan Baru	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O / 1991, tanggal 23 Agustus 1991.	
17.	Taman Budaya Nusa Tenggara Barat (1991)	Mataram	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O / 1991, tanggal 23 Agustus 1991.	
18.	Taman Budaya Sulawesi Tengah (1991)	Palu	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O / 1991, tanggal 23 Agustus 1991.	
19.	Taman Budaya Maluku (1991)	Ambon	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O / 1991, tanggal 23 Agustus 1991.	
20.	Taman Budaya Irian Jaya (1991)	Jayapura	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O / 1991, tanggal 23 Agustus 1991.	Sekarang bernama Provinsi Papua
21.	Taman Budaya Jambi (1992)	Jambi	Keputusan Mendikbud No.: 061/O / 1992, tanggal 23 Januari 1992	
22.	Taman Budaya Kalimantan Tengah (1992)	Palangkaraya	Keputusan Mendikbud No.: 061/O / 1992, tanggal 23 Januari 1992	
23.	Taman Budaya Sulawesi Tenggara (1992)	Kendari	Keputusan Mendikbud No.: 061/O / 1992, tanggal 23 Januari 1992	
24.	Taman Budaya Timor Timur (1994)	Dilli	Keputusan Mendikbud No.: 0197/O / 1994, tanggal 11 Agustus 1994	
25.	Taman Budaya Nusa Tenggara Timur (1999)	Kupang	Keputusan Mendikbud No.: 151/O / 1999, tanggal 29 Juni 1999.	
26.	Taman Budaya Sumatera Selatan	-	-	Belum terealisasikan
27.	Taman Budaya DKI Jakarta	-	-	Sudah memiliki Taman Ismail Marzuki
28.	Galeri Nasional (1998)	Jakarta	Keputusan Mendikbud, No. 099a/O / 1998, tanggal 8 Mei 1998.	

Tabel 6

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Sejarah dan Nilai Tradisional

	UPT	Lokasi		
1.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, DI Aceh	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0486/O/1989, tanggal 4 Agustus 1989	Sekarang bernama Provisin Nangroe Aceh Darussallam
2.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Riau	Tanjung Pinang	Kepmendikbud No.0486/O/1989, tanggal 4 Agustus 1989	Mencakup wilayah Riau, Jambi, sebagian Sumut.
3.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Sumatera Barat	Padang	Kepmendikbud No. 305/O/1997, tanggal 27-11-1997	
4.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud No.0486/O/1989, tanggal 4 Agustus 1989	Jawa Barat
5.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, DI Yogyakarta	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0208/O/1978 dan diperbaharui dengan Kepmendikbud No.0140/O/1981 tanggal, 14 April 1981	
6.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No. 0208/O/1978 dan diperbaharui dengan Kepmendikbud No.0140/O/1981 tanggal, 14 April 1981	
7.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kalimantan Barat	Pontianak	Kepmendikbud No.0486/O/1989, tanggal 4 Agustus 1989	Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur (bagian Barat Daya)
8.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bali	Denpasar	Kepmendikbud No.0140/O/1981 tanggal, 14 April 1981	

9.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisio- nal, Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud No.0486/O/1989, tanggal 4 Agustus 1989	
10.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisio-nal, Maluku	Ambon	Kepmendikbud No. 305/0/1997, tanggal 27-11-1997	
11.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisio-nal, Irian Jaya	Jayapura	Kepmendikbud No. 305/0/1997, tanggal 27-11-1997	Sekarang bernama Provinsi Papua

Tabel 7

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Perpustakaan

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Perpustakaan Nasional (gabungan dari: Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah dan Politik, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi dan Deposit dari Pusat Pembinaan Perpustakaan)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/1980, tanggal 17 Mei 1980, Keppres No. 11	Perpustakaan Nasional statusnya berubah menjadi sebuah LPND, mengkoordinasikan Perpustakaan Wilayah
2.	Perpustakaan Wilayah, DKI Jakarta, (sekarang bernama Provisnis Nangro Aceh Darussalam)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/1980, tanggal 17 Mei 1980	Digabungkan ke dalam Perpustakaan Nasional
3.	Perpustakaan Wilayah DI Aceh	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Setelah berlakunya UU No. 22 tahun 1999, nama-nama perpustakaan di Provinsi mengalami perubahan dan tidak seragam (ada yang namanya Badan, Dinas dan ada yang 'Kantor')
4.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Utara	Medan	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
5.	Perpustakaan Wilayah Riau	Pakanbaru	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
6.	Perpustakaan Wilayah Jambi	Jambi	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	

7.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat	Padang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
8.	Perpustakaan Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
9.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
10.	Perpustakaan Wilayah Lampung	Tanjungkara	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
11.	Perpustakaan Wilayah Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
12.	Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
13.	Perpustakaan Wilayah DI Yogyakarta	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
14.	Perpustakaan Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
15.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn.	

			Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
16.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
17.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
18.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
19.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
20.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi tengah	Palu	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
21.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
22.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
23.	Perpustakaan Wilayah Bali	Denpasar	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	

24.	Perpustakaan Wilayah NTB	Mataram	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
25.	Perpustakaan Wilayah NTT	Kupang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
26.	Perpustakaan Wilayah Timor-Timur	Dilli	Kepmendikbud No. 0379/O/1982, 2 Desember 1982	
27.	Perpustakaan Wilayah Maluku	Ambon	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
28.	Perpustakaan Wilayah Irian Jaya	Jayapura	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Sekarang bernama Provinsi Papua

BAHAN BACAAN:

1. DA. Peransi, Retradisionalisasi dalam Kebudayaan, Majalah Prisma, No. 6 tahun 1985
2. Darsiti Soeratman, Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939, Yayasan untuk Indonesia, Yogyakarta, 2000.
3. Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
4. Buku Panduan Kongres Kebudayaan 1991, Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1991.
5. Buku Panduan Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988.
6. Buletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1970.
7. Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, Programma en Tekstboekje Prae-Adviezen, Stoomdrukkrij CA. MISSET, Semarang, 1918.
8. DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk, Penerbit Mizan dan HU Republika, 1995
9. E. Ulrich Kratz, Sejarah Sastra Indonesia Abad XX, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2000.
10. Evaluasi dan Strategi Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1987
11. Jaap Erkelens, Java-Instituut Dalam Foto, Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkekunde (KITLV) di Indonesia, 2001.
12. J. Endepols, Verklarend Handwoordenboek Der Nederlandse Taal, JB. Wolters-Groningen, Batavia, 1939
13. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
14. Ki Hadjar Dewantara, Kebudayaan Bagian II, Taman Siswa, Jogjakarta, 1994.
15. Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara yang Penting Anggauta Angkatan Bersendjata, Muhono, 1966.
16. Laporan BMKN, Jakarta, terbitan BMKN, Jakarta, 1954.
17. Laporan Kongres Kebudayaan 1991, Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1992.
18. Majalah Arkeologi No. 9, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1990.
19. Majalah Budaja, September-Oktober 1954.
20. Majalah DJAWA, Java-Instituut, tahun 1921, 1924, 1926, 1927, 1928, 1938.
21. Majalah Indonesia, Nomor Kongres (No. I-II), Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1950.

22. Majalah Indonesia, Nomor Konferensi (No. 4-5), Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia, 1950.
23. Majalah Indonesia, No. 1-2-3, Tahun II, Lembaga Kebudayaan Indonesia, 1952
24. Majalah SRI POESTAKA, Balai Pustaka, Jakarta 1921.
25. M. Junus Melalatoa, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995
26. Panduan Konferensi Bahasa Daerah, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
27. Panduan Kongres Kesenian Indonesia I (1995), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1995/1996.
28. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
29. SENSOR, Sekretariat Lembaga Sensor Film, 2003.
30. Slametmuljana, Prof. Dr, Politik Bahasa Nasional, Jambatan Jakarta, 1959.
31. Soebaryo Mangunwidodo, Dr. KRT Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa 1879-1952, Gramedia, tahun 1994.
32. S. Wojowasito, Prof. Drs., Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001.
33. Umar Kayam, Prof. Dr., Perjalanan Fungsi Seni dalam Masyarakat (Makalah), Kongres Kesenian Indonesia I, tahun 1995.
34. Yus Rusyana, Penghargaan Bahasa dan sastra Daerah (Makalah), Konferensi Bahasa Daerah, 2000.

Riwayat Hidup Penyusun:



Nama: **Nunus Supardi bin Karsodimedjo**. Lahir di Madiun tanggal 19 Agustus 1943. Setelah lulus Sekolah Rakyat (SR) tahun 1956, lalu masuk ke pendidikan guru, SGB, hingga kelas III tahun 1959, kemudian meneruskan ke SGA Madiun. Lulus SGA tahun 1962, terus melanjutkan pendidikan ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS). Sejak lulus Sarjana Muda tahun 1965 diangkat menjadi Asisten Dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS di IKIP Malang Cabang Madiun hingga tahun 1973. Sambil bekerja melanjutkan pendidikan S1 dan lulus tahun 1970, dengan No. Induk 0195. Pernah mengajar di Sekolah Asisten Apoteker, PGSLP, IKIP PGRI di Madiun. Tahun 1973 pindah ke Jakarta menjadi staf di Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 1985-1993, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan 1993-1999, kemudian menjabat Direktur Purbakala mulai 1999-2001. Setelah itu diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dari tanggal 5-2-2001 sampai dengan 14-11-2001. Sejak 14 November 2001 hingga sekarang menjabat Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam Kongres Kebudayaan IV tahun 1991 di Jakarta duduk sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana, sedangkan dalam Kongres Kesenian Indonesia tahun 1995 menjabat sebagai salah satu anggota Panitia Pengarah di samping sebagai Sekretaris Umum Panitia Penyelenggara.



Mantan Ketua Pengarah Kongres Kebudayaan 1991, Prof. Dr. Fuad Hassan sedang berbincang-bincang dengan mantan Sekretaris Panitia Penyelenggara Kongres Kebudayaan 1991, Nunus Supardi, ketika menghadiri Prakongres Kebudayaan V di Bali, tanggal 28 – 30 April 2003.

Kongreskebudayaan1/nunus/12/02

ISBN: 979-95254-6-1